



PEMERINTAH KOTA BIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Kota Bima menyusun Laporan Keuangan Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022.

Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bima dalam Penyusunan dan Pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Permendagri nomor 77 tahun 2019 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Bahwa pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Karena hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk menciptakan suatu produk/hasil dengan mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan APBD, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, permendagri nomor 13 tahun 2006 dan permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian proses kegiatan yang dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang dijabarkan dalam peraturan Kepala Daerah untuk menjadi landasan bagi para Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Walikota selaku Kepala Daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Kuangan (BPK), selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Kementerian Keuangan. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Pemerintah Kota Bima selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Adapun secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah

adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai:

- a. posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kota Bima;
- b. perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- c. sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. cara Pemerintah Kota Bima mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Laporan Arus Kas; (f) Neraca; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/defisit-LRA;
- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dari pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- 4) Pos luar biasa; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; dan
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

e. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- 1) Kas dan Setara Kas;
- 2) Investasi Jangka Pendek;

- 3) Piutang;
- 4) Persediaan;
- 5) Investasi Jangka Panjang;
- 6) Aset Tetap;
- 7) Aset Lain-lain;
- 8) Kewajiban Jangka Pendek;
- 9) Kewajiban Jangka Panjang; dan
- 10) Ekuitas

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menjelaskan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; dan
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 245);
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 236);
23. Peraturan Walikota Bima Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bima Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Berita daerah Kota Bima tahun 2019 Nomor 500);
24. Peraturan Walikota Bima Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 193);

25. Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 232);
26. Peraturan Walikota Bima Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 233);
27. Peraturan Walikota Bima Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 706);
28. Peraturan Walikota Bima Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 777).

1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target APBD
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijakan Keuangan
	2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan
	3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
	4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Bab V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
	5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
	5.1.1 Pendapatan-LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
	5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
	5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
	5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
	5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
	5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
	5.3 Penjelasan Laporan Operasional

	5.3.1	Pendapatan-LO
	5.3.2	Beban
	5.3.3	Kegiatan Non Operasional
	5.3.4	Pos Luar Biasa
5.4		Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
	5.4.1	Perubahan Ekuitas
5.5		Penjelasan Komponen-Komponen Neraca
	5.5.1	Aset
	5.5.2	Kewajiban
	5.5.3	Ekuitas
5.6		Penjelasan Komponen-Komponen Laporan Arus Kas
	5.6.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi
	5.6.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
	5.6.3	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
	5.6.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Bab VI		Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
Bab VII		Penutup
Lampiran-Lampiran		

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Indikator Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Beberapa Indikator Kemiskinan antara lain :

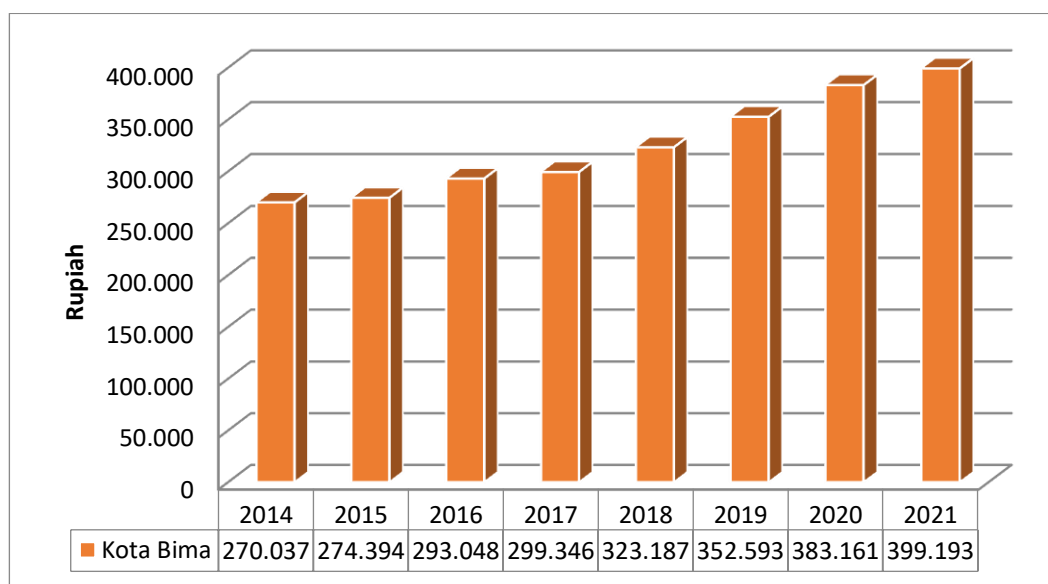
1. Penduduk Miskin. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah Penduduk miskin suatu wilayah, diartikan banyaknya penduduk miskin yang terdapat di wilayah tersebut.
2. Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman dan makanan yang setara dengan 2100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan (GK) = Garis Kemiskinan Makanan (GKM) + Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
3. Persentase Kemiskinan (Tingkat Kemiskinan). Secara sederhana Persentase Kemiskinan yang juga disebut Tingkat Kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Garis kemiskinan di Kota Bima mengalami peningkatan sebesar Rp16.032 dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun ini garis kemiskinan Kota Bima sebesar Rp399.193. Persentase penduduk miskin di Kota Bima secara trend selalu menurun semenjak tahun 2017. Persentase penduduk miskin di Kota Bima pada tahun 2021 sebesar 8,88 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 16.220 jiwa.

Tabel 2.1.1
Jumlah Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2014 – 2021
(*Poverty Line* - Rupiah)

Jumlah Penduduk Miskin (<i>Poverty Line</i> - Rupiah)								
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Bima	270.037	274.394	293.048	299.346	323.187	352.593	383.161	399.193

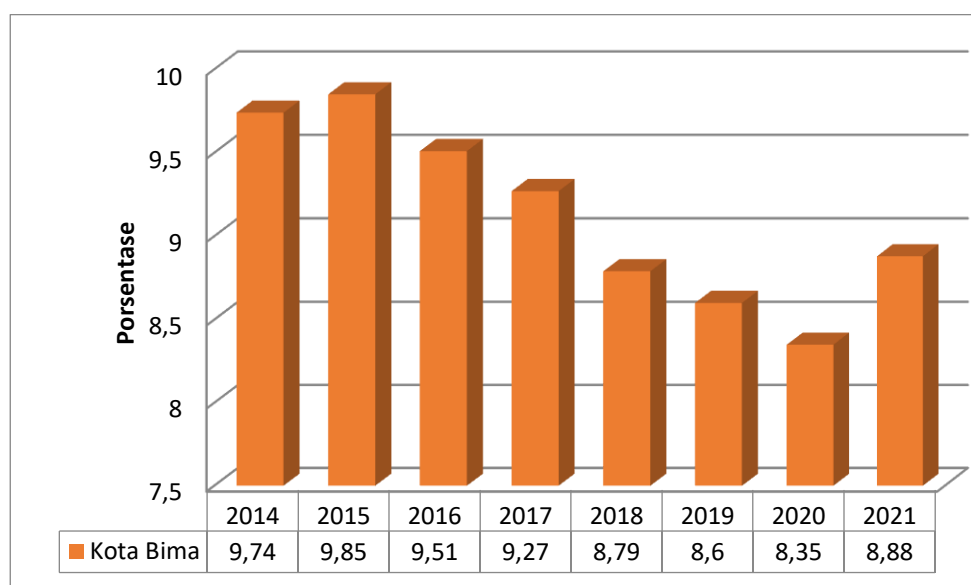
Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2022



Grafik 2.1.1 Jumlah Miskin Kota Bima Tahun 2014-2021

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2022

Tabel 2.1.2
Persentase Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2013 – 2020
(%)



Grafik 2.1.2 Persentase Miskin Kota Bima Tahun 2014-2021

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2022

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari kerja) yang biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

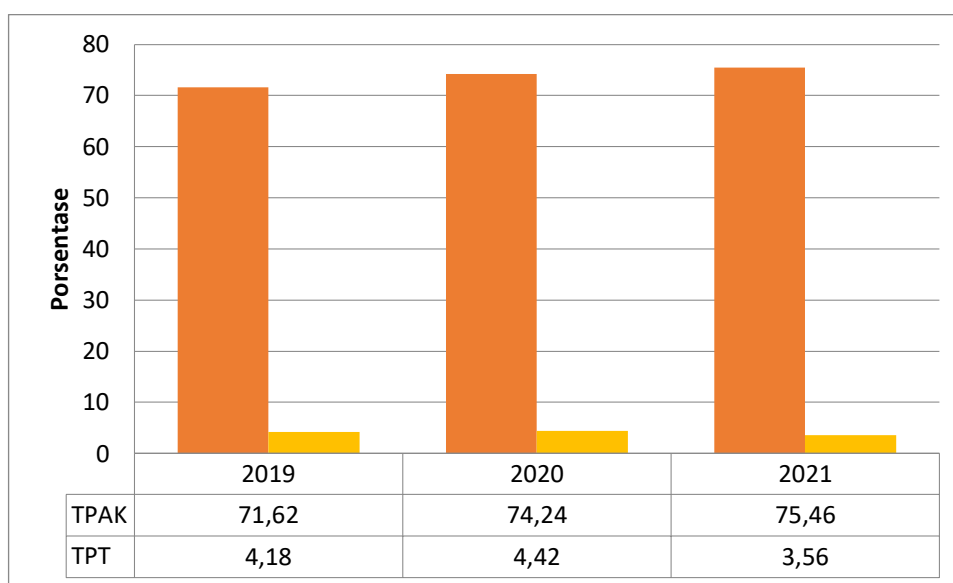
(TPAK). Keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kegiatan ekonomi di Kota Bima pada tahun 2021 mencapai 75,46 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 74,24 persen. Proporsi angkatan kerja yang menganggur dikenal dengan nama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Indikator ini dapat menggambarkan secara umum mengenai tingkat pengangguran di suatu wilayah dari waktu ke waktu. TPT Kota Bima tahun 2021 sebesar 3,56 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 4,42 persen. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk berumur 15 tahun ke atas sebagai buruh/karyawan/pegawai memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 41,20 persen sedangkan persentase terendah adalah berusaha dibantu buruh tetap/buruhdibayar yaitu sebesar 1,59 persen.

Tabel 2.1.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bima Tahun 2019-2021
(Persentase)

Tahun	Keterlibatan Penduduk Usia 15 tahun ke atas Dalam Kegiatan Ekonomi	
	TPAK	TPT
2019	71,62	4,18
2020	74,24	4,42
2021	75,46	3,56

Sumber : Statistik Daerah Kota Bima, 2022



Grafik 2.1.3 Keterlibatan Penduduk Usia 15 tahun ke atas Dalam Kegiatan Ekonomi
Kota Bima Tahun 2019-2021

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia memiliki peranan yang sangat penting di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran. Pengukuran terhadap indikator pembangunan manusia sangatlah kompleks. Walaupun demikian beberapa indikator dianggap dapat merefleksikan aspek-aspek pembangunan manusia. Aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan manusia

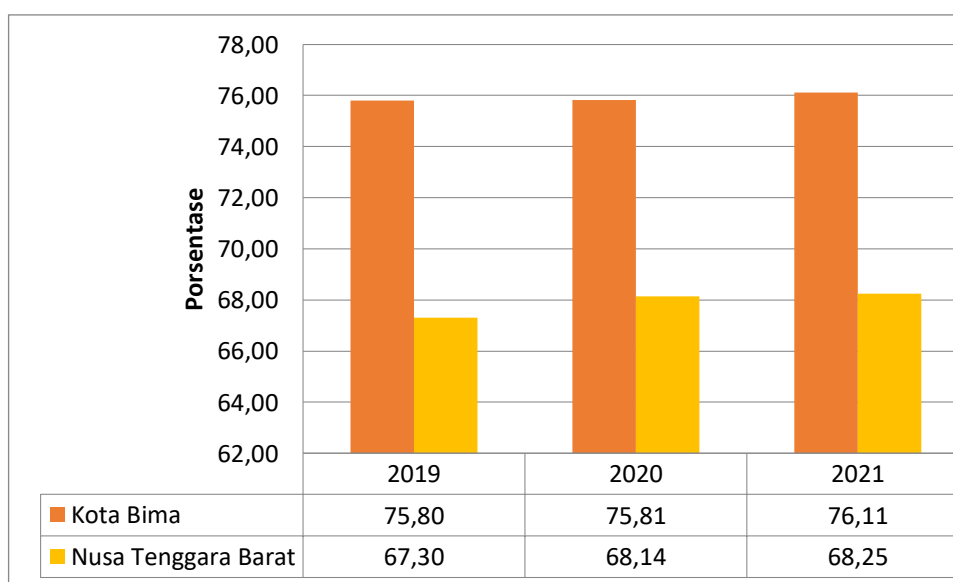
dapat dilihat dengan menggunakan ukuran indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan Indeks Komposit yang dipakai untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia dari tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah umur panjang dan sehat yang dicerminkan oleh Indeks Harapan Hidup, pengetahuan dan ketrampilan yang dicerminkan oleh Indeks Pendidikan dan kehidupan yang layak yang dicerminkan oleh Indeks Pendapatan.

IPM merupakan ukuran ringkas rata-rata yang menempatkan Kota Bima pada posisi kedua tertinggi dari sepuluh kabupaten/kota yang ada di NTB. IPM Kota Bima pada tahun 2021 adalah sebesar 76,11. Angka ini cukup tinggi dibandingkan nilai IPM NTB sendiri yang sebesar 68,65.

Tabel 2.1.4
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bima Tahun 2019 – 2021

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] IPM Kabupaten/Kota		
	2019	2020	2021
Kota Bima	75,80	75,81	76,11
Nusa Tenggara Barat	67,30	68,25	68,65

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat, 2022



Grafik 2.1.4 Tingkat IPM Kota Bima Tahun 2019-2021

2.1.4 LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

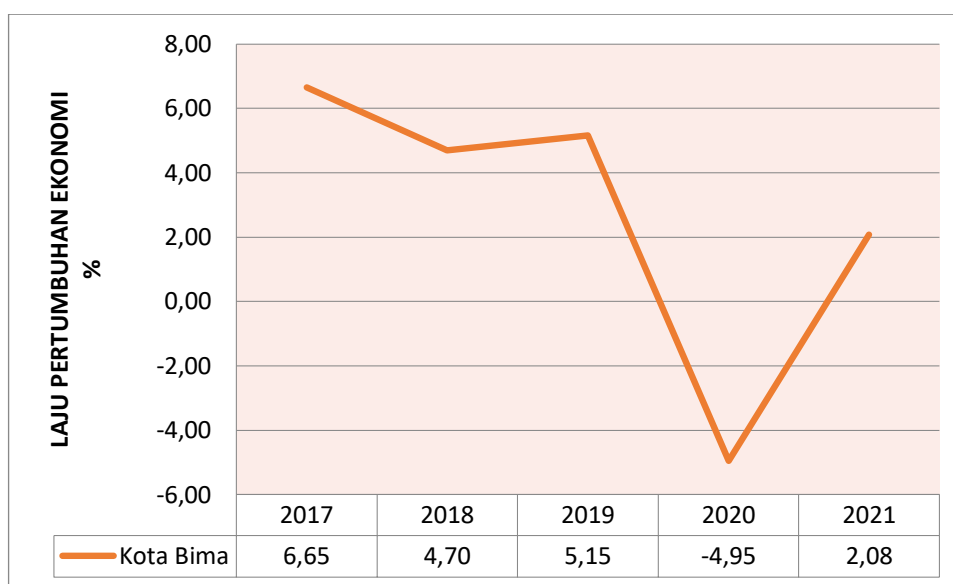
Di tahun 2021 besaran nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku sebesar 4.301,03 miliar rupiah meningkat dari tahun sebelumnya. Seperti halnya PDRB harga berlaku, PDRB kota Bima atas dasar harga konstan juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 2.939,13 miliar rupiah. Dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi 2,08 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini

menunjukkan bahwa upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah bersama seluruh stakeholders, termasuk semua masyarakat Indonesia, telah berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian.

Tabel 2.1.5
LPE Kota Bima Tahun 2021

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) %					
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Bima	6,65	4,70	5,15	-4,95	2,08

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2021



Grafik 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima

2.1.5 Inflasi

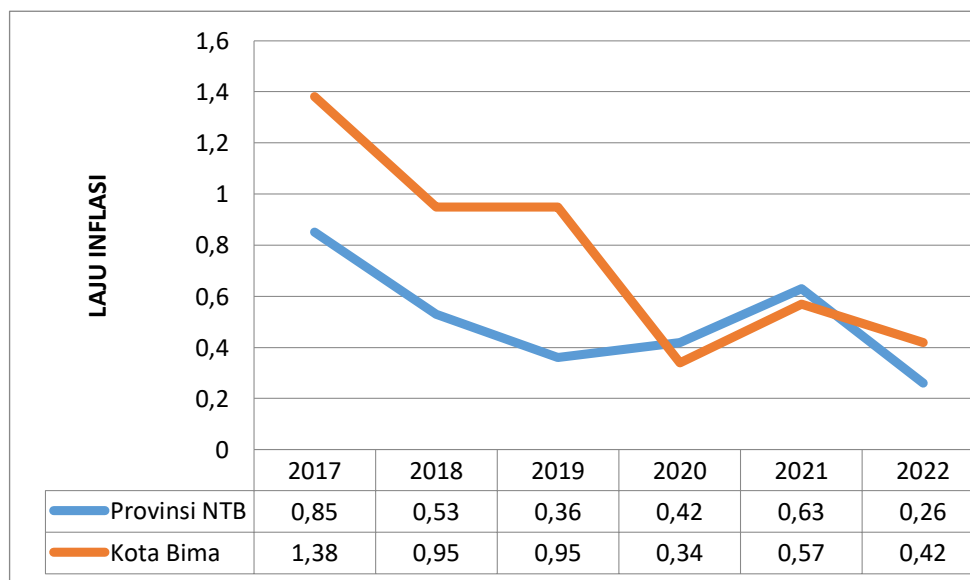
Inflasi sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen (IHK). IHK merupakan angka perbandingan harga yang terjadi pada suatu saat dari satu kelompok barang/jasa pada suatu periode waktu dengan periode tertentu (tahun dasar). Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap dan di sisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi barang.

Pada Bulan Desember 2022, Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0.42 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112.82 pada bulan November 2022 menjadi 113.29 persen pada Bulan Desember 2022. Laju inflasi tahun kalender (Desember 2022 terhadap Januari 2022) sebesar 6.39 persen dan laju inflasi 'tahun ke tahun' (Desember 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 6.39 persen.

Tabel 2.1.6
Angka Inflasi Kota Bima Tahun 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi NTB	0,85	0,53	0,36	0,42	0,63	0,26
Kota Bima	1,38	0,95	0,95	0,34	0,57	0,42

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat, 2022



Grafik 2.1.6 Tingkat Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2017-2022

2.1.6 Pertumbuhan PDRB

Indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Tren pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dapat dilihat salah satunya berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang didalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu (satu tahun).

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang

dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Harga Berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa Yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 4,30 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 167,07 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang telah mencapai 4,13 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 2,88 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 2,94 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Kota Bima mengalami kontraksi peningkatan ekonomi sekitar 2,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berada pada angka minus 4,95 persen.

Peningkatan nilai PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh kategori lapangan usaha di Kota Bima yang merupakan efek dari pemulihan ekonomi setelah terjadinya pandemi Covid-19 diawal tahun 2019 Pada tahun 2020, perekonomian Kota Bima mengalami kontraksi hampir sebesar 5%. Kontraksi terbesar terjadi pada transportasi dan Pergudangan, kemudian disusul konstruksi. Kondisi ini sebagai akibat dari pandemi covid-19. Meskipun begitu, akibat pandemi produksi pada Informasi dan Komunikasi meningkat drastis karena penggunaan sistem belajar daring sebesar 13,48 persen.

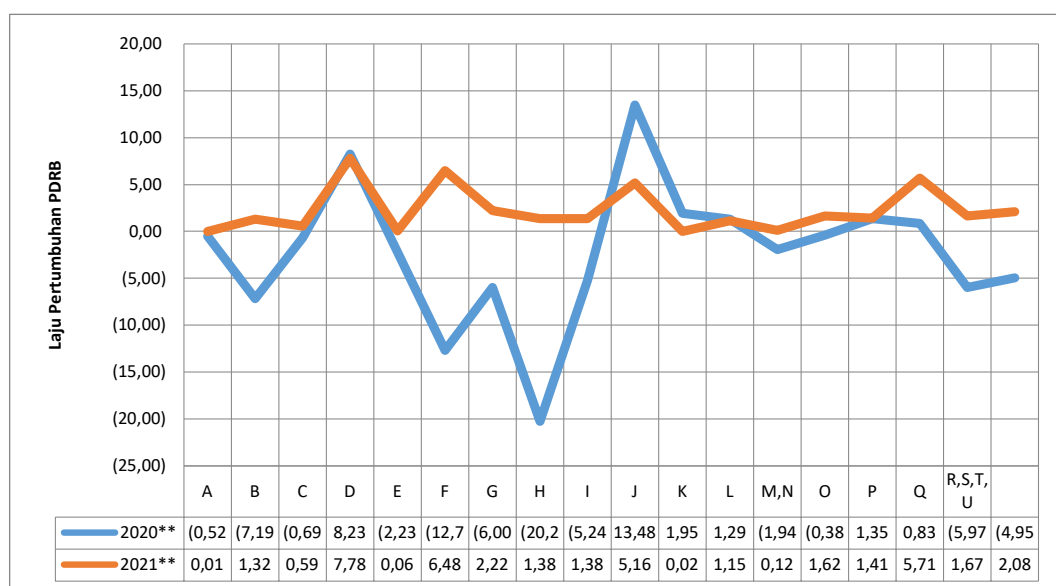
Gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor PDRB (lapangan usaha) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.7
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen/Percent) Tahun 2017-2021

	Kategori	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,84	3,08	3,38	(0,52)	0,01
B	Pertambangan dan Penggalian	7,85	5,05	4,72	(7,19)	1,32
C	Industri Pengolahan	5,50	3,52	4,27	(0,69)	0,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,49	1,93	7,46	8,23	7,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,01	0,41	3,43	(2,23)	0,06
F	Konstruksi	9,62	4,93	4,24	(12,70)	6,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,55	5,99	7,13	(6,00)	2,22
H	Transportasi dan Pergudangan	7,52	4,21	6,07	(20,24)	1,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,70	5,86	4,61	(5,24)	1,38

	Kategori	2017	2018	2019	2020*	2021**
J	Informasi dan Komunikasi	7,52	6,62	5,93	13,48	5,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,50	6,18	1,88	1,95	0,02
L	Real Estate	5,74	5,74	5,89	1,29	1,15
M,N	Jasa Perusahaan	5,07	7,40	4,18	(1,94)	0,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,70	0,98	1,07	(0,38)	1,62
P	Jasa Pendidikan	6,17	5,53	7,56	1,35	1,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,44	7,86	5,15	0,83	5,71
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,75	5,71	6,35	(5,97)	1,67
	PDRB	6,65	4,70	5,15	(4,95)	2,08

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2022 *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara



Grafik 2.1.7 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2020-2021

Pendapatan Regional merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perkembangan PDRB Kota Bima, struktur perekonomian, pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional mengalami perubahan akibat berbagai perubahan skala ekonomi, teknologi, dan SDM dalam memproduksi barang dan jasa.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bima pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatannya tersebut dipengaruhi oleh naiknya produksi di sebagian lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Bima tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2,94 trilyun rupiah. Angka tersebut naik dari 2,88 trilyun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,08 persen, jauh lebih tinggi jika

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang hanya mencapai -4,95 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 7,78 persen yang selama dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini selalu menunjukkan pertumbuhan tinggi diatas 7 persen. Salah satu sebab utamanya adalah makin meningkatnya kebutuhan akan listrik oleh pelaku usaha maupun masyarakat di Kota Bima. Empat lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas lima persen. Sedangkan dua belas lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari dua persen.

Dua lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif diatas lima persen tersebut antara lain: lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,78 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,48 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,71 persen dan yang terakhir adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,16 persen. Sedangkan delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif diatas 1 persen namun kurang dari 3 persen yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2,22 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 1,67 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,62 persen, lapangan usaha Jasa pendidikan sebesar 1,41 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan tercatat sebesar 1,38 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,38 persen.

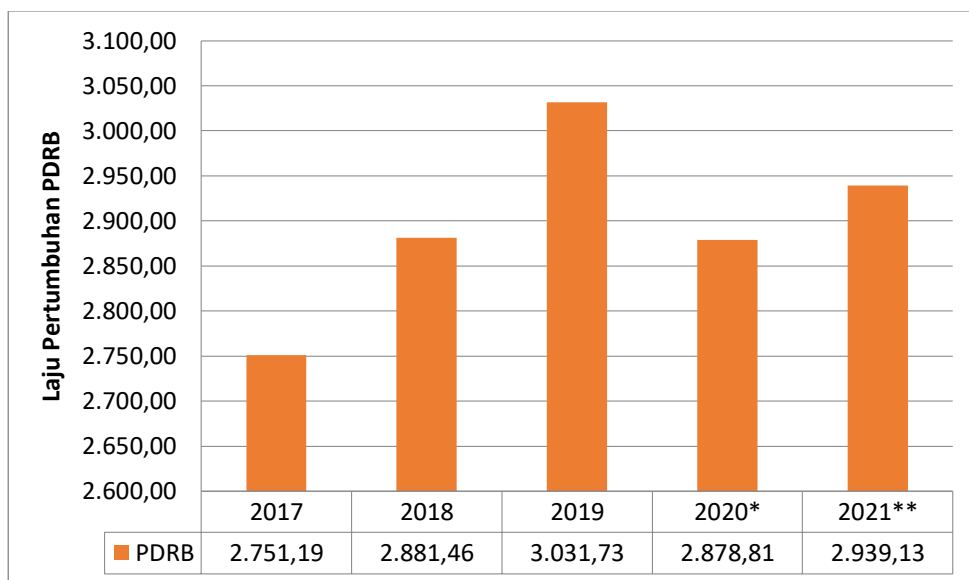
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Bima 2020 didasari pada Tahun Dasar 2010. Pada tahun 2020, terjadi penurunan secara massif akibat kondisi pandemic covid-19, laju pertumbuhan PDRB di Kota Bima yaitu dari 5,15 persen di tahun 2019 menjadi -4,95 persen pada tahun 2020. Untuk sektor yang memiliki peningkatan paling besar pada PDRB Kota Bima adalah Informasi dan Komunikasi, selain itu sektor yang memiliki penurunan secara signifikan adalah pada sektor Transportasi dan Pergudangan.

Tabel 2.1.8
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2017-2021

	Kategori	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,84	3,08	3,20	-0,52	0,01
B	Pertambangan dan Pengalihan	7,85	5,05	4,72	-7,19	1,32
C	Industri Pengolahan	5,50	3,52	4,23	-0,69	0,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,49	1,93	7,46	8,23	7,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,01	0,41	3,44	-2,23	0,06
F	Konstruksi	9,62	4,93	4,84	-12,70	6,48

	Kategori	2017	2018	2019	2020*	2021**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,55	5,99	7,06	-6,00	2,22
H	Transportasi dan Pergudangan	7,52	6,62	4,93	13,48	5,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,70	5,86	4,61	-5,24	1,38
J	Informasi dan Komunikasi	7,52	6,62	4,93	13,48	5,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,50	6,18	1,88	1,95	0,02
L	Real Estate	5,74	5,74	5,69	1,29	1,15
M,N	Jasa Perusahaan	5,07	7,40	4,18	-1,94	0,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,70	0,98	1,27	-0,38	1,62
P	Jasa Pendidikan	6,17	5,53	7,56	1,35	1,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,44	7,86	5,25	0,83	5,71
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,75	5,71	6,35	-5,97	1,67
	PDRB	6,65	4,70	5,15	-4,95	2,08

Sumber : PDRB Kota Bima, 2017-2021 *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara



Grafik 2.1.8 Persentase Pertumbuhan PDRB Kota Bima Tahun 2017-2021

Di tahun 2021, pasca covid-19 pemerintah menghimbau untuk menerapkan *new normal* tak terkecuali di Kota Bima. Dengan begitu maka membuka kembali aktifitas ekonomi, transportasi, perbelanjaan, sosial, pola hidup sehat dan lainnya dengan tetap menggunakan protokol kesehatan untuk mencegah terkena covid-19 dan variannya. Berkembangnya aktifitas ini maka lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

kembali meningkat, tampak dari pertumbuhannya yang pada tahun 2020 hanya menyentuh nilai 0,83 persen menjadi 5,71 persen pada tahun 2021. Peningkatan ini bukan berarti makin banyak orang sakit tetapi lebih karena pada tahun 2020 adanya kekhawatiran masyarakat untuk berobat ke sarana kesehatan takut tertular Covid-19.

2.1.7 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dari nilai tambah yang tercipta selama satu tahun. PDRB per kapita biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang melebihi angka inflasi mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat lebih baik, dan sebaliknya pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih rendah dari inflasi mencerminkan kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Pertumbuhan PDRB dapat terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat akibat pertumbuhan penduduk dan atau perubahan harga yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB.

Tabel 2.1.9
PDRB Per Kapita Kota Bima Tahun 2017– 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
I. Atas Dasar Harga Berlaku					
PDRB Perkapita (Ribu Rp)	21.831	23.250	24.265	26.658	27.531
Pertumbuhan (%)	16,53	16,97	17,22	18,57	18,81

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Kota Bima Tahun 2017-2021

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Bima atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017-2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 16,53 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 18,81 juta rupiah, walaupun faktor inflasi yang masih mempengaruhi kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini.

2.1.8 Indeks Harga Implisit

Tingkat harga merupakan variabel penting yang berpengaruh terhadap peningkatan PDRB dan daya beli (*purchasing power*) masyarakat terhadap barang dan jasa. Sementara itu daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan

yang diterima dan tingkat harga atas barang dan jasa. Untuk melihat terjadinya perubahan harga pada suatu waktu, indikator yang digunakan adalah Indeks Harga Implisit (IHI).

IHI adalah suatu indeks harga yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan untuk masing-masing sektor/sub sektor dalam kurun waktu satu tahun dan dikalikan 100. Perubahan indeks harga implisit menggambarkan perubahan harga ditingkat produsen dari seluruh komoditi baik barang maupun jasa dari seluruh kegiatan ekonomi mulai dari sektor pertanian sampai dengan sektor jasa-jasa yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 2.1.10
IHI dan Perubahan IHI Kota Bima Tahun 2017–2021

Tahun	Indeks Harga Implisit (IHI)	Laju IHI (%)
2017	132,05	3,24
2018	136,98	3,74
2019	140,88	2,85
2020*	143,55	1,89
2021**	146,34	1,94

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha 2017-2021

Selama kurun waktu 2017–2021, laju perubahan IHI selalu lebih rendah dibandingkan laju perubahan PDRB per kapita. Ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat selama periode tersebut mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Bima dilihat dari PDRB per kapita meningkat selama tahun 2021.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam proses pembangunan dan perkembangan perekonomian di daerah, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh karena itu, proses penyusunan APBD semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Oleh karena itu, disiplin dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan hal penting agar anggaran tersebut dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu:

1. Dalam konteks kebijakan anggaran, memberikan arah kebijakan perekonomian, dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat;
2. Untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; dan

3. Sebagai sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal dalam suatu daerah.

Pembangunan di Kota Bima dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan umum anggaran dan pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021 yang memuat berbagai strategi dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan situasi maupun kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat dimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kota Bima Tahun 2021 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022, maka RKPD dimaksudkan sebagai upaya-upaya pemerintah daerah secara menyeluruh untuk mewujudkan tujuan dari visi dan misi daerah. Untuk itu RKPD tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai penentu kebijakan dan menetapkan kerangka regulasi guna mendorong partisipasi masyarakat di daerah.

Dalam Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kota Bima tahun 2021 serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati, terdapat lima program prioritas pembangunan dalam tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2021 adalah pembangunan ekonomi berbasiskan perekonomian lokal, yaitu :

1. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia, sehingga menghasilkan produk yang unggul secara komparatif maupun secara kompetitif;
2. Meningkatkan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan masyarakat dengan mendorong tumbuhnya industri pengolahan skala kecil maupun skala menengah dengan memberikan kemudahan dan insentif yang sifatnya pengguliran, sehingga hal ini dapat menciptakan kesempatan kerja bagi para pencari kerja;
3. Menciptakan/memperluas jaringan pasar bagi produk masyarakat, sehingga produk tersebut layak dan berdaya saing di pasar yang pada gilirannya masyarakat memperoleh pendapatan;
4. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, pemberian paket insentif, dan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian dalam rangka mendukung Kota Bima sebagai Kota Perdagangan dan Jasa;
5. Penetapan kawasan/lahan abadi untuk produksi pertanian dalam rangka mempertahankan ketahanan dan kestabilan produksi pangan, serta mengembangkan usaha agrobisnis.

Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bima, selama tahun 2022 diterapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pendapatan Daerah;
2. Kebijakan Belanja Daerah; dan
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah dalam APBD Pemerintah Kota Bima adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022, ditempuh arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut.

A. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan peningkatan PAD harus tetap memperhatikan prinsip agar pajak dan retribusi tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat yang dapat berakibat pada terhambatnya iklim usaha yang baik untuk pengembangan ekonomi lokal. Dan sebaliknya perlu upaya dan langkah-langkah strategis untuk memberikan paket insentif dan disinsentif maupun stimulus agar terus bertumbuhkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat tetap stabil dan terus meningkat. Disamping itu dalam hal pengelolaan juga perlu penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, dan sosialisasi untuk terus meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak dan retribusi daerah perlu terus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada.

Dalam menetapkan target pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hendaknya dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan hasil dari nilai kekayaan daerah yang disertakan sesuai dengan tujuan dan fungsi penyertaan modal dimaksud. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang *idle* dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada tahun 2022 diproyeksikan meningkat dibandingkan dengan dana perimbangan yang ditargetkan pada tahun 2021 khususnya pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang meningkat seiring asumsi peningkatan gaji pegawai.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2021 juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan dengan pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2022.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah Pemerintah Kota Bima pada tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, Pemerintah Kota Bima sangat menekankan pada penggunaan belanja daerah yang mengedepankan efisiensi dan penghematan serta diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Bima dalam berbagai kebijakannya selalu memberikan perhatian khusus terhadap program prioritas daerah baik dalam rangka pencapaian visi dan misi pada tahun yang berjalan maupun bagi pencapaian pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*) sebagai perwujudan atas

terlaksananya otonomi daerah. Pemerintah Kota Bima memberdayakan seluruh elemen kebijakan yang sudah terimplementasikan pada semua Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan pada program/kegiatan. Pemerintah Kota Bima tetap menekankan pada penggunaan belanja daerah yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas belanja dengan memanfaatkan sumber pendapatan secara maksimal.

Arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. Kebijakan Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi, dan penambahan pegawai negeri sipil daerah (PNSD) telah diperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, serta estimasi alokasi untuk pembayaran gaji ke-13 dan gaji ke -14 PNSD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b. Untuk mengantisipasi kebutuhan pengangkatan calon PNSD (CPNSD) sesuai formasi Penyuluh Lapangan tahun 2022 serta pengangkatan PPPK;
- c. Penyediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan jaminan kesehatan (Askes) bagi PNSD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- d. Penganggaran belanja pegawai untuk Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah senilai 5% dari target pajak daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Penganggaran belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD;
- f. Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD dalam upaya peningkatan prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi;
- g. Dasar penghitungan besaran honorarium bagi PNSD disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima, dengan tetap memperhatikan aspek kewajaran dan beban kerja; dan
- h. Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi pemerintah.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
- b. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang TA 2022. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan beban pekerjaan;
- c. Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif dan terdapat pembatasan frekuensi dan jumlah hari;
- d. Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel;
- e. Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, *workshop*, seminar, dan lokakarya agar dibatasi; dan
- f. Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan belanja hibah antara lain :

- a. Penganggaran belanja hibah dialokasikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Partai Politik, Perusahaan daerah, dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b. Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah, dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Disamping itu, penetapan besaran bantuan tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; dan
- d. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, telah diupayakan pembatasan terhadap jumlah alokasi anggaran belanja hibah

dan bantuan sosial dan format pertanggungjawabannya telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Belanja Modal

1. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
2. Penganggaran belanja modal tidak hanya senilai harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

C. Belanja Tidak Terduga

Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2022 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2022.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

A. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Bima selama ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Untuk itu, dalam menetapkan SiLPA agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.

B. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Bima dialokasikan jika diperkirakan surplus anggaran. Pemanfaatan sisa lebih anggaran (surplus) digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja APBD daerah, sehingga Pemerintah Kota Bima memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam TA 2022. Penetapan capaian kinerja APBD untuk tahun 2022 dilaksanakan sebanyak dua kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 dan yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Tabel berikut ini menyajikan Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2022.

2.3.1 APBD dan Perubahannya

APBD dan perubahan APBD serta realisasi APBD tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut.

Tabel 2.1.11

APBD, Perubahan APBD dan Realisasi APBD Kota Bima Tahun 2022

No	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Realisasi APBD	%
1.	Pendapatan	763.421.815.802,00	786.130.956.782,00	805.811.256.060,22	102,50
2.	Belanja	776.427.815.802,00	806.099.136.615,00	749.196.056.304,73	92,94
	Surplus / (Defisit)	(13.006.000.000,00)	(19.968.179.833,00)	56.615.199.755,49	(283,53)
3.	Pembiayaan	13.006.000.000,00	19.968.179.833,00	19.967.826.874,18	100,00
a.	Penerimaan Pembiayaan	15.006.000.000,00	21.968.179.833,00	21.967.826.874,18	100,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
	SILPA	0,00	0,00	76.583.026.629,67	0,00

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2022, diolah

Dari data tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan anggaran pendapatan pada perubahan APBD senilai Rp22.709.140.980,00 atau senilai 2,89%. Peningkatan pendapatan ini diakibatkan karena estimasi kebutuhan yang terjadi karena adanya penambahan belanja sehingga dilakukan penambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Total anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Bima pada tahun 2022 setelah perubahan senilai Rp806.099.136.615,00 mengalami kenaikan senilai Rp56.903.080.310,27 atau senilai 7,06% dibanding total anggaran belanja sebelum perubahan senilai Rp776.427.815.802,00.

2.3.2 Realisasi APBD

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2022 senilai Rp805.811.256.060,22 atau 102,50% dari target yang ditetapkan senilai Rp786.130.956.782,00 sehingga melebihi target senilai Rp19.680.299.278,22 atau senilai 2,50%.

Realisasi belanja tahun 2022 senilai Rp749.196.056.304,73 atau senilai 95,04 % dari yang ditargetkan senilai Rp806.099.136.615,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran senilai Rp56.903.080.310,27 atau 7,06%. Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi dalam pengeluaran total belanja secara umum yang mencakup belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

Realisasi pendapatan dikurangi belanja pada tahun 2022 mengalami defisit senilai Rp19.968.179.833,00 sementara realisasi pembiayaan neto adalah senilai Rp19.968.179.833,00 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp21.968.179.833,00 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp2.000.000.000,00 sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) senilai Rp0,00.

Tabel 2.1.12
Rekapitulasi Belanja Daerah Per Program Kegiatan Tahun 2022

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	348.062.960,00	281.353.711,00	(66.709.249,00)	80,83
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	142.109.038,00	134.474.864,00	(7.634.174,00)	94,63
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	117.010.300,00	107.910.200,00	(9.100.100,00)	92,22
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	86.681.100,00	84.106.700,00	(2.574.400,00)	97,03
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	93.595.600,00	91.849.394,00	(1.746.206,00)	98,13
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	232.488.100,00	223.059.232,00	(9.428.868,00)	95,94
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	464.807.948,00	405.774.500,00	(59.033.448,00)	87,3
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	357.707.136.494,00	348.576.808.194,00	(9.130.328.300,00)	97,45
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	285.034.300,00	284.200.500,00	(833.800,00)	99,71
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.553.941.000,00	9.288.505.837,00	(265.435.163,00)	97,22
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.693.200,00	25.637.200,00	(56.000,00)	99,78
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	313.508.839,00	277.581.200,00	(35.927.639,00)	88,54
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	158.402.480,00	158.206.291,00	(196.189,00)	99,88
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	204.625.628,00	191.794.900,00	(12.830.728,00)	93,73
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	49.774.333,00	38.363.000,00	(11.411.333,00)	77,07
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	13.616.200,00	13.549.000,00	(67.200,00)	99,51
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31.424.000,00	30.846.000,00	(578.000,00)	98,16
01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	57.623.300,00	55.042.000,00	(2.581.300,00)	95,52
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.494.500,00	21.488.300,00	(6.200,00)	99,97
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.167.200,00	39.782.200,00	(385.000,00)	99,04
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	697.121.000,00	691.607.000,00	(5.514.000,00)	99,21
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.463.745.700,00	4.341.287.700,00	(122.458.000,00)	97,26
01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	83.769.600,00	60.031.000,00	(23.738.600,00)	71,66
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	96.946.000,00	91.546.000,00	(5.400.000,00)	94,43

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	118.845.300,00	118.270.810,00	(574.490,00)	99,52
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.007.486.720,00	1.639.039.445,00	(368.447.275,00)	81,65
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	326.030.150,00	325.676.300,00	(353.850,00)	99,89
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.086.874.028,00	2.028.920.166,00	(57.953.862,00)	97,22
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.327.020,00	49.014.020,00	(2.313.000,00)	95,49
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.188.456.975,00	1.184.388.800,00	(4.068.175,00)	99,66
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.715.490.652,00	1.667.806.072,00	(47.684.580,00)	97,22
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	345.632.500,00	283.849.278,00	(61.783.222,00)	82,12
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	100
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.410.765.093,00	1.374.251.140,00	(36.513.953,00)	97,41
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.059.069.171,00	9.848.903.643,00	(210.165.528,00)	97,91
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	164.754.300,00	153.910.000,00	(10.844.300,00)	93,42
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	121.378.200,00	121.105.000,00	(273.200,00)	99,77
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.118.000,00	65.117.000,00	(1.000,00)	100
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.491.180.734,00	1.477.482.795,00	(13.697.939,00)	99,08
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	262.599.100,00	262.003.400,00	(595.700,00)	99,77
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	432.054.970,00	292.369.400,00	(139.685.570,00)	67,67
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.270.860,00	483.873.405,81	(16.397.454,19)	96,72
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.572.000,00	67.500.000,00	(1.072.000,00)	98,44
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.616.000,00	45.616.000,00	0,00	100
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.063.176.441,00	2.992.201.200,00	(70.975.241,00)	97,68
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.413.760.952,00	3.885.745.341,00	(528.015.611,00)	88,04
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	334.298.740,00	330.678.000,00	(3.620.740,00)	98,92
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.827.518.247,00	7.545.002.041,00	(282.516.206,00)	96,39
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.795.871.701,00	1.674.598.251,00	(121.273.450,00)	93,25
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.960.531.108,00	2.779.493.233,00	(181.037.875,00)	93,88

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	476.938.912,00	472.802.072,00	(4.136.840,00)	99,13
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	620.805.700,00	618.249.200,00	(2.556.500,00)	99,59
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.802.771.210,00	1.778.445.016,00	(24.326.194,00)	98,65
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.437.700,00	123.516.500,00	(4.921.200,00)	96,17
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.460.000,00	38.590.000,00	(14.870.000,00)	72,18
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	521.399.585,00	274.375.788,00	(247.023.797,00)	52,62
01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	81.000.000,00	53.000.000,00	(28.000.000,00)	65,43
01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180.000.000,00	121.447.893,00	(58.552.107,00)	67,47
01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	384.999.600,00	(15.000.400,00)	96,25
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.032.808.000,00	997.178.992,00	(35.629.008,00)	96,55
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	799.804.000,00	667.134.180,00	(132.669.820,00)	83,41
01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	162.502.900,00	162.290.210,00	(212.690,00)	99,87
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	231.905.000,00	231.667.900,00	(237.100,00)	99,9
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	54.685.500,00	53.553.300,00	(1.132.200,00)	97,93
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	39.121.000,00	38.184.000,00	(937.000,00)	97,6
01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	39.092.000,00	38.683.501,00	(408.499,00)	98,96
01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100.966.000,00	100.646.330,00	(319.670,00)	99,68
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	3.256.874.000,00	3.256.124.000,00	(750.000,00)	99,98
01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	983.345.000,00	981.644.106,00	(1.700.894,00)	99,83
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	461.544.000,00	379.524.000,00	(82.020.000,00)	82,23
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	106.834.000,00	104.594.000,00	(2.240.000,00)	97,9
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	265.960.000,00	264.620.000,00	(1.340.000,00)	99,5
01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	304.950.000,00	304.937.500,00	(12.500,00)	100
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	621.464.000,00	619.247.000,00	(2.217.000,00)	99,64

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.921.182.000,00	8.761.465.000,00	(159.717.000,00)	98,21
02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	264.657.000,00	263.936.000,00	(721.000,00)	99,73
02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.044.929.526,00	4.043.969.526,00	(960.000,00)	99,98
02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	56.224.000,00	29.981.200,00	(26.242.800,00)	53,32
02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	26.872.700,00	22.492.700,00	(4.380.000,00)	83,7
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	43.032.400,00	42.646.000,00	(386.400,00)	99,1
02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	335.918.000,00	330.210.991,00	(5.707.009,00)	98,3
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.369.280.716,00	14.432.083.913,00	(937.196.803,00)	93,9
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.415.502.000,00	6.370.325.000,00	(45.177.000,00)	99,3
02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	402.160.000,00	402.100.000,00	(60.000,00)	99,99
02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	19.028.000,00	11.704.000,00	(7.324.000,00)	61,51
02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.770.900,00	28.970.900,00	(1.800.000,00)	94,15
02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	46.807.700,00	46.085.700,00	(722.000,00)	98,46
02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	181.929.800,00	166.345.000,00	(15.584.800,00)	91,43
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.900.135.000,00	5.781.935.249,00	(118.199.751,00)	98
02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	540.485.000,00	538.093.000,00	(2.392.000,00)	99,56
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	836.259.000,00	834.871.000,00	(1.388.000,00)	99,83
02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	96.397.200,00	92.447.600,00	(3.949.600,00)	95,9
02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	13.885.300,00	0,00	(13.885.300,00)	0
02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	14.432.700,00	7.082.700,00	(7.350.000,00)	49,07
02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	308.765.200,00	264.910.200,00	(43.855.000,00)	85,8
02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	45.503.000,00	29.843.000,00	(15.660.000,00)	65,58
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.416.600.000,00	4.334.874.000,00	(81.726.000,00)	98,15
02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	26.967.100,00	25.567.100,00	(1.400.000,00)	94,81

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13.934.900,00	0,00	(13.934.900,00)	0
02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	73.639.500,00	54.717.500,00	(18.922.000,00)	74,3
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	771.100.000,00	771.100.000,00	0,00	100
02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.891.260.000,00	2.878.254.766,20	(13.005.233,80)	99,55
02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	300.000.000,00	281.358.782,00	(18.641.218,00)	93,79
02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.731.640.000,00	1.609.161.280,00	(122.478.720,00)	92,93
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.075.272.500,00	29.138.230.943,00	(937.041.557,00)	96,88
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	3.125.808.863,00	2.745.891.152,00	(379.917.711,00)	87,85
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.332.205.137,00	1.332.160.527,00	(44.610,00)	100
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	452.212.300,00	400.834.900,00	(51.377.400,00)	88,64
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	137.597.400,00	37.356.000,00	(100.241.400,00)	27,15
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	52.544.200,00	20.233.700,00	(32.310.500,00)	38,51
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	107.485.300,00	96.178.900,00	(11.306.400,00)	89,48
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	167.481.600,00	155.849.100,00	(11.632.500,00)	93,05
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	133.618.400,00	124.732.700,00	(8.885.700,00)	93,35
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	101.432.200,00	77.353.200,00	(24.079.000,00)	76,26
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	100
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	68.577.600,00	58.566.900,00	(10.010.700,00)	85,4
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	145.486.500,00	131.285.500,00	(14.201.000,00)	90,24
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	51.187.400,00	44.635.600,00	(6.551.800,00)	87,2
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	55.744.600,00	51.780.000,00	(3.964.600,00)	92,89
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	11.095.200,00	6.895.200,00	(4.200.000,00)	62,15
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.008.256.800,00	804.015.200,00	(204.241.600,00)	79,74

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	72.891.650,00	62.968.600,00	(9.923.050,00)	86,39
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	326.648.300,00	266.580.300,00	(60.068.000,00)	81,61
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	844.890.400,00	814.719.600,00	(30.170.800,00)	96,43
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	22.009.000,00	21.509.000,00	(500.000,00)	97,73
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	237.786.449,00	157.644.000,00	(80.142.449,00)	66,3
02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100
02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.353.200,00	3.353.200,00	0,00	100
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	220.437.200,00	198.608.700,00	(21.828.500,00)	90,1
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	679.755.922,00	581.937.100,00	(97.818.822,00)	85,61
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22.446.123.026,00	16.169.083.786,00	(6.277.039.240,00)	72,04
02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	963.600,00	963.600,00	0,00	100
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	5.667.900,00	4.167.900,00	(1.500.000,00)	73,54
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	20.140.437.996,00	21.648.650.984,00	1.508.212.988,00	107,49
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.288.571.529,00	967.593.963,00	(320.977.566,00)	75,09
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.428.300.471,00	792.750.140,00	(635.550.331,00)	55,5
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.106.537.500,00	2.149.787.300,00	(956.750.200,00)	69,2
02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	46.770.200,00	41.612.000,00	(5.158.200,00)	88,97
02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	7.999.200,00	2.249.600,00	(5.749.600,00)	28,12
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	28.949.950,00	26.692.450,00	(2.257.500,00)	92,2
02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.041.300,00	10.041.000,00	(300,00)	100
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	732.630.175,00	331.826.697,00	(400.803.478,00)	45,29
02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	85.000.000,00	58.068.376,00	(26.931.624,00)	68,32
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	820.848.000,00	817.996.000,00	(2.852.000,00)	99,65
02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	4.130.075.500,00	4.107.896.500,00	(22.179.000,00)	99,46

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.01.16	Pembangunan Check Dam	482.738.142,00	475.025.439,00	(7.712.703,00)	98,4
02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1.297.522.500,00	1.296.922.500,00	(600.000,00)	99,95
02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	84.275.000,00	82.735.000,00	(1.540.000,00)	98,17
02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	487.189.000,00	472.554.500,00	(14.634.500,00)	97
02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	51.130.000,00	50.050.000,00	(1.080.000,00)	97,89
02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	203.955.475,00	203.571.000,00	(384.475,00)	99,81
02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	46.277.960,00	46.269.000,00	(8.960,00)	99,98
02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.484.370.000,00	1.399.365.000,00	(85.005.000,00)	94,27
02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	76.795.997,00	73.310.023,00	(3.485.974,00)	95,46
02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	134.474.200,00	110.474.000,00	(24.000.200,00)	82,15
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	105.550.000,00	105.550.000,00	0,00	100
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100
02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	68.816.800,00	65.026.800,00	(3.790.000,00)	94,49
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	37.970.004,00	37.578.800,00	(391.204,00)	98,97
02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	2.412.737.000,00	2.219.477.000,00	(193.260.000,00)	91,99
02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	91.256.500,00	84.634.500,00	(6.622.000,00)	92,74
02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	124.678.000,00	120.528.000,00	(4.150.000,00)	96,67
02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20.000.000,00	19.350.000,00	(650.000,00)	96,75
02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	76.450.000,00	73.094.000,00	(3.356.000,00)	95,61
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	18.518.000,00	18.065.000,00	(453.000,00)	97,55

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	31.471.900,00	28.909.791,00	(2.562.109,00)	91,86
02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	15.834.700,00	15.834.700,00	0,00	100
02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1.276.310.600,00	1.275.631.000,00	(679.600,00)	99,95
02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.159.292.000,00	93.313.400,00	(2.065.978.600,00)	4,32
02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	332.832.200,00	279.002.080,00	(53.830.120,00)	83,83
02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	143.500.000,00	136.325.950,00	(7.174.050,00)	95
02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	107.812.405,00	68.140.400,00	(39.672.005,00)	63,2
02.2.01.01	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	24.649.200,00	24.649.200,00	0,00	100
02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	14.489.800,00	14.489.800,00	0,00	100
02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	25.049.900,00	25.049.900,00	0,00	100
02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	427.750.000,00	425.708.850,00	(2.041.150,00)	99,52
02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	31.523.000,00	31.523.000,00	0,00	100
02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	49.341.000,00	46.760.290,00	(2.580.710,00)	94,77
02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	11.461.500,00	11.461.300,00	(200,00)	100
02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	929.640.000,00	929.640.000,00	0,00	100
02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.063.017.871,00	2.017.360.000,00	(45.657.871,00)	97,79
02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.496.237.903,00	4.412.358.451,00	(83.879.452,00)	98,13
02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	147.700.000,00	147.656.000,00	(44.000,00)	99,97
02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	207.992.000,00	197.492.000,00	(10.500.000,00)	94,95
02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	66.575.214,00	64.846.000,00	(1.729.214,00)	97,4

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15.016.000,00	14.992.000,00	(24.000,00)	99,84
02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	100.620.000,00	100.620.000,00	0,00	100
02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	242.420.000,00	241.420.000,00	(1.000.000,00)	99,59
02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10.024.524,00	9.984.000,00	(40.524,00)	99,6
02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	23.768.000,00	23.768.000,00	0,00	100
02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	16.075.500,00	16.064.550,00	(10.950,00)	99,93
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	74.262.300,00	62.212.000,00	(12.050.300,00)	83,77
02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	1.042.358.000,00	992.358.000,00	(50.000.000,00)	95,2
02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	16.872.800,00	16.872.800,00	0,00	100
02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	39.261.900,00	39.258.450,00	(3.450,00)	99,99
02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	40.294.000,00	40.268.000,00	(26.000,00)	99,94
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	35.514.000,00	35.514.000,00	0,00	100
02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	711.237.500,00	709.326.297,00	(1.911.203,00)	99,73
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	92.794.000,00	92.775.022,00	(18.978,00)	99,98
02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	60.603.000,00	60.583.000,00	(20.000,00)	99,97
02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	30.443.000,00	30.424.643,00	(18.357,00)	99,94
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.222.000,00	10.208.000,00	(14.000,00)	99,86
02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.129.000,00	40.020.100,00	(108.900,00)	99,73
02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	21.204.000,00	21.084.000,00	(120.000,00)	99,43
02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.694.500,00	13.678.500,00	(16.000,00)	99,88
02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74.964.000,00	74.856.240,00	(107.760,00)	99,86

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	135.292.300,00	81.161.400,00	(54.130.900,00)	59,99
02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	71.059.000,00	55.154.000,00	(15.905.000,00)	77,62
02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	42.562.800,00	36.712.800,00	(5.850.000,00)	86,26
02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0
02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	376.314.870,00	356.495.000,00	(19.819.870,00)	94,73
02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.063.500,00	3.063.500,00	0,00	100
02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	8.476.400,00	8.401.400,00	(75.000,00)	99,12
02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	5.136.000,00	5.010.000,00	(126.000,00)	97,55
02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	1.806.000,00	1.806.000,00	0,00	100
02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.060.000,00	0	(5.060.000,00)	0
02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	13.202.000,00	13.202.000,00	0,00	100
02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	336.920.000,00	330.748.000,00	(6.172.000,00)	98,17
02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	7.191.000,00	7.191.000,00	0,00	100
02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00	100
02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	1.151.000,00	306.000,00	(845.000,00)	26,59
02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	158.464.600,00	156.893.000,00	(1.571.600,00)	99,01
02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	33.523.400,00	26.350.000,00	(7.173.400,00)	78,6
02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	2.112.000,00	612.000,00	(1.500.000,00)	28,98
02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	2.159.500,00	2.159.500,00	0,00	100
02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	13.625.300,00	13.625.300,00	0,00	100
02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100
02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	20.524.000,00	20.524.000,00	0,00	100
02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	12.086.000,00	12.086.000,00	0,00	100
02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	319.808.000,00	314.908.195,00	(4.899.805,00)	98,47
02.2.02.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	407.900.000,00	389.175.195,00	(18.724.805,00)	95,41
02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.326.878.361,00	3.306.057.500,00	(20.820.861,00)	99,37
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	78.819.300,00	78.296.400,00	(522.900,00)	99,34
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	159.100.000,00	158.962.000,00	(138.000,00)	99,91
02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	6.979.900,00	6.979.000,00	(900,00)	99,99
02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	6.080.900,00	6.080.000,00	(900,00)	99,99
02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	1.080.000,00	720.000,00	(360.000,00)	66,67
02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	38.116.500,00	37.216.500,00	(900.000,00)	97,64
02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	160.100.000,00	159.725.000,00	(375.000,00)	99,77
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	252.262.600,00	201.438.000,00	(50.824.600,00)	79,85
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	7.763.900.850,00	7.600.564.437,56	(163.336.412,44)	97,9
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	696.056.740,00	676.643.630,00	(19.413.110,00)	97,21
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	317.292.000,00	295.462.530,00	(21.829.470,00)	93,12
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	21.924.112.300,00	11.613.201.620,00	(10.310.910.680,00)	52,97

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	220.243.200,00	210.783.210,00	(9.459.990,00)	95,7
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	145.374.200,00	131.616.200,00	(13.758.000,00)	90,54
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	332.468.300,00	332.343.100,00	(125.200,00)	99,96
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	278.798.000,00	278.791.100,00	(6.900,00)	100
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	75.005.600,00	73.767.400,00	(1.238.200,00)	98,35
02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	658.150.000,00	629.560.872,00	(28.589.128,00)	95,66
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	450.800.000,00	450.347.600,00	(452.400,00)	99,9
02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	100
02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	100
02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100
02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	150.000.000,00	149.641.840,00	(358.160,00)	99,76
02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	100
02.2.02.03	Pembahasan APBD	164.500.000,00	163.874.470,00	(625.530,00)	99,62
02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	160.150.000,00	158.317.400,00	(1.832.600,00)	98,86
02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	100
02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	100
02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	27.540.000,00	18.210.000,00	(9.330.000,00)	66,12
02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12.420.000,00	8.970.000,00	(3.450.000,00)	72,22
02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	18.540.000,00	7.965.000,00	(10.575.000,00)	42,96
02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12.420.000,00	9.075.000,00	(3.345.000,00)	73,07
02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12.420.000,00	5.925.000,00	(6.495.000,00)	47,71
02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	12.420.000,00	0,00	(12.420.000,00)	0
02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	179.730.000,00	172.516.900,00	(7.213.100,00)	95,99
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.215.000.000,00	1.199.809.284,00	(15.190.716,00)	98,75
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	485.800.000,00	477.275.000,00	(8.525.000,00)	98,25
02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	132.360.000,00	132.287.000,00	(73.000,00)	99,94
02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	5.265.000,00	5.265.000,00	0,00	100
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	2.460.870.000,00	2.453.412.200,00	(7.457.800,00)	99,7
02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	205.100.000,00	204.041.440,00	(1.058.560,00)	99,48
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.384.035.000,00	2.353.525.608,00	(30.509.392,00)	98,72
02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	31.847.000,00	31.847.000,00	0,00	100
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	38.440.000,00	38.384.000,00	(56.000,00)	99,85
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	50.405.000,00	50.405.000,00	0,00	100
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	27.788.000,00	27.447.200,00	(340.800,00)	98,77
02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	25.905.000,00	25.755.360,00	(149.640,00)	99,42
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	81.060.000,00	72.938.841,00	(8.121.159,00)	89,98
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	43.564.000,00	43.431.000,00	(133.000,00)	99,69
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	44.535.000,00	44.431.000,00	(104.000,00)	99,77
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	192.067.200,00	189.317.491,00	(2.749.709,00)	98,57
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	213.460.300,00	210.913.859,00	(2.546.441,00)	98,81
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	220.820.500,00	219.110.233,00	(1.710.267,00)	99,23
02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	623.450.000,00	608.635.000,00	(14.815.000,00)	97,62
02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	178.850.000,00	174.208.000,00	(4.642.000,00)	97,4
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	43.164.700,00	43.096.300,00	(68.400,00)	99,84
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	123.635.223,00	123.426.456,00	(208.767,00)	99,83
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	59.060.233,00	58.949.233,00	(111.000,00)	99,81
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	137.579.000,00	136.940.148,00	(638.852,00)	99,54

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	7.603.000,00	5.729.000,00	(1.874.000,00)	75,35
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	9.007.000,00	9.007.000,00	0,00	100
02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	32.289.200,00	28.552.000,00	(3.737.200,00)	88,43
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	36.859.000,00	36.703.400,00	(155.600,00)	99,58
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	93.999.115,00	93.973.316,00	(25.799,00)	99,97
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	60.932.481,00	48.648.808,00	(12.283.673,00)	79,84
02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	234.129.000,00	216.740.965,00	(17.388.035,00)	92,57
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	26.884.800,00	25.890.000,00	(994.800,00)	96,3
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.855.206.339,00	1.029.778.000,00	(1.825.428.339,00)	36,07
02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	235.618.000,00	234.846.080,00	(771.920,00)	99,67
02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	206.459.106,00	205.415.090,00	(1.044.016,00)	99,49
02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	22.275.000,00	22.103.000,00	(172.000,00)	99,23
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	83.780.000,00	82.760.997,00	(1.019.003,00)	98,78
02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	35.616.000,00	35.363.080,00	(252.920,00)	99,29
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	164.099.800,00	157.818.700,00	(6.281.100,00)	96,17
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	71.106.500,00	70.002.794,00	(1.103.706,00)	98,45
02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	317.600.000,00	317.600.000,00	0,00	100
02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	14.017.000,00	13.953.000,00	(64.000,00)	99,54
02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	112.944.000,00	111.894.578,00	(1.049.422,00)	99,07
02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	11.997.000,00	11.997.000,00	0,00	100

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	97.640.000,00	97.630.241,00	(9.759,00)	99,99
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.309.591.500,00	1.290.280.596,00	(19.310.904,00)	98,53
02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	112.500.000,00	1.820.000,00	(110.680.000,00)	1,62
02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	16.046.000,00	12.810.000,00	(3.236.000,00)	79,83
02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	16.046.000,00	15.731.000,00	(315.000,00)	98,04
02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	224.947.000,00	196.437.517,00	(28.509.483,00)	87,33
02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	70.771.500,00	51.663.580,00	(19.107.920,00)	73
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	176.741.800,00	176.739.000,00	(2.800,00)	100
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	21.258.200,00	21.052.000,00	(206.200,00)	99,03
02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	88.961.000,00	88.007.000,00	(954.000,00)	98,93
02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	34.155.100,00	33.816.096,00	(339.004,00)	99,01
02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	72.648.600,00	71.959.296,00	(689.304,00)	99,05
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	214.060.600,00	212.461.855,00	(1.598.745,00)	99,25
02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	40.682.800,00	40.481.128,00	(201.672,00)	99,5
02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	54.335.600,00	54.251.000,00	(84.600,00)	99,84
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	106.500.000,00	106.494.000,00	(6.000,00)	99,99
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	119.392.600,00	119.388.900,00	(3.700,00)	100
02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100
02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	163.978.800,00	158.348.800,00	(5.630.000,00)	96,57

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	135.983.800,00	131.403.160,00	(4.580.640,00)	96,63
03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	80.714.200,00	75.472.000,00	(5.242.200,00)	93,51
03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	5.198.000,00	5.198.000,00	0,00	100
03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3.079.000,00	3.079.000,00	0,00	100
03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.667.000,00	1.667.000,00	0,00	100
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	4.910.000,00	4.508.400,00	(401.600,00)	91,82
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.838.000,00	7.838.000,00	0,00	100
03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	255.126.600,00	55.356.600,00	(199.770.000,00)	21,7
03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.137.197.000,00	1.118.686.520,00	(18.510.480,00)	98,37
03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.780.219.400,00	1.482.241.400,00	(297.978.000,00)	83,26
03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.894.948.000,00	2.816.656.250,00	(78.291.750,00)	97,3
03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	42.330.000,00	13.824.000,00	(28.506.000,00)	32,66
03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	72.513.461,00	13.112.000,00	(59.401.461,00)	18,08
03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	329.196.420,00	279.141.700,00	(50.054.720,00)	84,79
03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	335.960.000,00	0	(335.960.000,00)	0
03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	31.165.800,00	31.165.800,00	0,00	100
03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	88.460.000,00	88.125.200,00	(334.800,00)	99,62
03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3.274.947.000,00	3.274.586.000,00	(361.000,00)	99,99
03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	290.040.900,00	287.344.801,00	(2.696.099,00)	99,07

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	73.159.200,00	73.155.000,00	(4.200,00)	99,99
03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	214.791.590,00	213.971.590,00	(820.000,00)	99,62
03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	105.447.000,00	103.261.942,00	(2.185.058,00)	97,93
03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	31.568.000,00	22.448.000,00	(9.120.000,00)	71,11
03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	294.750.600,00	289.534.458,00	(5.216.142,00)	98,23
03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	320.784.100,00	320.666.900,00	(117.200,00)	99,96
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	277.117.000,00	274.801.100,00	(2.315.900,00)	99,16
03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	198.507.900,00	198.507.900,00	0,00	100
03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	18.273.300,00	18.271.000,00	(2.300,00)	99,99
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	44.179.200,00	29.467.800,00	(14.711.400,00)	66,7
03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.874.700,00	6.889.200,00	(1.985.500,00)	77,63
03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.071.700,00	13.788.700,00	(2.283.000,00)	85,79
03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	107.030.000,00	95.190.000,00	(11.840.000,00)	88,94
03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	48.943.200,00	48.863.020,00	(80.180,00)	99,84
03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	14.534.800,00	13.312.900,00	(1.221.900,00)	91,59
03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	51.556.500,00	51.188.500,00	(368.000,00)	99,29
03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	32.899.800,00	29.516.800,00	(3.383.000,00)	89,72
03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	33.931.000,00	32.554.000,00	(1.377.000,00)	95,94
03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	17.742.500,00	17.724.600,00	(17.900,00)	99,9

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	111.100.000,00	111.100.000,00	0,00	100
03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	27.433.120,00	21.373.300,00	(6.059.820,00)	77,91
03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	61.373.600,00	60.140.260,00	(1.233.340,00)	97,99
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	416.969.400,00	416.959.920,00	(9.480,00)	100
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	21.174.500,00	21.174.500,00	0,00	100
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	86.500.900,00	84.541.900,00	(1.959.000,00)	97,74
03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	86.338.345,00	83.476.564,00	(2.861.781,00)	96,69
03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	38.191.900,00	38.191.900,00	0,00	100
03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	26.002.000,00	25.976.000,00	(26.000,00)	99,9
03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	30.010.000,00	30.010.000,00	0,00	100
03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100
03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	52.957.100,00	52.807.100,00	(150.000,00)	99,72
03.2.01.03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	14.043.700,00	14.043.700,00	0,00	100
03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	17.200.900,00	17.200.900,00	0,00	100
03.2.02.10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	22.268.400,00	22.268.400,00	0,00	100
03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000,00	4.320.000,00	(55.000,00)	98,74
03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00	24.999.900,00	(100,00)	100
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	450.640.000,00	448.626.152,00	(2.013.848,00)	99,55

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
03.2.02.03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	196.800.000,00	196.800.000,00	0,00	100
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5.850.000,00	5.755.000,00	(95.000,00)	98,38
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	346.482.700,00	336.905.400,00	(9.577.300,00)	97,24
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.006.150.000,00	1.001.436.490,00	(4.713.510,00)	99,53
03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	7.179.800,00	7.179.800,00	0,00	100
03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	276.000.000,00	275.980.000,00	(20.000,00)	99,99
03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	50.955.000,00	50.880.000,00	(75.000,00)	99,85
03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	44.920.000,00	44.911.312,00	(8.688,00)	99,98
03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	48.536.000,00	48.459.955,00	(76.045,00)	99,84
03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	343.414.000,00	342.827.200,00	(586.800,00)	99,83
03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	47.538.000,00	47.527.099,00	(10.901,00)	99,98
03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	218.457.000,00	218.418.000,00	(39.000,00)	99,98
03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	26.890.600,00	26.640.600,00	(250.000,00)	99,07
03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	9.720.000,00	9.510.000,00	(210.000,00)	97,84
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	15.627.000,00	15.571.700,00	(55.300,00)	99,65
03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.116.118.000,00	1.115.450.000,00	(668.000,00)	99,94
03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	300.000.000,00	299.994.000,00	(6.000,00)	100
03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2.000.000,00	0	(2.000.000,00)	0

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	1.277.000,00	1.277.000,00	0,00	100
03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	5.481.500,00	5.391.500,00	(90.000,00)	98,36
03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	2.065.900,00	2.038.900,00	(27.000,00)	98,69
03.2.01.01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	10.772.000,00	10.772.000,00	0,00	100
03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	100
03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	14.405.500,00	14.405.500,00	0,00	100
03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	132.950.000,00	132.090.760,00	(859.240,00)	99,35
03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	17.551.000,00	14.750.700,00	(2.800.300,00)	84,04
03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100
03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	20.758.700,00	19.758.700,00	(1.000.000,00)	95,18
03.2.04.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	18.578.700,00	18.578.700,00	0,00	100
03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	121.528.216,00	120.898.441,00	(629.775,00)	99,48
03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	538.335.185,00	498.505.348,00	(39.829.837,00)	92,6
03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	55.750.500,00	48.732.400,00	(7.018.100,00)	87,41
03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	20.808.700,00	20.378.700,00	(430.000,00)	97,93
03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	109.250.750,00	107.820.000,00	(1.430.750,00)	98,69
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	73.898.000,00	73.640.242,00	(257.758,00)	99,65
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	165.836.200,00	137.424.715,00	(28.411.485,00)	82,87
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	68.820.600,00	66.990.420,00	(1.830.180,00)	97,34
03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	44.225.900,00	28.502.178,00	(15.723.722,00)	64,45

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	9.782.800,00	9.510.800,00	(272.000,00)	97,22
03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	40.773.300,00	40.746.200,00	(27.100,00)	99,93
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	459.599.500,00	455.028.500,00	(4.571.000,00)	99,01
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	118.828.000,00	116.444.000,00	(2.384.000,00)	97,99
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	265.273.300,00	257.108.661,00	(8.164.639,00)	96,92
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	224.179.106,00	219.889.201,00	(4.289.905,00)	98,09
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	177.631.000,00	175.350.588,00	(2.280.412,00)	98,72
03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	43.953.300,00	43.118.061,00	(835.239,00)	98,1
03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	65.760.100,00	61.419.350,00	(4.340.750,00)	93,4
03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	107.672.000,00	101.211.473,00	(6.460.527,00)	94
03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22.810.000,00	22.575.000,00	(235.000,00)	98,97
03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	218.088.000,00	199.864.058,00	(18.223.942,00)	91,64
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	22.810.000,00	21.340.000,00	(1.470.000,00)	93,56
03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	175.916.900,00	175.869.677,00	(47.223,00)	99,97
03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	21.172.800,00	21.022.800,00	(150.000,00)	99,29
03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	160.855.100,00	147.685.795,00	(13.169.305,00)	91,81
03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11.938.000,00	11.833.000,00	(105.000,00)	99,12
03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	308.473.500,00	302.131.900,00	(6.341.600,00)	97,94

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	21.395.400,00	20.045.400,00	(1.350.000,00)	93,69
03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	153.410.000,00	152.706.276,00	(703.724,00)	99,54
03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	21.187.800,00	21.130.800,00	(57.000,00)	99,73
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	54.297.900,00	54.015.450,00	(282.450,00)	99,48
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	23.150.000,00	23.033.500,00	(116.500,00)	99,5
03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.390.280,00	9.254.800,00	(135.480,00)	98,56
03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	86.594.500,00	79.479.500,00	(7.115.000,00)	91,78
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	70.635.800,00	67.642.450,00	(2.993.350,00)	95,76
03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	23.980.700,00	20.200.700,00	(3.780.000,00)	84,24
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	120.273.800,00	118.798.850,00	(1.474.950,00)	98,77
03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	158.080.000,00	153.414.638,00	(4.665.362,00)	97,05
03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15.912.000,00	12.140.000,00	(3.772.000,00)	76,29
03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	23.196.000,00	23.180.600,00	(15.400,00)	99,93
03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	8.489.900,00	8.255.000,00	(234.900,00)	97,23
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15.190.500,00	14.727.133,00	(463.367,00)	96,95
03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15.639.500,00	15.558.270,00	(81.230,00)	99,48
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	66.006.700,00	66.006.700,00	0,00	100
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	190.872.300,00	190.872.300,00	0,00	100
03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	390.995.000,00	390.122.800,00	(872.200,00)	99,78
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	862.000.000,00	806.000.000,00	(56.000.000,00)	93,5
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17.383.052.213,00	17.198.806.728,00	(184.245.485,00)	98,94
03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	162.034.000,00	158.586.000,00	(3.448.000,00)	97,87

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	1.265.666.000,00	1.250.006.160,00	(15.659.840,00)	98,76
04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15.043.600,00	13.313.200,00	(1.730.400,00)	88,5
04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5.001.100,00	4.999.800,00	(1.300,00)	99,97
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	36.107.600,00	36.107.600,00	0,00	100
04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	37.987.800,00	35.827.800,00	(2.160.000,00)	94,31
04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	22.294.000,00	22.294.000,00	0,00	100
04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.640.000,00	25.134.700,00	(2.505.300,00)	90,94
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	165.132.000,00	164.984.000,00	(148.000,00)	99,91
04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	55.232.000,00	55.222.000,00	(10.000,00)	99,98
04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	65.553.080,00	65.543.300,00	(9.780,00)	99,99
04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	29.420.000,00	26.570.000,00	(2.850.000,00)	90,31
04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	10.678.900,00	9.360.600,00	(1.318.300,00)	87,66
04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	8.462.000,00	0,00	(8.462.000,00)	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	15.000.000,00	14.775.000,00	(225.000,00)	98,5
04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	74.858.130,00	73.487.800,00	(1.370.330,00)	98,17
04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	46.410.000,00	46.410.000,00	0,00	100
04.2.01.02	Penyediaan Sandang	164.599.100,00	161.441.700,00	(3.157.400,00)	98,08
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	17.810.000,00	17.791.800,00	(18.200,00)	99,9
04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	267.457.050,00	265.079.000,00	(2.378.050,00)	99,11
04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	22.839.000,00	18.750.000,00	(4.089.000,00)	82,1
04.2.01.08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	165.939.859,00	152.868.711,00	(13.071.148,00)	92,12
04.2.02.04	Penyediaan Sandang	10.675.000,00	10.445.000,00	(230.000,00)	97,85
04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	4.479.000,00	4.400.000,00	(79.000,00)	98,24
04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	33.930.000,00	32.826.300,00	(1.103.700,00)	96,75
04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	13.050.000,00	10.117.600,00	(2.932.400,00)	77,53
04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	28.347.000,00	28.262.000,00	(85.000,00)	99,7
04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	20.587.600,00	20.587.600,00	0,00	100
04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	1.214.728.000,00	1.214.590.000,00	(138.000,00)	99,99
04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	8.145.000,00	8.145.000,00	0,00	100
04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	20.488.400,00	20.482.500,00	(5.900,00)	99,97
04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	68.033.200,00	66.184.461,00	(1.848.739,00)	97,28
04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	8.967.000,00	8.763.000,00	(204.000,00)	97,72
04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	91.230.400,00	91.230.400,00	0,00	100
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.907.034.505,00	2.901.786.160,16	(5.248.344,84)	99,82
04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	7.242.900,00	7.242.900,00	0,00	100

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.382.000,00	6.382.000,00	0,00	100
04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	300.466.000,00	291.466.000,00	(9.000.000,00)	97
04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	27.801.000,00	27.801.000,00	0,00	100
04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.898.000,00	3.898.000,00	0,00	100
04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3.051.200,00	3.051.200,00	0,00	100
04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.724.400,00	15.724.400,00	0,00	100
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	618.000.000,00	602.064.000,00	(15.936.000,00)	97,42
04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	862.735.900,00	766.675.500,00	(96.060.400,00)	88,87
04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	110.663.000,00	106.090.500,00	(4.572.500,00)	95,87
04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	20.530.000,00	20.530.000,00	0,00	100
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	30.962.500,00	30.843.660,00	(118.840,00)	99,62
04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	28.183.844,00	28.183.844,00	0,00	100
04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	105.200.000,00	97.512.500,00	(7.687.500,00)	92,69
04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	91.148.500,00	83.143.780,00	(8.004.720,00)	91,22
04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.956.000,00	17.897.100,00	(14.058.900,00)	56,01
04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.156.000,00	13.156.000,00	0,00	100
04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	15.596.000,00	15.596.000,00	0,00	100
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	128.795.830,00	127.177.200,00	(1.618.630,00)	98,74
04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.338.006,00	14.337.000,00	(1.006,00)	99,99
04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	10.324.355,00	10.321.500,00	(2.855,00)	99,97
04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	17.610.700,00	17.610.500,00	(200,00)	100
04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	27.649.900,00	27.368.900,00	(281.000,00)	98,98
04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	207.180.800,00	204.105.600,00	(3.075.200,00)	98,52
04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	457.852.000,00	0	(457.852.000,00)	0
04.2.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINas	22.293.000,00	22.203.000,00	(90.000,00)	99,6
04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	36.640.000,00	34.866.700,00	(1.773.300,00)	95,16
04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	3.890.000,00	3.794.600,00	(95.400,00)	97,55
04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7.541.500,00	7.541.500,00	0,00	100
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	133.570.000,00	131.900.000,00	(1.670.000,00)	98,75
04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	172.357.000,00	124.261.372,00	(48.095.628,00)	72,1
04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	114.569.000,00	113.222.900,00	(1.346.100,00)	98,83
04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	19.950.000,00	19.468.900,00	(481.100,00)	97,59
04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	22.591.000,00	22.061.100,00	(529.900,00)	97,65
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	585.166.859,00	450.666.159,00	(134.500.700,00)	77,01
04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50.368.000,00	49.182.862,00	(1.185.138,00)	97,65
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	65.809.000,00	63.860.350,00	(1.948.650,00)	97,04
04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	78.220.000,00	77.793.000,00	(427.000,00)	99,45

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	88.824.000,00	88.144.000,00	(680.000,00)	99,23
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	463.446.000,00	463.146.000,00	(300.000,00)	99,94
04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	197.484.200,00	182.643.000,00	(14.841.200,00)	92,48
05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	13.919.000,00	6.650.000,00	(7.269.000,00)	47,78
05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	16.101.000,00	15.601.000,00	(500.000,00)	96,89
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8.831.700,00	8.831.700,00	0,00	100
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	29.323.200,00	29.185.800,00	(137.400,00)	99,53
05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	62.426.400,00	60.676.400,00	(1.750.000,00)	97,2
05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.768.119.120,00	5.682.672.568,00	(85.446.552,00)	98,52
05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	47.416.000,00	47.300.000,00	(116.000,00)	99,76
05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	84.362.400,00	82.925.250,00	(1.437.150,00)	98,3
05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.000.000.000,00	5.347.512.000,00	(652.488.000,00)	89,13
05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	27.732.000,00	27.507.000,00	(225.000,00)	99,19
05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.015.000,00	19.015.000,00	0,00	100
05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.014.900,00	19.010.000,00	(4.900,00)	99,97
05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	18.431.000,00	18.263.000,00	(168.000,00)	99,09

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	8.084.000,00	8.083.000,00	(1.000,00)	99,99
05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	9.768.000,00	9.041.000,00	(727.000,00)	92,56
05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100
05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	26.870.000,00	26.075.000,00	(795.000,00)	97,04
05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	11.044.000,00	10.440.000,00	(604.000,00)	94,53
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.580.799.600,00	3.228.624.260,00	(352.175.340,00)	90,16
05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	7.569.000,00	7.569.000,00	0,00	100
05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	8.286.000,00	8.286.000,00	0,00	100
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	192.838.800,00	187.422.739,00	(5.416.061,00)	97,19
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	275.193.000,00	250.122.800,00	(25.070.200,00)	90,89
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	122.940.000,00	121.305.000,00	(1.635.000,00)	98,67
05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	158.778.000,00	62.224.760,00	(96.553.240,00)	39,19
05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	0,00
05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	19.198.800,00	9.650.000,00	(9.548.800,00)	50,26
05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	202.299.000,00	202.260.600,00	(38.400,00)	99,98
05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100
05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	59.457.599,00	57.100.000,00	(2.357.599,00)	96,03
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	45.991.800,00	45.913.400,00	(78.400,00)	99,83
05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	143.525.200,00	141.692.600,00	(1.832.600,00)	98,72

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.682.900,00	19.682.900,00	0,00	100
05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25.557.600,00	25.257.600,00	(300.000,00)	98,83
05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	110.535.200,00	93.704.163,00	(16.831.037,00)	84,77
06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	3.506.120.511,00	3.503.539.500,00	(2.581.011,00)	99,93
06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	3.421.790.207,00	2.222.892.025,00	(1.198.898.182,00)	64,96
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	100
06.2.01.02	Penyediaan Sandang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100
06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	6.800.000,00	3.300.000,00	(3.500.000,00)	48,53
06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	6.255.000,00	6.255.000,00	0,00	100
06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	87.170.000,00	87.165.000,00	(5.000,00)	99,99
06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	8.309.300,00	8.309.300,00	0,00	100
06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	61.330.200,00	57.787.000,00	(3.543.200,00)	94,22
06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100
06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.516.600,00	73.921.600,00	(2.595.000,00)	96,61
06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1.594.078.900,00	1.087.586.660,00	(506.492.240,00)	68,23

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	41.841.400,00	41.823.400,00	(18.000,00)	99,96
06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	136.015.300,00	117.741.000,00	(18.274.300,00)	86,56
06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	33.478.000,00	30.486.400,00	(2.991.600,00)	91,06
06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.073.105.000,00	1.018.699.160,00	(54.405.840,00)	94,93
06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.676.300,00	41.971.000,00	(3.705.300,00)	91,89
06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	14.498.800,00	13.958.000,00	(540.800,00)	96,27
06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	31.869.000,00	28.890.000,00	(2.979.000,00)	90,65
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	104.347.000,00	72.931.600,00	(31.415.400,00)	69,89
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	66.810.800,00	66.810.800,00	0,00	100
06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	502.808.200,00	499.628.700,00	(3.179.500,00)	99,37
06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	52.590.600,00	28.726.800,00	(23.863.800,00)	54,62
06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.749.236.000,00	1.712.915.000,00	(36.321.000,00)	97,92
07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	12.057.040.000,00	912.351.060,00	(11.144.688.940,00)	7,57
07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	106.270.800,00	76.214.200,00	(30.056.600,00)	71,72

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	141.563.000,00	139.281.100,00	(2.281.900,00)	98,39
07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	242.014.000,00	202.038.000,00	(39.976.000,00)	83,48
07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.276.200,00	92.083.279,00	(20.192.921,00)	82,01
07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.543.200,00	21.996.700,00	(3.546.500,00)	86,12
07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	16.166.500,00	16.164.500,00	(2.000,00)	99,99
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	44.745.100,00	42.445.000,00	(2.300.100,00)	94,86
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	45.810.000,00	45.809.000,00	(1.000,00)	100
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	17.500.100,00	17.500.100,00	0,00	100
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	17.082.000,00	16.880.000,00	(202.000,00)	98,82
07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	9.874.900,00	9.514.900,00	(360.000,00)	96,35
08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	331.220.000,00	231.720.000,00	(99.500.000,00)	69,96
08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	206.696.000,00	81.196.280,00	(125.499.720,00)	39,28
08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	77.595.000,00	77.415.000,00	(180.000,00)	99,77
08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	263.434.110,00	255.403.447,00	(8.030.663,00)	96,95
09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	4.719.430.500,00	4.716.980.500,00	(2.450.000,00)	99,95
09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	6.300.792.540,00	6.300.188.100,00	(604.440,00)	99,99

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	36.974.050,00	35.665.000,00	(1.309.050,00)	96,46
10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	647.666.500,00	645.122.500,00	(2.544.000,00)	99,61
10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	189.568.000,00	129.330.000,00	(60.238.000,00)	68,22
10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	627.054.500,00	624.093.000,00	(2.961.500,00)	99,53
10.2.01.05	Pembangunan Jalan	1.023.321.000,00	1.023.321.000,00	0,00	100
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	19.293.159.000,00	18.978.276.650,00	(314.882.350,00)	98,37
10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	8.756.218.350,00	8.754.805.960,00	(1.412.390,00)	99,98
10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	627.077.500,00	627.077.500,00	0,00	100
10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	3.383.905.000,00	3.383.795.000,00	(110.000,00)	100
10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	14.490.000,00	11.924.000,00	(2.566.000,00)	82,29
11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	25.091.040,00	24.796.000,00	(295.040,00)	98,82
11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	54.874.500,00	54.838.500,00	(36.000,00)	99,93
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.506.933.747,00	3.463.052.246,00	(43.881.501,00)	98,75
11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	33.245.000,00	33.245.000,00	0,00	100
11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	73.775.200,00	38.476.200,00	(35.299.000,00)	52,15
12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	298.141.015,00	297.731.500,00	(409.515,00)	99,86
12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	29.106.820,00	28.646.200,00	(460.620,00)	98,42
12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	16.895.600,00	16.442.400,00	(453.200,00)	97,32
12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	11.520.000,00	11.430.000,00	(90.000,00)	99,22
12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	79.910.590,00	79.474.900,00	(435.690,00)	99,45
12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	159.181.000,00	156.411.000,00	(2.770.000,00)	98,26
JUMLAH		806.099.136.615,00	749.196.056.304,73	(56.903.080.310,27)	92,94

Sumber Data : BPKAD Kota Bima Tahun Anggaran 2022, Diolah

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bima telah menganut anggaran defisit.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Bima pada TA 2022 senilai Rp786.130.956.782,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp68.087.667.058,00, Pendapatan Transfer senilai Rp718.043.289.724,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp0,00.

Sedangkan Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Bima pada TA 2021 senilai Rp745.404.518.907,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp58.906.077.013,00, Pendapatan Transfer senilai Rp668.730.441.894,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp17.768.000.000,00.

Realisasi Pendapatan pada TA 2022 adalah senilai Rp805.811.256.060,22 atau (102,50%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp57.359.469.008,22 (84,24%), Pendapatan Transfer senilai Rp748.451.787.052,00 (104,23%) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp0,00 (0,00%).

Sedangkan Realisasi Pendapatan pada TA 2021 adalah senilai Rp729.687.511.750,67 atau (97,89%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp46.993.516.746,67 atau (79,78%), Pendapatan Transfer senilai Rp664.762.654.304,00 (99,41%) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp17.931.340.700,00 (100,92%).

Anggaran Belanja pada TA 2022 senilai Rp806.099.136.615,00 dan TA 2021 senilai Rp754.078.303.532,00. Sedangkan realisasi Belanja TA 2022 adalah senilai Rp749.196.056.304,73 dan TA 2021 senilai Rp716.700.153.286,42 yang terdiri dari Realisasi Belanja Operasi TA 2022 senilai Rp594.440.854.017,00, Belanja Modal senilai Rp153.809.784.287,73 dan Belanja Tak Terduga senilai Rp945.418.000,00. Sedangkan realisasi TA 2021 terdiri dari Realisasi Belanja Operasi TA 2021 senilai Rp575.787.111.971,68, Belanja Modal senilai Rp138.378.990.564,74 dan Belanja Tak Terduga senilai Rp2.534.050.750,00.

Realisasi Pendapatan pada TA 2022 senilai Rp805.811.256.060,22 bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja TA 2022 senilai Rp749.196.056.304,73 maka terjadi surplus senilai Rp56.615.199.755,49 Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp21.967.826.874,18 dan pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp2.000.000.000,00 sehingga menghasilkan SILPA TA 2022 senilai Rp76.583.026.629,67.

Realisasi Pendapatan pada TA 2021 senilai Rp729.687.511.750,67, bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja TA 2021 senilai Rp716.700.153.286,42 maka terjadi surplus senilai

Rp12.987.358.464,25 Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp10.974.821.367,93 dan pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp2.000.000.000,00 sehingga menghasilkan SILPA TA 2021 senilai Rp21.962.179.832,18.

Realisasi APBD Kota Bima Tahun 2022 dan 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.1
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun Anggaran 2022

No.	Komponen	Tahun 2022 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
4	Pendapatan Daerah			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	68.087.667.058,00	57.359.469.008,22	84,24
4.1.01	Pajak Daerah	24.368.139.721,00	21.355.298.265,81	87,64
4.1.02	Retribusi Daerah	26.296.337.440,00	19.710.293.760,28	74,95
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.284.388.412,00	1.545.139.285,00	120,3
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.138.801.485,00	14.748.737.697,13	91,34
04.02	Pendapatan Transfer	718.043.289.724,00	748.451.787.052,00	104,23
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	665.234.092.232,00	696.779.883.471,00	104,74
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.809.197.492,00	51.671.903.581,00	97,85
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		786.130.956.782,00	805.811.256.060,22	102,5
5	Belanja Daerah			
05.01	Belanja Operasi	646.803.491.625,00	594.440.854.017,00	91,9
05.01.01	Belanja Pegawai	371.902.399.623,00	361.680.806.870,00	97,25
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	240.234.685.146,00	209.804.746.008,00	87,33
05.01.05	Belanja Hibah	27.407.406.856,00	16.448.051.139,00	60,01
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	7.259.000.000,00	6.507.250.000,00	89,64
05.02	Belanja Modal	156.536.638.651,00	153.809.784.287,73	98,26
05.02.01	Belanja Modal Tanah	3.359.000.000,00	3.035.329.060,00	90,36
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.581.464.683,00	45.650.535.702,00	102,4
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.817.758.287,00	34.349.972.004,73	95,9
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.256.078.301,00	69.040.535.395,00	96,89
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.522.337.380,00	1.733.412.126,00	113,87
05.03	Belanja Tidak Terduga	2.759.006.339,00	945.418.000,00	34,27
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	2.759.006.339,00	945.418.000,00	34,27
Jumlah Belanja		806.099.136.615,00	749.196.056.304,73	92,94

No.	Komponen	Tahun 2022 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
	SUPLUS/ (DEFISIT)	(19.968.179.833,00)	56.615.199.755,49	(283,53)
3	Pembiayaan			
03.01	Penerimaan	21.968.179.833,00	21.967.826.874,18	100,00
03.02	Pengeluaran	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
	Jumlah Pembiayaan	19.968.179.833,00	19.967.826.874,18	100,00
	SILPA	0,00	76.583.026.629,67	0,00

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2022, diolah

Tabel 3.1.2.
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun Anggaran 2021

No.	Komponen	Tahun 2021 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
5.1.1	Pendapatan Daerah			
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	58.906.077.013,00	46.993.516.746,67	79,78
5.1.1.1.1	Pajak Daerah	23.131.077.198,00	19.507.819.782,88	84,34
5.1.1.1.2	Retribusi Daerah	18.928.026.700,00	15.196.689.454,00	80,29
5.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.650.003.101,00	1.284.388.411,79	77,84
5.1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.196.970.014,00	11.004.619.098,00	72,41
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	668.730.441.894,00	664.762.654.304,00	99,41
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	620.414.753.762,00	624.035.340.074,00	100,58
5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.315.688.132,00	40.727.314.230,00	84,29
5.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.768.000.000,00	17.931.340.700,00	100,92
5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.768.000.000,00	17.931.340.700,00	100,92
	Jumlah Pendapatan	745.404.518.907,00	729.687.511.750,67	97,89
5.1.2.1	Belanja Daerah			
5.1.2.1	Belanja Operasi	609.884.155.790,55	575.787.111.971,68	94,41
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	370.292.078.078,09	357.437.167.837,55	96,53
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	219.942.245.712,46	200.214.962.134,13	91,03
5.1.2.1.3	Belanja Hibah	18.200.332.000,00	16.712.982.000,00	91,83
5.1.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.449.500.000,00	1.422.000.000,00	98,10
5.1.2.2	Belanja Modal	140.957.764.221,45	138.378.990.564,74	98,17
5.1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	915.000.000,00	737.365.000,00	80,59
5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.747.070.650,00	28.081.390.647,00	94,40
5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.300.654.312,03	66.975.887.199,03	99,52
5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.243.019.909,42	40.902.636.451,71	99,17
5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.752.019.350,00	1.681.711.267,00	95,99
5.1.2.3	Belanja Tidak Terduga	3.236.383.520,00	2.534.050.750,00	78,30
5.1.2.3	Belanja Tidak Terduga	3.236.383.520,00	2.534.050.750,00	78,30
	Jumlah Belanja	754.078.303.532,00	716.700.153.286,42	95,04

No.	Komponen	Tahun 2021 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
	SUPLUS/ (DEFISIT)	(8.673.784.625,00)	12.987.358.464,25	(149,73)
5.1.3	Pembiayaan			
5.1.3.1	Penerimaan	10.973.784.625,00	10.974.821.367,93	100,01
5.1.3.2	Pengeluaran	2.300.000.000,00	2.000.000.000,00	86,96
	Jumlah Pembiayaan	8.673.784.625,00	8.974.821.367,93	103,47
	SILPA	0,00	21.962.179.832,18	0,00

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2021, diolah

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

3.2.1 Penjelasan Terkait Capaian Target Pendapatan

Capaian target pendapatan Kota Bima terdapat pada beberapa SKPD selama tahun 2022 dan tahun 2021. Adapun rekapitulasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima tahun 2022 dan 2021 tergambar dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1.3
Rekapitulasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima Berdasarkan SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150.000.000,00	114.000.000,00	76,00	150.000.000,00	144.000.000,00	96,00
2	Dinas Kesehatan	16.530.459.400,00	17.639.264.050,00	106,71	19.375.344.300,00	17.506.127.632,00	90,35
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.309.850.000,00	1.378.436.759,28	105,24	1.300.000.000,00	1.232.749.438,00	94,83
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	700.000.000,00	364.200.000,00	52,03	400.000.000,00	291.095.000,00	72,77
6	Dinas Perhubungan	1.499.260.000,00	793.548.000,00	52,93	1.250.000.000,00	297.965.000,00	23,84
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	187.738.000,00	182.710.440,00	97,32	197.284.000,00	187.738.000,00	95,16
8	Dinas Koperindag	2.977.205.040,00	1.130.823.315,00	37,98	2.805.332.400,00	1.417.779.537,00	50,54
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	193.600.000,00	165.250.000,00	85,36	236.000.000,00	131.650.000,00	55,78
10	Dinas Pariwisata	1.527.900.000,00	698.861.887,00	45,74	1.517.820.000,00	574.745.000,00	37,87
11	Dinas Pertanian	260.000.000,00	251.750.750,00	96,83	250.000.000,00	207.786.000,00	83,11
12	Sekretariat Daerah	507.350.000,00	440.380.000,00	86,80	561.675.000,00	361.970.000,00	64,44
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	760.237.594.342,00	782.643.984.495,68	102,95	717.361.063.207,00	707.333.906.143,67	98,60
	JUMLAH	786.130.956.782,00	805.803.209.696,96	97,16	745.404.518.907,00	729.687.511.750,67	97,16

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2022 dan 2021, diolah

Hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bima untuk mencapai target pendapatan dan belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.4
Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi SKPD untuk mencapai Target Pendapatan dan Belanja

No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 Koordinasi antar elemen pada SKPD terkait; 2 Percepatan pada proses pelaksanaan pekerjaan terutama pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh pihak ke tiga; 3 Proses pencairan dana yang tepat waktu; 4 System pelaporan realisasi fisik dan keuangan semakin optimal; 5 Kelengkapan personil yang lebih maksimal sehingga pembagian pekerjaan menjadi lebih merata,	1 Kurangnya kelengkapan kantor guna menunjang aktifitas operasional; 2 Kondisi Alam yang seringkali menghambat pekerjaan fisik dan lapangan; 3 Keterlambatan start pelaksanaan pekerjaan karena adanya himbauan KPK terkait pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal; 4 Pelaksanaan Pembuatan Kontrak dengan System Online sehingga terjadi kendala dalam penginputan data terkait masala jaringan dan lain-lain.
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Menjaga hubungan koordinasi antar OPD antara Pemerintah Daerah Lainnya, Provinsi serta Pusat agar pencapaian kinerja yang diharapkan bisa maksimal.	1 Waktu Perencanaan berpengaruh dalam capaian kinerja. 2 Penyerapan anggaran belum memenuhi capaian program yang ada.
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 Tersedianya aparatur yang melaksanakan kegiatan; 2 Adanya obyek yang menjadi sasaran kegiatan; 3 Terlaksananya kegiatan yang direncanakan; 4 Peran serta masyarakat dalam Kesatuan Bangsa dan Politik.	1 Dana Terbatas; 2 Kualitas SDM masih rendah; 3 Sarana dan Prasarana Terbatas; 4 Data pendukung masih kurang.
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Optimalisasi Pencapaian Kinerja dan Manajemen yang Baik dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	Perencanaan untuk realisasi keuangan yang kurang efektif dan manajemen realisasi keuangan yang kurang efektif dan manajemen realisasi keuangan yang kurang baik
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Tersedianya tenaga yang memahami pengelolaan keuangan SKPD 2 Terpenuhinya SDM pada setiap struktur organisasi pada SKPD	1 Panjangnya birokrasi penyelesaian tugas karena adanya penyerahan sebagian wewenang kepala pelaksana kepada sekretaris yang masih kabur pembatasannya sehingga perlu konsultasi atas bawah secara berulang kepada pimpinan untuk akhirnya diputuskan 2 Kendala dalam pelaksanaan tugas dibidang kesiapsiagaan adalah koordinasi dengan BNPB yang selalu molor pada saat asistensi teknis pembuatan kajian resiko bencana pada sub kegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana karena jadwal kegiatan tersebut harus sesuai dengan ketersediaan waktu pihak BNPB, sehingga menyebabkan terlambatnya penyelesaian dokumen kajian resiko bencana

No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
		3 Adanya program kerjasama dengan mitra pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan pada kemasyarakatan lebih efektif dan efisien	3 Tidak terlaksananya penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana yang awalnya dijadwalkan pada tahun 2022, sehingga akhirnya mata anggaran penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana tersebut dirasionalisasi pada DPA Perubahan menjadi dokumen kajian UPL UKL
			4 Kendala pada kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi terkait dengan pemindahan warga dirumah relokasi adalah sebagian besar penerimaan bantuan dana rumah masih enggan pindah kelokasi karena masih terbatasnya fasilitas pendukung lainnya seperti sekolah,puskesmas,tempat ibadah dan koneksi internet serta masih jauh dari tempat pencaharian 5 Keterbatasan tenaga teknis dalam perawatan peralatan peringatan dini, menyebabkan sebagian besar peralatan tidak terawat dan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal
6	DINAS KETAHANAN PANGAN	1 Ketersediaan Anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan Program Kegiatan	1 Kurangnya SDM dan Koordinasi antar Bidang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada dokumen kegiatan
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Dedikasi dan Tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas 2 Manajerial yang baik dalam mendukung pencapaian target kinerja dan realisasi APBD	1 Armada Pengangkut Sampah perlu ditambah,karena armada yang sebelumnya sudah tidak layak pakai 2 Masih kurangnya SDM Pegawai yang memahami pengaplikasian pengelolaan keuangan (SIMDA Daerah) 3 Peralatan dan Mesin untuk Penataan Taman Masih Kurang 4 Ternak yang masih berkeliaraan di tiap sudut Kota 5 Peralatan kerja yang secara umum kurang memadai
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1 Manajemen pengelolaan Program/Kegiatan disesuaikan dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan 2 Penerapan Aplikasi yang memadai dan efisien	1 Terlambatnya informasi dari pusat terhadap petunjuk pelaksanaan dan Penggunaan DAK fisik dan BOKB 2 Ketidaksesuaian Rekening Pemerintah Daerah terhadap alokasi dana DAK 3 Kurangnya Dana UP yang berbanding terbalik terhadap efisiensi penggunaan dan DAK yang signifikan sekitar 120%
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 Peran dan Dukungan perangkat organisasi yang cukup tinggi 2 Kelengkapan peralatan kantor yang memadai sehingga mendukung kelancaran setiap kegiatan;	1 Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan dalam pencapaian target.
10	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1 Adanya sumber PAD yang terdapat pada Pasar ; 2 Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait Pemungutan PAD.	1 Banyaknya tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1 Perencanaan dan target awal tertuang jelas dan terarah 2 Kinerja bidang pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran bagus dan tepat waktu 3 Pelaksanaan kegiatan tepat waktu	1 Sarana ruang kerja yang kurang kondusif 2 Kurangnya sarana dan Prasarana Kearsipan Sub Bagian Keuangan untuk pengarsipan SPJ

No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
		dan sesuai perencanaan	
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1 Perencanaan program/kegiatan terstruktur; 2 Sistem kinerja dan pengendaliannya yang baik; 3 Administratif, penatausahaan yang memadai; 4 Pemahaman akan fungsi dan tugas.	1 Kegiatan yang tidak mampu diprediksi; 2 Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu program dan kegiatan.
13	DINAS PARIWISATA	1 Kelengkapan peralatan kantor yang memadai sehingga mendukung kelancaran setiap kegiatan; 2 Jaringan internet yang mendukung; 3 SDM pada sekretariat yang bisa diandalkan sehingga mempermudah dalam merealisasikan setiap kegiatan yang telah direncanakan.	1 Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan anggaran pada bulan Oktober 2019; 2 Kurangnya kontroling dalam melengkapi Surat Pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilaksanakan; dan 3 Masih adanya ego sektoral bidang.
14	SEKRETARIAT DAERAH	1 Koordinasi dan Komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan serta antar unit bagian dalam melaksanakan tugas; 2 Adanya profesionalisme ASN yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; 3 Profisialnya tenaga hanorer dan kontrak dalam menyikapi tugas dan tanggung jawab; dan 4 Fasilitas peralatan kerja yang memadai dalam mendukung pekerjaan	1 Proses administrasi keuangan yang belum maksimal karena keterbatasan sumber daya aparatur pengelola keuangan serta penguasaan terhadap regulasi dan teknis pengelolaan keuangan; 2 Belum optimalnya SDM dalam megoperasikan teknologi informasi; 3 Pemeliharaan barang inventaris dan fasilitas kantor lainnya belum dilaksanakan secara berkala dan teratur.
15	SEKRETARIAT DPRD	1 Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD sesuai Program Kerja Tahunan dan Profram Sekretariat DPRD; dan 2 Terlaksananya Kegiatan sesuai dengan Jadwal.	1 Program yang sudah di tentukan maupun yang dijadwalkan berbenturan dengan alokasi waktu.
16	KECAMATAN RABA	1 Tersedianya Anggaran yang cukup sehingga belanja dapat dilakukan secara maksimal	1 Terlalu seringnya perubahan anggaran / reconfusing 2 Adanya covid 19 sehingga pengajuan anggaran terhambat
17	INSPEKTORAT	1 Sistem administrasi, penatausahaan dan pertanggungjawaban terintegrasi; 2 Program dan Kegiatan Balance dan Tepat Waktu; 3 Sistem kerja antar lini terkendali; 4 Paham akan Tugas dan Fungsi Setiap Aparatur.	Beberapa kegiatan tidak berjalan dengan baik sesuai waktu dan pelaksanaanya karena beberapa faktor yang salah satunya kegiatan penanganan atas aduan masyarakat; 1 Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.
18	BAPPEDA DAN LITBANG	1 Pengoptimalan anggaran berbasis kinerja	1 Kurang cermat penganggaran dalam pengalokasian pada belanja rutin seperti belanja telepon, belanja pajak kendaraan bermotor
19	BPKAD	1 Penerapan aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan SIMDA Pendapatan Terintegrasi satu sama lain; 2 Penerapan SIM Gaji yang maksimal;	1 Kurangnya komitmen pada beberapa perangkat daerah dalam memenuhi standar kelengkapan pengajuan pencairan dana; 2 Tempat maupun ruang kerja yang

No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
		3 Komitmen Aparatur dalam Menyelesaikan Pekerjaan 4 Kerjasama dan Kolaborasi antar Bidang yang sistematis dan lancar; 5 Regulasi dan SOP Tersedia dalam mendukung Tupoksi Kerja	kurang memadai; 3 Kurangnya SDM untuk optimalisasi program dan kegiatan; 4 Kurangnya tenaga IT untuk mengoptimalkan aplikasi berbasis web.
20	KECAMATAN RASANA BARAT	1 Tersedianya aparatur yang melaksanakan kegiatan; 2 Terlaksananya kegiatan yang direncanakan; 3 Peran serta masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan	1 Kualitas SDM masih rendah; 2 Anggaran yang tersedia masih belum memadai
21	DINAS TENAGA KERJA	1 Personal team, semua pegawai bisa saling berkoordinasi dan mendukung satu sama lain dengan tujuan agar capaian terget kinerja dinas dapat dilaksanakan secara maksimal dan bertanggungjawab; 2 Sarana dan Prasarana, Dapat melaksanakan tugas dan fungsinya karena didukung oleh sarana prasarana yang memadai; 3 Anggaran, untuk mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan perlu anggaran yang cukup.	1 Jumlah pegawai yang kurang sehingga dalam pelaksanaan tupoksi dan pelayanan terhadap masyarakat mengalami hambatan
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang dapat menunjang pencapaian terget kinerja	1 Perencanaan Anggaran yang tidak sinkron dengan kebutuhan dinas atau kantor 2 Terbatasnya tenaga yang memahami pengelola keuangan dinas
23	DINAS SOSIAL	1 Lengkapya fasilitas peralatan kantor 2 Dukungan Sistem Aplikasi yang sangat membantu dalam pengolahan data keuangan	1 Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan anggaran pada bulan Oktober 2022; 2 Terbatasnya tenaga yang memahami pengelola keuangan dinas; 3 Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal
24	KECAMATAN ASAKOTA	1 Terlibatnya semua unsur dalam kecamatan asakota sehingga dengan mudah dalam mencapai semua target	1 Terbatasnya tenaga yang memahami pengelolaan keuangan terutama dalam pengelolaan anggaran

3.2.2 Penjelasan Terkait Capaian Target Belanja

Pencapaian target belanja dapat ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima per SKPD
Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2021

No.	SKPD	Tahun 2022 (Rp)		%	Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	197.466.790.153,00	192.039.092.308,00	97,25	189.769.427.251,49
2	Dinas Kesehatan	98.201.109.808,00	90.499.856.864,20	92,16	120.741.822.133,00
3	RSUD Kota Bima	48.960.373.096,00	45.375.066.931,00	92,68	0,00

No.	SKPD	Tahun 2022 (Rp)		%	Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.677.095.802,00	80.826.878.268,00	85,37	62.085.318.689,20
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	12.888.161.821,00	11.830.199.286,00	91,79	9.467.183.456,00
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	8.064.796.370,00	7.775.878.915,00	96,42	7.959.113.776,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.907.824.818,00	4.787.698.448,00	97,55	3.864.858.086,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.763.970.413,00	4.622.397.252,00	97,03	4.451.016.324,00
9	Dinas Sosial	11.313.808.925,00	10.542.000.188,00	93,18	4.950.296.618,00
10	Dinas Tenaga Kerja	5.569.480.417,00	5.488.613.024,81	98,55	3.920.688.657,00
11	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.879.502.190,00	5.562.324.257,00	70,59	5.505.386.721,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	3.930.109.483,00	3.849.221.184,00	97,94	3.685.657.232,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	19.608.820.807,00	18.696.866.781,16	95,35	17.367.521.501,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.838.463.998,00	5.606.515.988,00	96,03	4.873.300.984,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.911.127.029,00	7.711.788.573,00	97,48	6.509.687.272,00
16	Dinas Perhubungan	12.912.388.840,00	12.628.389.380,00	97,80	11.573.762.496,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.832.283.311,00	7.661.960.545,00	97,83	8.315.823.608,00
18	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	8.275.310.045,00	7.376.038.652,00	89,13	7.910.763.833,18
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.950.264.438,00	3.792.740.156,00	96,01	3.534.599.593,00
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.408.022.060,00	5.336.193.214,00	98,67	15.154.802.319,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.621.221.283,00	5.253.834.812,00	93,46	5.872.147.312,00
22	Dinas Pariwisata	11.566.522.938,00	11.297.762.990,00	97,68	9.473.989.591,00
23	Dinas Pertanian	12.844.908.059,00	12.661.123.910,00	98,57	12.632.868.186,00
24	Sekretariat Daerah	64.457.792.849,00	52.703.815.843,56	81,76	67.066.968.351,55
25	Inspektorat	8.121.637.471,00	8.041.090.868,00	99,01	25.944.494.677,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	7.022.738.390,00	6.695.345.281,00	95,34	9.417.624.024,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	20.020.478.889,00	17.300.669.604,00	86,41	11.188.098.248,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.358.757.275,00	6.242.265.825,00	98,17	9.956.524.212,00
29	Sekretariat DPRD	27.988.248.484,00	26.521.250.423,00	94,76	14.791.121.314,00
30	Kecamatan RasanaE Barat	10.083.490.453,00	9.944.919.563,00	98,63	17.567.800.298,00
31	Kecamatan RasanaE Timur	11.460.213.564,00	11.309.927.200,00	98,69	7.341.721.190,00
32	Kecamatan Asakota	10.571.358.761,00	10.319.865.721,00	97,62	5.823.356.297,00
33	Kecamatan Mpunda	14.983.573.822,00	14.693.237.521,00	98,06	17.238.465.970,00
34	Kecamatan Raba	17.510.785.669,00	17.267.282.065,00	98,61	6.210.727.211,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.127.704.884,00	6.933.944.463,00	97,28	4.533.215.855,00
JUMLAH		806.099.136.615,00	749.196.056.304,73	92,94	716.700.153.286,42

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2022 dan 2021, diolah

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Kota Bima Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin-Buletin Teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bima, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kota Bima sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Kesiambungan Entitas, Pemerintah Kota Bima sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. Keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah.

Periode akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kota Bima secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 ini disusun berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bima sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan data-data keuangan lainnya.

SKPKD merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima. SKPD merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kota Bima dan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. SKPD tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Kota Bima;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan;
7. Dinas Perhubungan;
8. Dinas Lingkungan Hidup;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Dinas Sosial;
13. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
14. Dinas Parawisata, Pemuda, dan Olahraga;
15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
16. Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Sekretariat Daerah;
18. Sekretariat DPRD;
19. Inspektorat;
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Dinas Ketahanan Pangan;
25. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
26. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
27. Dinas Pertanian;
28. Dinas Tenaga Kerja;
29. Dinas Kelautan dan Perikanan;
30. Kecamatan Rasanae Barat;
31. Kecamatan Rasanae Timur;
32. Kecamatan Asakota;
33. Kecamatan Mpunda;
34. Kecamatan Raba;
35. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO dan Beban dalam Laporan Operasional (LO) dan Pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas berarti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah.

Basis akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca, LO, dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh

pada keuangan SKPD atau pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan bahwa pendapatan dalam LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Salah satu asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), disamping kemandirian entitas dan kesinambungan entitas. Hal ini berarti laporan keuangan Pemerintah Kota Bima harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

Pengukuran berhubungan dengan pengakuan suatu kejadian dan jumlah nilai yang dicatat dalam catatan akuntansi dan disajikan dalam laporan keuangan sehubungan dengan kejadian tersebut. Basis pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yaitu sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Pengukuran pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu sebesar kas yang diterima di Kas Daerah atas pendapatan atau penerimaan pembiayaan tersebut.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.2 Pengukuran Pos-Pos Laporan Operasional

A. Pengukuran Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO yang ditetapkan secara *self assessment system* dicatat sebesar nilai pajak terutang yang dicantumkan dalam rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) serta Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
2. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak/Retribusi (SKP/SKR) Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKP/SKR Daerah mengacu pada Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota Bima;
3. Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LO sebesar hak Pemerintah Kota Bima;
4. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil "dijual", bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut;
5. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO Bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
6. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran

- harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
7. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
 8. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
 9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
 10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
 11. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- B. Pengukuran beban yaitu sebesar harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Apabila tidak ada harga perolehan, maka beban diukur berdasarkan taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

4.3.3 Pengukuran Pos-Pos Neraca

- A. Pengukuran Aset adalah sebagai berikut.
1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
 2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar:
 - a. Nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar untuk investasi yang memiliki pasar aktif. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya;
 - b. Nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar, apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan. Apabila tidak ada nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
 - c. Nilai nominal, apabila Investasi Jangka Pendek dalam bentuk bukan surat berharga.
 3. Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
 4. Persediaan dicatat sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 5. Investasi jangka panjang dicatat sebesar:

- a. Nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar untuk investasi yang memiliki pasar aktif. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya;
 - b. Biaya perolehan, apabila investasi jangka panjang yang bersifat permanen;
 - c. Nilai perolehan, apabila investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan;
 - d. Nilai bersih yang dapat direalisasikan, apabila investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian;
 - e. Biaya pembangunan, apabila investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah; dan
 - f. Harga perolehan, apabila investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah, atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.
6. Investasi Non Permanen Dana Bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir;
 7. Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
 8. Aset Lainnya dicatat sebesar:
 - a. Nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan untuk piutang dari tagihan penjualan angsuran. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - b. Nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak untuk Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi;
 - c. Harga perolehan untuk aset tak berwujud; dan
 - d. Nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian untuk aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan dan nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan untuk aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya.
 - B. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - C. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1 Pendapatan-LRA

- A. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
- B. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi atas Pendapatan-LRA dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar;
- C. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan;
- D. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - 1. Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan SKPD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA;
 - 2. Diterima di SKPD;
 - 3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD;
 - 4. Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
 - 5. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di SKPD pemungut dan penyetor;
 - 6. Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari tiga bulan berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga;
 - 7. Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3-12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga;
 - 8. Bila terdapat aset tetap/lainnya yang dijual oleh Pemerintah Kota Bima, maka atas hasil penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi, diakui Pendapatan-LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang disepakati dengan Pemerintah Kota Bima;
 - 9. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA;
 - 10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama;

11. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang SAL pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi (pengembalian kelebihan bayar) pendapatan tersebut oleh Pemerintah Kota Bima dilakukan dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga;
 12. Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 13. Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- E. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

4.4.2 Belanja

- A. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- B. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- C. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- D. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
- E. Belanja daerah diklasifikasikan menurut Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran dan Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas;
- F. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci terdapat dalam Bagan Akun Standar;
- G. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
- H. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama;
- I. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA);
- J. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;

- K. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga serta dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- L. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu;
- M. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
1. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
 3. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 4. Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan;
- N. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.4.3 Pembiayaan

- A. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
- B. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci lagi menurut sumber pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis pengeluaran pembiayaan;
- C. Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah, dan penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah;
- D. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah;
- E. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- F. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SiLPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD;
- G. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;

- H. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, dan penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
- I. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang;
- J. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- K. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- L. Pembiayaan disajikan dalam LRA sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima untuk memanfaatkan surplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit anggaran.

4.4.4 Pendapatan-LO

- A. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- B. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
- C. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum;
- D. Pendapatan-LO pada PPKD meliputi: pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- E. Pendapatan-LO pada SKPD meliputi: PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan;
 - 1. PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima yang disahkan dengan penetapan;
 - 2. PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Kota Bima karena proses bisnis yang tidak memungkinkan;
- F. Pendapatan-LO disajikan sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan;

4.4.5 Beban

- A. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- B. Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- C. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Bima dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
- D. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- E. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- F. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Bunga, dan Beban Transfer.

4.4.6 Aset/Aktiva

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.4.6.1. Aset Lancar

1. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
2. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3-12 bulan, Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

3. Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
4. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) tanggal perolehannya.
5. Kas diakui pada saat diterima oleh BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas yang dikeluarkan untuk belanja oleh BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sedangkan bagi SKPD diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK SKPD.
6. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3-12 bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.
7. Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu 3-12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
8. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Bima dan/atau hak Pemerintah Kota Bima yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa, perjanjian, terbitnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi daerah, atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
9. Piutang terdiri atas: piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.
10. Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
11. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
12. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
13. Pengukuran Berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
14. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
15. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

16. Persediaan dapat terdiri atas: alat tulis kantor, alat listrik, material/bahan, benda pos, bahan bakar, dan bahan makanan pokok.
17. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

4.4.6.2. Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi jangka panjang terdiri dari:
 - a. Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa pembelian SUN dengan jatuh tempo lebih dari 12 bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, modal kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat (dana bergulir), dan investasi non permanen lainnya.
 - b. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain penambahan modal pada Koperasi Pegawai Negeri.
3. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria berikut, yaitu manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.
4. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.
5. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode biaya dengan kriteria kepemilikan kurang dari 20%; metode ekuitas dengan kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%, metode nilai bersih yang direalisasikan dengan kriteria kepemilikan bersifat non permanen.
6. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

7. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam LRA maupun LAK.
8. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen - Dana Bergulir.
9. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

4.4.6.3. Aset Tetap

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bima atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.
3. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
4. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
5. Peralatan dan Mesin, meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan.
6. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum dan rambu-rambu.
7. Jalan Irigasi dan Jaringan, meliputi jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
8. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
9. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses

perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

10. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
11. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.
12. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
13. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
14. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya, di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
15. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.4.6.4. Dana Cadangan

1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.
2. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

4.4.6.5. Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
2. Aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.
3. Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak untuk menagih atas penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.

4. Piutang dari tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersih.
5. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
6. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
7. Piutang dari TGR diukur sebesar nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
8. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
9. ATB diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
10. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi.
11. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.
12. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.
13. Jumlah yang dapat diamortisasi dari ATB harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat ATB adalah 20 tahun sejak perolehan ATB.
14. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. ATB dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.
15. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
16. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

17. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama bangun serah guna (BSG), diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
18. Aset Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar.
19. Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
20. Pengakuan Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.4.7 Kewajiban

- A. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- B. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- C. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- D. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
- E. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- F. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- G. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- H. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4.8 Ekuitas

- A. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bima pada tanggal laporan.
- B. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang diperoleh dari LPE dan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.

- C. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke Neraca. Sedangkan ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan SKPD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasi.
- D. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Arus Kas.

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bima yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

5.1.1. PENDAPATAN

Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

5.1.1	Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp) 786.130.956.782,00	Realisasi 2022 (Rp) 805.811.256.060,22	Realisasi 2021 (Rp) 729.687.511.750,67
--------------	-------------------	--	---	---

Pendapatan Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp786.130.956.782,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 236) dan terealisasi senilai Rp805.811.256.060,22 atau 102,50%. Jika dibandingkan realisasi pendapatan Tahun 2021 senilai Rp 729.687.511.750,67 maka realisasi pendapatan Tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp76.123.744.309,55 atau 10,43%.

Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana yang terdapat pada ikhtisar dibawah ini :

Tabel 5.1.1
Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	PENDAPATAN				
	Pendapatan Asli Daerah				
1	Pendapatan Pajak Daerah	24.368.139.721,00	21.355.298.265,81	87,64	19.507.819.782,88
2	Pendapatan Retribusi Daerah	26.296.337.440,00	19.710.293.760,28	74,95	15.196.689.454,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.284.388.412,00	1.545.139.285,00	120,30	1.284.388.411,79
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.138.801.485,00	14.748.737.697,13	91,39	11.004.619.098,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		68.087.667.058,00	57.359.469.008,22	84,24	46.993.516.746,67
	Pendapatan Transfer				
	Transfer Pemerintah Pusat -				
	Dana Perimbangan				
1	Bagi Hasil Pajak	44.999.362.000,00	69.899.355.791,00	155,33	37.344.039.204,00
2	Dana Alokasi Umum	430.503.529.123,00	430.503.529.123,00	100,00	432.159.814.000,00
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	92.298.823.000,00	89.773.006.178,00	97,26	68.320.563.668,00
4	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	70.055.337.109,00	67.495.307.379,00	96,35	56.185.780.202,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		637.857.051.232,00	657.671.198.471,00	103,11	594.010.197.074,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	27.377.041.000,00	39.108.685.000,00	142,85	30.025.143.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	665.234.092.232,00	696.779.883.471,00	104,74	624.035.340.074,00
	Transfer Pemerintah Propinsi				
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52.309.197.492,00	51.171.903.581,00	97,85	40.727.314.230,00
2	Bantuan Keuangan	500.000.000,00	500.000.000,00	100	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		52.809.197.492,00	51.671.903.581,00	97,85	40.727.314.230,00
Total Pendapatan Transfer		718.043.289.724,00	748.451.787.052,00	104,23	664.762.654.304,00
	Lain-lain Pendapatan yang Sah				
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	17.911.340.000,00
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	20.000.700,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		0,00	0,00	0,00	17.931.340.700,00
TOTAL		786.130.956.782,00	805.811.256.060,22	102,50	729.687.511.750,67

Rekapitulasi Pendapatan Daerah berdasarkan SKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.2
Rekapitulasi Pendapatan Daerah Berdasarkan SKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150.000.000,00	114.000.000,00	76,00	150.000.000,00	144.000.000,00	96,00
2	Dinas Kesehatan	16.530.459.400,00	1.851.800.100,00	11,20	19.375.344.300,00	17.506.127.632,00	90,35
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.309.850.000,00	1.378.436.759,28	105,24	1.300.000.000,00	1.232.749.438,00	94,83

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	291.095.000,00	72,77
5	Dinas Lingkungan Hidup	700.000.000,00	364.200.000,00	52,03	1.250.000.000,00	297.965.000,00	23,84
6	Dinas Perhubungan	1.499.260.000,00	793.548.000,00	52,93	197.284.000,00	187.738.000,00	95,16
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	187.738.000,00	182.710.440,00	97,32	2.805.332.400,00	1.417.779.537,00	50,54
8	Dinas Koperindag	2.977.205.040,00	1.130.823.315,00	37,98	236.000.000,00	131.650.000,00	55,78
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	193.600.000,00	165.250.000,00	85,36	1.517.820.000,00	574.745.000,00	37,87
10	Dinas Pariwisata	1.527.900.000,00	698.861.887,00	45,74	250.000.000,00	207.786.000,00	83,11
11	Dinas Pertanian	260.000.000,00	251.750.750,00	96,83	561.675.000,00	361.970.000,00	64,44
12	Sekretariat Daerah	507.350.000,00	440.380.000,00	86,80	0,00	0,00	0,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	760.237.594.342,00	782.643.984.495,68	102,65	717.361.063.207,00	707.333.906.143,67	98,60
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BLUD RSUD KOTA BIMA	0,00	15.795.510.313,26	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		786.130.956.782,00	805.811.256.060 22	102,50	745.404.518.907,00	729.687.511.750,67	97,89

Sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 188.45/430/500/XI/2021 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang efektif dilaksanakan pada 01 Januari 2022 sehingga Rumah Sakit Umum Kota Bima dapat mengelola Pendapatan dan Belanja secara mandiri. Pendapatan Rumah Sakit Umum Kota Bima pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp15.795.510.313,26, dengan rincian sebagai berikut :

- Retribusi Daerah sebesar Rp11.948.463.950,00
- Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp3.847.046.363,26

5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2022 (Rp) 68.087.667.058,00	Realisasi 2022 (Rp) 57.359.469.008,22	Realisasi 2021 (Rp) 46.993.516.746,67
----------------	-------------------------------	---	--	--

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bima bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan target pada Tahun 2022 senilai Rp68.087.667.058,00 dan terealisasi senilai Rp57.359.469.008,22 atau 84,24%. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 senilai Rp46.993.516.746,67 maka terjadi peningkatan senilai Rp10.365.952.261,55 atau 22,06%.

Tabel 5.1.3
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Pendapatan Asli Daerah				
1	Pendapatan Pajak Daerah	24.368.139.721,00	21.355.298.265,81	87,64	19.507.819.782,88
2	Pendapatan Retribusi Daerah	26.296.337.440,00	19.710.293.760,28	74,95	15.196.689.454,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.284.388.412,00	1.545.139.285,00	120,30	1.284.388.411,79
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.138.801.485,00	14.748.737.697,13	91,34	11.004.619.098,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		68.087.667.058,00	57.359.469.008,22	84,23	46.993.516.746,67

5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		24.368.139.721,00	21.355.298.265,81	19.507.819.782,88

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp24.368.139.721,00 dan terealisasi senilai Rp21.355.298.265,81 atau 87,64%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp19.507.819.782,88 maka realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 menunjukkan peningkatan yaitu senilai Rp1.847.478.482,93 atau 9,47% yang dipengaruhi oleh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral, Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan BPHTB.

Pendapatan Pajak Daerah diperoleh dari :

Tabel 5.1.4
Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Pajak Daerah - LRA	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hotel	736.000.000,00	911.452.444,30	123,84	415.017.422,00
2	Restoran	2.012.886.948,00	2.103.232.173,38	104,49	1.255.900.981,20
3	Hiburan	23.750.000,00	36.169.080,00	152,29	19.426.900,00
4	Reklame	774.440.250,00	489.500.086,50	63,21	567.980.156,75
5	Penerangan Jalan	9.250.000.000,00	9.443.782.515,00	102,09	8.463.177.492,00
6	Pajak Parkir	150.000.000,00	132.915.500,00	88,61	114.736.000,00
7	Air Tanah	54.000.000,00	56.046.006,45	103,79	46.170.792,18
8	Sarang Burung Walet	30.000.000,00	13.500.000,00	45,00	11.500.000,00
9	Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	350.043.239,18	70,01	207.879.473,75
10	Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.300.000.000,00	3.543.193.929,00	66,85	3.633.609.655,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.537.062.523,00	4.275.463.292,00	77,22	4.772.420.910,00
Jumlah		24.368.139.721,00	21.355.298.265,81	87,64	19.507.819.782,88

Secara rinci anggaran dan realisasi pajak daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.1.5
Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Pajak Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realiasi 2022 (Rp)	%	Realiasi 2021 (Rp)
Pajak Hotel					
1	Hotel	641.800.000,00	873.240.494,30	136,06	377.505.977,00
2	Rumah Penginapan dan Sejenisnya	33.600.000,00	35.993.450,00	107,12	29.427.975,00
3	Rumah Kos	60.600.000,00	2.218.500,00	3,66	8.083.470,00
Jumlah		736.000.000,00	911.452.444,30	123,84	415.017.422,00
Pajak Restoran					

No	Pajak Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realiasi 2022 (Rp)	%	Realiasi 2021 (Rp)
1	Restoran dan Sejenisnya	1.050.000.000,00	1.192.303.990,00	113,55	569.871.164,00
2	Rumah Makan dan Sejenisnya	400.000.000,00	178.489.112,00	44,62	165.634.014,00
3	Kafetaria dan Sejenisnya	60.000.000,00	155.637.536,00	259,40	90.469.676,20
4	Kantin dan Sejenisnya	2.886.948,00	42.244.835,00	1463,30	8.741.706,00
5	Warung dan Sejenisnya	250.000.000,00	244.099.078,98	97,64	177.019.248,00
6	Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	250.000.000,00	290.457.621,40	116,18	244.165.173,00
Jumlah		2.012.886.948,00	2.103.232.173,38	104,49	1.255.900.981,20
Pajak Hiburan					
1	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	14.500.000,00	5.641.080,00	38,90	5.486.800,00
2	Permainan Bilyar, Golf, Bowling	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	7.675.000,00	30.528.000,00	397,76	13.940.100,00
4	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan pusat kebugaran (fitnes Center)	525.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		23.750.000,00	36.169.080,00	152,29	19.426.900,00
Pajak Reklame					
1	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	600.000.000,00	399.375.631,50	66,56	412.859.531,75
2	Reklame Kain	71.440.250,00	76.733.000,00	107,41	143.762.250,00
3	Reklame Berjalan	103.000.000,00	13.391.455,00	13,00	11.358.375,00
Jumlah		774.440.250,00	489.500.086,50	63,21	567.980.156,75
Pajak Penerangan Jalan					
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	9.250.000.000,00	9.443.782.515,00	102,09	8.463.177.492,00
Jumlah		9.250.000.000,00	9.443.782.515,00	102,09	8.463.177.492,00
Pajak Parkir					
1	Pajak Parkir	150.000.000,00	132.915.500,00	88,61	114.736.000,00
Jumlah		150.000.000,00	132.915.500,00	88,61	114.736.000,00
Pajak Air Tanah					
1	Air Tanah	54.000.000,00	56.046.006,45	103,79	46.170.792,18
Jumlah		54.000.000,00	56.046.006,45	103,79	46.170.792,18
Pajak Sarang Burung Walet					
1	Sarang Burung Walet	30.000.000,00	13.500.000,00	45,00	11.500.000,00
Jumlah		30.000.000,00	13.500.000,00	45,00	11.500.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
1	Pasir dan kerikil	266.380.000,00	134.597.875,11	50,53	86.731.362,50
2	Tanah Liat	21.800.000,00	5.941.457,79	27,25	7.503.875,00
3	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	211.820.000,00	209.503.906,28	98,91	113.644.236,25
Jumlah		500.000.000,00	350.043.239,18	70,01	207.879.473,75
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					
1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.300.000.000,00	3.543.193.929,00	66,85	3.633.609.655,00
Jumlah		5.300.000.000,00	3.543.193.929,00	66,85	3.633.609.655,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan					

No	Pajak Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Bangunan					
1	BPHTB – Pemindahan Hak	5.537.062.523,00	4.275.463.292,00	77,22	4.772.420.910,00
Jumlah		5.537.062.523,00	4.275.463.292,00	77,22	4.772.420.910,00
Total Pajak Daerah		24.368.139.721,00	21.355.298.265,81	87,64	19.507.819.782,88

5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		26.296.337.440,00	19.710.293.760,28	15.196.689.454,00

Retribusi Daerah Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp26.296.337.440,00 dan terealisasi senilai Rp19.710.293.760,28 atau 74,95%. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 senilai Rp15.196.689.454,00 maka realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 menunjukkan kenaikan senilai Rp4.513.604.306,28 atau 29,70% yang dipengaruhi oleh Retribusi Jasa Umum.

Untuk Pendapatan Retribusi tersebut dapat dirinci secara kelompok sebagai berikut :

Tabel 5.1.6
Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No.	Retribusi Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	20.306.992.400,00	15.907.342.800,00	78,33	11.553.009.479,00
2	Retribusi Jasa Usaha	4.889.345.040,00	2.736.604.201,00	55,97	2.694.455.537,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.100.000.000,00	1.066.346.759,28	96,94	949.224.438,00
Jumlah Retribusi Daerah		26.296.337.440,00	19.710.293.760,28	74,95	15.196.689.454,00

Secara rinci Retribusi Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.1.7
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No.	Retribusi Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Retribusi Jasa Umum					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan				
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.281.223.400,00	1.700.967.400,00	74,56	1.799.074.600,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	12.857.236.000,00	11.928.213.950,00	92,77	7.984.098.079,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya Yang Sejenis	1.515.775.000,00	340.923.450,00	22,49	323.439.800,00
Jumlah		16.654.234.400,00	13.970.104.800,00	83,88	10.106.612.479,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan				

No.	Retribusi Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	1.328.280.000,00	509.321.000,00	38,34	869.616.000,00
	Jumlah	1.328.280.000,00	509.321.000,00	38,34	869.616.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	685.050.000,00	315.780.000,00	46,10	227.542.000,00
	Jumlah	685.050.000,00	315.780.000,00	46,10	227.542.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar				
	Retribusi Pelataran	789.090.000,00	487.003.000,00	61,72	78.751.000,00
	Retribusi Los	12.600.000,00	13.950.000,00	110,71	11.050.000,00
	Jumlah	801.690.000,00	500.953.000,00	62,49	89.801.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	650.000.000,00	429.810.000,00	66,12	24.475.000,00
	Jumlah	650.000.000,00	429.810.000,00	66,12	24.475.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				
	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	47.225.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	47.225.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	187.738.000,00	181.374.000,00	96,61	187.738.000,00
	Jumlah	187.738.000,00	181.374.000,00	96,61	187.738.000,00
	Jumlah Retribusi Jasa Umum	20.306.992.400,00	15.907.342.800,00	78,33	11.553.009.479,00
	Retribusi Jasa Usaha				
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	319.550.000,00	322.330.000,00	100,87	438.670.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah	75.710.000,00	21.140.000,00	27,92	62.220.000,00
	Retribusi Penyewaan Bangunan	662.400.000,00	546.000.000,00	82,43	72.000.000,00
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	50.000.000,00	50.745.000,00	101,49	0,00
	Retribusi Pemakaian Ruangan	50.000.000,00	0,00	0,00	144.000.000,00
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	258.000.000,00	237.675.000,00	92,12	243.015.000,00
	Retribusi Pemakaian Alat	302.450.000,00	290.645.000,00	96,10	379.950.000,00
	Jumlah	1.718.110.000,00	1.468.535.000,00	85,47	1.339.855.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	1.244.570.040,00	452.400.314,00	36,35	720.099.537,00

No.	Retribusi Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Jumlah	1.244.570.040,00	452.400.314,00	36,35	720.099.537,00
3	Retribusi Terminal				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	10.000.000,00	8.730.000,00	87,30	11.350.000,00
	Jumlah	10.000.000,00	8.730.000,00	87,30	11.350.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir				
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	624.210.000,00	216.983.500,00	34,76	206.356.000,00
	Jumlah	624.210.000,00	216.983.500,00	34,76	206.356.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan				
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	93.625.000,00	47.710.000,00	50,96	23.400.000,00
	Jumlah	93.625.000,00	47.710.000,00	50,96	23.400.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.198.830.000,00	542.245.387,00	45,23	393.395.000,00
	Jumlah	1.198.830.000,00	542.245.387,00	45,23	393.395.000,00
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	4.889.345.040,00	2.736.604.201,00	55,97	2.694.455.537,00
	Retribusi Perizinan Tertentu				
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				
	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	1.051.296.759,28	105,13	932.224.438,00
	Jumlah	1.000.000.000,00	1.051.296.759,28	105,13	932.224.438,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	100.000.000,00	15.050.000,00	15,05	17.000.000,00
	Jumlah	100.000.000,00	15.050.000,00	15,05	17.000.000,00
	Jumlah Retribusi Perijinan Tertentu	1.100.000.000,00	1.066.346.759,28	96,94	949.224.438,00
	Jumlah Retribusi Daerah	26.296.337.440,00	19.710.293.760,28	74,95	15.196.689.454,00

5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		1.284.388.412,00	1.545.139.285,00	1.284.388.411,79

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD. Pada Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.284.388.412,00 dan terealisasi senilai Rp1.545.139.285,00 atau 120,30%. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 senilai Rp1.284.388.411,79 maka realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp260.750.873,21 atau 20,30%.

Rincian Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut :

Tabel 5.1.8
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	BUMD	Anggaran 2022 (Rp)	Realiasi 2022 (Rp)	%	Realiasi 2021 (Rp)
1	PT. Bank NTB	1.069.057.966,00	1.364.656.675,00	127,65	1.069.057.966,00
2	PT Jamkrida NTB Bersaing	23.932.218,00	25.426.352,00	106,24	23.932.217,79
3	PD. BPR NTB Bima	180.014.359,00	155.056.258,00	86,135	180.014.359,00
4	KPN Sabua Ade	11.383.869,00	0,00	0,00	11.383.869,00
Jumlah		1.284.388.412,00	1.545.139.285,00	120,30	1.284.388.411,79

5.1.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		16.138.801.485,00	14.748.737.697,13	11.004.619.098,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp16.138.801.485,00 dan terealisasi senilai Rp14.748.737.697,13 atau 91,39%. Jika dibandingkan Realisasi Tahun 2021 senilai Rp11.004.619.098 maka realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan senilai Rp3.744.118.599,13 atau 34,02%.

Tabel 5.1.9
Obyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2022 dan tahun 2021

No	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	987.400.000,00	45.064.900,00	4,56	21.434.000,00
2	Penerimaan jasa giro	831.942.262,00	626.434.851,79	75,30	688.317.761,77
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.365.000,00	110.001,00	2,05	0,00
3	Penerimaan bunga deposito	1.395.241.904,00	1.699.870.625,01	121,83	1.737.013.060,61
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	3.351.340.359,00	406.652.754,32	12,13	789.079.651,20
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	25.536.962,75	0,00	68.896.386,00
6	Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	27.868.902,00	296.382.068,00	1.063,00	27.868.961,50
7	Pendapatan denda pajak	1.000.000,00	170.251,00	17,02	279.305,92
8	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	1.336.440,00	0,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	35.219.058,00	5.063.080,00	14,37	98.878.818,00
10	Lain-Lain PAD yang Sah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan BLUD	0,00	3.847.046.363,26	0,00	0,00
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.503.424.000,00	7.795.069.400,00	82,02	7.572.851.153,00
Jumlah		16.138.801.485,00	14.748.737.697,13	91,39	11.004.619.098,00

Rincian Obyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.1.10
Rincian Obyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 dan tahun 2021

No	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Anggaran 2022 (Rp)	Realiasi 2022 (Rp)	%	Realiasi 2021 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan					
1	Penjualan Peralatan/dan Mesin Hasil Penjualan Alat Angkutan	482.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Penjualan Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Penjualan Aset Tetap Lainnya Penjualan Biota Perairan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	40.064.900,00	0,00	21.434.000,00
Jumlah		987.400.000,00	45.064.900,00	4,56	21.434.000,00
Penerimaan Jasa Giro					
1	Jasa Giro Kas Daerah	800.000.000,00	597.948.766,56	74,74	660.328.488,75
2	Jasa Giro Pemegang Kas	31.942.262,00	28.486.085,23	89,18	27.989.273,02
Jumlah		831.942.262,00	626.434.851,79	75,30	688.317.761,77
Penerimaan Bunga Deposito					
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.395.241.904,00	1.699.870.625,01	121,83	1.737.013.060,61
Jumlah		1.395.241.904,00	1.699.870.625,01	121,83	1.737.013.060,61
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)					
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan/Kerugian Uang	0,00	243.285.542,00	0,00	65.322.980,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan/Kerugian Barang	3.351.340.359,00	163.367.212,32	4,87	723.756.671,20
Jumlah		3.351.340.359,00	406.652.754,32	12,13	789.079.651,20
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain					
1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	25.536.962,75	0,00	68.896.386,00
Jumlah		0,00	25.536.962,75	0,00	68.896.386,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan					
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	27.868.902,00	296.382.068,00	1.063,48	27.868.961,50
Jumlah		27.868.902,00	296.382.068,00	1.063,48	27.868.961,50
Pendapatan Denda Pajak					
1	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.000.000,00	170.251,00	17,03	279.305,92
Jumlah		1.000.000,00	170.251,00	17,03	279.305,92
Pendapatan Denda Retribusi					
1	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	1.336.440,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	1.336.440,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian					

No	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Anggaran 2022 (Rp)	Realiasi 2022 (Rp)	%	Realiasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	35.219.058,00	5.063.080,00	14,38	55.126.218,00
2	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	43.752.600,00
Jumlah		35.219.058,00	5.063.080,00	14,38	98.878.818,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat					
1	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa/Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	5.365.000,00	110.001,00	2,05	0,00
Jumlah		5.365.000,00	110.001,00	2,05	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN					
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.503.424.000,00	7.795.069.400,00	82,02	7.572.851.153,00
Jumlah		9.503.424.000,00	7.795.069.400,00	82,02	7.572.851.153,00
Pendapatan BLUD					
1	Pendapatan BLUD	0,00	3.847.046.363,26	0,00	0,00
Jumlah		0,00	3.847.046.363,26	0,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		16.138.801.485,00	14.748.737.697,13	91,39	11.004.619.098,00

Penerimaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan yang terdapat pada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP di tujuh Puskesmas Kota Bima Tahun 2022 sebesar Rp7.795.069.400,00 terdiri dari :

Tabel 5.1.11

Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Kota Bima Tahun 2022 dan 2021

No	Puskesmas	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	PKM Mpunda	1.875.264.000,00	1.746.675.899,00
2	PKM Rasanae Timur	661.329.000,00	730.217.100,00
3	PKM Paruga	1.443.774.900,00	1.335.810.336,00
4	PKM Penanae	1.755.236.700,00	1.775.705.699,00
5	PKM Kolo	312.010.700,00	342.821.986,00
6	PKM Kumbe	344.672.100,00	342.679.554,00
7	PKM Jatibaru	1.402.782.000,00	1.298.940.579,00
Jumlah		7.795.069.400,00	7.572.851.153,00

5.1.1.2	Pendapatan Transfer	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		718.043.289.724,00	748.451.787.052,00	664.762.654.304,00

Pendapatan Transfer Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp718.043.289.724,00 dan terealisasi senilai Rp748.451.787.052,00 atau 104,23%. Realisasi Tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp83.689.132.748,00 atau 12,59% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp664.762.654.304,00.

Pendapatan Dana Transfer diperoleh dari :

Tabel 5.1.12
Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Pendapatan Transfer	Anggaran 2022 (Rp)	Realiasi 2022 (Rp)	%	Realiasi 2021 (Rp)
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				
1	Dana Perimbangan	637.857.051.232,00	657.671.198.471,00	103,11	594.010.197.074,00
2	Dana Insentif Daerah	27.377.041.000,00	39.108.685.000,00	142,85	30.025.143.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	665.234.092.232,00	696.779.883.471,00	104,74	624.035.340.074,00
	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52.309.197.492,00	51.171.903.581,00	97,83	40.727.314.230,00
2	Bantuan Keuangan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Antar Daerah	52.809.197.492,00	51.671.903.581,00	97,85	40.727.314.230,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	718.043.289.724,00	748.451.787.052,00	104,23	664.762.654.304,00

5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		665.234.092.232,00	696.779.883.471,00	624.035.340.074,00

Pendapatan Transfer Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp665.234.092.232,00 dan terealisasi senilai Rp696.779.883.471,00 atau 104,74%. Realisasi Tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp 72.744.543.397,00 atau 11,66% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp624.035.340.074,00.

5.1.1.2.1.1	Dana Perimbangan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		637.857.051.232,00	657.671.198.471,00	594.010.197.074,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp637.857.051.232,00 dan terealisasi senilai Rp657.671.198.471,00 atau 103,11%. Realisasi Tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp63.661.001.397,00 atau 10,72% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp594.010.197.074,00.

Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan diperoleh dari :

Tabel 5.1.13
Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	44.999.362.000,00	69.899.355.791,00	155,33	37.344.039.204,00

No.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
2	Dana Alokasi Umum	430.503.529.123,00	430.503.529.123,00	100,00	432.159.814.000,00
3	Dana Alokasi Khusus – Fisik	92.298.823.000,00	89.773.006.178,00	97,26	68.320.563.668,00
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	70.055.337.109,00	67.495.307.379,00	96,35	56.185.780.202,00
Jumlah		637.857.051.232,00	657.671.198.471,00	103,11	594.010.197.074,00

5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	44.999.362.000,00	69.899.355.791,00	37.344.039.204,00

Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp44.999.362.000,00 dan terealisasi senilai Rp69.899.355.791,00 atau 155,33%. Realisasi Tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp32.555.316.587,00 atau 87,18% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp37.344.039.204,00

Secara rincian obyek Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari :

Tabel 5.1.14
Rincian Obyek Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan	4.490.928.000,00	5.701.935.675,00	126,97	5.727.066.197,00
2	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDPN	7.543.655.000,00	7.630.278.551,00	101,15	7.996.600.600,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.640.543.000,00	3.732.305.034,00	102,52	2.488.943.050,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	27.308.452.000,00	50.786.615.092,00	185,97	19.660.036.703,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	57.473.000,00	89.910.439,00	156,44	113.773.504,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.357.619.150,00
Jumlah		44.999.362.000,00	69.899.355.791,00	155,33	37.344.039.204,00

5.1.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	430.503.529.123,00	430.503.529.123,00	432.159.814.000,00

Dana Alokasi Umum Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp430.503.529.123,00 dengan rincian Dana Alokasi Umum sebesar Rp430.503.529.123,00 dan terealisasi sebesar Rp430.503.529.123,00 atau 100,00%.

5.1.1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	Anggaran 2022 (Rp) 92.298.823.000,00	Realisasi 2022 (Rp) 89.773.006.178,00	Realisasi 2021 (Rp) 68.320.563.668,00
---------------	------------------------------------	---	--	--

Dana Alokasi Khusus – Fisik Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp92.298.823.000,00 dan terealisasi senilai Rp89.773.006.178,00 atau 97,26%. Realisasi Tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp21.452.442.510,00 atau 31,40% dibandingkan realisasi Tahun 2021 senilai Rp68.320.563.668,00.

Secara rincian obyek Dana Alokasi Khusus - Fisik terdiri dari :

Tabel 5.1.15
Rincian obyek Dana Alokasi Khusus - Fisik Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Alokasi Khusus - Fisik					
1	DAK Bidang Pendidikan				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.361.204.000,00	1.357.812.000,00	99,75	3.941.447.792,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.300.145.000,00	9.265.464.000,00	99,63	9.309.803.757,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.441.988.000,00	5.397.751.000,00	99,19	3.833.493.774,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	309.888.000,00	304.036.000,00	98,11	9.798.000.000,00
	Jumlah	16.413.225.000,00	16.325.063.000,00	99,46	26.882.745.323,00
2	DAK Bidang Kesehatan				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.171.130.000,00	3.985.566.479,00	95,55	2.920.578.028,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.574.660.000,00	1.554.530.490,00	98,72	1.283.214.195,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	13.586.656.355,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	3.271.497.442,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.987.853.683,00
	Jumlah	5.745.790.000,00	5.540.096.969,00	96,42	24.049.799.703,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	26.080.583.000,00	26.076.988.000,00	99,99	5.885.011.914,00
	Jumlah	26.080.583.000,00	26.076.988.000,00	99,99	5.885.011.914,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	3.523.195.000,00	2.466.236.500,00	70,00	0,00
	Jumlah	3.523.195.000,00	2.466.236.500,00	70,00	0,00
5	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	5.532.365.000,00	5.523.565.000,00	99,84	0,00

No	Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Jumlah		5.532.365.000,00	5.523.565.000,00	99,84	0,00
6	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.746.602.000,00	1.578.947.000,00	90,40	0,00
Jumlah		1.746.602.000,00	1.578.947.000,00	90,40	0,00
7	DAK Penugasan				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	741.271.000,00	733.107.707,00	98,90	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	326.458.000,00	286.884.000,00	87,88	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan	31.809.241.000,00	30.869.455.144,00	97,05	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	380.093.000,00	372.662.858,00	98,05	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.361.623.728,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.030.742.000,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.844.456.000,00
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.115.590.000,00
	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.150.595.000,00
Jumlah		33.257.063.000,00	32.262.109.709,00	97,01	11.503.006.728,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus - Fisik	92.298.823.000,00	89.773.006.178,00	97,26	68.320.563.668,00

5.1.1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		70.055.337.109,00	67.495.307.379,00	56.185.780.202,00

Dana Alokasi Khusus – Non Fisik Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp70.055.337.109,00 dan terealisasi senilai Rp67.495.307.379,00 atau 96,35%. Realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan senilai Rp11.309.527.177,00 atau - 20,13% dibandingkan realisasi Tahun 2021 senilai Rp56.185.780.202,00.

Secara rincian obyek Dana Alokasi Khusus - Non Fisik terdiri dari :

Tabel 5.1.16
Rincian obyek Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik					
1	BOS Reguler	20.069.600.000,00	19.311.779.270,00	96,22	0,00
2	BOS Kinerja	765.000.000,00	685.000.000,00	89,54	892.665.262,00
3	TPG PNSD	35.971.591.975,00	34.424.858.975,00	95,70	42.213.111.000,00
4	Tamsil Guru PNSD	882.750.000,00	1.029.000.000,00	116,57	432.000.000,00
5	BOP PAUD	4.656.600.000,00	4.334.874.000,00	93,09	3.703.500.000,00
6	BOP Pendidikan Kesenjangan	771.100.000,00	771.100.000,00	100,00	923.200.000,00
7	BOKKB BOK	3.117.923.820,00	3.248.199.820,00	104,18	5.073.270.071,00
8	BOKKB Jaminan Persalinan	130.276.000,00	0,00	0,00	0,00
9	BOKKB BOKB	2.089.486.982,00	2.089.486.982,00	100,00	1.264.393.269,00
10	PK2UKM	387.372.856,00	387.372.856,00	100,00	361.347.600,00
11	Fasilitasi Penanaman Modal	397.878.676,00	397.878.676,00	100,00	343.813.000,00
12	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	397.356.800,00	397.356.800,00	100,00	417.230.000,00
13	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	418.400.000,00	418.400.000,00	100,00	561.250.000,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik	70.055.337.109,00	67.495.307.379,00	96,35	56.185.780.202,00

5.1.1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		27.377.041.000,00	39.108.685.000,00	30.025.143.000,00

Dana Insentif Daerah Tahun 2022 merupakan Dana Insentif Daerah yang dianggarkan senilai Rp27.377.041.000,00 dan terealisasi senilai Rp39.108.685.000,00 atau 142,85%. Realisasi Tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp9.083.542.000,00 atau 30,25% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp30.025.143.000,00.

5.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Antar Daerah	Anggaran 2022 (Rp) 52.809.197.492,00	Realisasi 2022 (Rp) 51.671.903.581,00	Realisasi 2021 (Rp) 40.727.314.230,00
------------------	---	---	--	--

Transfer Pemerintah Antar Daerah Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp52.809.197.492,00 dan terealisasi senilai Rp51.671.903.581,00 atau 97,85%. Realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan senilai Rp10.944.589.351,00 atau 26,87% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp40.727.314.230,00.

Secara rinci Transfer Pemerintah Antar Daerah Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.16
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52.309.197.492,00	51.171.903.581,00	97,83	40.727.314.230,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah	52.809.197.492,00	51.671.903.581,00	97,85	40.727.314.230,00

5.1.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2022 (Rp) 52.309.197.492,00	Realisasi 2022 (Rp) 51.171.903.581,00	Realisasi 2021 (Rp) 40.727.314.230,00
--------------------	------------------------------------	---	--	--

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan senilai Rp52.309.197.492,00 dan terealisasi senilai Rp51.171.903.581,00 atau 97,83%. Realisasi Tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp10.444.589.351,00 atau 25,65% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp40.727.314.230,00.

Secara rinci Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kota Bima dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.17
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

No.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Pajak Kendaraan Bermotor	10.347.529.479,00	7.625.909.931,00	73,70	6.672.660.345,00
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.361.087.495,00	5.609.123.194,00	76,20	5.374.685.550,50
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.687.461.391,00	18.745.529.174,00	119,49	12.130.057.966,50
	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	46.875.000,00	41.524.731,00	88,59	34.749.404,00
	Pajak Rokok	18.866.244.127,00	19.149.816.551,00	101,50	16.515.160.964,00
	Jumlah	52.309.197.492,00	51.171.903.581,00	97,83	40.727.314.230,00

5.1.1.2.2 Bantuan Keuangan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	500.000.000,00	500.000.000,00	0

Bantuan Keuangan dianggarkan senilai Rp500.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp500.000.000,00 atau 100%. Sesuai SK Gubernur NTB Nomor 900-696 Tahun 2022 Kota Bima mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi NTB sebesar Rp500.000.000,00 untuk Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	0,00	0,00	17.931.340.700,00

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%, terdiri dari pendapatan hibah Dana BOS dan pendapatan atas Pengembalian Hibah.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan. Lain-lain PAD yang Sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Kota Bima adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.18
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	17.911.340.000,00
Jumlah					17.911.340.000,00
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah					0,00
3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	20.000.700,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	20.000.700,00
Total Lain-Lain Pendapatan yang Sah		0,00	0,00	0,00	17.931.340.700,00

5.1.1.3.1 Lain-Lain Pendapatan yang Sah - Pendapatan Hibah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	0,00	0,00	17.911.340.000,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah – Pendapatan Hibah Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi Tahun 2022

mengalami penurunan senilai Rp17.911.340.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp17.911.340.000,00. Pendapatan Hibah ini merupakan Hibah dari Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri.

5.1.1.3.2	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – Dana Darurat	Anggaran 2022 (Rp) 0,00	Realisasi 2022 (Rp) 0,00	Realisasi 2021 (Rp) 0,00
-----------	---	--	---	---

Lain-Lain Pendapatan yang Sah – Pendapatan Darurat 2022 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.1.3.3	Lain-Lain pendapatan yang Sah -Pendapatan Lainnya	Anggaran 2022 (Rp) 0,00	Realisasi 2022 (Rp) 0,00	Realisasi 2021 (Rp) 20.000.700,00
-----------	--	--	---	--

Lain-Lain Pendapatan yang Sah – Pendapatan Lainnya Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan senilai Rp20.000.700,00 atau 100% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp20.000.700,00. Pendapatan Hibah ini merupakan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia.

5.1.2. BELANJA

5.1.2 Belanja	Anggaran 2022 (Rp) 806.099.136.615,00	Realisasi 2022 (Rp) 749.196.056.304,73	Realisasi 2021 (Rp) 716.700.153.286,42
---------------	--	---	---

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Pemerintah Kota Bima meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja aset Tetap Lainnya, selain itu juga terdapat Belanja Tak Terduga.

Secara umum Belanja Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp806.099.136.615,00 dan terealisasi senilai Rp749.196.056.304,73 atau 92,94%, sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp56.903.080.310,27 atau 7,60%. Terdapat Kenaikan realisasi Belanja Tahun 2022 senilai Rp32.495.903.018,31 atau 4,53% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp716.700.153.286,42 yang dipengaruhi oleh Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Tahun 2022 terdiri dari :

Tabel 5.1.19
Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi	646.803.491.625,00	594.440.854.017,00	91,90	575.787.111.971,68
2	Belanja Modal	156.536.638.651,00	153.809.784.287,73	98,26	138.378.990.564,74
3	Belanja Tak Terduga	2.759.006.339,00	945.418.000,00	34,27	2.534.050.750,00
Jumlah		806.099.136.615,00	749.196.056.304,73	92,94	716.700.153.286,42

Laporan ikhtisar atas realisasi belanja Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.1.20
Rincian Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Belanja	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
A	Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	371.902.399.623,00	361.680.806.870,00	97,25	357.437.167.837,55
2	Belanja Barang & Jasa	240.234.685.146,00	209.804.746.008,00	87,33	200.214.962.134,13
3	Belanja Hibah	27.407.406.856,00	16.448.051.139,00	60,01	16.712.982.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	7.259.000.000,00	6.507.250.000,00	89,64	1.422.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi		646.803.491.625,00	594.440.854.017,00	91,90	575.787.111.971,68
B	Belanja Modal				
1	Belanja Tanah	3.359.000.000,00	3.035.329.060,00	90,36	737.365.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	44.581.464.683,00	45.650.535.702,00	93,79	28.081.390.647,00
3	Belanja Bangunan dan Gedung	35.817.758.287,00	34.349.972.004,73	95,90	66.975.887.199,03
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.256.078.301,00	69.040.535.395,00	96,89	40.902.636.451,71
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.487.337.380,00	1.698.424.926,00	114,19	1.681.711.267,00
6	Belanja Aset Lainnya	35.000.000,00	34.987.200,00	99,96	0,00
Jumlah Belanja Modal		156.536.638.651,00	153.809.784.287,73	98,26	138.378.990.564,74
C	Belanja Tak Terduga				
1	Belanja Tak Terduga	2.759.006.339,00	945.418.000,00	34,27	2.534.050.750,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		2.759.006.339,00	945.418.000,00	34,27	2.534.050.750,00
Jumlah Belanja		806.099.136.615,00	749.196.056.304,73	92,94	716.700.153.286,42
Jumlah Belanja		806.099.136.615,00	749.196.056.304,73	92,94	716.700.153.286,42

Rekapitulasi Belanja Daerah masing-masing SKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.21
Rekapitulasi Belanja masing-masing SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	197.466.790.153,00	192.039.092.308,00	97,25	189.769.427.251,49
2	Dinas Kesehatan	98.201.109.808,00	90.499.856.864,20	92,16	120.741.822.133,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.677.095.802,00	80.826.878.268,00	85,37	62.085.318.689,20
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	12.888.161.821,00	11.830.199.286,00	91,79	9.467.183.456,00
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	8.064.796.370,00	7.775.878.915,00	96,42	7.959.113.776,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.763.970.413,00	4.622.397.252,00	97,03	3.864.858.086,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.907.824.818,00	4.787.698.448,00	97,55	4.451.016.324,00
8	Dinas Sosial	11.313.808.925,00	10.542.000.188,00	93,18	4.950.296.618,00
9	Dinas Tenaga Kerja	5.569.480.417,00	5.488.613.024,81	98,55	3.920.688.657,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.879.502.190,00	5.562.324.257,00	70,59	5.505.386.721,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	3.930.109.483,00	3.849.221.184,00	97,94	3.685.657.232,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	19.608.820.807,00	18.696.866.781,16	95,35	17.367.521.501,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.838.463.998,00	5.606.515.988,00	96,03	4.873.300.984,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.911.127.029,00	7.711.788.573,00	97,48	6.509.687.272,00
15	Dinas Perhubungan	12.912.388.840,00	12.628.389.380,00	97,80	11.573.762.496,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.832.283.311,00	7.661.960.545,00	97,83	8.315.823.608,00
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	8.275.310.045,00	7.376.038.652,00	89,13	7.910.763.833,18
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.950.264.438,00	3.792.740.156,00	96,01	3.534.599.593,00
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.408.022.060,00	5.336.193.214,00	98,67	15.154.802.319,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.621.221.283,00	5.253.834.812,00	93,46	5.872.147.312,00
21	Dinas Pariwisata	11.566.522.938,00	11.297.762.990,00	97,68	9.473.989.591,00
22	Dinas Pertanian	12.844.908.059,00	12.661.123.910,00	98,57	12.632.868.186,00
23	Sekretariat Daerah	64.457.792.849,00	52.703.815.843,56	81,76	67.066.968.351,55
24	Sekretariat DPRD	27.988.248.484,00	26.521.250.423,00	94,76	25.944.494.677,00
25	Kecamatan Rasanae Barat	10.083.490.453,00	9.944.919.563,00	98,63	9.417.624.024,00
26	Kecamatan Rasanae Timur	11.460.213.564,00	11.309.927.200,00	98,69	11.188.098.248,00
27	Kecamatan Asakota	10.571.358.761,00	10.319.865.721,00	97,62	9.956.524.212,00
28	Kecamatan Mpunda	14.983.573.822,00	14.693.237.521,00	98,06	14.791.121.314,00
29	Kecamatan Raba	17.510.785.669,00	17.267.282.065,00	98,61	17.567.800.298,00
30	Inspektorat	8.121.637.471,00	8.041.090.868,00	99,01	7.341.721.190,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	7.022.738.390,00	6.695.345.281,00	95,34	5.823.356.297,00
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	20.020.478.889,00	17.300.669.604,00	86,41	17.238.465.970,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.358.757.275,00	6.242.265.825,00	98,17	6.210.727.211,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.127.704.884,00	6.933.944.463,00	97,28	4.533.215.855,00
35	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima	48.960.373.096,00	45.375.066.931,00	92,68	0,00
JUMLAH		806.099.136.615,00	749.196.056.304,73	92,94	716.700.153.286,42

Sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 188.45/430/500/XI/2021 Rumah Sakit Umum Kota Bima ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang efektif dilaksanakan pada 01 Januari 2022 sehingga Rumah Sakit Umum Kota Bima dapat mengelola Pendapatan dan Belanja secara mandiri. Realisasi Belanja Rumah Sakit Umum Kota Bima pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp45.375.066.931,00 atau 92,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.960.373.096,00.

5.1.2.1	Belanja Operasi	Anggaran 2022 (Rp) 646.803.491.625,00	Realisasi 2022 (Rp) 594.440.854.017,00	Realisasi 2021 (Rp) 575.787.111.971,68
----------------	------------------------	--	---	---

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pada Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp646.803.491.625,00 dan terealisasi senilai Rp 594.440.854.017,00 atau 91,90%, sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp52.362.637.608,00 atau 8,1% Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp575.787.111.971,68 maka realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp18.653.742.045,32 atau 3,24%.

Belanja Operasi Tahun 2022 terdiri dari :

Tabel 5.1.22
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Belanja Operasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	371.902.399.623,00	361.680.806.870,00	97,25	357.437.167.837,55
2	Belanja Barang & Jasa	240.234.685.146,00	209.804.746.008,00	87,33	200.214.962.134,13
3	Belanja Hibah	27.407.406.856,00	16.448.051.139,00	60,01	16.712.982.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	7.259.000.000,00	6.507.250.000,00	89,64	1.422.000.000,00
Jumlah		646.803.491.625,00	594.440.854.017,00	91,90	575.787.111.971,68

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	371.902.399.623,00	361.679.330.850,00	357.437.167.837,55

Belanja Pegawai adalah belanja pegawai pada Belanja Operasi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp371.902.399.623,00 dan direalisasikan senilai Rp361.680.806.870,00 atau 97,25%. Dibandingkan realisasi Tahun 2021 Rp357.437.167.837,55 maka realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 menunjukkan peningkatan senilai Rp4.243.639.032,45 atau 1,19%.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.23
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	243.507.976.111,00	240.011.994.328,00	98,56	235.774.822.363,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	55.507.082.787,00	54.164.103.648,00	97,58	49.051.880.569,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	61.078.323.304,00	56.766.361.210,00	92,94	61.921.077.845,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.761.617.836,00	9.978.172.296,00	92,72	9.934.861.816,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	521.399.585,00	274.375.788,00	52,62	253.725.644,55
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	526.000.000,00	485.799.600,00	92,36	500.799.600,00
Jumlah		371.902.399.623,00	361.680.806.870,00	97,25	357.437.167.837,55

Tabel 5.1.24
Subrincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021

	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	243.507.976.111,00	240.011.994.328,00	98,56	235.774.822.363,00
	* Belanja Gaji Pokok ASN	184.007.077.967,00	182.091.772.707,00	98,96	180.552.569.210,00
	- Belanja Gaji Pokok PNS	176.707.046.650,00	175.655.810.814,00	99,41	180.034.175.810,00
	- Belanja Gaji Pokok PPK	7.300.031.317,00	6.435.961.893,00	88,16	518.393.400,00
	* Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.744.880.489,00	15.640.042.131,00	99,33	15.510.230.967,00

	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.291.520.945,00	15.189.833.463,00	99,34	15.494.586.537,00
	- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	453.359.544,00	450.208.668,00	99,30	15.644.430,00
	* Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.296.835.925,00	7.243.001.803,00	99,26	7.314.240.026,00
	- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.296.835.925,00	7.243.001.803,00	99,26	7.314.240.026,00
	* Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.036.163.775,00	9.934.731.320,00	98,99	9.917.476.000,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.960.563.775,00	9.859.131.320,00	98,98	9.909.046.000,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	75.600.000,00	75.600.000,00	100,00	8.430.000,00
	* Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.260.768.400,00	3.192.453.160,00	97,90	2.934.000.000,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.889.843.400,00	2.820.973.160,00	97,62	2.922.670.000,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	370.925.000,00	371.480.000,00	100,15	11.330.000,00
	* Belanja Tunjangan Beras ASN	10.216.318.535,00	10.144.955.700,00	99,30	10.053.632.091,00
	- Belanja Tunjangan Beras PNS	9.832.999.475,00	9.763.012.620,00	99,29	10.039.872.291,00
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK	383.319.060,00	381.943.080,00	99,64	13.759.800,00
	* Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	783.317.619,00	766.011.053,00	97,79	604.586.776,00
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	783.317.619,00	766.011.053,00	97,79	604.586.776,00
	* Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.596.197,00	2.568.590,00	98,94	2.553.850,00
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.504.460,00	2.477.616,00	98,93	2.551.475,00
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	91.737,00	90.974,00	99,17	2.375,00
	* Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.653.553.751,00	9.501.079.294,00	89,18	7.404.796.459,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.385.602.387,00	9.241.438.915,00	88,98	7.395.434.934,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	267.951.364,00	259.640.379,00	96,90	9.361.525,00
	* Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	376.616.537,00	373.844.766,00	99,26	369.853.439,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	363.388.605,00	360.814.138,00	99,29	369.452.003,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	13.227.932,00	13.030.628,00	98,51	401.436,00

	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	* Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.129.846.916,00	1.121.533.804,00	99,26	1.110.883.545,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.090.164.815,00	1.082.400.881,00	99,29	1.109.431.565,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	39.682.101,00	39.132.923,00	98,62	1.451.980,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	55.507.082.787,00	54.164.103.648,00	97,58	49.051.880.569,00
	* Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	19.124.944.762,00	18.423.859.101,20	96,33	16.411.358.908,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	18.965.322.504,00	18.299.792.882,20	96,49	16.411.358.908,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	159.622.258,00	124.066.219,00	77,72	0,00
	* Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.962.953.250,00	7.788.488.579,80	97,81	6.227.567.775,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	7.949.413.360,00	7.785.006.893,80	97,93	6.227.567.775,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	13.539.890,00	3.481.686,00	25,71	0,00
	* Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	122.846.313,00	122.846.313,00	100,00	115.813.161,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	122.846.313,00	122.846.313,00	100,00	115.813.161,00
	* Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	28.296.338.462,00	27.828.909.654,00	98,35	26.297.140.725,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	28.056.260.429,00	27.639.594.493,00	98,51	26.297.140.725,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	240.078.033,00	189.315.161,00	78,86	0,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	61.078.323.304,00	56.766.361.210,00	92,94	61.921.077.845,00
	* Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	592.659.732,00	404.515.000,00	68,25	375.471.960,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	8.400.000,00	8.385.000,00	99,82	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	40.200.000,00	40.200.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	665.000,00	660.000,00	99,25	479.060,00

	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	15.466.040,00	5.100.000,00	32,98	7.756.250,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	252.000.000,00	234.950.000,00	93,23	251.999.150,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.520.000,00	2.230.000,00	88,49	1.977.900,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.260.000,00	1.000.000,00	79,37	1.259.700,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	840.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	145.308.692,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	112.000.000,00	111.990.000,00	99,99	111.999.900,00
	* Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	344.830.396,00	107.030.546,00	31,04	70.815.710,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.038.450,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	38.383.520,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	31.362.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	60.715.900,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	8.040.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara	7.891.360,00	7.891.360,00	100,00	7.891.360,00

	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Telekomunikasi				
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	75.113.600,00	51.954.650,00	69,17	15.440.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	11.115.480,00	0,00	0,00	13.894.350,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	749.600,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	20.426.400,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.020.600,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	42.973.486,00	7.184.536,00	16,72	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	33.590.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	* Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	38.661.671.000,00	36.728.350.420,00	95,00	39.572.115.540,00
	- Belanja TPG PNSD	38.661.671.000,00	36.728.350.420,00	95,00	39.572.115.540,00
	* Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.029.000.000,00	1.028.250.000,00	99,93	404.250.000,00
	- Belanja Tamsil Guru PNSD	1.029.000.000,00	1.028.250.000,00	99,93	404.250.000,00
	* Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	12.331.471.571,00	10.556.930.452,00	85,61	13.484.739.135,00
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	12.331.471.571,00	10.556.930.452,00	85,61	13.484.739.135,00
	* Belanja Honorarium	8.118.690.605,00	7.941.284.792,00	97,81	8.013.685.500,00

	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.540.952.000,00	7.401.501.100,00	98,15	6.908.313.500,00
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	577.738.605,00	539.783.692,00	93,43	1.075.612.000,00
	- Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	29.760.000,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.761.617.836,00	9.978.172.296,00	90,93	9.934.861.816,00
	* Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.435.000,00	99,98	561.540.000,00
	- Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.435.000,00	99,98	561.540.000,00
	* Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	53.067.000,00	53.508.000,00	100,83	53.350.500,00
	- Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	53.067.000,00	53.508.000,00	100,83	53.350.500,00
	* Belanja Tunjangan Beras DPRD	79.215.220,00	78.130.080,00	98,63	77.897.550,00
	- Belanja Tunjangan Beras DPRD	79.215.220,00	78.130.080,00	98,63	77.897.550,00
	* Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	48.121.500,00	85,70	48.132.000,00
	- Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	48.121.500,00	85,70	48.132.000,00
	* Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.080.750,00	99,98	814.233.000,00
	- Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.080.750,00	99,98	814.233.000,00
	* Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	96.556.950,00	64.097.050,00	66,38	64.858.500,00
	- Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	96.556.950,00	64.097.050,00	66,38	64.858.500,00
	* Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.663.088,00	18.300.450,00	93,07	19.000.800,00
	- Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.663.088,00	18.300.450,00	93,07	19.000.800,00
	* Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
	- Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
	* Belanja Tunjangan Reses DPRD	484.312.500,00	472.500.000,00	97,56	472.500.000,00
	- Belanja Tunjangan Reses DPRD	484.312.500,00	472.500.000,00	97,56	472.500.000,00

	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	* Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	248.794,00	248.794,00	100,00	248.794,00
	- Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	248.794,00	248.794,00	100,00	248.794,00
	* Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.687.950.784,00	3.160.600.672,00	85,70	3.161.100.672,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	154.560.000,00	132.480.000,00	85,71	132.480.000,00
	- Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.347.696,00	1.155.168,00	85,71	1.155.168,00
	- Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.043.088,00	3.465.504,00	85,71	3.465.504,00
	- Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.528.000.000,00	3.023.500.000,00	85,70	3.024.000.000,00
	* Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.944.500.000,00	2.814.000.000,00	95,57	2.772.000.000,00
	- Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.944.500.000,00	2.814.000.000,00	95,57	2.772.000.000,00
	* Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	74.176.500,00	3.150.000,00	4,25	0,00
	- Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	74.176.500,00	3.150.000,00	4,25	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	521.399.585,00	274.375.788,00	52,62	253.725.644,55
	* Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.688.790,00	54.600.000,00	94,65	54.639.000,00
	- Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.688.790,00	54.600.000,00	94,65	54.639.000,00
	* Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	7.594.020,00	7.140.000,00	94,02	7.140.000,00
	- Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.594.020,00	7.140.000,00	94,02	7.140.000,00
	* Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.773.850,00	98.280.000,00	92,92	98.280.000,00
	- Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.773.850,00	98.280.000,00	92,92	98.280.000,00
	* Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.482.434,00	6.083.280,00	81,30	7.097.160,00
	- Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.482.434,00	6.083.280,00	81,30	7.097.160,00
	* Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	984.529,00	984.529,00	100,00	1.571.150,00
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	984.529,00	984.529,00	100,00	1.571.150,00
	* Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.920,00	1.920,00	100,00	2.040,00
	- Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.920,00	1.920,00	100,00	2.040,00
	* Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.486.400,00	5.486.400,00	100,00	5.486.400,00

	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Belanja Iuran Jaminan - Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.486.400,00	5.486.400,00	100,00	5.486.400,00
	* Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	100,00	112.320,00
	Belanja Iuran Jaminan - Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	100,00	112.320,00
	* Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	100,00	336.960,00
	Belanja Iuran Jaminan - Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	100,00	336.960,00
	* Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	230.510.772,00	88.350.000,00	38,33	67.883.744,55
	Belanja Insentif bagi - KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	5.360.000,00	4.100.000,00	76,49	0,00
	Belanja Insentif bagi - KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	22.128.869,00	17.300.000,00	78,18	0,00
	Belanja Insentif bagi - KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	237.500,00	0,00	0,00	55.000,00
	Belanja Insentif bagi - KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	7.744.403,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi - KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	92.500.000,00	36.465.000,00	39,42	24.622.136,00
	Belanja Insentif bagi - KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.200.000,00	385.000,00	32,08	466.975,00
	Belanja Insentif bagi - KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	540.000,00	0,00	0,00	239.633,55
	Belanja Insentif bagi - KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi - KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi - KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00

	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	42.500.000,00	30.100.000,00	70,82	42.500.000,00
	* Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	105.427.590,00	13.000.379,00	12,33	11.176.870,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	14.297.750,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	13.436.380,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	15.213.100,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.972.840,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	19.500.900,00	4.000.000,00	20,51	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.778.870,00	0,00	0,00	2.778.870,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	187.400,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat	7.806.600,00	0,00	0,00	0,00

	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Khusus Parkir				
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	836.250,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.887.500,00	1.000.379,00	8,42	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000,00	8.000.000,00	80,00	8.398.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	526.000.000,00	485.799.600,00	92,36	500.799.600,00
	* Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	126.000.000,00	100.800.000,00	80,00	100.800.000,00
	Belanja Dana - Operasional Pimpinan DPRD	126.000.000,00	100.800.000,00	80,00	100.800.000,00
	* Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	384.999.600,00	96,25	399.999.600,00
	Belanja Dana - Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	384.999.600,00	96,25	399.999.600,00
	Jumlah	371.902.399.623,00	361.680.806.870,00	97,25	357.437.167.837,55

5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp) 240.234.685.146,00	Realisasi 2022 (Rp) 209.804.746.008,00	Realisasi 2021 (Rp) 200.214.962.134,13
------------------	--------------------------------	--	---	---

Belanja Barang adalah belanja barang pada Belanja Operasi yang terdiri dari belanja bahan habis pakai, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilisasi, belanja sewa alat berat, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makan dan minum, belanja pakaian dinas dan belanja perjalanan dinas.

Dalam APBD Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp240.234.685.146,00 dan direalisasikan senilai Rp209.804.746.008,00 atau 87,33%. Dibandingkan realisasi Tahun 2021 Rp200.214.962.134,13 maka realisasi belanja

barang Tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp9.589.783.873,87 atau 4,79% yang dipengaruhi oleh Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Cetak, Belanja Pakaian Dinas, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa konsultasi, Belanja Kursus pelatihan dan Belanja Yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

Tabel 5.1.25

Rincian Belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang	75.146.589.854,00	57.459.374.310,00	76,46	60.990.992.601,64
2	Belanja Jasa	96.615.723.459,00	87.258.923.544,00	90,32	62.767.798.096,00
3	Belanja Pemeliharaan	6.950.897.382,00	6.503.946.252,00	93,57	10.243.588.750,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	40.767.378.107,00	38.319.952.531,00	94,00	0
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.430.754.100,00	4.430.545.200,00	100,00	503.077.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.323.342.244,00	15.832.004.171,00	96,99	1.039.541.400,00
Jumlah		240.234.685.146,00	209.804.746.008,00	87,33	200.214.962.134,13

Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.26

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021

Belanja		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	75.146.589.854,00	57.459.374.310,00	76,46	60.990.992.601,64
2	Belanja Jasa Kantor	76.649.990.290,00	69.381.287.567,00	90,52	62.767.798.096,00
3	Belanja Premi Asuransi	10.722.609.600,00	9.986.968.850,00	93,14	10.243.588.750,00
4	Belanja Sewa Tanah	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67	0,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	842.192.000,00	793.029.000,00	94,16	503.077.000,00
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.315.101.400,00	1.195.330.400,00	90,89	1.039.541.400,00
7	Belanja Perjalanan Dinas	40.767.378.107,00	38.319.952.531,00	94,00	30.335.287.243,00
8	Belanja Pemeliharaan	6.950.897.382,00	6.503.946.252,00	93,57	5.152.232.663,00
9	Belanja Jasa Konsultansi	5.358.186.210,00	4.428.859.125,00	82,66	7.572.331.882,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	88.176.000,00	6.387.802,00	7,24	0,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	315.000.000,00	315.000.000,00	100	315.000.000,00
12	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	1.065.479.500,00	967.384.500,00	90,79	1.029.811.000,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	253.988.459,00	180.676.300,00	71,14	117.759.820,00

Belanja		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	100	2.000.000,00
15	Belanja Barang Dana BOS	16.323.342.244,00	15.832.004.171,00	96,99	16.006.852.578,49
16	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.430.754.100,00	4.430.545.200,00	100	4.138.689.100,00
Jumlah		240.234.685.146,00	209.804.746.008,00	87,33	200.214.962.134,13

Tabel 5.1.27
Subrincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	75.146.589.854,00	57.459.374.310,00	76,46	60.990.992.601,64
	* Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	833.969.280,00	758.804.870,00	90,99	832.283.723,18
	* Belanja Bahan-Bahan Kimia	85.306.700,00	85.306.700,00	100,00	678.143.600,00
	* Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.999.260.219,00	2.903.478.832,00	96,81	2.878.817.397,00
	* Belanja Bahan-Bahan Baku	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	* Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	470.276.600,00	470.026.700,00	99,95	123.946.350,00
	* Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	9.600.000,00	3.200.000,00	33,33	7.600.000,00
	* Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	75.000.000,00	74.780.000,00	99,71	74.250.000,00
	* Belanja Bahan-Bahan Lainnya	157.916.000,00	145.008.000,00	91,83	1.782.851.290,00
	* Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.260.643.800,00	1.223.823.622,00	97,08	1.490.413.889,00
	* Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	3.885.000,00	2.760.000,00	71,04	3.260.000,00
	* Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	308.000,00	308.000,00	100,00	0,00
	* Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	178.630.500,00	153.147.296,00	85,73	130.650.401,00
	* Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.283.827.956,00	3.125.336.707,00	95,17	2.455.184.388,00
	* Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.388.135.740,00	1.356.535.413,00	97,72	1.440.748.964,00
	* Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.647.707.636,00	6.339.667.209,00	95,37	6.011.419.927,00
	* Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	688.072.461,00	658.950.500,00	95,77	523.935.000,00

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	* Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	38.534.600,00	37.362.800,00	96,96	47.590.400,00
	* Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	99.142.580,00	89.606.200,00	90,38	87.252.400,00
	* Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	890.582.830,00	750.676.737,00	84,29	789.444.485,00
	* Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.235.017.930,00	1.171.784.430,00	94,88	1.630.626.246,00
	* Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	524.194.700,00	523.054.700,00	99,78	173.519.400,00
	* Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	837.410.000,00	837.150.000,00	99,97	708.875.000,00
	* Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	838.370.937,00	811.274.200,00	96,77	645.507.000,00
	* Belanja Obat-Obatan-Obat	12.038.707.759,00	9.276.390.818,00	77,05	13.775.672.257,00
	* Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	42.644.335,00	14.035.000,00	32,91	84.168.400,00
	* Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	24.488.051.010,00	11.910.366.106,00	48,64	11.631.430.801,46
	* Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	37.681.000,00
	* Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	82.520.000,00	82.520.000,00	100,00	0,00
	* Belanja Natura dan Pakan-Pakan	768.000.000,00	677.851.372,00	88,26	0,00
	* Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	22.500.600,00	17.897.100,00	79,54	0,00
	* Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	0,00	0,00	15.920.000,00
	* Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00	0,00	19.520.000,00
	* Belanja Natura dan Pakan-Pakan	0,00	0,00	0,00	941.843.666,00
	* Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.841.300,00
	* Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.057.675.951,00	8.264.162.000,00	91,24	6.987.204.205,00
	* Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.891.535.880,00	2.763.747.448,00	95,58	2.705.224.312,00
	* Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	227.000,00
	* Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	844.309.050,00	667.711.550,00	79,08	1.029.198.900,00

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	* Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.039.387.800,00	978.010.000,00	94,09	990.578.000,00
	* Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	216.200.000,00	187.480.000,00	86,72	81.000.000,00
	* Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	125.850.000,00	125.230.000,00	99,51	0,00
	* Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.467.200,00	2.467.200,00	100,00	1.233.600,00
	* Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	34.539.000,00	34.539.000,00	100,00	25.850.000,00
	* Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	692.887.800,00	687.473.800,00	99,22	12.648.000,00
	* Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	2.170.000,00	1.500.000,00	69,12	0,00
	* Belanja Pakaian Adat Daerah	158.200.000,00	157.350.000,00	99,46	63.300.000,00
	* Belanja Pakaian Olahraga	38.500.000,00	38.500.000,00	100,00	54.050.000,00
	* Belanja Pakaian Paskibraka	50.250.000,00	50.100.000,00	99,70	15.081.300,00
2	Belanja Jasa Kantor	76.649.990.290,00	69.381.287.567,00	90,52	62.767.798.096,00
	* Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	130.000.000,00	5.816.280,00	4,47	0,00
	* Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.415.600.000,00	1.969.478.100,00	81,53	2.159.490.000,00
	* Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.782.338.800,00	5.127.113.000,00	88,67	3.332.389.000,00
	* Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	199.800.000,00	136.800.000,00	68,47	45.000.000,00
	* Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	552.300.000,00	550.900.000,00	99,75	414.350.000,00
	* Honorarium Rohaniwan	51.600.000,00	51.200.000,00	99,22	32.800.000,00
	* Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	215.650.000,00	199.700.000,00	92,60	67.300.000,00
	* Honorarium Penyelenggara Ujian	6.180.000,00	6.180.000,00	100,00	0,00
	* Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	175.525.000,00	172.475.000,00	98,26	295.295.000,00
	* Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	610.800.000,00	597.000.000,00	97,74	605.600.000,00
	* Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.328.940.000,00	5.193.300.000,00	97,45	5.723.170.000,00

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	* Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.676.405.888,00	9.484.889.049,00	81,23	8.602.504.346,00
	* Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	* Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	396.006.000,00	347.636.000,00	87,79	242.666.800,00
	* Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.091.800.000,00	2.898.540.000,00	93,75	2.952.190.000,00
	* Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	420.000.000,00	407.250.000,00	96,96	265.500.000,00
	* Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0,00	0,00	0,00	163.200.000,00
	* Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	6.367.050.000,00	6.338.550.000,00	99,55	6.330.175.000,00
	* Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	8.600.000,00	8.600.000,00	100,00	2.100.000,00
	* Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00	55.000.000,00
	* Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.924.750.000,00	5.635.048.818,00	95,11	5.723.808.830,00
	* Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	280.400.000,00	245.400.000,00	87,52	231.300.000,00
	* Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.021.649.986,00	5.779.447.000,00	95,98	5.277.763.414,00
	* Belanja Jasa Tenaga Ahli	304.198.000,00	297.750.000,00	97,88	600.820.000,00
	* Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.990.750.000,00	4.833.213.000,00	96,84	4.692.075.000,00
	* Belanja Jasa Tenaga Keamanan	704.500.000,00	670.312.000,00	95,15	839.658.000,00
	* Belanja Jasa Tenaga Caraka	495.000.000,00	486.580.000,00	98,30	753.000.000,00
	* Belanja Jasa Tenaga Supir	350.000.000,00	316.250.000,00	90,36	354.750.000,00
	* Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	466.300.000,00	464.300.000,00	99,57	416.600.000,00
	* Belanja Jasa Tata Rias	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	16.800.000,00
	* Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	732.100.000,00	723.100.000,00	98,77	563.581.000,00
	* Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	138.747.600,00	129.579.000,00	93,39	89.572.500,00
	* Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	233.700.000,00	222.750.000,00	95,31	269.850.000,00
	* Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	97.000.000,00	93.970.000,00	96,88	0,00
	* Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	699.200.400,00	561.560.000,00	80,31	670.000.000,00
	* Belanja Jasa Kalibrasi	49.015.000,00	7.277.500,00	14,85	55.543.885,00

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	* Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.064.585.000,00	755.551.633,00	70,97	281.003.041,00
	* Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	18.352.320,00	12.292.500,00	66,98	3.504.100,00
	* Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.537.280.000,00	1.525.500.000,00	99,23	1.656.111.400,00
	* Belanja Tagihan Air	31.614.770,00	14.520.800,00	45,93	76.047.510,00
	* Belanja Tagihan Listrik	6.992.457.926,00	6.628.761.874,00	94,80	5.829.886.700,00
	* Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	89.750.000,00	89.200.000,00	99,39	347.635.000,00
	* Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.296.081.900,00	1.974.708.602,00	86,00	1.879.397.934,00
	* Belanja Paket/Pengiriman	23.652.000,00	17.454.000,00	73,80	11.779.000,00
	* Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	211.810.500,00	83.941.218,00	39,63	106.214.136,00
	* Belanja Pengolahan Air Limbah	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	* Belanja Lembur	906.059.200,00	844.922.000,00	93,25	559.339.000,00
	* Belanja Medical Check Up	255.000.000,00	196.447.893,00	77,04	173.027.500,00
	* Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	2.499.540.000,00	1.640.445.000,00	65,63	0,00
	* Belanja Insentif Tenaga Kesehatan COVID-19	1.692.800.000,00	1.562.677.300,00	92,31	0,00
3	Belanja Premi Asuransi	10.722.609.600,00	9.986.968.850,00	93,14	10.243.588.750,00
	* Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.501.240.000,00	8.903.007.000,00	93,70	10.061.339.550,00
	* Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	861.369.600,00	803.411.600,00	93,27	182.249.200,00
	* Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	159.000.000,00	124.689.000,00	78,42	0,00
	* Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	201.000.000,00	155.861.250,00	77,54	0,00
4	Belanja Sewa Tanah	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67	0,00
	* Belanja Sewa Lapangan Lainnya	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67	0,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	842.192.000,00	793.029.000,00	94,16	503.077.000,00
	* Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	8.232.000,00
	* Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	26.460.000,00	26.460.000,00	100,00	27.064.000,00

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	* Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	10.600.000,00
	* Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	115.400.000,00	82.400.000,00	71,40	24.600.000,00
	* Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00
	* Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	* Belanja Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.862.500,00	1.987.000,00	51,44	0,00
	* Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
	* Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	* Belanja Sewa Laboratorium Lingkungan	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	3.200.000,00
	* Belanja Sewa Peralatan Umum	667.369.500,00	657.282.000,00	98,49	399.641.000,00
	* Belanja Sewa Photo and Film Equipment	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	7.500.000,00
	* Belanja Sewa Personal Computer	0,00	0,00	0,00	4.380.000,00
	* Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.315.101.400,00	1.195.330.400,00	90,89	1.039.541.400,00
	* Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	24.600.000,00	24.600.000,00	100,00	74.400.000,00
	* Belanja Sewa Bangunan Gudang	207.500.000,00	207.500.000,00	100,00	185.250.000,00
	* Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	30.036.000,00	30.036.000,00	100,00	20.000.000,00
	* Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	201.375.000,00	148.225.000,00	73,61	54.650.000,00
	* Belanja Sewa Taman	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	0,00
	* Belanja Sewa Hotel	206.820.000,00	190.223.000,00	91,98	73.200.000,00
	* Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	100.000.000,00	50.000.000,00	50,00	100.000.000,00
	* Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	541.370.400,00	541.346.400,00	100,00	532.041.400,00
7	Belanja Perjalanan Dinas	40.767.378.107,00	38.319.952.531,00	94,00	30.335.287.243,00
	* Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.131.766.001,00	23.982.045.445,00	95,43	17.324.656.640,00
	* Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.030.349.106,00	1.027.580.197,00	99,73	1.367.691.623,00
	* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.016.035.000,00	6.688.266.347,00	95,33	4.852.497.000,00
	* Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.477.375.000,00	6.515.870.000,00	87,14	6.241.570.000,00

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	* Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	111.853.000,00	106.190.542,00	94,94	548.871.980,00
8	Belanja Pemeliharaan	6.950.897.382,00	6.503.946.252,00	93,57	5.152.232.663,00
	* Belanja Pemeliharaan Tanah	50.000.000,00	49.582.000,00	99,16	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	50.000.000,00	49.582.000,00	99,16	0,00
	* Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.557.150.372,00	4.300.642.636,00	94,37	3.291.640.849,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	12.746.650,00	12.746.650,00	100,00	9.340.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	49.475.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	66.600.000,00	66.530.000,00	99,89	62.700.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	60.195.522,00	59.908.122,00	99,52	128.403.900,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	0,00	0,00	0,00	25.259.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.805.891.000,00	2.708.538.474,00	96,53	1.544.950.025,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	109.890.000,00	109.252.500,00	99,42	114.210.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	75.000.000,00	74.997.150,00	100,00	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	50.400.000,00	45.850.000,00	90,97	9.762.297,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	324.330.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	74.000.000,00	73.950.000,00	99,93	20.310.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	185.750.000,00	180.849.000,00	97,36	192.177.500,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	22.673.900,00	22.604.200,00	99,69	11.606.200,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	280.683.300,00	269.562.300,00	96,04	210.654.728,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00	20.000.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	11.000.000,00	10.997.240,00	99,97	9.872.199,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima	15.000.000,00	14.997.000,00	99,98	15.000.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	45.100.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	595.820.000,00	558.860.000,00	93,80	425.390.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00	39.500.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
*	- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.342.847.010,00	2.152.821.616,00	91,89	1.663.412.814,00

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.082.097.010,00	1.907.588.116,00	91,62	1.327.962.814,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	195.000.000,00	179.502.000,00	92,05	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	54.650.000,00	54.631.500,00	99,97	54.650.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	36.650.000,00
	- Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	0,00	0,00	0,00	244.150.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00	0,00
	* Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	196.279.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota	0,00	0,00	0,00	189.279.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Tanah Dangkal	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	* Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	900.000,00	900.000,00	100,00	900.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga- Alat Bercorak Kebudayaan- Barang Kerajinan	900.000,00	900.000,00	100,00	900.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi	5.358.186.210,00	4.428.859.125,00	82,66	7.572.331.882,00
	* Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.502.772.535,00	3.033.208.380,00	86,59	6.804.112.300,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	274.000.000,00	273.000.000,00	99,64	118.713.000,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	159.678.205,00	157.287.250,00	98,50	157.855.000,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	223.950.000,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	124.250.000,00	14.199.000,00	11,43	920.595.750,00

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa - Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	828.000.000,00	824.211.560,00	99,54	417.085.750,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa - Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.033.000.000,00	836.455.000,00	80,97	1.768.330.075,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa - Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	410.000.000,00	407.856.000,00	99,48	910.398.500,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa - Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	20.900.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan Wilayah	277.344.775,00	274.759.000,00	99,07	291.030.925,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	147.199.300,00	146.103.340,00	99,26	277.650.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	149.300.255,00	24.101.430,00	16,14	577.915.400,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	523.531.300,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	430.320.500,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	0,00	0,00	0,00	11.660.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	100.000.000,00	75.235.800,00	75,24	154.176.100,00
	* Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.855.413.675,00	1.395.650.745,00	75,22	768.219.582,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	0,00	0,00	34.650.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	288.620.245,00	277.678.000,00	96,21	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.020.860.000,00	594.211.450,00	58,21	713.569.582,00

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Belanja Jasa Konsultansi - Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	315.933.430,00	296.104.800,00	93,72	20.000.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Bidang - Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	230.000.000,00	227.656.495,00	98,98	0,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	88.176.000,00	6.387.802,00	7,24	0,00
	* Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum	88.176.000,00	6.387.802,00	7,24	0,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	315.000.000,00	315.000.000,00	100	315.000.000,00
	* Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
	* Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	115.000.000,00	115.000.000,00	100,00	115.000.000,00
12	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	1.065.479.500,00	967.384.500,00	90,79	1.029.811.000,00
	* Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	198.015.500,00	140.160.500,00	70,78	103.651.000,00
	* Belanja Bimbingan Teknis	467.400.000,00	427.160.000,00	91,39	373.870.000,00
	* Belanja Diklat Kepemimpinan	400.064.000,00	400.064.000,00	100,00	552.290.000,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	253.988.459,00	180.676.300,00	71,14	117.759.820,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.600.000,00	3.596.800,00	99,91	0,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	17.220.000,00	17.213.900,00	99,96	0,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	285.000,00	282.500,00	99,12	0,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	6.628.304,00	2.200.000,00	33,19	0,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	108.000.000,00	107.878.900,00	99,89	84.669.820,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.080.000,00	1.018.000,00	94,26	260.000,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	540.000,00	520.000,00	96,30	440.000,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	62.275.155,00	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	48.000.000,00	47.966.200,00	99,93	32.390.000,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
	* Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
15	Belanja Barang Dana BOS	16.323.342.244,00	15.832.004.171,00	96,99	16.006.852.578,49
	* Belanja Barang dan Jasa BOS	16.323.342.244,00	15.832.004.171,00	96,99	16.006.852.578,49
16	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.430.754.100,00	4.430.545.200,00	100,00	4.138.689.100,00
	* Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.428.754.100,00	4.428.553.200,00	100,00	4.136.689.100,00
	- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.184.634.500,00	1.184.433.600,00	99,98	648.109.200,00
	- Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	4.119.600,00	4.119.600,00	100,00	48.579.900,00
	- Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3.240.000.000,00	3.240.000.000,00	100,00	3.440.000.000,00
	* Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.000.000,00	1.992.000,00	99,60	2.000.000,00
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.000.000,00	1.992.000,00	99,60	2.000.000,00
Jumlah		240.234.685.146,00	209.804.746.008,00	87,33	200.214.962.134,13

5.1.2.1.3	Belanja Hibah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		27.407.406.856,00	16.448.051.139,00	16.712.982.000,00

Belanja Hibah untuk Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp27.407.406.856,00 dan direalisasikan senilai Rp16.448.051.139,00 atau 60,01%. Dibandingkan realisasi Tahun 2021 senilai Rp16.712.982.000,00 maka realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 mengalami penurunan senilai Rp264.930.861,00 atau 1,59%.

Rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.28
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021

NO.	BELANJA HIBAH	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
A	<i>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</i>	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	100,00%	1.210.000.000,00
1	Dewan Pendidikan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	0,00
2	PGRI	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	0,00
3	FPRB KOTA BIMA	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	50.000.000,00
4	TIM SIAGA BENCANA (FTSB) KOTA BIMA	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	0,00
5	KONI	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00%	1.000.000.000,00
6	Perguruan Beladiri Pencak Silat Bantaran Angin	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Lembaga Bantuan Hukum Bima	0,00	0,00	0,00%	80.000.000,00
8	Lembaga Bantuan Hukum Ksatria Bima	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	40.000.000,00
9	Posbakumadin PA Bima	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	40.000.000,00
10	Karang Taruna Kota Bima	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	0,00
B	<i>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</i>	875.000.000,00	825.000.000,00	94,29%	791.000.000,00
1	YYS KARTIKA SARI SLB DWP KOBİ	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%	200.000.000,00
2	PANTI ASUHAN NURUL IHSAN KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00%	3.000.000,00
3	LEGIUN VETERAN RI KOTA BIMA	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00
4	PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA BIMA	50.000.000,00	0,00	0,00%	40.000.000,00
5	RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	0,00
6	Gerakan Pemuda ANSOR Kota Bima	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00
7	Halo Bugar Sambinae	0,00	0,00	0,00%	8.000.000,00
8	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bima	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%	0,00
9	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bima	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00%	120.000.000,00
12	Pengurus Cabang Generasi Muda FKPPİ Kota Bima	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	0,00
13	PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00%	40.000.000,00
14	HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG BIMA	0,00	0,00	0,00%	20.000.000,00
15	PERSATUAN PURNAWIRAWAN POLISI REPUBLİK INDONESIA (PP POLRI) BIMA	0,00	0,00	0,00%	40.000.000,00
16	PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA	0,00	0,00	0,00%	20.000.000,00
17	İKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH BIMA	0,00	0,00	0,00%	20.000.000,00
18	DEWAN PIMPINAN DAERAH WAHDAH ISLAMİYAH KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00%	16.000.000,00
19	YAYASAN AL JUMHURIAH	0,00	0,00	0,00%	40.000.000,00
20	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLİK INDONESIA	0,00	0,00	0,00%	40.000.000,00

NO.	BELANJA HIBAH	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
21	PENGURUS CABANG MUSLIMAT NW KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00%	20.000.000,00
22	PENGURUS CABANG MUSLIMAT NU KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00%	20.000.000,00
25	GERAKAN PERSATUAN PEMUDA DAN MAHASISWA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00%	3.000.000,00
28	LEMBAGA PEMANTAU PEMBANGUNAN DAN KINERJA PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	4.000.000,00
29	LEMBAGA PEMANTAU PENGAWASAN KORUPSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00%	4.000.000,00
30	LEMBAGA PENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN Keadilan Kota Bima	0,00	0,00	0,00%	4.000.000,00
31	LSM PUSAT PEMANTAU KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN Keadilan Kota NIMA	0,00	0,00	0,00%	4.000.000,00
33	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LKPM-NTB	0,00	0,00	0,00%	15.000.000,00
34	PEMUDA PANCA WARGA	0,00	0,00	0,00%	20.000.000,00
35	Patelki Kota Bima	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,00
36	Kontrol Publik Kebijakan DPD Kota Bima	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,00
37	BNNK Kab Bima	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	0,00
40	BOP PAUD	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00%	0,00
41	KORPRI	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	0,00
C	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	21.050.100.000,00	10.806.100.000,00	51,34%	14.589.750.000,00
1	Dewan Pendidikan Kota Bima	0,00	0,00	0,00%	200.000.000,00
2	Bantuan Hibah Kepada PKBM (DAK Non Fisik BOP Kesetaraan)	771.100.000,00	771.100.000,00	100,00%	1.000.750.000,00
3	Himpunan Pendidik dan Tenaga kependidikan Kota Bima	0,00	0,00	0,00%	20.000.000,00
4	FOREIGN LANGUAGEINSTITUTE KOTA BIMA	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	75.000.000,00
5	Bantuan Hibah Kepada PAUD/TK (DAK Non Fisik BOP PAUD)	0,00	0,00	0,00%	2.580.000.000,00
6	Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bima	0,00	0,00	0,00%	150.000.000,00
7	Hibah Dana BOP Swasta Kota Bima	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	Tenaga Budaya	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
9	SDM Kesenian Tradisional	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
10	Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bima	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00%	65.000.000,00
11	Perhimpunan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Bima	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,00
12	Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kota Bima	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bima	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00%	50.000.000,00
14	Ikatan Dokter Indonesia	35.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
15	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Bima	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00%	35.000.000,00
16	PEMUDA TANGGUH TANGGAP BENCANA	0,00	0,00	0,00%	30.000.000,00
17	DHARMAWANITA PERSATUAN KOTA	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	200.000.000,00

NO.	BELANJA HIBAH	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
	BIMA				
18	FORUM PUSPA MAJA LABO DAHU KOTA	0,00	0,00	0,00%	120.000.000,00
19	GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)KOTA BIMA	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	200.000.000,00
20	TIM PENGGERAKPEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN DAN KELUARGA (PKK)	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00%	550.000.000,00
21	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	60.000.000,00
22	FORUM PUSPA MAJA LABO DAHU KOTA BIMA	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00%	0,00
23	BANTUAN LANGSUNG KEMASYARAKATAN (USAHA BAKULAN)	0,00	0,00	0,00%	600.000.000,00
24	BEM STISIP MBOJO BIMA	0,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
25	BEM STIH MUHAMMADIYAH BIMA	0,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
26	IKATAN MAHASISWA KOTA BIMA-MALANG	0,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
27	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMUPENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00%	150.000.000,00
28	Hibah Kepada Masjid dan Mushala se Kota Bima	0,00	0,00	0,00%	6.070.000.000,00
29	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%	200.000.000,00
30	BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00%	8.000.000,00
31	BADAN KONTAK MAJELIS TA'LIM KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00%	40.000.000,00
32	BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BNNK) BIMA	0,00	0,00	0,00%	40.000.000,00
33	Badan Waqaf Indonesia (BWI)	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	40.000.000,00
34	Dewan Masjid Indonesia (DMI)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	60.000.000,00
35	DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA SENI QASIDAH INDONESIA KOTA BIMA	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	160.000.000,00
36	FORUM KOMUNIKASI GEREJA KRISTEN	0,00	0,00	0,00%	120.000.000,00
37	MAJELIS TAKLIM USWATUN HASANAH	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	200.000.000,00
38	MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA	570.000.000,00	570.000.000,00	100,00%	530.000.000,00
39	PENGURUS CABANG NADHLATUL ULAMA (NU)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00
40	PENGURUS DAERAH NAHDLATUL WATHAN KOTA BIMA	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00
41	Hibah Kepada Pondok Pesantren di Kota Bima	0,00	0,00	0,00%	680.000.000,00
42	KOMITE PENDIRIAN INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI BIMA	0,00	0,00	0,00%	200.000.000,00
43	Masyarakat Ekonomi Syariah	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00
44	BKMM-DMI KOTA BIMA	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	0,00
45	PONDOK RUMAH PENGHAFAL QUR'AN (RPQ) AS-SUNNAH	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	0,00
46	PONDOK PESANTREN IMAM AHMAD	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	0,00
47	MESJID DAN MUSHALA SE KOTA BIMA	6.555.000.000,00	6.350.000.000,00	96,87%	0,00
48	UIN	10.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
49	KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00%	40.000.000,00
50	DEKRANASDA	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00%	0,00

NO.	BELANJA HIBAH	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
D	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	977.856.000,00	977.856.000,00	100,00%	122.232.000,00
1	Partai Amanat Nasional	146.448.000,00	146.448.000,00	100,00%	18.306.000,00
2	Partai Bulan Bintang	96.528.000,00	96.528.000,00	100,00%	12.066.000,00
3	Partai Demokrat	95.424.000,00	95.424.000,00	100,00%	11.928.000,00
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	89.436.000,00	89.436.000,00	100,00%	11.179.500,00
5	Partai Golongan Karya	164.160.000,00	164.160.000,00	100,00%	20.520.000,00
6	Partai Hati Nurani Rakyat	64.104.000,00	64.104.000,00	100,00%	8.013.000,00
7	Partai Keadilan Sejahtera	67.812.000,00	67.812.000,00	100,00%	8.476.500,00
8	Partai Kebangkitan Bangsa	59.064.000,00	59.064.000,00	100,00%	7.383.000,00
9	Partai NasDem	69.312.000,00	69.312.000,00	100,00%	8.664.000,00
10	Partai PERINDO	49.224.000,00	49.224.000,00	100,00%	6.153.000,00
11	Partai Persatuan Pembangunan	76.344.000,00	76.344.000,00	100,00%	9.543.000,00
E	Belanja Hibah Dana BOS	2.864.450.856,00	2.199.095.139,00	76,77%	0,00
1	Hibah Satdik Negeri	80.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
2	SD AL IKHWAN SALAMA KOTA BIMA	46.800.000,00	37.800.000,00	80,77%	0,00
3	SD AL-ISLAM SUNTU KOTA BIMA	126.000.000,00	102.095.500,00	81,03%	0,00
4	SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM SALAMA KOTA BIMA	193.500.000,00	154.483.500,00	79,84%	0,00
5	SD IT AL HIKMAH MELAYU KOTA BIMA	189.000.000,00	151.762.539,00	80,30%	0,00
6	SD MUHAMMADIYAH GILIPANDA KOTA BIMA	136.800.000,00	109.781.000,00	80,25%	0,00
7	SDIT IMAM SYAFII KEDO KOTA BIMA	281.700.000,00	228.600.000,00	81,15%	0,00
8	SDIT INSAN KAMIL SANTI KOTA BIMA	436.500.000,00	351.583.360,00	80,55%	0,00
9	SDIT LASKAR PELANGI KOTA BIMA	17.100.000,00	14.400.000,00	84,21%	0,00
10	SDIT ULUL ALBAAB KOTA BIMA	96.300.000,00	45.547.000,00	47,30%	0,00
11	SMP AL IKHWAN	26.550.856,00	15.238.000,00	57,39%	0,00
12	SMP DARUL FURQAN KOTA BIMA	150.700.000,00	122.100.000,00	81,02%	0,00
13	SMP ISLAM NURUL IHSAN	90.200.000,00	71.138.800,00	78,87%	0,00
14	SMP ISLAM TAHFIDZ QUR AN	210.100.000,00	169.150.000,00	80,51%	0,00
15	SMP IT IMAM SYAFIY	420.200.000,00	338.897.900,00	80,65%	0,00
16	SMP MUHAMMADIYAH KOTA BIMA	116.600.000,00	89.701.000,00	76,93%	0,00
17	SMPIT INSAN KAMIL KOTA BIMA	159.500.000,00	127.596.540,00	80,00%	0,00
18	SMPIT LASKAR PELANGI KOTA BIMA	86.900.000,00	69.220.000,00	79,65%	0,00
	TOTAL	27.407.406.856,00	16.448.051.139,00	60,01%	16.712.982.000,00

5.1.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		7.259.000.000,00	6.507.250.000,00	1.422.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial berupa bantuan sosial kepada masyarakat untuk Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp7.259.000.000,00 dan direalisasi senilai Rp6.507.250.000,00 atau 89,64%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021

Rp1.422.000.000,00 maka realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 mengalami peningkatan senilai Rp5.085.250.000,00 atau 357,61%.

Rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.29
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan Tahun 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (Bantuan Pendidikan)	109.000.000,00	92.500.000,00	84,86	87.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat (Rumah Tidak Layak Huni)	1.300.000.000,00	1.215.000.000,00	93,46	1.255.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) RUMAH SINGGAH IKA MKOBI-MATARAM	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga	5.850.000.000,00	5.199.750.000,00	88,88	0,00
	TOTAL	7.259.000.000,00	6.507.250.000,00	89,64	1.422.000.000,00

Berdasarkan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 senilai Rp6.507.250.000,00 sudah termasuk realisasi Belanja Bantuan Pendidikan, Rumah Tidak Layak Huni, Bantuan Orang Terlantar dan Bantuan Langsung Tunai yang dianggarkan pada 3 SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.1.30
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang/Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2022

NO.	SKPD/ KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%
1	SEKRETARIAT DAERAH	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (Bantuan Pendidikan)	104.000.000,00	91.000.000,00	87,50
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat (Rumah Tidak Layak Huni)	1.300.000.000,00	1.215.000.000,00	93,46
3	DINAS SOSIAL	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (Bantuan Orang Terlantar)	5.000.000,00	1.500.000,00	30,00
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga (Bantuan Langsung Tunai)	5.850.000.000,00	5.199.750.000,00	88,88
		TOTAL	7.259.000.000,00	6.507.250.000,00	89,64

5.1.2.2	Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		156.536.638.651,00	153.809.784.287,73	138.378.990.564,74

Belanja Modal Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp156.536.638.651,00 dan terealisasi senilai Rp153.809.784.287,73 atau 98,26%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp138.378.990.564,74 maka realisasi Belanja Modal Tahun 2022 menunjukkan kenaikan senilai Rp15.430.793.722,99 atau 11,15%.

Belanja Modal Tahun 2022 terdiri dari :

Tabel 5.1.31
Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Tanah	3.359.000.000,00	3.035.329.060,00	90,36	737.365.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	44.581.464.683,00	45.650.535.702,00	102,40	28.081.390.647,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	35.817.758.287,00	34.349.972.004,73	95,90	66.975.887.199,03
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.256.078.301,00	69.040.535.395,00	96,89	40.902.636.451,71
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.522.337.380,00	1.733.412.126,00	113,87	1.681.711.267,00
Jumlah		156.536.638.651,00	153.809.784.287,73	98,26	138.378.990.564,74

5.1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		3.359.000.000,00	3.035.329.060,00	737.365.000,00

Belanja Modal Tanah Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp3.359.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.035.329.060,00 atau 90,36%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp737.365.000,00 maka realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022 menunjukkan kenaikan senilai Rp2.297.964.060,00 atau 311,65%. Realisasi Belanja Modal Tanah terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima.

Belanja Modal Tanah Tahun 2022 dan Tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.1.32
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Belanja Modal Tanah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00	717.400.000,00
-	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	717.400.000,00

No	Belanja Modal Tanah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
2	Belanja Modal Tanah Lapangan Lainnya	3.359.000.000,00	3.035.329.060,00	90,36	19.965.000,00
-	Belanja Modal Tanah untuk Makam	3.359.000.000,00	3.035.329.060,00	90,36	19.965.000,00
Jumlah		3.359.000.000,00	3.035.329.060,00	90,36	737.365.000,00

5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		44.581.464.683,00	45.650.535.702,00	28.081.390.647,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp44.581.464.683,00 dan terealisasi senilai Rp45.650.535.702,00 atau 102,40%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp28.081.390.647,00 maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2022 menunjukkan kenaikan senilai Rp17.569.145.055,00 atau 62,57%.

Tabel 5.1.33
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin OPD Tahun 2022

No	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.749.169.464,00	9.536.540.926,00	97,82
2	Dinas Kesehatan	5.789.334.043,00	5.734.129.639,00	99,05
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	650.000.000,00	641.200.000,00	98,65
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	36.148.400,00	35.890.000,00	99,29
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	112.883.000,00	112.283.532,00	99,47
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.475.000,00	26.230.000,00	99,07
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	109.858.730,00	109.851.350,00	99,99
8	Dinas Sosial	2.684.100,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	129.117.000,00	128.967.000,00	99,88
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	120.134.000,00	119.650.280,00	99,60
11	Dinas Ketahanan Pangan	21.146.100,00	21.145.000,00	99,99
12	Dinas Lingkungan Hidup	144.039.100,00	135.274.150,00	93,91
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	528.500.000,00	526.269.500,00	99,58
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	618.000.000,00	602.064.000,00	97,42
15	Dinas Perhubungan	92.750.000,00	91.660.000,00	98,82
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	237.700.000,00	225.496.000,00	94,87
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	29.359.000,00	29.359.000,00	100,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.010.000,00	26.010.000,00	100,00

No	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	474.614.370,00	468.706.000,00	98,76
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	521.250.000,00	493.196.500,00	94,62
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	426.712.016,00	426.646.000,00	99,98
22	Dinas Pertanian	25.745.095,00	25.728.450,00	99,94
23	Sekretariat Daerah	1.925.859.340,00	1.910.781.301,00	99,22
24	Sekretariat DPRD	161.891.000,00	145.861.000,00	90,10
25	Kecamatan Rasanae Barat	9.015.000,00	9.015.000,00	100,00
26	Kecamatan Rasanae Timur	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Asakota	5.000.000,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Mpunda	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Raba	0,00	0,00	0,00
30	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	71.771.850,00	70.584.900,00	98,35
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	219.987.500,00	83.009.000,00	37,73
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	53.110.000,00	52.668.400,00	99,17
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
35	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima	22.236.200.575,00	23.835.318.774,00	107,19
JUMLAH		44.581.464.683,00	45.650.535.702,00	102,40

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.34
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Belanja Modal Peralatan Mesin	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Alat-alat Bantu	846.727.671,00	830.218.000,00	98,05	22.200.000,00
	- Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00
	- Belanja Modal Peralatan Selam	201.470.000,00	201.470.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	645.257.671,00	628.748.000,00	97,44	0,00
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.347.618.734,00	2.324.259.795,00	99,00	1.973.125.000,00
	- Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	64.438.000,00	64.437.000,00	100,00	1.973.125.000,00
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.210.450.734,00	1.200.612.795,00	99,19	0,00
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.072.730.000,00	1.059.210.000,00	98,74	0,00
3	Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	345.042.500,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	345.042.500,00
4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	41.200.000,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk	0,00	0,00	0,00	41.200.000,00

No	Belanja Modal Peralatan Mesin	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Penumpang				
5	Alat Bengkel Bermesin	53.932.219,00	50.212.200,00	93,10	0,00
	- Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	53.932.219,00	50.212.200,00	93,10	0,00
6	Alat Bengkel Tak Bermesin	12.609.050,00	11.300.000,00	89,62	0,00
	- Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	12.609.050,00	11.300.000,00	89,62	0,00
7	Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	239.174.000,00
	- Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	239.174.000,00
8	Peralatan Kantor	301.150.500,00	300.354.300,00	99,74	456.684.250,00
	- Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	301.150.500,00	300.354.300,00	99,74	448.434.250,00
9	Alat Rumah Tangga	588.004.290,00	566.658.200,00	96,37	831.250.600,00
	- Belanja Modal Mebel	99.800.000,00	99.800.000,00	100,00	149.800.000,00
	- Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	240.500.000,00
	- Belanja Modal Alat Pendingin	178.591.000,00	178.591.000,00	100,00	5.665.000,00
	- Belanja Modal Alat Dapur	5.741.000,00	5.741.000,00	100,00	15.000.000,00
	- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	196.947.900,00	175.607.500,00	89,16	414.510.100,00
	- Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	106.924.390,00	106.918.700,00	99,99	5.775.500,00
10	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	535.905.078,00	523.035.530,00	97,60	637.575.050,00
	- Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	95.011.000,00	95.011.000,00	100,00	84.536.250,00
	- Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	22.000.000,00	21.999.000,00	100,00	35.640.000,00
	- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	199.609.366,00	198.898.110,00	99,64	132.769.800,00
	- Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	97.317.000,00	96.871.300,00	99,54	242.326.000,00
	- Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	46.235.000,00
	- Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	25.605.000,00	22.580.000,00	88,19	30.315.000,00
	- Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	96.362.712,00	87.676.120,00	90,99	65.753.000,00
11	Alat-Alat Studio	46.000.000,00	33.950.000,00	73,80	0,00
	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	46.000.000,00	33.950.000,00	73,80	0,00
12	Alat-Alat Komunikasi	109.108.000,00	108.518.532,00	99,46	1.267.411.200,00
	- Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	101.243.000,00	100.653.532,00	99,42	0,00

No	Belanja Modal Peralatan Mesin	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	7.865.000,00	7.865.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	1.267.411.200,00
13	Alat-Alat Kedokteran	0,00	3.839.000.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	0,00	3.839.000.000,00	0,00	0,00
14	Alat Kesehatan Umum	26.541.674.323,00	24.772.034.118,00	93,33	10.755.397.847,00
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	26.541.674.323,00	24.772.034.118,00	93,33	10.755.397.847,00
15	Unit-Unit Laboratorium	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	0,00
16	Alat Peraga/Praktek Sekolah	8.505.690.000,00	8.422.944.000,00	99,03	7.398.419.468,00
	- Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	4.030.098.000,00	3.948.372.000,00	97,97	1.016.500.000,00
	- Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	4.475.592.000,00	4.474.572.000,00	99,98	6.381.919.468,00
17	Alat Laboratorium Hydrodinamica	492.300.000,00	464.257.500,00	94,30	0,00
	- Belanja Modal Peralatan Umum	492.300.000,00	464.257.500,00	94,30	0,00
18	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	31.100.000,00	31.100.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	31.100.000,00	31.100.000,00	100,00	0,00
19	Belanja Modal Komputer Unit	2.504.694.666,00	1.844.099.446,00	73,63	2.293.632.240,00
	- Belanja Modal Komputer Jaringan	146.813.896,00	146.252.226,00	99,62	249.392.700,00
	- Belanja Modal Personal Computer	1.895.349.770,00	1.374.225.670,00	72,51	1.349.781.540,00
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	462.531.000,00	323.621.550,00	69,97	694.458.000,00
20	Belanja Modal Komputer Unit	1.567.950.152,00	1.432.684.081,00	91,37	1.692.978.492,00
	- Belanja Modal Peralatan Mainframe	12.368.100,00	11.891.000,00	96,14	10.018.000,00
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	171.310.000,00	158.787.200,00	92,69	76.149.975,00
	- Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	277.775.000,00
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.384.272.052,00	1.262.005.881,00	91,17	1.329.035.517,00
21	Alat Pengeboran Mesin	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00
	- Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00
22	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	- Belanja Modal Elektrik	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
23	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	92.750.000,00	91.660.000,00	98,82	0,00
	- Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	92.750.000,00	91.660.000,00	98,82	0,00

No	Belanja Modal Peralatan Mesin	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Jumlah	44.581.464.683,00	45.650.535.702,00	102,40	28.081.390.647,00

5.1.2.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		35.817.758.287,00	34.349.972.004,73	66.975.887.199,03

Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp35.817.758.287,00 dan terealisasi senilai Rp34.349.972.004,73 atau 95,90%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp66.975.887.199,00 maka realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2022 menunjukkan Penurunan senilai Rp32.625.915.194,30 atau 48,71%.

Tabel 5.1.35
Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung OPD Tahun 2022

No	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.260.366.000,00	17.049.253.000,00	98,78
2	Dinas Kesehatan	2.850.000.000,00	2.836.994.766,20	99,05
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.775.090.000,00	771.849.500,00	43,48
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	465.750.000,00	449.420.155,81	96,49
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	898.240.000,00	897.155.138,16	99,88
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	646.600.000,00	643.130.000,00	99,46
15	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	87.630.000,00	87.129.900,00	99,43
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	125.000.000,00	124.492.000,00	99,59
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	417.700.000,00	410.548.000,00	98,29
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.130.207.900,00	2.129.307.900,00	99,96
22	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00

No	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
23	Sekretariat Daerah	7.380.000.000,00	7.221.292.744,56	97,85
24	Sekretariat DPRD	68.000.000,00	67.500.000,00	99,26
25	Kecamatan Rasanae Barat	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Rasanae Timur	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Asakota	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Mpunda	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Raba	0,00	0,00	0,00
30	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	30.000.000,00	28.500.000,00	95,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
35	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima	22.236.200.575,00	23.835.318.774,00	107,19
JUMLAH		35.817.758.287,00	34.349.972.004,73	95,90

Belanja Modal Bangunan dan Gedung tahun 2022 dan Tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.1.36

Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.005.029.387,00	33.537.243.104,73	95,81	65.852.131.199,03
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	21.776.903.387,00	21.355.760.700,37	98,07	47.139.139.342,00
	- Belanja Modal Bangunan Gudang	452.200.000,00	444.548.000,00	98,31	194.668.480,00
	- Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.850.000.000,00	2.836.994.766,20	99,54	9.807.484.000,00
	- Belanja Modal Taman	9.925.926.000,00	8.899.939.638,16	89,66	8.710.839.377,03
2	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	812.728.900,00	812.728.900,00	100,00	1.123.756.000,00
	- Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	812.728.900,00	812.728.900,00	100,00	1.123.756.000,00
Jumlah		35.817.758.287,00	34.349.972.004,73	95,90	66.975.887.199,03

5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		71.256.078.301,00	69.040.535.395,00	40.902.636.451,71

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp71.256.078.301,00 dan terealisasi senilai Rp69.040.535.395,00 atau 96,89%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp40.902.636.451,71 maka realisasi

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 menunjukkan kenaikan senilai Rp28.137.898.943,29 atau 68,79%.

Tabel 5.1.37
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan OPD Tahun 2022

No	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	4.723.989.359,00	4.499.000.000,00	95,24
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.491.138.174,00	60.560.429.589,00	96,91
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	40.752.897,00	40.500.000,00	0,00
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	143.100.000,00	142.630.146,00	99,67
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	2.062.297.871,00	2.016.640.000,00	0,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	98.800.000,00	97.805.000,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	110.000.000,00	98.130.660,00	89,21
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	386.000.000,00	385.400.000,00	99,84
22	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00
23	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
24	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Rasanae Barat	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Rasanae Timur	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Asakota	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Mpunda	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Raba	0,00	0,00	0,00
30	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00

No	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	0,00	0,00	0,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
35	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		71.256.078.301,00	69.040.535.395,00	96,89

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dan Tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.1.38
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Jalan/Konstruksi Jalan	39.518.234.000,00	39.135.337.650,00	99,03	17.439.702.676,04
	- Belanja Modal Jalan Kota	30.896.338.500,00	30.516.492.150,00	98,77	11.550.508.902,48
	- Belanja Modal Jalan Desa	8.221.895.500,00	8.218.845.500,00	99,96	5.818.343.773,56
	- Belanja Modal Jalan Lainnya	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	70.850.000,00
2	Jembatan	3.720.567.000,00	3.720.567.000,00	100,00	1.623.051.572,48
	- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	3.371.817.000,00	3.371.817.000,00	100,00	1.623.051.572,48
	- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	348.750.000,00	348.750.000,00	100,00	0,00
3	Bangunan Air Irigasi	920.113.142,00	911.175.939,00	99,03	1.491.430.000,00
	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	920.113.142,00	911.175.939,00	99,03	1.491.430.000,00
4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.269.708.500,00	4.269.196.500,00	99,99	1.653.773.000,00
	- Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	613.318.000,00
	- Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	4.069.708.500,00	4.069.196.500,00	99,99	1.040.455.000,00
5	Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.277.042.500,00	1.276.442.500,00	99,95	3.011.988.417,42
	- Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	1.277.042.500,00	1.276.442.500,00	99,95	3.011.988.417,42
6	Bangunan Air Bersih/Baku	5.531.343.000,00	5.193.338.000,00	93,89	6.033.633.912,50
	- Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	5.531.343.000,00	5.193.338.000,00	93,89	6.033.633.912,50
7	Bangunan Air Kotor	8.793.230.032,00	7.593.002.146,00	86,35	8.663.056.873,27
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	6.224.670.032,00	5.024.912.000,00	80,73	5.622.728.981,89

No	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	- Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	196.000.000,00	196.000.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	2.372.560.000,00	2.372.090.146,00	99,98	3.040.327.891,38
9	Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.857.514.359,00	1.826.200.000,00	98,31	0,00
	- Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.857.514.359,00	1.826.200.000,00	98,31	0,00
10	Instalasi Gardu Induk Listrik	90.000.000,00	89.700.000,00	99,67	0,00
	- Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk	90.000.000,00	89.700.000,00	99,67	0,00
11	Instalasi Lain	110.000.000,00	98.130.660,00	89,21	0,00
	- Belanja Modal Instalasi Lain	110.000.000,00	98.130.660,00	89,21	0,00
12	Pengadaan Jaringan Air Minum	40.752.897,00	40.500.000,00	99,38	0,00
	- Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	40.752.897,00	40.500.000,00	99,38	0,00
13	Pengadaan Jaringan Listrik	5.127.572.871,00	4.886.945.000,00	95,31	986.000.000,00
	- Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	5.127.572.871,00	4.886.945.000,00	95,31	0,00
	- Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	986.000.000,00
Jumlah		71.256.078.301,00	69.040.535.395,00	96,89	40.902.636.451,71

5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		1.522.337.380,00	1.733.412.126,00	1.681.711.267,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.522.337.380,00 dan terealisasi senilai Rp1.733.412.126,00 atau 113,87%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp1.681.711.267,00 maka realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 menunjukkan kenaikan senilai Rp51.700.859,00 atau 3,07%.

Tabel 5.1.39
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya OPD Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.098.337.380,00	1.315.597.926,00	119,78
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00

No	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	389.000.000,00	382.827.000,00	98,41
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00
23	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
24	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Rasanae Barat	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Rasanae Timur	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Asakota	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Mpunda	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Raba	0,00	0,00	0,00
30	Inspektorat	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	25.000.000,00	24.997.200,00	99,99
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	0,00	0,00	0,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
35	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.522.337.380,00	1.733.412.126,00	113,87

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.1.40
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	1.437.337.380,00	1.648.425.926,00	114,69	1.581.611.267,00
	- Belanja Modal Buku Umum	339.000.000,00	332.828.000,00	98,18	526.660.400,00
	- Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	50.050.000,00	49.984.000,00	99,87	0,00
	- Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	1.048.287.380,00	1.265.613.926,00	120,73	1.054.950.867,00
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	50.000.000,00	49.999.000,00	100,00	99.800.000,00
	- Belanja Modal Audio Visual	50.000.000,00	49.999.000,00	120,73	99.800.000,00
3	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	- Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Aset Tidak Berwujud	35.000.000,00	34.987.200,00	99,96	0,00
	- Belanja Modal Software	35.000.000,00	34.987.200,00	99,96	0,00
Jumlah		1.522.337.380,00	1.733.412.126,00	113,87	1.681.711.267,00

5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		2.759.006.339,00	945.418.000,00	2.534.050.750,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja Tak Terduga tahun 2022 dianggarkan senilai Rp2.759.006.339,00 dan terealisasi senilai Rp945.418.000,00 atau 34,27%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp2.534.050.750,00 maka realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022 menunjukkan penurunan senilai Rp1.588.632.750,00 atau 62,69%.

Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022 terdiri dari :

Tabel 5.1.41
Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022

NO	TANGGAL SP2D	NO. SP2D	NAMA PENERIMA	URAIAN	JUMLAH
I	PENANGANAN TANGGAP DARURAT				133.624.000,00
1	13/12/2022	8010/TU NIHIL/KOBI/2022	DINAS PERTANIAN KOTA BIMA	BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI KOTA BIMA TAHUN 2022 KEPADA DINAS PERTANIAN KOTA BIMA SESUAI PROPOSAL TERLAMPIR	133.624.000,00

NO	TANGGAL SP2D	NO. SP2D	NAMA PENERIMA	URAIAN	JUMLAH
II	PENANGANAN KEPERLUAN MENDESAK PERCEPATAN RELOKASI				129.294.000,00
1	26/12/2022	8977/TU NIHIL/KOBI/2022	BPBD KOTA BIMA	BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGANAN KEPERLUAN MENDESAK PERCEPATAN RELOKASI MASYARAKAT DAN PENATAAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA BIMA TAHUN 2022 KEPADA BADAN PENGKULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BIMA SESUAI PROPOSAL TERLAMPIR	129.294.000,00
III	PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT				682.500.000,00
TOTAL PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2022					945.418.000,00

Pemakaian Belanja Tidak terduga tahun 2022 dapat direklasifikasi ke dalam belanja sebagai berikut :

RINCIAN REKLASIFIKASI BEBAN TIDAK TERDUGA KE BELANJA TAHUN 2022			
NO	Kode Rekening Beban	Uraian	Jumlah
1	BEBAN TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) PADA DINAS PERTANIAN KOTA BIMA TA 2022		
	5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	
	5.1.02.01.01.001	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	27.024.000,00
	5.1.02.02.01.051	Belanja jasa pembersihan pengendalian Hama dan Fumigasi	106.600.000,00
	Jumlah		133.624.000,00
2	BEBAN TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGANAN KEPERLUAN MENDESAK PERCEPATAN RELOKASI MASYARAKAT DAN PENATAAN SEMPADAN SUNGAI PADA BPBD KOTA BIMA TA 2022		
	8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	
	5.1.02.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	2.860.000,00
	5.1.02.01.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.284.000,00
	5.1.02.01.04.004	Belanja makan minum peserta/petugas/panitia	84.750.000,00
	5.1.02.02.05.001	Belanja Beban sewa ekskavator	28.400.000,00
	Jumlah		129.294.000,00
3	BEBAN TIDAK TERDUGA UNTUK SANTUNAN KEMATIAN DAN BANTUAN PENGobatan		
	5.1.06.01.01.001	Belanja Bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu	682.500.000,00
	Jumlah		682.500.000,00
	Jumlah Jumlah Relaksasi Beban Tidak Terduga		945.418.000,00

5.1.2.4	Belanja Transfer	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		0,00	0,00	0,00

Belanja Transfer Tahun 2022 dianggarkan senilai 0,00 dan terealisasi senilai 0,00 atau 0,00%. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2021 Rp0,00.

5.1.2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		0,00	0,00	0,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 dianggarkan senilai 0,00 dan terealisasi senilai 0,00 atau 0,00%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 Rp0,00.

5.1.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		0,00	0,00	0,00

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Tahun 2022 dianggarkan senilai 0,00 dan terealisasi senilai 0,00 atau 0,00%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Tahun 2021 Rp0,00.

5.1.3. PEMBIAYAAN DAERAH

5.1.3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		21.968.179.833,00	21.967.826.874,18	10.974.821.367,93

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp21.968.179.833,00 dan terealisasi senilai Rp21.967.826.874,18 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp10.974.821.367,93 maka realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp10.993.005.506,25 atau 100,17%.

Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2022 terdapat pada penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu senilai Rp10.974.821.367,93.

Tabel 5.1.42
Realisasi Pembiayaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
1	Penghematan Belanja	21.962.179.833,00	21.962.179.832,18	100,00	10.973.784.614,93
	- Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	4.462.179.833,00	4.462.179.832,18	100,00	1.426.215.364,93
	- Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	5.973.784.625,00
	- Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	2.999.215.375,00

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	- Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	574.569.250,00
2	Penerimaan Kembali Investasi Jangka Pendek berupa Dana Bergulir	6.000.000,00	5.647.042,00	94,12	1.036.753,00
	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	6.000.000,00	5.647.042,00	94,12	1.036.753,00
Jumlah Penerimaan		21.968.179.833,00	21.967.826.874,18	100,00	10.974.821.367,93
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
TOTAL PEMBIAYAAN		19.968.179.833,00	19.967.826.874,18	100,00	8.974.821.367,93

5.1.3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.000.000.000,00 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp2.000.000.000,00, tidak terdapat kenaikan / penurunan pada Pengeluaran Pembiayaan.

5.1.4	SiLPA Tahun Berjalan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		76.583.026.629,67	21.962.179.832,18

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 senilai Rp76.583.026.629,67 dan Tahun 2021 senilai Rp21.962.179.832,18 terdiri dari :

Tabel 5.1.43
Nilai SiLPA Tahun Berjalan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas di Daerah	71.620.257.944,90	21.804.706.778,67
2	Kas Dana Kapitasi pada Dinas Kesehatan	7.894.544,00	0,00
3	Kas Dana BOS	664.161,51	151.753.053,51
4	Kas Bendahara Pengeluaran	0,00	5.720.000,00
5	Kas di BLUD RSUD	4.954.209.979,26	0,00
Jumlah		76.583.026.629,67	21.962.179.832,18

5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Laporan Perubahan SAL Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	21.962.179.832,18	10.973.784.614,93
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	21.962.179.832,18	10.973.784.614,93
3	Subtotal (1 - 2)	0,00	0,00
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	76.583.026.629,67	21.962.179.832,18
5	Subtotal (3 + 4)	76.583.026.629,67	21.962.179.832,18
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6)	76.583.026.629,67	21.962.179.832,18

5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	2022 (Rp) 21.962.179.832,18	2021 (Rp) 10.973.784.614,93
--------------	----------------------------------	--	--

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, yaitu senilai Rp21.962.179.832,18. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp10.973.784.614,93 maka Saldo Anggaran Lebih Awal mengalami kenaikan senilai Rp10.988.395.217,25 atau 100,13%.

5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	2022 (Rp) 21.962.179.832,18	2021 (Rp) 10.973.784.614,93
--------------	---	--	--

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2021 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 senilai Rp21.962.179.832,18. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp10.973.784.614,93 maka Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan mengalami kenaikan senilai Rp10.988.395.217,25 atau 100,13%.

5.2.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	2022 (Rp) 76.583.026.629,67	2021 (Rp) 21.962.179.832,18
--------------	---	--	--

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 senilai Rp 76.583.026.629,67. Jika dibandingkan tahun 2021 Rp21.962.179.832,18 maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mengalami kenaikan senilai Rp 54.620.846.797,49 atau 349,70 %. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.2
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan	805.811.256.060,22	729.687.511.750,67
2	Belanja dan Transfer	749.196.056.304,73	716.700.153.286,42

No	Uraian	2022	2021
3	Surplus/Defisit	56.607.153.392,23	12.987.358.464,25
4	Penerimaan Pembiayaan	21.967.826.874,18	10.974.821.367,93
5	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6	Pembiayaan Netto	19.967.826.874,18	8.974.821.367,93
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	76.583.026.629,67	21.962.179.832,18

5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		0,00	0,00

Tidak Terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 2022 begitu juga dengan Tahun 2021.

5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		76.583.026.629,67	21.962.179.832,18

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2022 senilai Rp76.583.026.629,67. Jika dibandingkan tahun 2021 Rp21.962.179.832,18 maka Saldo Anggaran Lebih Akhir mengalami kenaikan senilai Rp54.620.846.797,49 atau 248,67 %. sebagai berikut.

. Tabel 5.2.3
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	21.962.179.832,18	10.973.784.614,93
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	21.962.179.832,18	10.973.784.614,93
3	Subtotal (1 - 2)	0,00	0,00
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	76.583.026.629,67	21.962.179.832,18
5	Subtotal (3 + 4)	76.583.026.629,67	21.962.179.832,18
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6)	76.583.026.629,67	21.962.179.832,18

5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO), berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima, menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel 5.3.1
Laporan Operasional – LO Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	23.013.317.601,03	20.964.219.184,94	2.049.098.416,09	9,77
4	Pendapatan Retribusi Daerah	23.063.630.472,28	15.132.006.221,00	7.931.624.251,28	52,42
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.545.139.285,00	1.284.388.411,79	260.750.873,21	20,30
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.749.833.103,75	10.907.930.231,82	3.841.902.871,93	35,22
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	62.371.920.462,06	48.288.544.049,55	14.083.376.412,51	29,17
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				
16	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	646.789.586.218,00	581.655.094.870,00	65.134.491.348,00	11,20
17	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (DID)- LO	39.108.685.000,00	30.025.143.000,00	9.083.542.000,00	30,25
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	685.898.271.218,00	611.680.237.870,00	74.218.033.348,00	12,13
19	TRANSFER ANTAR DAERAH				
20	Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak)- LO	50.734.478.786,00	42.282.192.857,00	8.452.285.929,00	19,99
	Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bantuan Keuangan)- LO	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (19)	51.234.478.786,00	42.282.192.857,00	8.952.285.929,00	21,17
22	Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 17 + 20)	737.132.750.004,00	653.962.430.727,00	83.170.319.277,00	12,72
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	80.488.640.312,30	8.106.996.664,00	72.381.643.648,30	892,83
25	Pendapatan Lainnya	0,00	17.931.340.700,00	(17.931.340.700,00)	(100,00)
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (23 s.d 24)	80.488.640.312,30	26.038.337.364,00	54.450.302.948,30	209,12
27	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 25)	879.993.310.778,36	728.289.312.140,55	151.703.998.637,81	20,83
28	BEBAN				
29	BEBAN OPERASI				
30	Beban Pegawai	361.265.993.269,00	355.177.717.132,55	6.088.276.136,45	1,71
31	Beban Barang dan Jasa	207.084.266.391,13	191.518.612.942,45	15.565.653.448,68	8,13
32	Beban Hibah	29.679.216.175,55	28.319.224.111,60	1.359.992.063,95	4,80
33	Beban Bantuan Sosial	6.507.250.000,00	3.526.290.000,00	2.980.960.000,00	84,54
34	Beban Penyisihan Piutang	2.179.367.171,19	1.844.994.095,22	334.373.075,97	18,12
35	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Jumlah Beban Operasi (29 s/d 34)	606.716.093.006,87	580.386.838.281,82	26.329.254.725,05	4,54
37	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
38	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	34.456.691.091,20	36.433.909.419,01	(1.977.218.327,81)	(5,43)
39	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.870.273.235,00	16.209.583.416,00	6.660.689.819,00	41,09
40	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	76.824.655.857,00	80.252.331.928,00	(3.427.676.071,00)	(4,27)
41	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	125.581.722,44	128.098.926,78	(2.517.204,34)	(1,97)
43	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (36 s.d 40)	134.277.201.905,64	133.023.923.689,79	1.253.278.215,85	0,94
44	BEBAN TRANSFER				
44	Beban Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jumlah Beban Transfer (42 s.d 43)	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BEBAN TAK TERDUGA				
49	Beban Tak Terduga	945.418.000,00	2.534.050.750,00	(1.588.632.750,00)	(62,69)
50	Jumlah Beban Tak Terduga (46)	945.418.000,00	2.534.050.750,00	(1.588.632.750,00)	(62,69)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
51	JUMLAH BEBAN (34+ 41 + 45 + 48)	741.938.712.912,51	715.944.812.721,61	25.993.900.190,83	3,63
52	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI (26- 48)	138.054.597.865,85	12.344.499.418,94	125.710.098.446,91	1.018,35
53	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
54	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
55	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	95.434.722,54	71.577.028,13	23.857.694,41	33,33
58	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL (53 s.d 55)	95.434.722,54	71.577.028,13	23.857.694,41	33,33
59	DEFISIT NON OPERASIONAL				
60	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	2.210.532.753,60	0,00	2.210.532.753,60	0,00
61	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
63	JUMLAH DEFISIT DARI NON OPERASIONAL (58 s.d 60)	2.210.532.753,60	0,00	2.210.532.753,60	0,00
64	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (56-61)	(2.115.098.031,06)	71.577.028,13	(2.186.675.059,19)	(3.055,00)
65	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 62)	135.939.499.834,86	12.416.076.447,07	123.433.635.707,18	994,14
66	POS LUAR BIASA				
67	PENDAPATAN LUAR BIASA				
68	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BEBAN LUAR BIASA				
71	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Jumlah Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
73	POS LUAR BIASA (67 - 70)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SURPLUS/(DEFISIT) – LO (63 + 71)	135.939.499.834,86	12.416.076.447,07	123.433.635.707,18	994,14

Penjelasan Laporan Operasional tahun 2022 adalah sebagai berikut.

$$5.3.1 \quad \text{Pendapatan – LO} \quad \frac{2022 \text{ (Rp)}}{879.993.310.778,36} \quad \frac{2021 \text{ (Rp)}}{728.289.312.140,55}$$

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Kota Bima yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih tahun 2022 senilai Rp 879.993.310.778,36 dan tahun 2021 senilai Rp728.289.312.140,55, sehingga hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih mengalami peningkatan senilai Rp151.703.998.637,81 atau 20,83 %.

Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.2

Laporan Pendapatan –LO Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	23.013.317.601,03	20.964.219.184,94	2.049.098.416,09	9,77
4	Pendapatan Retribusi Daerah	23.063.630.472,28	15.132.006.221,00	7.931.624.251,28	52,42
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.545.139.285,00	1.284.388.411,79	260.750.873,21	20,30
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.749.833.103,75	10.907.930.231,82	3.841.902.871,93	35,22
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	62.371.920.462,06	48.288.544.049,55	14.083.376.412,51	29,17
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil	59.017.743.538,00	24.988.937.000,00	34.028.806.538,00	136,18
12	Dana Alokasi Umum	430.503.529.123,00	432.159.814.000,00	(1.656.284.877,00)	(0,38)
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	89.773.006.178,00	68.320.563.668,00	21.452.442.510,00	31,40
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	67.495.307.379,00	56.185.780.202,00	11.309.527.177,00	20,13
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 13)	646.789.586.218,00	581.655.094.870,00	65.134.491.348,00	11,20
16	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA DANA INSENTIF DAERAH				
17	Dana Insentif Daerah	39.108.685.000,00	30.025.143.000,00	9.083.542.000,00	30,25
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	39.108.685.000,00	30.025.143.000,00	9.083.542.000,00	30,25
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	685.898.271.218,00	611.680.237.870,00	74.218.033.348,00	12,13
18	TRANSFER ANTAR DAERAH				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50.734.478.786,00	42.282.192.857,00	8.952.285.929,00	21,17
20	Bantuan Keuangan	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (19 + 20)	51.234.478.786,00	42.282.192.857,00	8.952.285.929,00	21,17
22	Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 17 + 21)	737.132.750.004,00	653.962.430.727,00	83.170.319.277,00	12,72
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	80.488.640.312,30	26.038.337.364,00	54.450.302.948,30	209,12
25	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	80.488.640.312,30	26.038.337.364,00	54.450.302.948,30	209,12
27	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 25)	879.993.310.778,36	728.289.312.140,55	151.703.998.637,81	20,83

Adapun Pendapatan-LO masing-masing SKPD tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.3

Laporan Pendapatan – LO SKPD Tahun 2022 dan 2021

No.	SKPD	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	236.500.000,00	364.000.000,00	(127.500.000,00)	(35,03)
2	Dinas Kesehatan	2.961.985.537,18	17.313.791.936,00	(14.351.806.398,82)	(82,89)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	18.096.019.899,26	0,00	18.096.019.899,26	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.378.436.759,28	1.025.954.438,00	352.482.321,28	34,36
5	Dinas Perhubungan	793.548.000,00	297.965.000,00	495.583.000,00	166,32
6	Dinas Lingkungan Hidup	364.200.000,00	291.095.000,00	73.105.000,00	25,11
7	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.081.231.041,00	2.042.571.504,00	38.659.537,00	1,89
8	Dinas Pariwisata	698.861.887,00	574.745.000,00	124.116.887,00	21,60

No.	SKPD	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
9	Sekretariat Daerah	26.185.489.812,00	7.026.914.000,00	19.158.575.812,00	272,65
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	772.980.931.078,64	697.869.653.102,55	75.111.277.976,09	10,76
11	Dinas Pertanian	251.750.750,00	207.786.000,00	43.964.750,00	21,16
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	173.500.000,00	206.000.000,00	(32.500.000,00)	(15,78)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.000.004.372,00	686.552.160,00	313.452.212,00	45,66
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	254.074.440,00	197.284.000,00	56.790.440,00	28,79
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	47.407.532.802,00	0,00	47.407.532.802,00	0,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.085.244.400,00	0,00	5.085.244.400,00	0,00
20	Kecamatan Rasanae Barat	0,00	185.000.000,00	(185.000.000,00)	(100,00)
21	Kecamatan Raba	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		879.993.310.778,36	728.289.312.140,55	151.703.998.637,81	20,83

5.3.1.1	Pendapatan Asli	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	Daerah-LO	62.371.920.462,06	48.288.544.049,55

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO yang diakui menjadi hak Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 senilai Rp62.371.920.462,06 dan tahun 2021 senilai Rp48.288.544.049,55 sehingga hak Pemerintah Kota Bima yang menambah ekuitas mengalami Peningkatan senilai Rp14.083.376.412,51 atau 29,17 % dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.4
Laporan Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2022 dan 2021

PENDAPATAN ASLI DAERAH	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan Pajak Daerah	23.013.317.601,03	20.964.219.184,94	2.049.098.416,09	9,77
Pendapatan Retribusi Daerah	23.063.630.472,28	15.132.006.221,00	7.931.624.251,28	52,42
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.545.139.285,00	1.284.388.411,79	260.750.873,21	20,30
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.749.833.103,75	10.907.930.231,82	3.841.902.871,93	35,22
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	62.371.920.462,06	48.288.544.049,55	14.083.376.412,51	29,17

Adapun masing-masing akun pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.1.1	Pendapatan Pajak	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	Daerah-LO	23.013.317.601,03	20.964.219.184,94

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional untuk tahun 2022 senilai Rp23.013.317.601,03 dan tahun 2021 senilai Rp20.964.219.184,94 sehingga hak Pemerintah Kota Bima yang menambah ekuitas mengalami peningkatan senilai Rp2.049.098.416,09 atau 9,77% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.5
Laporan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Pajak Daerah - LO	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pajak Hotel	911.273.944,30	415.716.422,00	495.557.522,30	119,21
2	Pajak Restoran	2.139.537.662,65	1.269.300.346,20	870.237.316,45	68,56
3	Pajak Hiburan	36.669.080,00	19.426.900,00	17.242.180,00	88,75
4	Pajak Reklame	487.984.266,25	567.828.129,81	(79.843.863,56)	(14,06)
5	Pajak Penerangan Jalan	9.443.782.515,00	8.463.177.492,00	980.605.023,00	11,59
6	Pajak Parkir	136.015.500,00	113.586.000,00	22.429.500,00	19,75
7	Pajak Air Tanah	56.651.077,65	45.769.896,18	10.881.181,47	23,77
8	Pajak Sarang Burung Walet	13.500.000,00	11.500.000,00	2.000.000,00	17,39
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.043.239,18	207.879.473,75	142.163.765,43	68,39
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.181.964.524,00	5.199.104.615,00	(17.140.091,00)	(0,33)
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.255.895.792,00	4.650.929.910,00	(395.034.118,00)	(8,49)
Jumlah		23.013.317.601,03	20.964.219.184,94	2.049.098.416,09	9,77

Secara rinci Pendapatan Pajak – LO Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.6
Laporan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Pajak Daerah - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
Pajak Hotel					
1	Hotel - LO	873.061.994,30	378.204.977,00	494.857.017,30	130,84
2	Losmen - LO	35.993.450,00	29.427.975,00	6.565.475,00	22,31
3	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) - LO	2.218.500,00	8.083.470,00	(5.864.970,00)	(72,56)
Jumlah		911.273.944,30	415.716.422,00	495.557.522,30	119,21
Pajak Restoran					
1	Restoran- LO	1.217.923.521,40	583.270.529,00	634.652.992,40	108,81
2	Rumah makan- LO	182.783.607,70	165.634.014,00	17.149.593,70	10,35
3	Kafetaria- LO	157.054.894,00	90.469.676,20	66.585.217,80	73,60
4	Kantin- LO	42.533.883,00	8.741.706,00	33.792.177,00	386,56
5	Warung- LO	248.366.516,15	177.019.248,00	71.347.268,15	40,30
6	Jasa boga/katering- LO	290.875.240,40	244.165.173,00	46.710.067,40	19,13
Jumlah		2.139.537.662,65	1.269.300.346,20	870.237.316,45	68,56
Pajak Hiburan					
1	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya- LO	5.641.080,00	5.486.800,00	154.280,00	2,81
3	Permainan bilyar, golf, bowling- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan - LO	31.028.000,00	13.940.100,00	17.087.900,00	122,58
5	Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitnes center</i>)- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hiburan anak- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		36.669.080,00	19.426.900,00	17.242.180,00	88,75
Pajak Reklame					
1	Reklame papan/bill board/videotron/megatron- LO	399.450.614,59	418.616.119,39	(19.165.504,80)	(4,58)
2	Reklame kain- LO	76.658.000,00	143.312.250,00	(66.654.250,00)	(46,51)
3	Reklame berjalan- LO	11.875.651,66	5.899.760,42	5.975.891,24	101,29
Jumlah		487.984.266,25	567.828.129,81	(79.843.863,56)	(14,06)
Pajak Penerangan Jalan					
1	Pajak Penerangan Jalan PLN- LO	9.443.782.515,00	8.463.177.492,00	980.605.023,00	11,59
Jumlah		9.443.782.515,00	8.463.177.492,00	980.605.023,00	11,59

No.	Pajak Daerah - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
Pajak Parkir					
1	Pajak Parkir - LO	136.015.500,00	113.586.000,00	22.429.500,00	19,75
	Jumlah	136.015.500,00	113.586.000,00	22.429.500,00	19,75
Pajak Air Tanah					
1	Pajak Air Tanah - LO	56.651.077,65	45.769.896,18	10.881.181,47	23,77
	Jumlah	56.651.077,65	45.769.896,18	10.881.181,47	23,77
Pajak Sarang Burung Walet					
1	Pajak Sarang Burung Walet - LO	13.500.000,00	11.500.000,00	2.000.000,00	17,39
	Jumlah	13.500.000,00	11.500.000,00	2.000.000,00	17,39
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
1	Pasir dan kerikil- LO	134.597.875,11	86.731.362,50	47.866.512,61	55,19
2	Tanah liat- LO	5.941.457,79	7.503.875,00	(1.562.417,21)	(20,82)
3	Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO	209.503.906,28	113.644.236,25	95.859.670,03	84,35
	Jumlah	350.043.239,18	207.879.473,75	142.163.765,43	68,39
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					
1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan- LO	5.181.964.524,00	5.199.104.615,00	(17.140.091,00)	(0,33)
	Jumlah	5.181.964.524,00	5.199.104.615,00	(17.140.091,00)	(0,33)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
1	BPHTB- LO	4.255.895.792,00	4.650.929.910,00	(395.034.118,00)	(8,49)
	Jumlah	4.255.895.792,00	4.650.929.910,00	(395.034.118,00)	(8,49)
Total Pajak daerah		23.013.317.601,03	20.964.219.184,94	2.049.098.416,09	9,77

5.3.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		23.063.630.472,28	15.132.006.221,00

Retribusi Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Bima atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional untuk tahun 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp23.063.630.472,28 dan Rp15.132.006.221,00 sehingga hak Pemerintah Kota Bima yang menambah ekuitas mengalami peningkatan senilai Rp7.931.624.258,28 atau 52,42 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.7
Pendapatan Retribusi – LO SKPD Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO	1.792.047.800,00	1.256.238.400,00	535.809.400,00	42,65
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	14.228.723.536,00	7.984.098.072,00	6.244.625.464,00	78,21
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	340.923.450,00	323.439.800,00	17.483.650,00	5,41
4	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	509.321.000,00	869.616.000,00	(360.295.000,00)	(41,43)
5	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	315.780.000,00	227.542.000,00	88.238.000,00	38,78
6	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO	487.003.000,00	78.751.000,00	408.252.000,00	518,41
7	Retribusi Los-LO	13.950.000,00	11.050.000,00	2.900.000,00	26,24
8	Retribusi Pengujian Kendaraan	429.810.000,00	24.475.000,00	405.335.000,00	1.656,12

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
	Bermotor-LO				
9	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	0,00	47.225.000,00	(47.225.000,00)	(100,00)
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	187.738.000,00	197.284.000,00	(9.546.000,00)	(4,84)
11	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	327.305.000,00	489.280.000,00	(161.975.000,00)	(33,10)
14	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	21.140.000,00	62.220.000,00	(41.080.000,00)	(66,02)
15	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	546.000.000,00	72.000.000,00	474.000.000,00	658,33
16	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	0,00	144.000.000,00	(144.000.000,00)	(100,00)
17	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	50.745.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	237.675.000,00	243.015.000,00	(5.340.000,00)	(2,20)
19	Retribusi Pemakaian Alat-LO	290.645.000,00	379.950.000,00	(89.305.000,00)	(23,50)
20	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO	452.400.314,00	0,00	452.400.314,00	0,00
21	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO	950.407.726,00	1.344.891.504,00	(394.483.778,00)	(29,33)
22	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO	8.730.000,00	1.416.000,00	7.314.000,00	516,53
23	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	0,00	9.934.000,00	(9.934.000,00)	(100,00)
24	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	216.983.500,00	206.356.000,00	10.627.500,00	5,15
25	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LO	47.710.000,00	23.400.000,00	24.310.000,00	103,89
26	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO	542.245.387,00	393.395.000,00	148.850.387,00	37,84
27	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	1.051.296.759,28	725.429.438,00	325.867.321,28	44,92
28	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	15.050.000,00	17.000.000,00	(1.950.000,00)	(11,47)
Total Retribusi Daerah		23.063.630.472,28	15.132.006.214,00	7.931.624.258,28	52,42

Pendapatan Retribusi - LO senilai Tahun 2022 Rp23.063.630.472,28 dikelola oleh 12 (Dua Belas) SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.8
Pendapatan Retribusi – LO SKPD Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	114.000.000,00	144.000.000,00	(30.000.000,00)	(20,83)
2	Dinas Kesehatan	1.942.880.500,00	9.390.440.279,00	(7.447.559.779,00)	(79,31)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
3	RSUD Kota Bima	14.248.973.536,00	0,00	14.248.973.536,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.378.436.759,28	1.025.954.438,00	352.482.321,28	34,36
5	Dinas Perhubungan	793.548.000,00	297.965.000,00	495.583.000,00	166,32
6	Dinas Lingkungan Hidup	364.200.000,00	291.095.000,00	73.105.000,00	25,11
7	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.081.121.040,00	2.042.571.504,00	38.549.536,00	1,89
8	Dinas Pariwisata	698.861.887,00	574.745.000,00	124.116.887,00	21,60
9	Sekretariat Daerah	440.380.000,00	361.970.000,00	78.410.000,00	21,66
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	393.240.000,00	392.195.000,00	1.045.000,00	0,27
11	Dinas Pertanian	251.750.750,00	207.786.000,00	43.964.750,00	21,16
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	168.500.000,00	206.000.000,00	(37.500.000,00)	(18,20)
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	187.738.000,00	197.284.000,00	(9.546.000,00)	(4,84)
JUMLAH		23.063.630.472,28	15.132.006.221,00	7.931.624.251,28	52,42

5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		2022 (Rp)	2021 (Rp)
		1.545.139.285,00	1.284.388.411,79

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 bersumber dari deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bima pada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Bank NTB, PD BPR NTB, PT Jamkrida NTB Bersaing dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kasabua Ade senilai Rp1.545.139.285,00 dan pada tahun 2021 senilai Rp1.284.388.411,79 terjadi penurunan senilai Rp260.750.873,21 atau 20,30 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.9

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan – LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Nama Perusahaan	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	PT. Bank NTB	1.364.656.675,00	1.069.057.966,00	295.598.709,00	27,65
2	PD. BPR NTB	155.056.258,00	180.014.359,00	(24.958.101,00)	(13,86)
3	PT.Jamkrida NTB Bersaing	25.426.352,00	23.932.217,79	1.494.134,21	6,24
4	KPN Kasabua Ade	0,00	11.383.869,00	(11.383.869,00)	(100,00)
Total		1.545.139.285,00	1.284.388.411,79	260.750.873,21	20,30

5.3.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		2022 (Rp)	2021 (Rp)
		14.749.833.103,75	10.907.930.231,82

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai Rp14.749.833.103,75 dan 2021 senilai

Rp10.907.930.231,82 sehingga mengalami penurunan senilai Rp3.841.902.871,93 atau 35,22% terdiri dari :

Tabel 5.3.10
Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Hasil penjualan peralatan/mesin - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hasil penjualan gedung dan bangunan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Biota Perairan-LO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	40.064.900,00	21.434.000,00	18.630.900,00	86,92
5	Jasa giro kas daerah - LO	597.948.766,56	660.328.488,75	(62.379.722,19)	(9,45)
6	Jasa giro kas bendahara - LO	36.388.559,37	27.989.273,02	8.399.286,35	30,01
7	Pendapatan bunga deposito - LO	1.701.109.920,75	1.737.013.060,61	(35.903.139,86)	(2,07)
8	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	406.652.754,32	692.390.785,02	(285.738.030,70)	(41,27)
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	25.536.962,75	68.896.386,00	(43.359.423,25)	(62,93)
10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	296.382.068,00	27.868.961,50	268.513.106,50	963,48
11	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan - LO	170.251,00	279.305,92	(109.054,92)	(39,04)
13	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	1.336.440,00	0,00	1.336.440,00	0,00
14	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan - LO	5.063.080,00	55.126.218,00	(50.063.138,00)	(90,82)
15	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas - LO	0,00	43.752.600,00	(43.752.600,00)	(100,00)
16	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Saku /Transport Peserta Rapat Koordinasi/Rapat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Terhadap Pihak Ketiga - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pendapatan dari pengembalian kelebihan SP2D - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Denda Keterlambatan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pendapatan Dari Pengembalian Sewa Ruang Rapat Pertemuan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Jasa Konsultansi - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Honorarium PNS - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Lain-lain PAD yang sah lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan dari BLUD-LO	3.839.000.000,00	0,00	3.839.000.000,00	0,00
27	Hasil dari pengelolaan dana bergulir - LO	110.001,00	0,00	110.001,00	0,00
28	Pendapatan dana kapitasi JKN - LO	7.795.069.400,00	7.572.851.153,00	222.218.247,00	2,93
Total		14.749.833.103,75	10.907.930.231,82	3.841.902.871,93	35,22

5.3.1.2	Pendapatan Transfer – LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		737.132.750.004,00	653.962.430.727,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bima adalah Pendapatan tahun 2022 senilai Rp737.132.750.004,00 dan 2021 Rp653.962.430.727,00 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp83.170.319.277,00 atau 12,72% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.11
Pendapatan Transfer – LO Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
1	PENDAPATAN TRANSFER				
2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				
3	DANA PERIMBANGAN				
4	Dana Bagi Hasil Pajak	17.958.559.206,00	12.307.792.000,00	5.650.767.206,00	45,91
5	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	41.059.184.332,00	12.681.145.000,00	28.378.039.332,00	223,78
6	Dana Alokasi Umum	430.503.529.123,00	432.159.814.000,00	(1.656.284.877,00)	(0,38)
7	Dana Alokasi Khusus	157.268.313.557,00	124.506.343.870,00	32.761.969.687,00	26,31
8	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (4 s/d 6)	646.789.586.218,00	581.655.094.870,00	65.134.491.348,00	11,20
9	DANA INSENTIF DAERAH	39.108.685.000,00	30.025.143.000,00	9.083.542.000,00	30,25
10	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (9)	685.898.271.218,00	611.680.237.870,00	74.218.033.348,00	12,13
11	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	51.234.478.786,00	42.282.192.857,00	8.952.285.929,00	21,17
13	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (12)	51.234.478.786,00	42.282.192.857,00	8.952.285.929,00	21,17
14	Total Pendapatan Transfer (7+10+13)	737.132.750.004,00	653.962.430.727,00	83.170.319.277,00	12,72

5.3.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		685.898.271.218,00	611.680.237.870,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2022 senilai Rp685.898.271.218,00 dan 2021 senilai Rp611.680.237.870,00 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp74.218.033.348,00 atau 12,13%.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut

Tabel 5.3.12
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan 2021

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Dana Perimbangan	646.789.586.218,00	581.655.094.870,00	65.134.491.348,00	11,20
2	Dana Insentif Daerah	39.108.685.000,00	30.025.143.000,00	9.083.542.000,00	30,25

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
	Total	685.898.271.218,00	611.680.237.870,00	74.218.033.348,00	12,13

Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut.

5.3.1.2.1.1	Dana Perimbangan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		646.789.586.218,00	581.655.094.870,00

Dana Perimbangan pada Tahun 2022 senilai Rp685.898.271.218,00 dan 2021 senilai Rp581.655.094.870,00 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp65.134.491.348,00 atau 11,20%.

Dana Perimbangan pada tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut

Tabel 5.3.13

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan– LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
	DANA PERIMBANGAN				
1	Bagi Hasil Pajak				
	Pajak Bumi dan Bangunan	5.390.876.827,00	3.620.315.000,00	1.770.561.827,00	48,91
	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	8.476.804.507,00	6.377.993.000,00	2.098.811.507,00	32,91
	Cukai Hasil Tembakau	4.090.877.872,00	2.309.484.000,00	1.781.393.872,00	77,13
	Jumlah	17.958.559.206,00	12.307.792.000,00	5.650.767.206,00	45,91
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam				
	Provisi Sumber Daya Hutan	63.687.586,00	23.016.000,00	40.671.586,00	176,71
	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	38.825.432.535,00	11.529.810.000,00	27.295.622.535,00	236,74
	Pungutan Hasil Perikanan	2.170.064.211,00	1.128.319.000,00	1.041.745.211,00	92,33
	Jumlah	41.059.184.332,00	12.681.145.000,00	28.378.039.332,00	223,78
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	430.503.529.123,00	432.159.814.000,00	(1.656.284.877,00)	(0,38)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)				
	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	26.076.988.000,00	5.885.011.914,00	20.191.976.086,00	343,11
	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	2.466.236.500,00	4.030.742.000,00	(1.564.505.500,00)	(38,81)
	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	5.523.565.000,00	1.844.456.000,00	3.679.109.000,00	199,47
	DAK Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	1.115.590.000,00	(1.115.590.000,00)	(100,00)
	DAK Bidang Keluarga Berencana	37.802.206.678,00	21.061.946.020,00	16.740.260.658,00	79,48
	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.578.947.000,00	3.150.595.000,00	(1.571.648.000,00)	(49,88)
	DAK Bidang Kesehatan	0,00	2.987.853.683,00	(2.987.853.683,00)	(100,00)
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	1.361.623.728,00	(1.361.623.728,00)	(100,00)
	DAK Bidang Pendidikan	16.325.063.000,00	26.882.745.323,00	(10.557.682.323,00)	(39,27)
	DAK Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Bidang Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	19.996.779.270,00	0,00	19.996.779.270,00	0,00
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD	4.334.874.000,00	3.703.500.000,00	631.374.000,00	17,05
	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	34.424.858.975,00	42.213.111.000,00	(7.788.252.025,00)	(18,45)
	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD	1.029.000.000,00	432.000.000,00	597.000.000,00	138,19
	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM	387.372.856,00	361.347.600,00	26.025.256,00	7,20
	DAK Non Fisik Proyek Bantuan Operasional Kesehatan	3.248.199.820,00	5.073.270.071,00	(1.825.070.251,00)	(35,97)
	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.089.486.982,00	1.264.393.269,00	825.093.713,00	65,26
	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	0,00	892.665.262,00	(892.665.262,00)	(100,00)
	DAK Akreditasi Labkesda	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	771.100.000,00	923.200.000,00	(152.100.000,00)	(16,48)
	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal-LO	397.878.676,00	343.813.000,00	54.065.676,00	15,73
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	397.356.800,00	417.230.000,00	(19.873.200,00)	(4,76)
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	418.400.000,00	561.250.000,00	(142.850.000,00)	(25,45)
	DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	157.268.313.557,00	124.506.343.870,00	32.761.969.687,00	26,31
	Total Dana Perimbangan (1 + 2 + 3 + 4)	646.789.586.218,00	581.655.094.870,00	65.134.491.348,00	11,20

5.3.1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		39.108.685.000,00	30.025.143.000,00

Dana Perimbangan pada Tahun 2022 senilai Rp39.108.685.000,00 dan 2021 senilai Rp30.025.143.000,00 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp9.083.542.000,00 atau 30,25%.

5.3.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		51.234.478.786,00	42.282.192.857,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2022 senilai Rp51.234.478.786,00 dan 2021 senilai Rp42.282.192.857,00, sehingga mengalami

peningkatan senilai Rp8.952.285.929,00 atau 21,17% merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi NTB dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.14
Pendapatan DBH Provinsi – LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50.734.478.786,00	42.282.192.857,00	8.452.285.929,00	19,99
2	Bantuan Keuangan	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
Total		51.234.478.786,00	42.282.192.857,00	8.952.285.929,00	21,17

5.3.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2022 (Rp) 50.734.478.786,00	2021 (Rp) 42.282.192.857,00
--------------------	------------------------------------	--	--

Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2022 senilai Rp50.734.478.786,00 dan 2021 senilai Rp42.282.192.857,00, sehingga mengalami peningkatan senilai Rp8.452.285.929,00 atau 19,99%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut.

Tabel 5.3.15
Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021

No.	Dana Bagi Hasil Pajak	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	6.206.609.566,00	7.120.769.264,00	(914.159.698,00)	(12,84)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.382.877.116,00	5.604.703.473,00	1.778.173.643,00	31,73
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.956.244.885,00	13.004.005.655,00	4.952.239.230,00	38,08
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	38.930.668,00	37.553.501,00	1.377.167,00	3,67
5	Pajak Rokok	19.149.816.551,00	16.515.160.964,00	2.634.655.587,00	15,95
Total		50.734.478.786,00	42.282.192.857,00	8.452.285.929,00	19,99

5.3.1.2.2.2	Bantuan Keuangan	2022 (Rp) 500.000.000,00	2021 (Rp) 0,00
--------------------	-------------------------	---	---------------------------------

Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2022 senilai Rp500.000.000,00 dan 2021 senilai Rp0,00, sehingga mengalami peningkatan senilai Rp500.000.000,00 atau 100,00%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut.

Tabel 5.3.16
Bantuan Keuangan Tahun 2022 dan 2021

No.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Olah Sampah Tuntas (Osamtu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penerangan Jalan Umum (PJU)	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
3	Pembangunan Infrastruktur Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00

5.3.1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO	2022 (Rp) 80.488.640.312,30	2021 (Rp) 26.038.337.364,00
----------------	---	--	--

Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO Pemerintah Kota Bima bersumber dari Pendapatan Hibah pada tahun 2022 senilai Rp80.488.640.312,30 dan 2021 senilai Rp26.038.337.364,00 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp54.450.302.948,30 atau 209,12 %.

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2022 dan 2021 terdiri dari:

Tabel 5.3.17
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO 2022 dan 2021

No.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan hibah	80.488.640.312,30	8.106.996.664,00	72.381.643.648,30	892,83
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	17.931.340.700,00	(17.931.340.700,00)	(100,00)
Total		80.488.640.312,30	26.038.337.364,00	54.450.302.948,30	209,12

5.3.1.3.1	Pendapatan Hibah	2022 (Rp) 80.488.640.312,30	2021 (Rp) 26.038.337.364,00
------------------	-------------------------	--	--

Pendapatan Hibah Pemerintah Kota Bima bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tahun 2022 senilai Rp80.488.640.312,30 dan tahun 2021 senilai Rp 26.038.337.364,00 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp 54.450.302.948,30 atau 209,12 %.

Rincian Pendapatan Hibah tahun 2022 terdiri dari.

Tabel 5.3.18
Pendapatan Hibah Tahun 2022

No.	SKPD	Keterangan	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bantuan dari Pemerintah Pusat Kementerian Pendidikan	35.000.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Kabupaten Bima	87.500.000,00
3	Dinas Kesehatan	Hibah Obat dari Pemerintah Provinsi	1.019.248.926,30

No.	SKPD	Keterangan	Nilai
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bantuan dari Pemerintah Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	47.407.532.802,00
5	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Hibah Obat dari Pemerintah Provinsi	1.000.004.372,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Kabupaten Bima	65.000.000,00
7	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Kabupaten Bima	5.085.244.400,00
8	Sekretariat Daerah	Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Kabupaten Bima	25.745.109.812,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-Bank Negara Indonesia	44.000.000,00
Jumlah			80.488.640.312,30

5.3.1.3.2 Pendapatan Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	0,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.1.3.3 Pendapatan Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	0,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.2	Beban – LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		741.938.712.912,51	715.944.812.721,61

Beban LO merupakan beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Pada tahun 2022 Beban – LO Pemerintah Kota Bima senilai Rp741.938.712.912,51 dan 2021 senilai Rp715.944.812.721,61. Jika dibanding tahun 2021 beban tahun 2022 mengalami peningkatan senilai Rp 25.993.900.190,90 atau 3,63%.

Adapun Beban-LO masing-masing SKPD tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.19

Laporan Beban SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	SKPD	Beban 2022 (Rp)	Beban 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	179.946.140.540,89	177.370.109.325,33	2.576.031.215,56	1,45
2	Dinas Kesehatan	97.776.769.759,35	106.886.272.103,50	(8.900.687.011,15)	(8,33)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	23.966.180.471,78	0,00	23.966.180.471,78	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	83.476.692.221,18	93.592.333.453,77	(10.115.641.232,59)	(10,81)
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	15.605.616.302,66	8.704.864.151,00	6.900.752.151,66	79,27
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	7.885.301.879,00	8.384.129.605,90	(498.827.726,90)	-5,95
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.230.509.711,66	10.042.859.545,00	187.650.166,66	1,87
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	5.181.594.699,00	7.919.297.548,91	(2.737.702.849,91)	-34,57
9	Dinas Sosial	10.671.237.422,70	5.043.390.137,00	5.665.102.493,70	112,33

No	SKPD	Beban 2022 (Rp)	Beban 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
10	Dinas Tenaga Kerja	3.849.644.836,33	4.983.727.173,00	(1.134.082.336,67)	-22,76
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.594.613.254,00	5.657.673.630,85	(63.060.376,85)	-1,11
12	Dinas Ketahanan Pangan	3.952.886.145,00	3.930.672.912,99	22.213.232,01	0,57
13	Dinas Lingkungan Hidup	19.664.849.851,67	16.800.931.630,67	2.863.918.221,00	17,05
14	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	5.322.994.974,00	4.968.067.095,00	354.927.879,00	7,14
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.477.403.074,00	6.502.019.186,00	975.383.888,00	15,00
16	Dinas Perhubungan	12.111.642.835,92	15.508.030.023,40	(3.396.387.187,48)	-21,90
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	9.747.691.270,81	9.853.147.220,12	(105.455.949,31)	-1,07
18	Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan	10.408.234.916,70	10.401.536.702,28	6.698.214,42	0,06
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.759.489.923,00	3.651.518.391,20	107.971.531,80	2,96
20	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	4.885.573.260,86	4.175.728.890,31	709.844.370,55	17,00
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	6.013.094.746,50	6.925.962.494,33	(912.867.747,83)	-13,18
22	Dinas Pariwisata	9.264.504.120,00	8.533.063.411,56	731.440.708,44	8,57
23	Dinas Pertanian	16.718.584.258,99	16.801.204.416,83	(82.620.157,84)	-0,49
24	Sekretariat Daerah	50.518.868.937,82	45.858.396.122,34	5.252.022.252,48	11,45
25	Sekretariat DPRD	26.862.561.644,00	26.180.641.752,00	681.919.892,00	2,60
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	6.748.336.629,00	5.840.269.860,00	908.066.769,00	15,55
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)	18.426.514.860,36	18.447.714.845,36	570.349.452,00	3,09
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	6.278.168.753,00	6.323.527.055,00	(45.358.302,00)	-0,72
29	Inspektorat	8.112.731.772,66	7.437.958.314,00	674.773.458,66	9,07
30	Kecamatan Rasane Barat	10.385.601.830,00	9.503.581.200,96	882.020.629,04	9,28
31	Kecamatan Rasane Timur	11.819.995.756,67	11.336.684.014,00	483.311.742,67	4,26
32	Kecamatan Asakota	10.819.198.603,00	10.807.966.195,00	11.232.408,00	0,10
33	Kecamatan Mpunda	15.257.589.952,00	15.112.610.115,00	303.351.162,00	2,01
34	Kecamatan Raba	18.039.935.581,00	17.825.779.419,00	214.156.162,00	1,20
35	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.972.877.545,00	4.633.144.780,00	2.339.732.765,00	50,50
Total		741.938.712.912,51	715.944.812.721,61	29.433.615.566,90	4,11

Penjelasan Beban – LO adalah sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.20

Beban - LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan 2021

No.	Beban	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Pegawai	361.265.993.269,00	355.177.717.132,55	6.088.276.136,45	1,71
2	Beban Barang dan Jasa	207.084.266.391,13	191.518.612.942,45	15.565.653.448,68	8,13
3	Beban Hibah	29.679.216.175,55	28.319.224.111,60	1.359.992.063,95	4,80
4	Beban Bantuan Sosial	6.507.250.000,00	3.526.290.000,00	2.980.960.000,00	84,54
5	Beban Penyisihan Piutang	2.179.367.171,19	1.844.994.095,22	334.373.075,97	18,12
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	134.277.201.905,64	133.023.923.689,79	1.253.278.215,85	0,94
7	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Tak Terduga	945.418.000,00	2.534.050.750,00	(1.588.632.750,00)	(62,69)
Jumlah		741.938.712.912,51	715.944.812.721,61	25.993.900.190,90	3,63

5.3.2	Beban Operasi	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		606.716.093.006,87	580.386.838.281,82

Beban Operasi tahun 2022 adalah senilai Rp606.716.093.006,87 dan tahun 2021 senilai Rp580.386.838.281,82 sehingga mengalami penurunan senilai Rp 26.329.254.725,05 atau 4,54% dibandingkan tahun 2021.

Adapun rincian Beban operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.21
Beban - LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan 2021

No.	Beban Operasi	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Pegawai	361.265.993.269,00	355.177.717.132,55	6.088.276.136,45	1,71
2	Beban Barang dan Jasa	207.084.266.391,13	191.518.612.942,45	15.565.653.448,68	8,13
3	Beban Hibah	29.679.216.175,55	28.319.224.111,60	1.359.992.063,95	4,80
4	Beban Bantuan Sosial	6.507.250.000,00	3.526.290.000,00	2.980.960.000,00	84,54
5	Beban Penyisihan Piutang	2.179.367.171,19	1.844.994.095,22	334.373.075,97	18,12
JUMLAH		606.716.093.006,87	580.386.838.281,82	26.329.254.725,05	4,54

5.3.2.1	Beban Pegawai- LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		361.265.993.269,00	355.177.717.132,55

Beban Pegawai - LO tahun 2022 adalah senilai Rp361.265.993.269,00 dan tahun 2021 senilai Rp355.177.717.132,55 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp6.088.276.136,45 atau 1,71% dibandingkan tahun 2021.

Adapun Beban Pegawai – LO tahun 2022 dan 2021 beserta kenaikan/penurunannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.3.22
Beban Pegawai – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan 2021

No.	Beban Pegawai - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Gaji Pokok PNS	175.622.229.542,00	180.528.835.210,00	(4.906.605.668,00)	(2,72)
2	Beban Gaji Pokok PPPK	6.438.928.393,00	0,00	6.438.928.393,00	0,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	15.185.126.098,00	15.508.463.792,00	(323.337.694,00)	(2,08)
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	450.623.978,00	0,00	450.623.978,00	0,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	7.238.726.803,00	7.317.750.026,00	(79.023.223,00)	(1,08)
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	9.908.820.320,00	9.911.758.000,00	(2.937.680,00)	(0,03)
7	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	75.600.000,00	0,00	75.600.000,00	0,00
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.820.973.160,00	2.934.555.000,00	(113.581.840,00)	(3,87)
9	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	371.665.000,00	0,00	371.665.000,00	0,00
10	Beban Tunjangan Beras PNS	9.762.147.906,00	10.054.501.131,00	(292.353.225,00)	(2,91)
11	Beban Tunjangan Beras PPPK	382.232.760,00	0,00	382.232.760,00	0,00
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	766.011.053,00	604.586.776,00	161.424.277,00	26,70

No.	Beban Pegawai - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
13	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.474.797,00	2.549.779,00	(74.982,00)	(2,94)
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	91.061,00	0,00	91.061,00	0,00
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.240.365.453,00	7.403.926.005,00	1.836.439.448,00	24,80
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	259.783.051,00	0,00	259.783.051,00	0,00
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	360.743.523,00	369.796.478,00	(9.052.955,00)	(2,45)
18	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	13.037.748,00	0,00	13.037.748,00	0,00
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.082.205.799,00	1.110.712.661,00	(28.506.862,00)	(2,57)
20	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	39.154.282,00	0,00	39.154.282,00	0,00
21	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	18.299.792.882,20	16.411.358.908,00	1.888.433.974,20	11,51
22	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	124.066.219,00	0,00	124.066.219,00	0,00
23	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	7.785.006.893,80	6.227.567.775,00	1.557.439.118,80	25,01
24	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	3.481.686,00	0,00	3.481.686,00	0,00
25	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	122.846.313,00	115.813.161,00	7.033.152,00	6,07
26	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	27.639.594.493,00	26.297.140.725,00	1.342.453.768,00	5,10
27	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	189.315.161,00	0,00	189.315.161,00	0,00
28	Beban TPG PNSD	36.728.350.420,00	37.745.244.340,00	(1.016.893.920,00)	(2,69)
29	Beban Tamsil Guru PNSD	728.250.000,00	704.250.000,00	24.000.000,00	3,41
30	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	10.556.930.452,00	13.484.739.135,00	(2.927.808.683,00)	(21,71)
31	Beban Honorarium	7.817.524.792,00	7.308.493.500,00	509.031.292,00	6,96
32	Beban Uang Representasi DPRD	561.435.000,00	561.540.000,00	(105.000,00)	(0,02)
33	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	53.508.000,00	53.350.500,00	157.500,00	0,30
34	Beban Tunjangan Beras DPRD	78.130.080,00	77.897.550,00	232.530,00	0,30
35	Beban Uang Paket DPRD	48.121.500,00	48.132.000,00	(10.500,00)	(0,02)
36	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.080.750,00	814.233.000,00	(152.250,00)	(0,02)
37	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	64.097.050,00	64.858.500,00	(761.450,00)	(1,17)
38	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.300.450,00	19.000.800,00	(700.350,00)	(3,69)
39	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00	0,00
40	Beban Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	0,00	0,00
41	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	248.794,00	248.794,00	0,00	0,00
42	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	132.480.000,00	0,00	132.480.000,00	0,00
43	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.155.168,00	0,00	1.155.168,00	0,00
44	Beban Jaminan Kematian DPRD	3.465.504,00	0,00	3.465.504,00	0,00
45	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	3.023.500.000,00	0,00	3.023.500.000,00	0,00
46	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.814.000.000,00	2.772.000.000,00	42.000.000,00	1,52
47	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	3.150.000,00		3.150.000,00	0,00

No.	Beban Pegawai - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
48	Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	0,00	100.800.000,00	(100.800.000,00)	(100,00)
49	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	3.161.100.672,00	(3.161.100.672,00)	(100,00)
50	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.639.000,00	(39.000,00)	(0,07)
51	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00
52	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
53	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	7.097.160,00	(1.013.880,00)	(14,29)
54	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	984.529,00	1.571.150,00	(586.621,00)	(37,34)
55	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.920,00	2.040,00	(120,00)	(5,88)
56	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.486.400,00	5.486.400,00	0,00	0,00
57	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00
58	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	0,00
59	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	612.895.925,00	525.348.284,55	87.547.640,45	16,66
60	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	100.800.000,00	0,00	100.800.000,00	0,00
61	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	384.999.600,00	399.999.600,00	(15.000.000,00)	(3,75)
	Jumlah	361.265.993.269,00	355.177.717.132,55	6.088.276.136,45	1,71

5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

2022 (Rp)

207.084.266.391,13

2021 (Rp)

191.518.612.942,45

Beban Persediaan Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 senilai Rp207.072.190.182,13 dan 2021 senilai Rp191.518.612.942,45 sehingga ada peningkatan senilai Rp 15.565.653.448,68 atau 8,13% dibandingkan tahun 2021.

Adapun rincian beban barang dan Jasa Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.23

Beban Barang dan Jasa – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Barang dan Jasa	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Barang	62.429.569.572,13	64.013.838.126,45	(1.584.268.554,32)	(2,47)
2	Belanja Jasa	89.750.809.103,00	82.406.388.521,00	7.344.420.582,00	8,91
3	Belanja Pemeliharaan	7.484.722.023,00	6.124.095.137,00	1.360.626.886,00	22,22
4	Belanja Perjalanan Dinas	42.934.574.493,00	34.835.602.058,00	8.098.972.435,00	23,25
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.484.591.200,00	4.138.689.100,00	345.902.100,00	8,36
	Jumlah	207.084.266.391,13	191.518.612.942,45	15.565.653.448,68	8,13

5.3.2.2.1	Beban Persediaan– LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		62.429.569.572,13	64.013.838.126,45

Beban Persediaan Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 senilai Rp62.429.569.572,13 dan 2021 senilai Rp64.013.838.126,45 sehingga ada penurunan senilai Rp1.584.268.554,32 atau 2,47% dibandingkan tahun 2021.

Rincian Beban Persediaan sesuai rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.24
Beban Persediaan Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan 2021

No.	Beban Persediaan - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Bahan Pakai Habis	62.429.569.572,13	64.013.838.126,45	1.584.268.554,32	2,47
	Jumlah	62.429.569.572,13	64.013.838.126,45	1.584.268.554,32	2,47

Beban Persediaan – LO sebagaimana yang tercantum dalam tabel di atas sudah termasuk beban persediaan atas Dana bantuan dari Pemerintah Pusat senilai 35.000.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.3.2.2.2	Beban Jasa– LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		74.649.548.526,00	82.406.388.521,00

Jumlah Beban Jasa - LO Pemerintah Kota Bima pada tahun 2022 senilai Rp74.649.548.526,00 dan 2021 senilai Rp82.406.388.521,00 sehingga mengalami penurunan senilai Rp 7.756.839.995,00 atau 9,41% dibandingkan tahun 2021.

Rincian Beban Jasa - LO sesuai rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.25
Beban Jasa - LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan 2021

No.	Beban Jasa - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Jasa Kantor				
	Telepon	44.608.784,00	39.883.057,00	4.725.727,00	11,85
	Air	23.209.444,00	78.991.310,00	(55.781.866,00)	(70,62)
	Listrik	6.956.844.837,00	6.094.247.432,00	862.597.405,00	14,15
	Surat Kabar/Majalah	195.977.450,00	485.704.045,00	(289.726.595,00)	(59,65)
	Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.440.353.565,00	2.408.523.227,00	31.830.338,00	1,32
	Paket/Pengiriman	22.784.750,00	26.143.350,00	(3.358.600,00)	(12,85)
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	83.941.218,00	106.214.136,00	(22.272.918,00)	(20,97)
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	5.816.280,00	0,00	5.816.280,00	0,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.525.500.000,00	1.656.111.400,00	(130.611.400,00)	(7,89)
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.976.593.100,00	2.199.004.100,00	(222.411.000,00)	(10,11)

No.	Beban Jasa - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.178.083.000,00	3.525.026.000,00	1.653.057.000,00	46,89
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	136.800.000,00	45.000.000,00	91.800.000,00	204,00
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	550.900.000,00	414.350.000,00	136.550.000,00	32,96
	Beban Honorarium Rohaniwan	51.200.000,00	32.800.000,00	18.400.000,00	56,10
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	199.700.000,00	67.300.000,00	132.400.000,00	196,73
	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	294.725.000,00	295.295.000,00	(570.000,00)	(0,19)
	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	597.000.000,00	605.600.000,00	(8.600.000,00)	(1,42)
	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	6.180.000,00	0,00	6.180.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	6.536.860.720,00	9.424.702.371,00	(2.887.841.651,00)	(30,64)
	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	9.484.889.049,00	8.602.504.346,00	882.384.703,00	10,26
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	347.636.000,00	242.666.800,00	104.969.200,00	43,26
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.898.540.000,00	2.952.190.000,00	(53.650.000,00)	(1,82)
	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	407.250.000,00	265.500.000,00	141.750.000,00	53,39
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0,00	163.200.000,00	(163.200.000,00)	(100,00)
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	6.338.550.000,00	6.330.175.000,00	8.375.000,00	0,13
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	8.600.000,00	2.100.000,00	6.500.000,00	309,52
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	58.500.000,00	55.000.000,00	3.500.000,00	6,36
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	5.635.048.818,00	5.106.407.830,00	528.640.988,00	10,35
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	245.400.000,00	231.300.000,00	14.100.000,00	6,10
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.779.447.000,00	5.277.763.414,00	501.683.586,00	9,51
	Beban Jasa Tenaga Ahli	297.750.000,00	600.820.000,00	(303.070.000,00)	(50,44)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.860.307.685,00	4.692.075.000,00	168.232.685,00	3,59
	Beban Jasa Tenaga Keamanan	670.312.000,00	839.658.000,00	(169.346.000,00)	(20,17)
	Beban Jasa Tenaga Caraka	486.580.000,00	753.000.000,00	(266.420.000,00)	(35,38)
	Beban Jasa Tenaga Supir	316.250.000,00	354.750.000,00	(38.500.000,00)	(10,85)
	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	464.300.000,00	416.600.000,00	47.700.000,00	11,45
	Beban Jasa Tata Rias	14.400.000,00	16.800.000,00	(2.400.000,00)	(14,29)
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	723.100.000,00	563.581.000,00	159.519.000,00	28,30

No.	Beban Jasa - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	129.579.000,00	89.572.500,00	40.006.500,00	44,66
	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	222.750.000,00	269.850.000,00	(47.100.000,00)	(17,45)
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	610.655.000,00	(610.655.000,00)	(100,00)
	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	561.560.000,00	670.000.000,00	(108.440.000,00)	(16,19)
	Beban Jasa Kalibrasi	7.277.500,00	55.543.885,00	(48.266.385,00)	(86,90)
	Beban Jasa Pengolahan Sampah	755.551.633,00	281.003.041,00	474.548.592,00	168,88
	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	12.292.500,00	3.504.100,00	8.788.400,00	250,80
	Beban Lembur	884.522.000,00	559.339.000,00	325.183.000,00	58,14
	Beban Medical Check Up	196.447.893,00	173.027.500,00	23.420.393,00	13,54
	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	93.970.000,00	0,00	93.970.000,00	0,00
	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	2.718.537.000,00	0,00	2.718.537.000,00	0,00
	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	1.640.445.000,00	0,00	1.640.445.000,00	0,00
	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	1.562.677.300,00	0,00	1.562.677.300,00	0,00
	Jumlah	74.649.548.526,00	67.683.481.844,00	6.966.066.682,00	10,29
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi				
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.903.007.000,00	10.061.339.550,00	(1.158.332.550,00)	(11,51)
	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	803.411.600,00	182.249.200,00	621.162.400,00	340,83
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	124.689.000,00	0,00	124.689.000,00	0,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	155.861.250,00	0,00	155.861.250,00	0,00
	Jumlah	9.986.968.850,00	10.243.588.750,00	(256.619.900,00)	(2,51)
3	Beban Jasa Konsultansi				
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	2.886.000,00	0,00	2.886.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	74.800.000,00	0,00	74.800.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	42.095.000,00	0,00	42.095.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.995.780,00	0,00	1.995.780,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	75.235.800,00	0,00	75.235.800,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	277.678.000,00	0,00	277.678.000,00	0,00
	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur	6.387.802,00	0,00	6.387.802,00	0,00

No.	Beban Jasa - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
	Air Minum				
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	594.211.450,00	0,00	594.211.450,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	296.104.800,00	0,00	296.104.800,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	227.656.495,00	0,00	227.656.495,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	842.825.625,00	(842.825.625,00)	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	543.989.582,00	(543.989.582,00)	0,00
	Jumlah	1.599.051.127,00	1.386.815.207,00	212.235.920,00	15,30
4	Beban Sewa				
	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	8.232.000,00	(8.232.000,00)	(100,00)
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	26.460.000,00	27.064.000,00	(604.000,00)	(2,23)
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10.800.000,00	10.600.000,00	200.000,00	1,89
	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	82.400.000,00	24.600.000,00	57.800.000,00	234,96
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	41.044.000,00	3.311.700,00	37.732.300,00	1.139,36
	Beban Sewa Alat Pendingin	0,00	3.660.000,00	(3.660.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja Kursi	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Beban Sewa Laboratorium Lingkungan	1.600.000,00	3.200.000,00	(1.600.000,00)	(50,00)
	Beban Sewa Peralatan Umum	657.282.000,00	399.641.000,00	257.641.000,00	64,47
	Beban Sewa Photo and Film Equipment	10.500.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	40,00
	Beban Sewa Personal Computer	0,00	4.380.000,00	(4.380.000,00)	(100,00)
	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	13.200.000,00	(13.200.000,00)	(100,00)
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	24.600.000,00	115.900.000,00	(91.300.000,00)	(78,77)
	Beban Sewa Bangunan Gudang	207.500.000,00	185.250.000,00	22.250.000,00	12,01
	Beban Sewa Bangunan Kesehatan	30.036.000,00	20.000.000,00	10.036.000,00	50,18
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	150.078.400,00	64.750.000,00	85.328.400,00	131,78
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.700.000,00	15.970.000,00	(14.270.000,00)	(89,36)
	Beban Sewa Hotel	190.223.000,00	74.350.000,00	115.873.000,00	155,85
	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	50.000.000,00	100.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	541.346.400,00	532.041.400,00	9.305.000,00	1,75
	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	Beban Sewa Lapangan Lainnya	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

No.	Beban Jasa - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
	Beban Sewa Taman	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	Jumlah	2.033.569.800,00	1.614.650.100,00	418.919.700,00	25,94
6	Beban Beasiswa Pendidikan PNS				
	Beasiswa Tugas Belajar S2	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	Beasiswa Tugas Belajar S3	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	0,00
7	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/Non PNS				
	Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	144.740.500,00	104.151.000,00	40.589.500,00	38,97
	Sosialisasi	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00
	Bimbingan Teknis	437.040.000,00	386.651.800,00	50.388.200,00	0,00
	Kontribusi/Kebersertaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Diklat Kepemimpinan	400.064.000,00	552.290.000,00	(152.226.000,00)	(27,56)
	Jumlah	983.994.500,00	1.043.092.800,00	(59.098.300,00)	(5,67)
9	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak dan Reribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN				
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.596.800,00	0,00	3.596.800,00	0,00
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	17.213.900,00	0,00	17.213.900,00	0,00
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	282.500,00	0,00	282.500,00	0,00
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	107.878.900,00	84.669.820,00	23.209.080,00	27,41
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.018.000,00	260.000,00	758.000,00	291,54
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	520.000,00	440.000,00	80.000,00	18,18
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	47.966.200,00	32.390.000,00	15.576.200,00	48,09
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	182.676.300,00	119.759.820,00	62.916.480,00	52,54
	Total	89.750.809.103,00	82.406.388.521,00	8.052.994.582,00	9,86

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2022 dan 2021

No.	Beban Jasa - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.184.433.600,00	648.109.200,00	536.324.400,00	82,75
	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	4.119.600,00	48.579.900,00	(44.460.300,00)	(91,52)
	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3.240.000.000,00	3.440.000.000,00	(200.000.000,00)	(5,81)
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	56.038.000,00	2.000.000,00	54.038.000,00	2.701,90
	Jumlah	4.484.591.200,00	4.138.689.100,00	345.902.100,00	8,36

5.3.2.2.3	Beban Pemeliharaan– LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		7.484.722.023,00	6.124.095.137,00

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Bima pada tahun 2022 senilai Rp7.484.722.023,00 dan 2021 senilai Rp6.124.095.137,00 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp1.360.626.886,00 atau 22,22% jika dibandingkan tahun 2021.

Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut.

Beban Pemeliharaan - LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan 2021

No.	Beban Pemeliharaan - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Tanah	174.458.000,00	196.504.700,00	(22.046.700,00)	(11,22)
2	Peralatan dan Mesin	4.604.640.349,00	3.473.197.668,00	1.131.442.681,00	32,58
3	Gedung dan Bangunan	2.608.395.946,00	2.157.165.354,00	451.230.592,00	20,92
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	196.279.000,00	(196.279.000,00)	(100,00)
5	Aset Tetap Lainnya	97.227.728,00	100.948.415,00	7.379.313,00	7,31
Jumlah		7.484.722.023,00	6.124.095.137,00	1.371.726.886,00	22,40

5.3.2.2.4	Beban Perjalanan Dinas – LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		42.934.574.493,00	34.835.602.058,00

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bima untuk tahun 2022 senilai Rp42.934.574.493,00 dan tahun 2021 senilai Rp34.835.602.058,00 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp8.098.972.435,00 atau 23,25% jika dibandingkan tahun 2021.

Adapun rinciannya sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.27

Beban Perjalanan Dinas- LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan 2021

No.	Beban Perjalanan Dinas - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	28.023.330.907,00	17.866.806.640,00	10.156.524.267,00	56,85
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	1.027.580.197,00	1.367.691.623,00	(340.111.426,00)	(24,87)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.688.266.347,00	4.853.447.000,00	0,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.089.206.500,00	10.198.784.815,00	0,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	106.190.542,00	548.871.980,00	(442.681.438,00)	0,00
Total		42.934.574.493,00	34.835.602.058,00	8.098.972.435,00	23,25

5.3.2.6 Beban Hibah – LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	29.679.216.175,55	28.319.224.111,60

Beban Hibah – LO Pemerintah Kota Bima untuk tahun 2022 senilai Rp29.679.216.175,55 dan 2021 senilai Rp28.319.224.111,60 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp1.359.992.063,95 atau 4,80% dibandingkan tahun 2021.

Rincian Beban Hibah – LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.28

Beban Hibah - LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022

No.	Beban Hibah - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	(625.491.225,65)	0,00	(625.491.225,65)	0,00
2	Beban Hibah Kepada Partai Politik	977.856.000,00	122.232.000,00	855.624.000,00	700,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.640.000.000,00	1.210.000.000,00	430.000.000,00	35,54
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	825.000.000,00	788.000.000,00	37.000.000,00	4,70
5	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	14.589.750.000,00	(14.589.750.000,00)	(100,00)

No.	Beban Hibah - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	9.443.751.284,36	(9.443.751.284,36)	(100,00)
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.127.074.000,00	0,00	3.127.074.000,00	0,00
9	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.806.100.000,00	0,00	10.806.100.000,00	0,00
10	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.199.095.139,00	0,00	2.199.095.139,00	0,00
11	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.729.582.262,20	0,00	10.729.582.262,20	0,00
12	Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	2.162.490.827,24	(2.162.490.827,24)	(100,00)
Jumlah		29.679.216.175,55	28.319.224.111,60	(502.589.419,40)	(1,74)

5.3.2.7	Beban Bunga	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		0,00	0,00

Beban Bunga sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.2.8	Beban Subsidi	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		0,00	0,00

Beban Subsidi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.2.9	Beban Bantuan Sosial – LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		6.507.250.000,00	3.526.290.000,00

Beban Bantuan Sosial – LO Pemerintah Kota Bima untuk tahun 2022 senilai Rp6.507.250.000,00 dan 2021 senilai Rp3.526.290.000,00 sehingga mengalami penurunan senilai Rp2.980.960.000,00 atau 84,54 % dibandingkan tahun 2021.

Adapun Beban Bantuan Sosial – LO tahun 2022 dan 2021 sesuai tabel berikut ini.

Tabel 5.3.29

No.	Beban Bantuan Sosial - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	92.500.000,00	87.000.000,00	5.500.000,00	6,32
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.215.000.000,00	1.255.000.000,00	(40.000.000,00)	(3,19)
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	2.104.290.000,00	(2.104.290.000,00)	(100,00)
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)	(100,00)
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.199.750.000,00	0,00	5.199.750.000,00	0,00
Jumlah		6.507.250.000,00	3.526.290.000,00	2.980.960.000,00	84,54

5.3.2.10	Beban Penyisihan Piutang	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	– LO	2.179.367.171,19	1.844.994.095,22

Beban penyisihan Piutang - LO dihitung dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima.

Beban penyisihan Piutang – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 senilai Rp2.179.367.171,19 dan 2021 senilai Rp1.844.994.095,22 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp334.373.075,97 atau 18,12%.

Beban penyisihan Piutang – LO dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.30

No.	Beban Penyisihan Piutang - LO	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Piutang Pajak Hotel	1.785.440,00	294.607,50	1.490.832,50	506,04
2	Piutang Restoran	7.065.818,84	2.668.921,83	4.396.897,01	164,74
3	Piutang Pajak Reklame	14.347.850,68	3.273.414,65	11.074.436,03	338,31
4	Pitang Pajak Parkir	154.000,00	439.293,75	(285.293,75)	(64,94)
5	Piutang Pajak Air Tanah	3.025,44	6.116.876,70	(6.113.851,26)	(99,95)
6	Piutang PBB	1.175.258.330,40	1.071.563.318,68	103.695.011,72	9,68
7	Piutang BPHTB	152.359.340,00	90.827.898,25	61.531.441,75	67,75
8	Piutang Hiburan	2.500,00	680.000,00	(677.500,00)	(99,63)
9	Piutang Retribusi	828.390.865,83	669.129.763,86	159.261.101,97	23,80
Jumlah		2.179.367.171,19	1.844.994.095,22	334.373.075,97	18,12

5.3.2.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		134.277.201.905,64	133.023.923.689,79

Pemerintah Kota Bima pada tahun 2022 melakukan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud dengan nilai Rp134.277.201.905,64 yang terdiri beban penyusutan aset tetap tahun berjalan senilai Rp134.151.620.183,20 dan amortisasi aset tak berwujud senilai Rp125.581.722,44 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.31
Beban Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Bima Tahun 2022

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2022 (Rp)
1	Beban Penyusutan Hauler	471.346.730,00
2	Beban Penyusutan Loader	142.295.000,00
3	Beban Penyusutan Mesin Proses Apung	4.952.750,00
4	Beban Penyusutan Electric Generating Set	78.700.000,00
5	Beban Penyusutan Pompa	31.160.506,00
6	Beban Penyusutan Mesin Bor	93.800,00
7	Beban Penyusutan Unit Pemeliharaan Lapangan	4.648.875,00
8	Beban Penyusutan Perlengkapan Kebakaran Hutan	154.915,00
9	Beban Penyusutan Peralatan Selam	9.742.165,00
10	Beban Penyusutan Peralatan SAR Mountenering	45.933,00
11	Beban Penyusutan Peralatan Intelijen	100.000,00
12	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.928.974.224,00
13	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	339.620.383,00
14	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	782.386.239,00
15	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	894.734.811,34
16	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus	1.074.746.232,00
17	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	124.010.761,00
18	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	470.654.952,68
19	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	292.332.612,00
20	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	120.883.916,00
21	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	508.536.955,50
22	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	308.378.400,00
23	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	5.866.666,00
24	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	5.195.996,00
25	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	1.047.790,00
26	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik	7.153.480,00
27	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Service	2.882.000,00
28	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu	6.225.593,00
29	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Khusus	3.133.423,00
30	Beban Penyusutan Peralatan Las	62.499,00
31	Beban Penyusutan Perkakas Pabrik Es	15.290.060,00
32	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	3.437.493,00
33	Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat	1.801.800,00

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2022 (Rp)
34	Beban Penyusutan Perkakas Standar (Standard Tools)	5.164.706,04
35	Beban Penyusutan Perkakas Khusus (Special Tools)	2.883.920,00
36	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kerja	1.584.070,98
37	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Besi	2.803.164,00
38	Beban Penyusutan Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	199.167,00
39	Beban Penyusutan Peralatan Bengkel Khusus Peladam	1.658.786,00
40	Beban Penyusutan Alat Ukur Universal	106.894.220,64
41	Beban Penyusutan Universal Tester	9.474.112,00
42	Beban Penyusutan Alat Ukur/Pembanding	5.337.698,00
43	Beban Penyusutan Alat Ukur Lain-Lain	21.096.000,00
44	Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara	45.685.600,00
45	Beban Penyusutan Anak Timbangan/Biara	49.585.020,00
46	Beban Penyusutan Alat Penguji Kendaraan Bermotor	54.752.800,00
47	Beban Penyusutan Alat Pengukur Keadaan Alam	2.800.000,00
48	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	15.149.210,00
49	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	60.832.471,00
50	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	702.611.521,00
51	Beban Penyusutan Alat-Alat Peternakan	111.554.373,00
52	Beban Penyusutan Mesin Hitung/Mesin Jumlah	25.233.336,00
53	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	479.155.066,00
54	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	1.166.631.653,80
55	Beban Penyusutan Mebel	1.206.589.596,56
56	Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu	533.333,00
57	Beban Penyusutan Alat Pembersih	73.090.703,00
58	Beban Penyusutan Alat Pendingin	454.815.056,36
59	Beban Penyusutan Alat Dapur	90.275.385,00
60	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	769.038.372,86
61	Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	90.843.957,00
62	Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	60.639.893,10
63	Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	10.128.400,00
64	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	178.685.807,89
65	Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat	44.834.538,00
66	Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5.752.833,00
67	Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	171.912.054,45
68	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	167.475.751,94
69	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	1.216.434.401,28
70	Beban Penyusutan Peralatan Cetak	285.212.341,00
71	Beban Penyusutan Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	53.342.834,00
72	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	476.586.077,00
73	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio SSB	15.376.837,00
74	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio VHF	50.325.209,00
75	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio UHF	2.795.925,00
76	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Sosial	24.809.723,00
77	Beban Penyusutan Alat-Alat Sandi	2.033.333,00
78	Beban Penyusutan Peralatan Antena UHF	2.143.417,00
79	Beban Penyusutan Peralatan Antena SHF/Parabola	340.000,00
80	Beban Penyusutan Humidity Control	1.881.000,00
81	Beban Penyusutan Program Input Equipment	1.430.000,00
82	Beban Penyusutan Sumber Tenaga	202.039.245,00

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2022 (Rp)
83	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	3.365.768.815,23
84	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gigi	303.879.790,00
85	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	11.580.929,56
86	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah	300.958.303,00
87	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	758.116.640,52
88	Beban Penyusutan Alat Kedokteran THT	63.311.664,00
89	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Mata	2.259.840,00
90	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	278.542.647,00
91	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anak	142.248.034,00
92	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Poliklinik	66.276.888,00
93	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	9.161.477,00
94	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	29.745.000,00
95	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jantung	118.581.290,00
96	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Radioterapi	833.340,00
97	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Nuklir	250.902.563,00
98	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	634.920,00
99	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat	196.310.081,00
100	Beban Penyusutan Alat Kedokteran ICCU	1.548.000,00
101	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah Jantung	220.000,00
102	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya	191.322.000,00
103	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kepolisian	6.392.240,00
104	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.435.937.210,00
105	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan	12.285.596,00
106	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	1.122.798,00
107	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	15.225.256,00
108	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	7.622.797,00
109	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	36.909.797,00
110	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	364.405.152,00
111	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikrobiologi	160.164.021,00
112	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia	24.440.367,00
113	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Patologi	225.390.497,00
114	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hematologi	1.067.621,00
115	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Makanan	8.107.280,00
116	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Farmasi	32.487.812,00
117	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pembuatan Pola	26.992.500,00
118	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	202.986,00
119	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	5.161.258,00
120	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	133.415.599,18
121	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	11.225.600,00
122	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Oseanografi	1.357.448,00
123	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	750.000,00
124	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi	39.975.200,00
125	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Geofisika	2.406.000,00
126	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	3.400.382,00

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2022 (Rp)
127	Beban Penyusutan Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	154.817.392,49
128	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain	11.246.615,00
129	Beban Penyusutan Alat Pengukur Gelombang	627.000,00
130	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Lainnya	357.000,00
131	Beban Penyusutan Analytical Instrument	550.000,00
132	Beban Penyusutan General Laboratory Tool	8.173.448,00
133	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	778.309.232,00
134	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	61.222.887,00
135	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	34.490.340,00
136	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	55.164.491,00
137	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	60.884.819,00
138	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	20.300.130,00
139	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama	736.100,00
140	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	139.919.762,00
141	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	63.990.485,00
142	Beban Penyusutan Alat Peraga Kejuruan	135.590.719,00
143	Beban Penyusutan Alat Peraga PAUD/TK	33.986.630,00
144	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	600.000,00
145	Beban Penyusutan Radiation Detector	30.064.375,00
146	Beban Penyusutan Assembly/Counting System	405.417,00
147	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas Udara	3.025.000,00
148	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Penunjang	32.832.781,00
149	Beban Penyusutan Peralatan Umum	37.570.420,00
150	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik	153.334,00
151	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	108.867.949,00
152	Beban Penyusutan Personal Computer	5.003.532.594,01
153	Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	188.821.468,00
154	Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer	33.359.469,32
155	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	956.469.161,33
156	Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	420.473.299,14
157	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	29.486.000,00
158	Beban Penyusutan Alat Deteksi Lainnya	20.390.000,00
159	Beban Penyusutan Baju Pengaman	52.893,00
160	Beban Penyusutan Sepatu Lapangan	2.000.000,00
161	Beban Penyusutan Alat Pelindung Lainnya	4.000.000,00
162	Beban Penyusutan Alat Penolong	143.000,00
163	Beban Penyusutan Alat Pendukung Pencarian	65.857.638,00
164	Beban Penyusutan Alat Kerja Bawah Air	331.335,00
165	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan	13.742.528,00
166	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	2.364.114,00
167	Beban Penyusutan Rambu Bersuar	33.164.833,00

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2022 (Rp)
168	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.646.667,00
169	Beban Penyusutan Peralatan Permainan	52.830.525,00
170	Beban Penyusutan Peralatan Senam	10.102.600,00
171	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Lainnya	24.339.120,00
172	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	3.716.209.861,00
173	Beban Penyusutan Bangunan Gudang	163.394.986,00
174	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	24.371.525,00
175	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi	352.704.055,00
176	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium	179.878.980,00
177	Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan	1.614.642.100,00
178	Beban Penyusutan Bangunan Oseanarium/Observatorium	73.929.113,00
179	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	692.636.172,00
180	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	430.816.583,00
181	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.171.765.969,00
182	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	155.691.101,00
183	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.146.211.362,00
184	Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	49.141.403,00
185	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	40.091.145,00
186	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pemotong Hewan	61.833.544,00
187	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Perpustakaan	428.098.369,00
188	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.316.825,00
189	Beban Penyusutan Bangunan Pengujian Kelaikan	40.140.203,00
190	Beban Penyusutan Bangunan Peternakan/ Perikanan	45.718.793,00
191	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.897.925,00
192	Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum	29.467.467,00
193	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pabrik	94.769.675,00
194	Beban Penyusutan Bangunan Stasiun Bus	1.866.004,00
195	Beban Penyusutan Taman	982.181.500,00
196	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	13.485.736,00
197	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II	13.822.502,00
198	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III	46.803.324,00
199	Beban Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	26.601.951,00
200	Beban Penyusutan Flat/Rumah Susun	6.625.742.327,00
201	Beban Penyusutan Tugu	125.385.485,00
202	Beban Penyusutan Bangunan Peninggalan	2.161.250,00
203	Beban Penyusutan Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	1.815.000,00
204	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan Lainnya	94.599.000,00
205	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	73.408.563,00
206	Beban Penyusutan Pagar	1.298.673.437,00
207	Beban Penyusutan Jalan Nasional	17.755.900,00
208	Beban Penyusutan Jalan Provinsi	2.723.501.416,00
209	Beban Penyusutan Jalan Kabupaten	44.345.105.229,00
210	Beban Penyusutan Jalan Kota	332.229.664,00
211	Beban Penyusutan Jalan Desa	1.840.285.962,00
212	Beban Penyusutan Jalan Khusus	8.353.922.949,00
213	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.378.516.016,00
214	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kota	7.031.362,00

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2022 (Rp)
215	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Desa	31.872.360,00
216	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Khusus	4.746.800,00
217	Beban Penyusutan Jembatan Penyeberangan	72.999.372,00
218	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Irigasi	591.372.486,00
219	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Irigasi	1.797.368.570,00
220	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Irigasi	64.251.140,00
221	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Irigasi	508.669.121,00
222	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Irigasi	73.532.884,00
223	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pasang Surut	12.757.700,00
224	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Surut	26.432.128,00
225	Beban Penyusutan Saluran Pembuang Pasang Surut	93.873.300,00
226	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	13.260.000,00
227	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	80.710.891,00
228	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	2.000.000,00
229	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	37.762.750,00
230	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3.014.853.068,00
231	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3.791.515.720,00
232	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	26.175.359,00
233	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	126.155.905,00
234	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	492.851.149,00
235	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	16.232.500,00
236	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	4.994.900,00
237	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	68.928.940,00
238	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	100.367.309,00
239	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	144.810.000,00
240	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	374.190.861,00
241	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	87.690.213,00
242	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	583.958.755,00
243	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Kotor	4.982.033,00
244	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	354.263.355,00
245	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor	82.966.202,00
246	Beban Penyusutan Instalasi Air Permukaan	5.328.310,00
247	Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dalam	49.906.058,00
248	Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dangkal	106.124.401,00
249	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.617.420.559,00
250	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Domestik	129.222.256,00
251	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	12.180.000,00
252	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	4.983.000,00
253	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	9.295.000,00
254	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	23.104.167,00
255	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk	138.453.117,00
256	Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	11.673.726,00
257	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	1.112.500,00
258	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	215.344.710,00

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2022 (Rp)
259	Beban Penyusutan Jaringan Sambungan ke Rumah	807.649.496,00
260	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum Lainnya	306.559.848,00
261	Beban Penyusutan Jaringan Transmisi	851.250.436,00
262	Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	105.152.201,00
263	Beban Penyusutan Jaringan Listrik Lainnya	373.276.065,00
264	Beban Penyusutan Jaringan Telepon diatas Tanah	2.460.000,00
265	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Distribusi	334.877.788,00
266	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Dinas	34.387.950,00
267	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00
268	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	125.581.722,44
Jumlah		134.277.201.905,64

Tabel 5.3.32

Beban Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Bima Tahun 2022

No.	Beban Penyusutan	2022 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	34.456.691.091,20
2	Gedung dan Bangunan	22.870.273.235,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	76.824.655.857,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00
Jumlah		134.151.620.183,20

5.3.2.2.1	Beban Penyusutan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	Peralatan dan Mesin	34.456.691.091,20	36.433.909.419,01

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO Pemerintah Kota Bima untuk tahun 2022 senilai Rp34.456.691.091,20 dan 2021 senilai Rp36.433.909.419,01 sehingga mengalami penurunan senilai Rp1.977.218.327,81 atau 5,43% dibandingkan tahun 2021. Rincian beban penyusutan Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.33

Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesih Tahun 2022

No	Nama Barang	2022 (Rp)
1	Alat Besar	743.140.674,00
2	Alat Angkutan	6.851.126.152,52
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	356.149.398,66
4	Alat Pertanian	890.147.575,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.813.112.506,02
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.502.226.094,22
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.534.531.672,31
8	Alat Laboratorium	2.794.883.986,67
9	Alat Persenjataan	509.893,00
10	Komputer	6.756.057.420,80
11	Alat Keselamatan Kerja	92.721.973,00
12	Rambu - Rambu	34.811.500,00
13	Peralatan Olah Raga	87.272.245,00
Total		34.456.691.091,20

Lebih rinci beban penyusutan Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 5.3.34
Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022

No	Nama Barang	2022 (Rp)
1	Alat Besar Darat	613.641.730,00
2	Alat Besar Apung	4.952.750,00
3	Alat Bantu	124.546.194,00
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	5.144.472.650,34
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	470.654.952,68
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	921.753.483,50
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	314.245.066,00
8	Alat Bengkel Bermesin	40.990.841,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	19.533.107,02
10	Alat Ukur	295.625.450,64
11	Alat Pengolahan	890.147.575,00
12	Alat Kantor	1.671.020.055,80
13	Alat Rumah Tangga	2.670.138.923,78
14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	471.953.526,44
15	Alat Studio	1.722.465.328,22
16	Alat Komunikasi	571.927.104,00
17	Peralatan Pemancar	207.833.662,00
18	Alat Kedokteran	6.092.202.222,31
19	Alat Kesehatan Umum	2.442.329.450,00
20	Unit Alat Laboratorium	1.280.806.974,67
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	8.723.448,00
22	Alat Peraga Praktek Sekolah	1.401.302.237,00
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	30.469.792,00
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	-
25	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	35.857.781,00
26	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	37.570.420,00
27	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	153.334,00
28	Senjata Api	100.000,00
29	Persenjataan Non Senjata Api	-
30	Alat Khusus Kepolisian	409.893,00
31	Komputer Unit	5.137.296.775,01
32	Peralatan Komputer	1.618.760.645,79
33	Alat Deteksi	20.390.000,00
34	Alat Pelindung	6.000.000,00
35	Alat Sar	66.331.973,00
36	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	34.811.500,00
37	Peralatan Olah Raga	87.272.245,00
Total		34.456.691.091,20

	Beban Penyusutan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.3.2.2.2	Gedung dan Bangunan	22.870.273.235,00	16.209.583.416,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 senilai Rp 22.870.273.235,00 dan 2021 senilai Rp 16.209.583.416,00 sehingga mengalami

peningkatan senilai Rp 6.660.689.819,00 atau 41,09 %. Rincian beban penyusutan Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.35

Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022

No	Nama	2022 (Rp)
1	Bangunan Gedung	21.274.230.500,00
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.561.260.396,00
	- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.712.970.104,00
2	Monumen	127.546.735,00
3	Bangunan Menara	96.414.000,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.372.082.000,00
	Total	22.870.273.235,00

	Beban Penyusutan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.3.2.2.3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	76.824.655.857,00	80.252.331.928,00

Beban penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 senilai Rp76.824.655.857,00 dan 2021 senilai Rp80.252.331.928,00 sehingga mengalami penurunan senilai Rp3.427.676.071,00 atau 4,27%. Rincian beban penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.36

Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022

No.	Nama Barang	2022 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	59.107.967.030,00
2	Bangunan Air	12.576.927.239,00
3	Instalasi	2.108.803.094,00
4	Jaringan	3.030.958.494,00
	Total	76.824.655.857,00

Lebih rinci beban penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 5.3.37

Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022

No.	Nama Barang	2022 (Rp)
1	Jalan	57.612.801.120,00
2	Jembatan	1.495.165.910,00
3	Bangunan Air Irigasi	3.035.194.201,00
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	146.323.128,00
5	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	120.473.641,00
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	6.832.544.147,00
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	635.239.554,00
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	780.982.223,00
9	Bangunan Air Kotor	1.026.170.345,00
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	1.778.779.328,00
11	Instalasi Air Kotor	129.222.256,00
12	Instalasi Pengolahan Sampah	17.163.000,00
13	Instalasi Pembangkit Listrik	32.399.167,00
14	Instalasi Gardu Listrik	150.126.843,00
15	Instalasi Pengaman	1.112.500,00

No.	Nama Barang	2022 (Rp)
16	Jaringan Air Minum	1.329.554.054,00
17	Jaringan Listrik	1.329.678.702,00
18	Jaringan Telepon	2.460.000,00
19	Jaringan Gas	369.265.738,00
	Total	76.824.655.857,00

5.3.2.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		0,00	0,00

Beban penyusutan Aset Tetap Lainnya – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 senilai Rp0,00 dan 2021 senilai Rp0,00.

5.3.2.2.4	Beban Penyusutan Aset Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		0,00	0,00

Beban penyusutan Aset Lainnya – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 senilai Rp0,00 dan 2021 senilai Rp0,00.

5.3.2.2.5	Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		945.418.000,00	2.534.050.750,00

Beban Amortisasi Aset tak Berwujud – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 senilai Rp125.581.722,44 dan 2021 senilai Rp128.098.926,78 sehingga mengalami penurunan senilai Rp2.517.204,34 atau 1,97%.

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud berupa *software* senilai Rp125.581.722,44 terdapat pada 9 (sembilan) SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.38

Beban Amortisasi ATB – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022

No.	Beban Penyusutan	2022 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	1.705.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.598.013,00
3	Dinas Kesehatan	9.524.000,00
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	21.804.800,00
5	Dinas Sosial	500.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	2.320.500,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	22.182.500,00
8	Inspektorat	499.500,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.249.860,00
10	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	63.205.049,44
11	Dinas Pariwisata	742.500,00
12	Rumah Sakit Umum Daerah Bima	250.000,00
	Jumlah	125.581.722,44

5.3.2.4	Beban Tak Terduga	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		945.418.000,00	2.534.050.750,00

Beban Tak terduga Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 senilai Rp945.418.000 yang terdiri dari:

- Pembayaran tidak terduga untuk penanganan keperluan mendesak penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kota Bima Tahun 2022 senilai 133.624.000,00 yang terdiri dari beban barang dan jasa dan beban jasa pembersihan pengendalian Hama dan Fumigasi yang dilaksanakan pada dinas pertanian;
- Pembayaran tidak terduga untuk penanganan keperluan mendesak mengantisipasi bencana banjir, tanah longsor dengan membuat padanan di Kota Bima Tahun 2022 senilai 129.294.000,00 dengan rincian antara lain beban barang dan jasa, beban alat tulis kantor, beban bahan bakar minyak/gas, beban makan minum peserta/petugas/panitia dan beban sewa ekskavator yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Pembayaran tidak terduga untuk santunan kematian dan pengobatan untuk masyarakat di Kota Bima Tahun 2022 senilai Rp682.500.000,00 berupa pemberian santunna kematian dan bantuan pengobatan kepada masyarakat dengan rincian belanja beban bantuan sosial uang yang direncanakan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Beban tidak terduga dapat dirinci penggunaannya dalam Beban - LO sebagai berikut :

Tabel 5.3.39
Rincian Reklasifikasi Beban Tidak Terduga Tahun 2022

Rincian Reklasifikasi Beban Tidak Terduga Tahun 2022			
No	Kode Rekening Beban	Uraian	Jumlah
1	Beban Tidak Terduga Untuk Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Dinas Pertanian Kota Bima TA 2022		
	8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	
	8.1.02.01.01.014	Beban Alat Kesehatan Pakai Habis	27.024.000,00
	8.1.02.02.01.051	Beban jasa pembersihan pengendalian Hama dan Fumigasi	106.600.000,00
	Jumlah		133.624.000,00
2	Beban Tidak Terduga Untuk Kegiatan Penanganan Keperluan Mendesak Percepatan Relokasi Masyarakat Dan Penataan Sempadan Sungai Pada BPBD Kota Bima TA 2022		
	8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	
	8.1.02.01.01.001	Beban Alat Tulis Kantor	2.860.000,00
	8.1.02.01.01.006	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	13.284.000,00
	8.1.02.01.04.004	Beban makan minum peserta/petugas/panitia	84.750.000,00
	8.1.02.02.05.001	Beban Beban sewa ekskavator	28.400.000,00
	Jumlah		129.294.000,00
3	Beban Tidak Terduga Untuk Santunan Kematian dan Bantuan Pengobatan		
	8.1.06.01.01.001	Beban Bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu	682.500.000,00
	Jumlah		682.500.000,00
	Jumlah Jumlah Relaksasi Beban Tidak Terduga		945.418.000,00

5.3.3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2022 (Rp) (2.115.098.031,06)	2021 (Rp) 71.577.028,13
--------------	--	---	--

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 senilai Rp(2.115.098.031,06) dan 2021 senilai Rp71.577.028,13 sehingga mengalami penurunan senilai Rp (2.186.675.059,19) atau (3.055,00)%.

5.3.3.1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	2022 (Rp) 95.434.722,54	2021 (Rp) 71.577.028,13
----------------	--	--	--

Surplus/dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Bima adalah senilai Rp95.434.722,54 dan 2021 senilai Rp71.577.028,13 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp23.857.694,41 atau 33,33 %.yang berasal dari pembayaran pokok dana bergulir.

5.3.3.1.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	2022 (Rp) 0,00	2021 (Rp) 0,00
------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Surplus/dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Bima adalah senilai Rp0,00 dan 2021 senilai Rp0,00.

5.3.3.1.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	2022 (Rp) 0,00	2021 (Rp) 0,00
------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Surplus/Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Bima adalah senilai Rp0,00 dan 2021 senilai Rp0,00.

5.3.3.1.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2022 (Rp) 95.434.722,54	2021 (Rp) 71.577.028,13
------------------	--	--	--

Surplus/dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Bima adalah senilai Rp95.434.722,54 dan 2021 senilai Rp71.577.028,13 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp23.857.694,41 atau 33,33 %.yang berasal dari pembayaran pokok dana bergulir.

5.3.3.2	Defisit Kegiatan Non Operasional	2022 (Rp) 2.210.532.753,60	2021 (Rp) 0,00
----------------	---	---	---------------------------------

Defisit/dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Bima adalah senilai Rp2.210.532.753,60 dan 2021 senilai Rp0,00 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp2.210.532.753,60. Yang berasal dari Pembongkaran Bahan Bangunan.

	Defisit	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.3.3.1.1	Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	2.210.532.753,60	0,00

Defisit/ Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Kota Bima adalah senilai Rp2.210.532.753,60 dan 2021 senilai Rp0,00 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp2.210.532.753,60.

	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.3.3.1.2		0,00	0,00

Defisit/ Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Bima tahun 2022 adalah senilai Rp0,00 dan 2021 senilai Rp0,00.

	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.3.3.1.3		0,00	0,00

Defisit/ dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan 2021 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

	Pos Luar Biasa	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.3.4		0,00	0,00

Pos Luar Biasa Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan 2021 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

	Pendapatan Luar Biasa	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.3.4		0,00	0,00

Pendapatan Luar Biasa Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 adalah senilai Rp0,00 dan 2021 senilai Rp0,00.

	Beban Luar Biasa	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.3.4		0,00	0,00

Beban Luar Biasa Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan 2021 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.3.5	Surplus/(Defisit) -LO	135.939.499.834,79	12.416.076.447,07

Surplus/(Defisit) -LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 senilai Rp135.939.499.834,79 dan 2021 senilai Rp12.416.076.447,07 sehingga Surplus/(Defisit)-LO mengalami peningkatan senilai Rp123.523.423.387,72 atau 994,87%

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4.1
Laporan Perubahan Ekuitas 2022 dan 2021

NO	Uraian	2022	2021
1	Ekuitas Awal	1.948.090.010.502,74	1.920.247.252.438,80
2	Surplus/Defisit - LO	135.939.499.834,79	12.416.076.447,07
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	16.430.996.589,05	15.426.681.616,87
5	Koreksi Ekuitas - Investasi	0,00	0,00
6	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	354.287.000,00	0,00
7	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	0,00	0,00
8	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	0,00	0,00
9	Koreksi Ekuitas - Lainnya	16.076.709.589,05	15.426.681.616,87
10	Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	0,00	0,00
11	Ekuitas Akhir	2.100.460.506.926,58	1.948.090.010.502,74

5.4.1	Ekuitas Awal	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		1.948.090.010.502,74	1.920.247.252.438,80

Jumlah ekuitas awal tahun 2022 senilai Rp1.948.090.010.502,74 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021, sementara ekuitas awal 2021 senilai Rp1.920.247.252.438,80.

5.4.2	Surplus/Defisit - LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		135.939.499.834,79	12.416.076.447,07

Saldo Surplus/Defisit - LO bersumber pada Laporan Operasional tahun 2022 senilai Rp135.939.499.834,79 dan mengalami kenaikan senilai Rp123.523.423.387,72 atau 90,87% jika dibandingkan tahun 2021 senilai Rp12.416.076.447,07 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan	879.993.310.778,36	728.289.312.140,55	151.703.998.637,81	20,83
2	Beban	741.938.712.912,51	715.944.812.721,61	25.993.900.190,90	3,63
3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi	138.054.597.865,85	12.344.499.418,94	125.710.098.446,91	1018,35
4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(2.115.098.031,06)	71.577.028,13	(2.186.675.059,19)	(3055,00)
5	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa – LO	135.939.499.834,79	12.416.076.447,07	123.523.423.387,72	994,87
6	Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Surplus/Defisit - LO	135.939.499.834,79	12.416.076.447,07	123.523.423.387,72	994,87

5.4.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		16.430.996.589,05	15.426.681.616,87

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan mendasar pada Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 senilai Rp16.430.996.589,05 dan Tahun 2021 senilai Rp15.426.681.616,87 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.3
Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan mendasar Tahun 2022

No	Uraian	2022	2021
1	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	16.430.996.589,05	15.426.681.616,87
2	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	354.287.000,00	0,00
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	16.076.709.589,05	15.426.681.616,87

5.4.3.1	Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		354.287.000,00	0,00

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap senilai Rp354.287.000,00, terdapat pada 2 (dua) OPD yaitu: Sekretariat Daerah senilai Rp242.300.000,00 dan Dinas Perpustakaan dan Arsip senilai Rp 111.987.000,00.

5.4.3.2	Koreksi Ekuitas	2022 (Rp)	2021 (Rp)
----------------	------------------------	------------------	------------------

Lainnya	16.076.709.589,05	15.426.681.616,87
----------------	--------------------------	--------------------------

Koreksi Ekuitas – Lainnya Tahun 2022 senilai Rp16.076.709.589,05, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.4
Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2022

Uraian	Nilai
Piutang Dana Transfer	15.709.532.348,00
Piutang Pajak	0,04
Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	(474.744.217,07)
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	(59.561.182,00)
Aset Tetap-Tanah	1.256.515.940,00
Aset Tetap-Peralatan Mesin	(736.180.740,00)
Aset Tetap-Gedung Bangunan	(1.282.669.160,00)
Aset Tetap-Jalan Irigasi Jaringan	1.025.563.400,00
Aset Tetap-Lainnya	1.617.500,00
Aset Lain-lain	(24.739.892,00)
Akumulasi Penyusutan-Peralatan Mesin	3.217.596.204,52
Akumulasi Penyusutan-Gedung dan Bangunan	172.101.223,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(2.728.321.835,44)
JUMLAH	16.076.709.589,05

5.4.4 Ekuitas Akhir	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	2.100.460.506.926,58	1.948.090.010.502,74

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 senilai Rp2.100.460.506.926,58 dan 2021 Rp1.948.090.010.502,74 merupakan hasil penjumlahan matematis atas Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar.

5.5 PENJELASAN KOMPONEN-KOMPONEN NERACA

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Pemerintah Kota Bima mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2022 dan 2021 secara umum sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Laporan Neraca Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
1	Aset	2.101.200.364.710,09	1.948.818.658.085,50
2	Kewajiban	739.857.783,51	728.647.582,76
3	Ekuitas	2.100.460.506.926,58	1.948.090.010.502,74

5.5.1	Aset	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		2.101.200.364.710,09	1.948.818.658.091,50

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kota Bima terdiri dari Aset lancar, Investasi Jangka panjang, Aset Tetap serta Aset lainnya.

Saldo Aset pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp2.101.200.364.710,09 mengalami peningkatan senilai Rp 152.381.706.618,59 atau 7,82% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp1.948.818.658.085,50.

Perbandingan aset Pemerintah Kota Bima periode tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5.2
Rincian Aset Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
1	Aset Lancar	105.490.536.949,40	49.631.824.414,76
2	Investasi Jangka Panjang	23.023.125.259,72	14.612.249.186,29
4	Aset Tetap	1.947.211.575.128,24	1.864.964.691.001,61
5	Aset Lainnya	25.475.127.372,73	19.609.893.482,84
Jumlah		2.101.200.364.710,09	1.948.818.658.085,50

Adapun akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kota Bima tahun 2022 adalah sebagai berikut.

5.5.1.1	Aset Lancar	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		105.490.536.949,40	49.631.824.414,76

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima yang terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara

Pengeluaran, Kas Dana BOS, Kas Lainnya, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Deviden, Piutang Lain-lain, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Penyisihan Piutang, Belanja Dibayar Dimuka, dan Persediaan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 terdiri atas Kas, Piutang, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.3
Rincian Aset Lancar Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
1	Kas	76.613.516.008,67	21.962.966.165,30
2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
3	Piutang	27.651.468.502,54	23.375.777.686,79
4	Penyisihan Piutang	(11.235.490.023,86)	(9.145.910.533,21)
5	Beban Dibayar dimuka	274.770.484,00	2.969.280.200,00
6	Persediaan	12.186.271.978,05	10.469.710.895,88
Total		105.490.536.949,40	49.631.824.414,76

Saldo Aset Lancar pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp105.490.536.949,40 mengalami kenaikan senilai Rp55.858.712.534,64 atau 112,55% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp49.631.824.414,76.

5.5.1.1.1	Kas dan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	Setara Kas	76.613.516.008,67	21.962.966.165,30

Saldo Kas pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp76.613.516.008,67 mengalami kenaikan senilai Rp54.650.549.843,37 atau 248,83% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp21.962.966.165,30

Saldo Kas per 31 Desember 2022 terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP, Kas di Kas Bendahara Pengeluaran, Kas di Kas Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Kas Dana BOS dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.4
Rincian Kas Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	71.620.257.944,90	21.804.706.778,67
2	Kas di Kas Bendahara Penerimaan	0,00	143.889,12
3	Kas di Kas Bendahara Pengeluaran	0,00	5.720.000,00

4	Kas di BLUD	4.954.209.979,26	0,00
5	Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP	7.894.544,00	0,00
6	Kas di Kas Dana BOS	664.161,51	151.753.053,51
7	Kas Lainnya	30.489.379,00	642.444,00
Jumlah		76.613.516.008,67	21.962.966.165,30

5.5.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		71.620.257.944,90	21.804.706.778,67

Saldo Kas di Kas Daerah pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp71.620.257.944,90 mengalami kenaikan senilai Rp49.815.551.166,23 atau 228,46% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp21.804.706.778,67.

Saldo Kas di Kas Daerah 31 Desember 2022 senilai Rp71.620.257.944,90, terdiri dari:

Tabel 5.5.5
Rincian Kas Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
A.	PT Bank NTB Syariah		
1	Rekening Giro Nomor 005.21.00102.02-5	27.620.257.944,90	17.804.706.778,67
2	Deposito	35.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Jumlah		62.620.257.944,90	19.804.706.778,67
B.	PT Bank BNI		
1	Deposito	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah		5.000.000.000,00	1.000.000.000,00
C.	PT Bank BRI		
1	Deposito	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah		4.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Total		71.620.257.944,90	21.804.706.778,67

Pemerintah Kota Bima menempatkan dana pada Rekening Deposito yang bersifat *on call* yang dapat diartikan sebagai simpanan yang berjangka waktu antara 3 hari sampai dengan 30 hari atau satu bulan sehingga dapat dicairkan sewaktu-waktu.

5.5.1.1.1.2	Kas di Kas Bendahara Pengeluaran	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		0,00	5.720.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 senilai Rp,00 mengalami Penurunan di bandingkan tahun 2021 yang terdapat pada Sekretariat Daerah dan sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 14 Januari 2022.

5.5.1.1.1.3	Kas di Kas Bendahara Penerimaan	2022 (Rp) 0,00	2021 (Rp) 143.889,12
--------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------

Peraturan Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima menyatakan bahwa apabila masih ada kas di Bendahara Penerimaan belum disetorkan ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam Neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

Saldo Kas di Kas Bendahara Penerimaan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai 0,00 mengalami penurunan senilai Rp143.889,12 atau 100% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp143.889,12.

Kas di Kas Bendahara Penerimaan senilai Rp143.889,12 telah disetorkan semua ke Kas Daerah pada tahun 2022 sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.5.6
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2022

No	Uraian	31-12-2020 (Rp)	Tanggal Penyetoran
1	Sisa Kas pada Rekening Bendahara Umum RSUD Kota Bima (Bank NTB No. 005.22.20.814103) berupa jasa giro bulan Desember senilai	143.889,12	20 januari 2022
	Jumlah	143.889,12	

5.5.1.1.1.4	Kas di BLUD	2022 (Rp) 4.954.209.979,26	2021 (Rp) 0,00
--------------------	--------------------	---	---------------------------------

Saldo Kas di BLUD RSUD Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp4.954.209.979,26. yang terdiri dari Saldo JKN RSUD Rp2.686.324.661,00 Saldo Operasional sebesar Rp2.259.838.955,00 dan Pendapatan Jasa Giro di bendahara penerimaan sebesar 8.046.363,26.

5.5.1.1.1.5	Kas di Kas Dana BOS	2022 (Rp) 664.161,51	2021 (Rp) 151.753.053,51
--------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---

Saldo Kas di Kas Dana BOS pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp664.161,51 mengalami penurunan senilai Rp151.088.892,00 atau 99,56% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp125.015.896,26 sedangkan Kas di Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2021 senilai Rp151.753.053,51 dengan rincian:

Tabel 5.5.7
Kas Dana BOS Tahun 2022 dan 2021

Kas Dana BOS	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
Kas Dana BOS	664.161,51	151.753.053,51

Rincian saldo Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di setiap sekolah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.8
Kas Dana Bos Setiap Sekolah Tahun 2022

No	Nama Sekolah	Kas Tunai Bos	Bungan Bank	Kas Bank Bos	Bos Kinerja	Saldo 31 des/12/2022
1	2	4	5	6	7	8
1	SD Negeri 1 Melayu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SD Negeri 2 Suntu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SD Negeri 3 Jatiwangi Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SD Negeri 5 Rabangodu Utara Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SD Negeri 6 Kodo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SD Negeri 7 Kumbe Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SD Negeri 8 Penanae Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SD Negeri 10 Penatoi Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SD Negeri 11 Manggemaci Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SD Negeri 12 Sarae Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SD Negeri 13 Kolo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SD Negeri 14 Sadia Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sd Negeri 15 Ntobo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SD Negeri 16 Salama Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SD Negeri 17 Pane Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SD Negeri 18 Dodu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SD Negeri 19 Rabangodu Utara Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SD Negeri 20 Rabadompu Timur Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SD Negeri 21 Tolomundu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SD Negeri 22 Jatibaru Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SD Negeri 24 Rabangodu Utara Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SD Negeri 25 Santi Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SD Negeri 26 Rabadompu Barat Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SD Negeri 27 Rabadompu Timur Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SD Negeri 28 Melayu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SD Negeri 29 Tanjung Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SD Negeri 30 Nitu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SD Negeri 31 Lelamase Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SD Negeri 32 Panggi Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SD Negeri 33 Lampe Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SD Negeri 34 Bonto Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SD Negeri 35 Nungga Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SD Negeri 36 Nggaralo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SD Negeri 37 Kendo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SD Negeri 39 Rabadompu Barat Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SD Negeri 40 Lewirato Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SD Negeri 42 Manggemaci Kota Bima	(0,49)	0,00	0,00	0,00	-0,49
38	SD Negeri 43 Melayu Kota Bima	628.062,00	0,00	0,00	0,00	628.062,00
39	SD Negeri 44 Mande Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	SD Negeri 45 Pane Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	SD Negeri 46 Lela Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SD Negeri 47 Kodo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SD Negeri 48 Kumbe Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SD Negeri 49 Rabangodu Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Nama Sekolah	Kas Tunai Bos	Bungan Bank	Kas Bank Bos	Bos Kinerja	Saldo 31 des/12/2022
	Kota Bima					
45	SD Negeri 50 Penaraga Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SD Negeri 51 Rite Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SD Negeri 52 Busu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SD Negeri 53 Oi Foo Kota Bima	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
49	SD Negeri 54 Santi Kota Bima	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
50	SD Negeri 55 Dara Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SD Negeri 56 Tolobali Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	SD Negeri 57 Wadumbolo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	SD Negeri 58 Tambana Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	SD Negeri 59 Rasalewi Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SD Negeri 60 Sambinae Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SD Negeri 61 Karara Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SD Negeri 62 Rontu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SD Negeri 63 Dodu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SD Negeri 64 Sori Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	SD Negeri 65 Jatibaru Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	SD Negeri 66 Kuta Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	SD Negeri 67 Rabantala Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SD Negeri 68 Kolo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SD Negeri 69 Kabanta Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	SD Negeri 70 Tolotonga Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SD Negeri 71 Wenggo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	SD Negeri 72 Ntobo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SD Negeri 73 Sabali Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SD Negeri 74 Songgela Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SD Negeri 76 Toloweri Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SD Negeri 77 Niu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah SD		663.961,51	-	200,00	-	664.161,51
72	SMP Negeri 1 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	SMP Negeri 2 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SMP Negeri 3 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SMP Negeri 4 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	SMP Negeri 5 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	SMP Negeri 6 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	SMP Negeri 7 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SMP Negeri 8 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	SMP Negeri 9 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SMP Negeri 10 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	SMP Negeri 11 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SMP Negeri 12 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	SMP Negeri 13 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	SMP Negeri 14 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	SMP Negeri 15 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah SMP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SD + SMP		663.961,51	0,00	200,00	0,00	664.161,51

Sementara Kas Dana BOS tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5.9
Kas Dana Bos Setiap Sekolah Tahun 2021

NO	Nama Sekolah	Kas Tunai Bos	Kas Bank Bos	Bos Kinerja	Bungan Bank	Saldo 31 des/12/2021
1	SD Negeri 1 Melayu Kota Bima	6.205.900,00	0,00	0,00	0,00	6.205.900,00
2	SD Negeri 2 Suntu Kota Bima	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

NO	Nama Sekolah	Kas Tunai Bos	Kas Bank Bos	Bos Kinerja	Bungan Bank	Saldo 31 des/12/2021
3	SD Negeri 3 Jatiwangi Kota Bima	75.013,00	0,00	0,00	0,00	75.013,00
4	SD Negeri 5 Rabangodu Utara Kota Bima	959,00	0,00	0,00	0,00	959,00
5	SD Negeri 6 Kodo Kota Bima	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
6	SD Negeri 7 Kumbe Kota Bima	3.235.000,00	0,00	0,00	0,00	3.235.000,00
7	SD Negeri 8 Penanae Kota Bima	4.590.000,00	0,00	0,00	0,00	4.590.000,00
8	SD Negeri 10 Penatoi Kota Bima	1.497.913,00	0,00	0,00	0,00	1.497.913,00
9	SD Negeri 11 Manggemaci Kota Bima	51.249,00	0,00	0,00	0,00	51.249,00
10	SD Negeri 12 Sarae Kota Bima	3.963.266,00	0,00	0,00	0,00	3.963.266,00
11	SD Negeri 13 Kolo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SD Negeri 14 Sadia Kota Bima	7.495.379,00	0,00	0,00	0,00	7.495.379,00
13	Sd Negeri 15 Ntobo Kota Bima	368.121,00	0,00	0,00	0,00	368.121,00
14	SD Negeri 16 Salama Kota Bima	2.165.151,00	0,00	0,00	0,00	2.165.151,00
15	SD Negeri 17 Pane Kota Bima	466.029,00	0,00	0,00	0,00	466.029,00
16	SD Negeri 18 Dodu Kota Bima	909.300,00	0,00	0,00	0,00	909.300,00
17	SD Negeri 19 Rabangodu Utara Kota Bima	10.160,00	50.000,00	0,00	0,00	60.160,00
18	SD Negeri 20 Rabadompur Timur Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SD Negeri 21 Tolomundu Kota Bima	4.531.732,00	0,00	0,00	0,00	4.531.732,00
20	SD Negeri 22 Jatibaru Kota Bima	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
21	SD Negeri 24 Rabangodu Utara Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SD Negeri 25 Santi Kota Bima	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
23	SD Negeri 26 Rabadompur Barat Kota Bima	338.774,00	0,00	0,00	0,00	338.774,00
24	SD Negeri 27 Rabadompur Timur Kota Bima	320.008,00	0,00	0,00	0,00	320.008,00
25	SD Negeri 28 Melayu Kota Bima	2.680.041,00	19.959,00	0,00	0,00	2.700.000,00
26	SD Negeri 29 Tanjung Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SD Negeri 30 Nitu Kota Bima	989.584,00	109.500,00	0,00	0,00	1.099.084,00
28	SD Negeri 31 Lelamase Kota Bima	8.807.700,00	0,00	0,00	0,00	8.807.700,00
29	SD Negeri 32 Panggi Kota Bima	860.800,00	0,00	0,00	0,00	860.800,00
30	SD Negeri 33 Lampe Kota Bima	3.176.706,00	0,00	0,00	0,00	3.176.706,00
31	SD Negeri 34 Bonto Kota Bima	307.389,00	0,00	0,00	0,00	307.389,00
31	SD Negeri 35 Nungga Kota Bima	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
33	SD Negeri 36 Nggaralo Kota Bima	7.091.800,00	0,00	0,00	0,00	7.091.800,00
34	SD Negeri 37 Kendo Kota Bima	2.215.791,00	0,00	0,00	0,00	2.215.791,00
35	SD Negeri 39 Rabadompur Barat Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SD Negeri 40 Lewirato Kota Bima	1.191.901,00	41.000,00	0,00	0,00	1.232.901,00
37	SD Negeri 42 Manggemaci Kota Bima	283.048,51	0,00	0,00	0,00	283.048,51
38	SD Negeri 43 Melayu Kota Bima	824,00	20.952,00	0,00	0,00	21.776,00
39	SD Negeri 44 Mande Kota Bima	170.412,00	0,00	0,00	0,00	170.412,00
40	SD Negeri 45 Pane Kota Bima	1.012.975,00	0,00	0,00	0,00	1.012.975,00
41	SD Negeri 46 Lela Kota Bima	4.574.500,00	0,00	0,00	0,00	4.574.500,00
42	SD Negeri 47 Kodo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SD Negeri 48 Kumbe Kota Bima	4.309.800,00	0,00	0,00	0,00	4.309.800,00
44	SD Negeri 49 Rabangodu Selatan Kota Bima	1.252.663,00	0,00	0,00	0,00	1.252.663,00
45	SD Negeri 50 Penaraga Kota Bima	38.075,00	0,00	0,00	0,00	38.075,00
46	SD Negeri 51 Rite Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SD Negeri 52 Busu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SD Negeri 53 Oi Foo Kota Bima	6.149.800,00	40.000,00	0,00	0,00	6.189.800,00
49	SD Negeri 54 Santi Kota Bima	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
50	SD Negeri 55 Dara Kota Bima	121.430,00	0,00	0,00	0,00	121.430,00
51	SD Negeri 56 Tolobali Kota Bima	502.179,00	0,00	0,00	0,00	502.179,00
52	SD Negeri 57 Wadumbolo Kota Bima	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00
53	SD Negeri 58 Tambana Kota Bima	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
54	SD Negeri 59 Rasalewi Kota Bima	134.413,00	0,00	0,00	0,00	134.413,00

NO	Nama Sekolah	Kas Tunai Bos	Kas Bank Bos	Bos Kinerja	Bungan Bank	Saldo 31 des/12/2021
55	SD Negeri 60 Sambinae Kota Bima	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00
56	SD Negeri 61 Karara Kota Bima	1.539,00	407.000,00	0,00	0,00	408.539,00
57	SD Negeri 62 Rontu Kota Bima	4.565.481,00	0,00	0,00	0,00	4.565.481,00
58	SD Negeri 63 Dodu Kota Bima	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
59	SD Negeri 64 Sori Kota Bima	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
60	SD Negeri 65 Jatibaru Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	SD Negeri 66 Kuta Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	SD Negeri 67 Rabantala Kota Bima	2.970.101,00	0,00	0,00	0,00	2.970.101,00
63	SD Negeri 68 Kolo Kota Bima	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
64	SD Negeri 69 Kabanta Kota Bima	313.572,00	0,00	0,00	0,00	313.572,00
65	SD Negeri 70 Tolotongga Kota Bima	1.199.518,00	0,00	0,00	0,00	1.199.518,00
66	SD Negeri 71 Wenggo Kota Bima	92.244,00	0,00	0,00	0,00	92.244,00
67	SD Negeri 72 Ntobo Kota Bima	304.073,00	0,00	0,00	0,00	304.073,00
68	SD Negeri 73 Sabali Kota Bima	5.933.200,00	0,00	0,00	0,00	5.933.200,00
69	SD Negeri 74 Songgela Kota Bima	2.433.720,00	0,00	0,00	0,00	2.433.720,00
70	SD Negeri 76 Toloweri Kota Bima	828.228,00	0,00	0,00	0,00	828.228,00
71	SD Negeri 77 Niu Kota Bima	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
	Jumlah SD	108.234.820,51	688.411,00	0,00	0,00	108.923.231,51
72	SMP Negeri 1 Kota Bima	4.015.000,00	0,00	0,00	0,00	4.015.000,00
73	SMP Negeri 2 Kota Bima	17.618.975,00	0,00	0,00	0,00	17.618.975,00
74	SMP Negeri 3 Kota Bima	295.408,00	26.000,00	0,00	0,00	321.408,00
75	SMP Negeri 4 Kota Bima	52.700,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
76	SMP Negeri 5 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	SMP Negeri 6 Kota Bima	645.000,00	83.970,00	0,00	0,00	728.970,00
78	SMP Negeri 7 Kota Bima	2.609,00	600,00	0,00	0,00	3.209,00
79	SMP Negeri 8 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	SMP Negeri 9 Kota Bima	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
81	SMP Negeri 10 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	SMP Negeri 11 Kota Bima	1.261.170,00	0,00	0,00	0,00	1.261.170,00
83	SMP Negeri 12 Kota Bima	69.156,00	0,00	0,00	0,00	69.156,00
84	SMP Negeri 13 Kota Bima	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
85	SMP Negeri 14 Kota Bima	6.344.234,00	0,00	0,00	0,00	6.344.234,00
86	SMP Negeri 15 Kota Bima	5.685.050,00	126.350,00	0,00	0,00	5.811.400,00
	JUMLAH	42.592.902,00	236.920,00	0,00	0,00	42.829.822,00
	JUMLAH SD & SMP	150.827.722,51	925.331,00	0,00	0,00	151.753.053,51

5.5.1.1.1.6	Kas di Kas Dana	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	Kapitasi JKN FKTP	7.894.544,00	0,00

Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP merupakan Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan.

Saldo Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp7.894.544,00 mengalami kenaikan senilai Rp7.894.544,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.10
Rincian Kas Dana Kapitasi Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
1	Puskesmas Mpunda	0,00	7.894.544,00

No	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
2	Puskesmas RasanaE Timur	0,00	0,00
3	Puskesmas Paruga	0,00	0,00
4	Puskesmas PenanaE	0,00	0,00
5	Puskesmas Kolo	0,00	0,00
6	Puskesmas Kumbe	0,00	0,00
7	Puskesmas Jatibaru	0,00	0,00
Jumlah		0,00	7.894.544,00

5.5.1.1.1.7	Kas Lainnya	2022 (Rp) 30.489.379,00	2021 (Rp) 642.444,00
--------------------	--------------------	--	---------------------------------------

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp30.489.379,00 sementara per 31 Desember 2021 senilai Rp642.444,00.

Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.5.11
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022

NO	SKPD	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPN	Pihak Ketiga LainnyaBOP- PAUD	Total	bulan Penyetoran
1	Bappeda Litbang	721.000,00	335.981,00	27.703,00	1.280.453,00	0,00	2.365.137,00	Februari 2023
2	PKM Mpunda	7.613.483,00	1.913.455,00	-	13.687.538,00	0,00	23.214.476,00	Januari 2023
3	PKM Kolo	651.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.766,00	Januari 2023
4	BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258.000,00	4.258.000,00	Januari 2023
JUMLAH		8.986.249,00	2.249.436,00	27.703,00	14.967.991,00	4.258.000,00	30.489.379,00	

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 senilai Rp30.489.379,00 berupa utang PFK berupa PPh21, PPh22, PPH23, PPN, dan PFK lainnya dari Pengembalian Dana Transfer Pusat Dana alokasi Non Fisik BOP PAUD telah disetorkan pada bulan Januari dan Februari 2023. Sementara Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 senilai Rp642.444,00 merupakan utang PFK berupa PPh21, PPh22, semua telah terbayarkan ke Kas Negara pada tahun 2022.

5.5.1.1.1.8	Setara Kas	2022 (Rp) 0,00	2021 (Rp) 0,00
--------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------------

Saldo Setara Kas pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 sama dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

5.5.1.1.2	Investasi Jangka Pendek	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Pendek pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 sama dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

5.5.1.1.3	Piutang Pajak Daerah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		13.211.288.451,55	11.543.811.889,54

Saldo Piutang Pajak Daerah bruto pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp13.211.288.451,51 mengalami kenaikan senilai Rp1.667.476.562,01 atau 14,44% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp11.543.811.889,59 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.13
Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	31-12 2021 (Rp)	Piutang atas Penetapan 2020	Penambahan	Pengurangan	31-12 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	84.625.921,20	0,00	911.273.944,30	911.452.444,30	84.447.421,20
2	Pajak Restoran	81.910.177,83	0,00	2.139.537.662,65	2.103.232.173,38	118.215.667,10
3	Pajak Hiburan	1.700.000,00	0,00	36.669.080,00	36.169.080,00	2.200.000,00
4	Pajak Reklame	58.052.909,71	171.055.647,44	316.928.618,81	480.042.859,71	65.994.316,25
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	9.443.782.515,00	9.443.782.515,00	0,00
6	Pajak Parkir	1.362.250,00	0,00	136.015.500,00	132.915.500,00	4.462.250,00
7	Pajak Air Tanah	29.551.606,80	0,00	56.651.077,65	56.046.006,45	30.156.678,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	350.043.239,18	350.043.239,18	0,00
10	PBB	10.622.694.974,00	0,00	5.181.964.524,00	3.543.193.929,00	12.261.465.569,00
11	Pajak BPHTB (Bea Perolehan Tanah dan Bangunan)	663.914.050,00	0,00	4.255.895.792,00	4.275.463.292,00	644.346.550,00
Jumlah		11.543.811.889,54	171.055.647,44	22.842.261.953,59	21.345.841.039,02	13.211.288.451,55

Dari jumlah Piutang Pajak senilai Rp13.211.288.451,55 telah dilakukan penyisihan senilai Rp7.975.363.319,77 sehingga nilai Piutang Pajak neto adalah senilai Rp5.235.925.131,78 dengan rincian sebagai berikut.

a. Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp84.447.421,20 mengalami penurunan senilai Rp178.500,00 atau 0,21% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp84.625.921,20 sebagaimana pada **Lampiran 1** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.14
Rincian Piutang Pajak Hotel Tahun 2022 dan 2021

Tahun	Piutang 2021 (Rp)	Penambahan	Pembayaran Tahun 2022	Piutang 2022 (Rp)	Penyisihan 2022	NRV 2022
2011	39.562.000,00	0,00	0,00	39.562.000,00	39.562.000,00	0,00
2012	23.350.000,00	0,00	0,00	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00
2013	12.850.000,00	0,00	0,00	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00
2014	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
2017	3.026.800,00	0,00	0,00	3.026.800,00	3.026.800,00	0,00
2018	542.621,20	0,00	0,00	542.621,20	271.310,60	271.310,60
2019	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	286.500,00	286.500,00
2020	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	322.500,00	322.500,00
2021	826.500,00	0,00	706.500,00	120.000,00	12.000,00	108.000,00
2022		911.273.944,30	910.745.944,30	528.000,00	2.640,00	525.000
Jumlah	84.625.921,20	911.273.944,30	911.452.444,30	84.447.421,20	82.933.750,60	988.310,60

Dari jumlah Piutang Pajak Hotel senilai Rp84.447.421,20 telah dilakukan penyisihan senilai Rp82.933.750,60 sehingga nilai Piutang Pajak Hotel netto adalah senilai Rp988.310,60.

b. Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp118.215.667,10 mengalami kenaikan senilai Rp36.305.489,27 atau 58,48% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp81.910.177,83 sebagaimana pada **Lampiran 2** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.15
Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2022 dan 2021

Tahun	Piutang 2021 (Rp)	Penambahan	Pembayaran Tahun 2022	Piutang 2022 (Rp)	Penyisihan 2022	NRV 2022
2010	13.677.000,00	0,00	0	13.677.000,00	13.677.000,00	0,00
2011	13.379.000,00	0,00	20.000,00	13.359.000,00	13.359.000,00	0,00
2012	4.634.000,00	0,00	0,00	4.634.000,00	4.634.000,00	0,00
2013	13.181.900,00	0,00	20.000,00	13.161.900,00	13.161.900,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10.840.000,00	0,00	50.000,00	10.790.000,00	10.790.000,00	0,00

Tahun	Piutang 2021 (Rp)	Penambahan	Pembayaran Tahun 2022	Piutang 2022 (Rp)	Penyisihan 2022	NRV 2022
2018	3.218.912,83	0,00	43.912,83	3.175.000,00	1.587.500,00	1587500,00
2019	5.755.000,00	0,00	0,00	5.755.000,00	2.877.500,00	2877500,00
2020	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	1.560.000,00	1560000,00
2021	14.104.365,00	0,00	12.214.365,00	1.890.000,00	189.000,00	1701000,00
2022		2.139.537.662,65	2.090.883.895,55	48.653.767,10	243.268,84	48410498,26
Jumlah	81.910.177,83	2.139.537.662,65	2.103.232.173,38	118.215.667,10	62.079.168,84	56.136.498,26

Dari jumlah Piutang Pajak Restoran senilai Rp118.215.667,10 telah dilakukan penyisihan senilai Rp62.079.168,84 sehingga nilai Piutang Pajak Restoran netto adalah senilai Rp56.136.498,26.

c. Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp2.200.000. mengalami kenaikan mengalami kenaikan senilai Rp500.000,00 atau 29,41% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp1.700.000,00 sebagaimana pada **Lampiran 3** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.16
Rincian Piutang Pajak Hiburan Tahun 2022 dan 2021

Tahun	Piutang 2021 (Rp)	Penambahan	Pembayaran Tahun 2022	Piutang 2022 (Rp)	Penyisihan 2022	NRV 2022
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	36.669.080,00	36.169.080,00	500.000,00	2.500,00	497.500,00
Jumlah	1.700.000,00	36.669.080,00	36.169.080,00	2.200.000,00	852.500,00	1.347.500,00

Dari jumlah Piutang Pajak Hiburan senilai Rp2.200.000,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp852.500,00 sehingga nilai Piutang Pajak Hiburan netto adalah senilai Rp1.347.500,00.

d. Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp65.994.316,25 mengalami kenaikan senilai Rp7.941.406,50 atau 13,68 % dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp58.052.909,75 sebagaimana pada sebagaimana pada **Lampiran 4** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.17
Rincian Piutang Pajak Reklame Tahun 2022 dan 2021

Tahun	Piutang 2021 (Rp)	Pengakuan 2022 atas Penetapan 2021	Penambahan	Pembayaran Tahun 2022	Piutang 2022 (Rp)	Penyisihan 2022	koreksi-BPK	Penyisihan 2022	NRV 2022
2017	9.265.625,25	0,00	0,00	0,00	9.265.625,25	9.265.625,25		9.265.625,25	0,00
2018	947.370,21	0,00	0,00	175.781,25	771.588,96	385.794,48	-	385.794,48	385.794,48
2019	20.777.396,20	0,00	0,00	1.737.500,00	19.039.896,20	9.519.948,10	-	9.519.948,10	9.519.948,10
2020	23.954.704,17	0,00	0,00	0,00	23.954.704,17	11.977.352,09		11.977.352,09	11.977.352,09
2021	3.107.813,92	0,00	0,00	2.348.437,50	759.376,42	75.937,64	-	75.937,64	683.438,78
2022	0,00	171.055.647,44	316.928.618,81	475.781.141,00	12.203.125,25	61.015,63	(11.624.687,03)	(11.563.671,40)	12.142.109,62
Jumlah	58.052.909,75	171.055.647,44	316.928.618,81	480.042.859,75	65.994.316,25	31.285.673,19	(11.624.687,03)	19.660.986,15	34.708.643,07

Terdapat pembayaran atas pendapatan diterima dimuka senilai Rp171.055.647,44 dan dari jumlah Piutang Pajak Reklame senilai Rp65.994.316,25 telah dilakukan penyisihan senilai Rp19.660.986,15 sehingga nilai Piutang Pajak Reklame neto adalah senilai Rp34.708.643,07.

e. Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp30.156.678,00. mengalami kenaikan senilai Rp605.000,00 atau 2,05% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp29.551.606,80 sebagaimana pada **Lampiran 6** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.18
Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2022 dan 2021

Tahun	Piutang 2021 (Rp)	Penambahan	Pembayaran Tahun 2022	Piutang 2022 (Rp)	Penyisihan 2022	NRV 2022
2012	291.570,00	0,00	0,00	291.570,00	291.570,00	0,00
2013	4.590.000,00	0,00	0,00	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00
2014	5.934.360,00	0,00	0,00	5.934.360,00	5.934.360,00	0,00
2015	10.579.830,00	0,00	0,00	10.579.830,00	10.579.830,00	0,00
2016	8.155.830,00	0,00	0,00	8.155.830,00	8.155.830,00	0,00
2018	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		56.651.077,65	56.045.989,65	605.088,00	3.025,44	602.062,56
Jumlah	29.551.606,80	56.651.077,65	56.046.006,45	30.156.678,00	29.554.615,44	602.062,56

Dari jumlah Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp30.156.678,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp29.554.615,44 sehingga nilai Piutang Pajak Air Tanah neto adalah senilai Rp602.062,56

f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan - Perdesaan Perkotaan

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan - Perdesaan Perkotaan (PBB - P2) pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp12.261.465.569,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.638.770.595,00 atau 15,43% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp10.622.694.974,00 sebagaimana pada **Lampiran 7** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.19
Rincian Piutang PBB-P2 Tahun 2022 dan 2021

Tahun	Piutang 2021 (Rp)	Penambahan	Pembayaran Tahun 2022	Piutang 2022 (Rp)	Penyisihan 2022	NRV 2022
2011	553.562.775,00	0,00	0,00	553.562.775,00	553.562.775,00	0,00
2012	636.912.241,00	0,00	0,00	636.912.241,00	636.912.241,00	0,00
2013	585.637.501,00	0,00	0,00	585.637.501,00	585.637.501,00	0,00
2014	717.428.903,00	0,00	9.759.534,00	707.669.369,00	707.669.369,00	0,00
2015	949.717.848,00	0,00	12.031.969,00	937.685.879,00	937.685.879,00	0,00
2016	1.172.665.813,00	0,00	19.478.671,00	1.153.187.142,00	1.153.187.142,00	0,00
2017	1.137.745.255,00	0,00	17.089.310,00	1.120.655.945,00	1.120.655.945,00	0,00
2018	1.037.163.601,00	0,00	16.505.409,00	1.020.658.192,00	510.329.096,00	510.329.096,00
2019	915.711.885,00	0,00	14.154.765,00	901.557.120,00	450.778.560,00	450.778.560,00
2020	1.159.610.138,00	0,00	24.673.387,00	1.134.936.751,00	567.468.375,50	567.468.375,50
2021	1.756.539.014,00	0,00	163.087.467,00	1.593.451.547,00	159.345.154,70	1.434.106.392,30
2022		5.181.964.524,00	3.266.413.417,00	1.915.551.107,00	9.577.755,54	1.905.973.351,47
Jumlah	10.622.694.974,00	5.181.964.524,00	3.543.193.929,00	12.261.465.569,00	7.392.809.793,74	4.868.655.775,27

Dari jumlah Piutang PBB senilai Rp12.261.465.569,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp7.392.809.793,74 sehingga nilai Piutang Pajak PBB neto adalah senilai Rp4.868.655.775,27.

g. Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Saldo Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp664.346.550,00 mengalami kenaikan senilai Rp19.567.500,00 atau 2,95% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp663.914.050,00 sebagaimana pada **Lampiran 8** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.20
Rincian Piutang BPHTB Tahun 2022 dan 2021

Tahun	Piutang 2021 (Rp)	Penambahan	Pembayaran Tahun 2022	Piutang 2022 (Rp)	Penyisihan 2022	NRV 2022
2014	10.460.000,00	0,00	2.000.000,00	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00
2015	12.339.600,00	0,00	0,00	12.339.600,00	12.339.600,00	0,00
2016	14.017.500,00	0,00	0,00	14.017.500,00	14.017.500,00	0,00

Tahun	Piutang 2021 (Rp)	Penambahan	Pembayaran Tahun 2022	Piutang 2022 (Rp)	Penyisihan 2022	NRV 2022
2017	96.188.100,00	0,00	0,00	96.188.100,00	96.188.100,00	0,00
2018	113.362.200,00	0,00	4.500.000,00	108.862.200,00	54.431.100,00	54.431.100,00
2019	145.425.300,00	0,00	3.325.000,00	142.100.300,00	71.050.150,00	71.050.150,00
2020	269.871.350,00	0,00	9.742.500,00	260.128.850,00	130.064.425,00	130.064.425,00
2021	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	225.000,00	2.025.000,00
2022		4.255.895.792,00	4.255.895.792,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	663.914.050,00	4.255.895.792,00	4.275.463.292,00	644.346.550,00	386.775.875,00	257.570.675,00

Dari jumlah Piutang BPHTB senilai Rp664.346.550,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp386.775.875,00 sehingga nilai Piutang BPHTB netto adalah senilai Rp257.570.675,00.

j. Piutang Pajak Parkir

Saldo Piutang Pajak Parkir pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp4.462.250,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.100.000,00 atau 227,56% dibandingkan dengan per 31 desember 2021 senilai Rp1.362.250,00 sebagaimana pada **Lampiran 9**.

Tabel 5.5.21

Rincian Piutang Pajak Parkir Tahun 2022 dan 2021

Tahun	Piutang 2021 (Rp)	Penambahan	Pembayaran Tahun 2022	Piutang 2022 (Rp)	Penyisihan 2022	NRV 2022
2019	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00	508.000,00	508.000,00
2020	346.250,00	0,00	0,00	346.250,00	173.125,00	173.125,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	136.015.500,00	132.915.500,00	3.100.000,00	15.500,00	3.084.500,00
Jumlah	1.362.250,00	136.015.500,00	132.915.500,00	4.462.250,00	696.625,00	3.765.625,00

Dari jumlah Piutang Pajak Parkir senilai Rp4.462.250,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp696.625,00 sehingga nilai Piutang BPHTB netto adalah senilai Rp3.765.625,00.

5.5.1.1.4	Piutang Retribusi	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		6.570.013.361,00	3.243.676.649,00

Saldo Piutang Retribusi bruto pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp6.570.013.361 mengalami kenaikan senilai Rp3.326.336.712,00 atau 102,55% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp3.243.676.649,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.22
Rincian Piutang Retribusi Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Retribusi	Piutang 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Piutang 2022 (Rp)
1	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	2.570.376.209,00	1.402.808.040,00	452.400.314,00	3.520.783.935,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	359.170.000,00	561.740.000,00	583.765.000,00	337.145.000,00
3	Retribusi Pengendalian Menara	45.867.840,00	187.738.000,00	181.374.000,00	52.231.840,00
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan	268.262.600,00	359.343.000,00	268.262.600,00	359.343.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	0,00	2.300.509.586,00	0,00	2.300.509.586,00
Jumlah		3.243.676.649,00	4.812.138.626,00	1.485.801.914,00	6.570.013.361,00

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir serta Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima. Penyisihan piutang merupakan estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Dari jumlah Piutang Retribusi senilai Rp6.570.013.361,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp(3.260.126.704,09) sehingga nilai Piutang Retribusi neto adalah senilai Rp3.309.886.656,91 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.23
Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Retribusi	Piutang Retribusi 2022	Penyisihan 2022	NRV 2022	Piutang 2021
1	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	3.520.783.935,00	2.887.347.540,60	633.436.394,40	2.570.376.209,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	337.145.000,00	324.630.624,99	12.514.375,01	359.170.000,00
3	Retribusi Pengendalian Menara	52.231.840,00	48.148.538,50	4.083.301,50	45.867.840,00
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan	359.343.000,00	0,00	359.343.000,00	268.262.600,00
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	2.300.509.586,00	0,00	2.300.509.586,00	0,00
Jumlah		6.570.013.361,00	3.260.126.704,09	3.309.886.656,91	3.243.676.649,00

Penjelasan masing-masing akun piutang retribusi sebagai berikut:

a. Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Saldo Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp3.520.783.935,00 mengalami peningkatan senilai Rp950.407.726,00 atau 36,98% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp3.520.783.935,00 sebagaimana pada **Lampiran 10** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.24
Mutasi Piutang Retribusi Pasar/Grosir Tahun 2022 dan 2021

Tahun	Piutang 2021 (Rp)	Penambahan	Pembayaran Tahun 2022	Piutang 2022 (Rp)	Penyisihan 2022	NRV 2022
2010	114.245.220,00	0,00	0,00	114.245.220,00	114.245.220,00	0,00
2011	123.061.001,00	0,00	0,00	123.061.001,00	123.061.001,00	0,00
2012	61.799.028,00	0,00	0,00	61.799.028,00	61.799.028,00	0,00
2013	54.311.750,00	0,00	0,00	54.311.750,00	54.311.750,00	0,00
2014	71.485.067,00	0,00	0,00	71.485.067,00	71.485.067,00	0,00
2015	13.209.910,00	0,00	0,00	13.209.910,00	13.209.910,00	0,00
2016	184.150.110,00	0,00	0,00	184.150.110,00	184.150.110,00	0,00
2018	416.873.230,00	0,00	0,00	416.873.230,00	416.873.230,00	0,00
2019	325.037.928,00	0,00	0,00	325.037.928,00	325.037.928,00	0,00
2020	531.719.578,00	0,00	0,00	531.719.578,00	531.719.578,00	0,00
2021	674.483.387,00	0,00	37.407.314,00	637.076.073,00	637.076.073,00	0,00
2022		1.402.808.040,00	414.993.000,00	987.815.040,00	354.378.645,60	633.436.394,40
Total	2.570.376.209,00	1.402.808.040,00	452.400.314,00	3.520.783.935,00	2.887.347.540,60	633.436.394,40

Dari jumlah Piutang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan senilai Rp3.520.783.935,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp2.887.347.540,60 sehingga nilai Piutang Retribusi neto adalah senilai Rp633.436.394,40

b. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp337.145.000 mengalami penurunan senilai Rp22.025.000,00 atau 6,13% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp359.170.000,00.

Tabel 5.5.25
Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2022 dan 2021

Tahun	Piutang 2021 (Rp)	Piutang atas Penetapan 2021	Penambahan	Pengurangan	Piutang 2022 (Rp)	Penyisihan	NRV
A	Bagian Umum (Lampiran 11)						
2010	56.035.000,00	0,00	0,00	0,00	56.035.000,00	56.035.000,00	0,00
2011	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
2012	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
2013	16.610.000,00	0,00	0,00	0,00	16.610.000,00	16.610.000,00	0,00
Jumlah	77.745.000,00	0,00	0,00	0,00	77.745.000,00	77.745.000,00	0,00
B	BPKAD (Lampiran 12)						
2019	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
2020	24.900.000,00	0,00	0,00	775.000,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,00

Tahun	Piutang 2021 (Rp)	Piutang atas Penetapan 2021	Penambahan	Pengurangan	Piutang 2022 (Rp)	Penyisihan	NRV
2021	35.635.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	635.000,00	635.000,00	0,00
2022	0,00	27.500.000,00	365.740.000,00	388.240.000,00	5.000.000,00	321.875,00	4.678.125,00
Jumlah	61.675.000,00	27.500.000,00	365.740.000,00	424.015.000,00	30.900.000,00	26.221.875,00	4.678.125,00
C	Dinas Kelautan dan Perikanan (Lampiran 13)						
2015	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2016	12.425.000,00	0,00	0,00	0,00	12.425.000,00	12.425.000,00	0,00
2017	49.925.000,00	0,00	0,00	0,00	49.925.000,00	49.925.000,00	0,00
2018	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
2019	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
2020	38.900.000,00	0,00	0,00	0,00	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00
2021	74.350.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00
2022	0,00	0,00	168.500.000,00	156.500.000,00	12.000.000,00	4.163.749,99	7.836.250,01
Jumlah	219.750.000,00	0,00	168.500.000,00	159.750.000,00	228.500.000,00	220.663.749,99	7.836.250,01
Total	359.170.000,00	27.500.000,00	525.490.000,00	583.765.000,00	337.145.000,00	324.630.624,99	12.514.375,01

Dari jumlah Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp337.145.000,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp324.630.624,99 sehingga nilai Piutang Retribusi netto adalah senilai Rp12.514.375,01

c. Piutang Retribusi Pengendalian Menara

Saldo Piutang Retribusi Pengendalian Menara pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp52.231.840,00 mengalami kenaikan senilai Rp6.364.000,00 atau 13,87% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp45.867.840,00 dan sudah dilakukan penyisihan senilai Rp48.148.538,50 dengan NRV senilai R4.083.301,50 dan Piutang 2022 secara rinci sebagai berikut.

Tabel 5.5.26

Mutasi Piutang Retribusi Pengendalian Menara Tahun 2022 dan 2021

NO	NAMA PEMILIK / WAJIB RETRIBUSI	SALDO 31/12/2021	PENETAPAN 2022	Realisasi Tahun 2022	Total Piutang 2022
1	PT. TOWER BERSAMA	16.830.265,00	19.092.000,00	15.910.000,00	20.012.265,00
2	PT. XL-AXIATA	20.714.161,00	3.182.000,00	0,00	23.896.161,00
3	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	0,00	35.002.000,00	35.002.000,00	0,00
4	PT. KOMET INFRA NUSANTARA	0,00	9.546.000,00	9.546.000,00	0,00
5	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	0,00	22.274.000,00	22.274.000,00	0,00
6	PT. PERSADA SOKKA TAMA	0,00	19.092.000,00	19.092.000,00	0,00
7	SOLUSINDO KREASI PRATAMA	0,00	12.728.000,00	12.728.000,00	0,00
8	PT. EPID MENARA ASSETCO	0,00	6.364.000,00	6.364.000,00	0,00

NO	NAMA PEMILIK / WAJIB RETRIBUSI	SALDO 31/12/2021	PENETAPAN 2022	Realisasi Tahun 2022	Total Piutang 2022
9	PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKA	0,00	19.092.000,00	19.092.000,00	0,00
10	PROTELINDO / PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	0,00	41.366.000,00	41.366.000,00	0,00
11	PT. SARANA INTI PERSADA	8.323.414,00	0,00	0,00	8.323.414,00
JUMLAH		45.867.840,00	187.738.000,00	181.374.000,00	52.231.840,00

Dari jumlah Piutang Retribusi Pengendalian Menara senilai Rp52.231.840,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp48.148.538,50 sehingga nilai Piutang Retribusi netto adalah senilai Rp4.083.301,50.

Tabel 5.5.27
Perhitungan Penyisihan Pengendalian Menara

Tahun	Piutang 2021	Penambahan	Pembayaran	Piutang 2022	Penyisihan	NRV
2015	29.957.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		187.738.000,00	181.374.000,00	6.364.000,00	2.280.698,50	4.083.301,50
	45.867.840,00	187.738.000,00	181.374.000,00	6.364.000,00	2.280.698,50	4.083.301,50

d. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Saldo Piutang Pelayanan Kesehatan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp359.343.000,00 dan piutang pelayanan kesehatan di RSUD sebesar Rp.2.300.509.586,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.28
Piutang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

No	Puskesmas	Uraian	Bulan	Rincian	Keterangan
1	Penanae	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Oktober, November dan Desember 2021 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Oktober	16.925.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
			November	25.555.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
			Desember	22.080.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
	Saldo 31 Desember 2022			64.560.000,00	
2	Rasanae Timur	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Oktober, November, Desember 2022 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Oktober	9.075.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
			November	7.124.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
			Desember	5.149.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
	Saldo 31 Desember 2022			21.348.000,00	
3	Jatibaru	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan	September	600.000,00	Dibavarkan Di Tahun 2023

No	Puskesmas	Uraian	Bulan	Rincian	Keterangan
		September, Oktober, November, Desember 2022 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Oktober	26.359.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
			November	32.979.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
			Desember	2.360.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
	Saldo 31 Desember 2022			62.298.000,00	
4	Mpunda	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Oktober, November dan Desember 2022 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Oktober	25.150.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
			November	18.503.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
			Desember	1.628.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
	Saldo 31 Desember 2022			45.281.000,00	
5	Kumbe	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Agustus,Oktober, November, Desember 2022 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Agustus	8.600.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
			Oktober	6.375.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
			November	7.575.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
			Desember	950.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
	Saldo 31 Desember 2022			23.500.000,00	
6	Paruga	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Oktober, November dan Desember 2022 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Oktober	48.465.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
			November	45.935.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
			Desember	33.155.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
	Saldo 31 Desember 2022			127.555.000,00	
7	Kolo	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Oktober, November, Desember 2022 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Oktober	9.025.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
			November	4.790.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
			Desember	986.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
	Saldo 31 Desember 2022			14.801.000,00	
Jumlah				359.343.000,00	

Tabel 5.5.29

Piutang Pelayanan Kesehatan pada RSUD

No	Jenis Klaim	Uraian	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	Klaim INA CBG'S	Klaim Februari	2022	7.683.400,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
		Klaim Bulan Mei	2022	46.403.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
		Klaim Bulan Juni	2022	99.763.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
		Klaim Juli	2022	95.318.500,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
		Klaim Agustus	2022	56.234.475,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
		Klaim September	2022	95.527.343,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
		Klaim Oktober	2022	573.967.466,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
		Klaim November	2022	524.775.735,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
	Klaim Desember	2022	518.215.067,00	Dibayarkan Di Tahun 2023	
2	Klaim Covid 19	Klaim November	2022	152.790.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
		Klaim Desember	2022	122.531.500,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
3	Klaim Tes Cepat Molekuler (TCM)	Klaim Agustus	2022	1.425.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
		Klaim September	2022	1.875.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
		Klaim Oktober	2022	1.600.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
		Klaim November	2022	1.225.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
		Klaim Desember	2022	1.175.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2023
Total 1+2+3				2.300.509.586,00	

	Piutang Hasil Pengelolaan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.5.1.1.5	Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai 0,00 dan Tahun 2021 senilai 0,00.

5.5.1.1.6	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	2022 (Rp) 1.239.295,74	2021 (Rp) 0,00
------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp1.239.295,74 yang berasal dari TDF TKD remunirasi pendapatan bunga.

5.5.1.1.7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2022 (Rp) 728.448.661,00	2021 (Rp) 1.010.385.620,00
------------------	--	---	---

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp 728.448.661,00. Mengalami penurunan Rp281.936.959,00 atau 27,90% di bandingkan tahun 2021 senilai Rp1.010.385.620,00.

Tabel 5.5.30
Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Koreksi Piutang 2021			2022		Piutang 2022 (Rp)	Aset Lainnya (TDF) 2022 (Rp)	Piutang Transfer 2022 (Rp)
		Piutang 2021 pada LKPD TA 2021 (Rp)	Penyesuaian Piutang 2021 pada LKPD TA 2021(Rp)	Penetapan sesuai Perpres 98 Tahun 2022/PMK 218/pmk.07/2022	Pembayaran Piutang	Pembayaran Tahun Berjalan			
1	2	3	8=6	9	11	12	13=8+9-10-11-12	14	15 = 13-14
DBH Pemerintah Pusat									
Dana Bagi Hasil Pajak									
1	DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DBH PBB menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Bagi Rata	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Biaya Pemungutan PBB Sektor Migas	-	-	21.378.390,00	-	19.025.000,00	2.353.390,00	2.353.390,00	-
4	DBH PBB Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	2.111.950,00	3.898.115,00	2.111.950,00	3.469.000,00	429.115,00	429.115,00	-
5	DBH PBB Bagian Daerah Sektor Migas	-	-	615.703.277,00	-	547.925.000,00	67.778.277,00	67.778.277,00	-
6	DBH PBB Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	60.807.157,00	112.286.838,00	60.807.157,00	99.926.000,00	12.360.838,00	12.360.838,00	-
7	DBH PBB untuk Provinsi/Kabupaten/Kota sektor pertambangan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DBH Pajak PPh Pasal 21	85.528.299,00	312.308.820,00	8.040.027.968,00	-	7.154.960.000,00	1.197.376.788,00	885.067.968,00	312.308.820,00
9	DBH Pajak PPh Pasal 25/29	153.185.340,00	354.793.462,00	436.776.539,00	86.623.551,00	388.695.000,00	316.251.450,00	48.081.539,00	268.169.911,00
10	DBH PBB Bagi Rata	281.579.681,00	803.667.166,00	4.637.610.207,00	803.667.166,00	4.165.004.402,00	472.605.805,00	472.605.805,00	-
11	DBH Cukai Hasil Tembakau TA. 2019	173.211.300,00	197.163.524,00	4.090.877.872,00	197.163.524,00	3.535.141.510,00	555.736.362,00	450.334.872,00	105.401.490,00
Jumlah I		693.504.620,00	1.730.852.079,00	17.958.559.206,00	1.150.373.348,00	15.914.145.912,00	2.624.892.025,00	1.939.011.804,00	685.880.221,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA								
12	DBH SDA Pertambangan Umum Royalty	-	14.956.628.450,00	38.825.432.535,00	11.598.972.354,00	39.187.642.738,00	2.995.445.893,00	2.952.877.453,00	42.568.440,00
13	DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DBH SDA Kehutanan	-	32.437.439,00	63.687.586,00	32.437.439,00	57.473.000,00	6.214.586,00	6.214.586,00	-
15	DBH SDA Perikanan	316.881.000,00	-	2.170.064.211,00	-	1.958.311.000,00	211.753.211,00	211.753.211,00	-
Jumlah II		316.881.000,00	14.989.065.889,00	41.059.184.332,00	11.631.409.793,00	41.203.426.738,00	3.213.413.690,00	3.170.845.250,00	42.568.440,00
Jumlah I + Jumlah II		1.010.385.620,00	16.719.917.968,00	59.017.743.538,00	12.781.783.141,00	57.117.572.650,00	5.838.305.715,00	5.109.857.054,00	728.448.661,00

5.5.1.1.8	Piutang Transfer Antar Daerah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		4.361.716.996,00	4.799.141.791,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp4.361.716.996,00. Mengalami penurunan sebesar Rp437.424.795,00 atau 9.11%. jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp4.799.141.791,00.

Tabel 5.5.31

Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Koreksi Piutang 2021			2022		Piutang 2021 (Rp)	Piutang 2021 (Rp)
		Piutang 2021 pada LKPD TA 2021 (Rp)	Penyesuaian Piutang 2021 pada LKPD TA 2021(Rp)	Penetapan sesuai SK GUB Nomor 973-104 Tahun 2023	Pembayaran Piutang	Pembayaran Tahun Berjalan		
1	2	3	8=6	9	11	12	13=8+9-10-11-12	13=8+9-10-11-12
DBH Pemerintah Provinsi								
1	DBH Pajak Kendaraan Bermotor	1.419.300.365,00	1.419.300.365,00	7.638.585.425,00	1.419.300.365,00	6.206.609.566,00	1.431.975.859,00	1.431.975.859,00
2	DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	923.700.431,00	923.700.431,00	5.950.901.257,00	923.700.431,00	4.685.422.763,00	1.265.478.494,00	1.265.478.494,00
3	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.449.330.954,00	2.449.330.954,00	17.956.244.885,00	2.449.330.954,00	16.296.198.220,00	1.660.046.665,00	1.660.046.665,00
4	DBH Pajak Air Permukaan	6.810.041,00	6.810.041,00	38.930.668,00	6.810.041,00	34.714.690,00	4.215.978,00	4.215.978,00
5	DBH Pajak Rokok	-	-	19.149.816.551,00		19.149.816.551,00	-	-
Jumlah		4.799.141.791,00	4.799.141.791,00	50.734.478.786,00	4.799.141.791,00	46.372.761.790,00	4.361.716.996,00	4.361.716.996,00

5.5.1.1.9	Piutang Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		2.778.761.737,25	2.778.761.737,25

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan saldo Piutang Lancar atas Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah yang sudah memiliki Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua bahwa piutang ganti rugi disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp2.778.761.737,25 tidak mengalami penurunan/kenaikan senilai Rp0,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp2.778.761.737,25. sebagaimana pada **Lampiran 14**.

5.5.1.1.11	Penyisihan Piutang	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		(11.235.490.023,86)	(9.145.910.533,21)

Saldo Penyisihan Piutang pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp11.235.490.023,86. Mengalami kenaikan sebesar

Rp2.089.579.490,65 atau 22,85%. Jika dibandingkan tahun 2021 senilai Rp9.145.910.533,21.

5.5.1.1.12	Belanja Dibayar Dimuka	2022 (Rp) 274.770.484,00	2021 (Rp) 2.969.280.200,00
-------------------	-------------------------------	---	---

Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp274.770.484 mengalami kenaikan senilai Rp2.694.509.716,00 atau 90,75% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp2.969.280.200 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.32
Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2022 dan 2021

No	OPD	Keterangan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Sewa Rumah Aspirasi kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Tahun 2021	13.750.000,00	13.750.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Pembangunan Gedung Perpustakaan	0,00	724.072.200,00
3	Sekretariat Daerah	Pembangunan Sayap kantor Walikota Bima	0,00	2.231.458.000,00
4	Dinas Perhubungan	Atas Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	43.980.000,00	0,00
5	Dinas Kesehatan	Renovasi Gedung Lab Kesda (DAK)	141.849.738,00	0,00
			75.190.746,00	0,00
Jumlah			274.770.484,00	2.969.280.200,00

5.5.1.1.3	Persediaan	2022 (Rp) 12.186.271.978,05	2021 (Rp) 10.469.710.895,88
------------------	-------------------	--	--

Saldo Persediaan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp12.186.271.978,05 mengalami kenaikan senilai Rp1.716.561.082,17 atau 16,40% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp10.469.710.895,80,.

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Bahan Pakai Habis/material yang terdiri dari obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis, ATK, bibit tanaman, benih ikan, barang untuk diserahkan kepada masyarakat dan barang Persediaan lainnya pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bima tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.5.33
Laporan Persediaan Per SKPD Tahun 2022

No	Nama OPD	PERSEDIAAN 2022						TOTAL
		ATK	CETAK	KERTAS DAN COVER	BAHAN KOMPUTER	OBAT-OBATAN	BAHAN - BAHAN LAINNYA	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	29.432.000,00	0,00	0,00	7.901.545.405,68	681.943.250,00	8.612.920.655,68
3	Dinas Ketahanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450.000,00	45.450.000,00

No	Nama OPD	PERSEDIAAN 2022						
		ATK	CETAK	KERTAS DAN COVER	BAHAN KOMPUTER	OBAT-OBATAN	BAHAN - BAHAN LAINNYA	TOTAL
	Pangan							
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	278.000,00	273.049.935,64	0,00	5.240.000,00	0,00	0,00	278.567.935,64
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	677.583.309,00	0,00	677.583.309,00
6	Dinas Perhubungan	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
7	Dinas Koperindag	0,00	28.585.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.585.950,00
8	Diskanlut	129.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	2.509.000,00
9	BPBD	0,00	900.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah	810.000,00	29.625.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	33.535.000,00
11	RSUD Kota Bima	0,00	14.337.800,00	0,00	0,00	2.300.391.792,73	142.115.535,00	2.456.845.127,73
TOTAL KESELURUHAN		2.292.000	424.330.686	3.400.000	5.240.000	10.879.520.507	871.488.785	12.186.271.978,05

Tabel 5.5.34
Laporan Persediaan Per SKPD Tahun 2021

NO.	NAMA SKPD	ATK	BAHAN LAINNYA	BAHAN CETAK	OBAT-OBATAN	BAHAN KOMPUTER	BIBIT TERNAK	KERTAS DAN COVER	PERSEDIAAN
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.000,00
2	Dinas Kesehatan		136.863.995,00	17.016.800,00	9.565.140.161,24				9.719.020.956,24
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan		28.080.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080.050,00
12	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	455.000,00	0,00	262.111.435,64	0,00	13.900.000,00	0,00	0,00	276.466.435,64
14	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00		304.632.014,00	0,00	0,00	0,00	304.632.014,00
15	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	58.525.000,00		0,00	0,00	0,00	58.525.000,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	40.000,0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00	39.178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.178.200,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00	200.000,00	4.880.000,00
21	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.352.240,00	0,00	0,00	0,00	2.352.240,00
23	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sekretariat Dprd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Rasanae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO.	NAMA SKPD	ATK	BAHAN LAINNYA	BAHAN CETAK	OBAT-OBATAN	BAHAN KOMPUTER	BIBIT TERNAK	KERTAS DAN COVER	PERSEDIAAN
	Barat								
26	Kecamatan Rasanee Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Asakota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Mpunda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Raba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
31	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)	272.000,00	0,00	30.380.000,00	0,00	0,00	0,00	3.970.000,00	34.622.000,00
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.821.000,00	164.944.045,00	407.711.435,64	9.872.124.415,24	13.900.000,00	4.180.000,00	5.030.000,00	10.469.710.895,88

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang	23.023.125.259,72	14.612.249.186,29

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Saldo Investasi Jangka Panjang pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp23.023.125.259,72 mengalami peningkatan senilai Rp8.410.876.073,43 atau 57,56% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp14.612.249.186,29 yang terdiri dari.

Tabel 5.5.35
Laporan Investasi Jangka Panjang Tahun 2021 dan 2020

No	Investasi Jangka Panjang	31/12/2022	31/12/2021
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	23.023.125.259,72	14.612.249.186,29
Jumlah		23.023.125.259,72	14.612.249.186,29

5.5.1.2.1	Investasi Non Permanen	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		0,00	0,00

Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima tersebut merupakan dana bergulir yang bersumber dari APBD yang disalurkan kepada kelompok usaha ekonomi produktif maupun masyarakat melalui dinas/instansi terkait dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang harus dikembalikan beserta bagi hasil keuntungannya dalam jangka waktu tertentu.

Saldo Investasi Non Permanen pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.

Tabel 5.5.36
Tabel Investasi Non Permanen

No	Investasi Jangka Panjang	31/12/2022	31/12/2021
1	Dana Bergulir	3.525.842.694,00	3.531.489.746,00
2	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(3.525.842.694,00)	(3.531.489.746,00)
Jumlah		0,00	0,00

5.5.1.2.1.5	Dana Bergulir	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		3.525.842.694,00	3.531.489.736,00

Mutasi Dana Bergulir tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.37
Data Dana Bergulir Tahun 2022 dan 2021

No	OPD Pengelola	31/12/2021	Penambahan	Pengurangan	31/12/2022	Keterangan
1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.050.931.670,00	0,00	5.536.885,00	1.045.394.785,00	Lampiran 15
2	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	2.419.583.066,00	0,00	110.157,00	2.419.472.909,00	Lampiran 16
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (ex. BPMPK)	60.975.000,00	0,00	0,00	60.975.000,00	Lampiran 17
Jumlah		3.531.489.736,00	0,00	5.647.042,00	3.525.842.694,00	

Sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima, dilakukan penyisihan atas dana bergulir dengan persentase penyisihan sebagai berikut.

Tabel 5.5.38
Perhitungan Dana Bergulir sesuai Kebijakan Akuntansi

No	Umur Tunggakan Dana Bergulir	Kategori Penyaluran Dana Bergulir	% Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1	0 s.d 2 thn	Lancar	0 %
2	> 2 thn s.d 3 thn	Kurang Lancar	10 %
3	>3 thn s.d 4 thn	Diragukan	50 %
4	> 4 thn ke atas	Macet	100 %

Dari jumlah Dana Bergulir senilai Rp3.525.842.694,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp3.525.842.694,00 sehingga nilai Dana Bergulir neto adalah senilai Rp0,00. Rincian dana bergulir beserta perhitungan penyisihannya masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.39
Perhitungan Dana Bergulir Per SKPD Tahun 2022

No	OPD Pengelola	31/12/2021	Penyisihan Tidak Tertagih	NRV 31 Desember 2020
1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.045.394.785,00	1.045.394.785,00	0,00
2	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	2.419.472.909,00	2.419.472.909,00	0,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (ex. BPMPK)	60.975.000,00	60.975.000,00	0,00
Jumlah		3.525.842.694,00	3.525.842.694,00	0,00

5.5.1.2.1.6	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	2022 (Rp) (3.525.842.694,00)	2021 (Rp) (3.531.489.736,00)
--------------------	---	---	---

Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp3.525.842.694,00 dan di tahun 2021 senilai Rp3.525.842.694,00

5.5.1.2.2	Investasi Permanen	2022 (Rp) 23.023.125.259,72	2021 (Rp) 14.612.249.186,29
------------------	---------------------------	--	--

Saldo Investasi Permanen pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.023.125.259,72 dan Tahun 2021 senilai Rp14.612.249.186,29. Nilai saldo merupakan Akumulasi nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bima pada Perusahaan Milik Daerah dengan menggunakan metode Ekuitas dan Metode Biaya sebesar Rp16.137.504.969,22 dan Properti Investasi Kota Bima sebesar Rp6.885.620.290,50.

5.5.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		16.137.504.969,22	14.612.249.186,29

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp16.137.504.969,22 dan di tahun 2021 senilai Rp14.612.249.186,29.

Tabel 5.5.40
Perhitungan Mengguakan Metode Ekuitas

No	BUMD	Prosesntasi Kepemilikan Saham	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Naik/ (turun)
1	Perumda Bima Aneka	100,00%	725.134.575,22	1.199.878.792,00	(474.744.217,07)
J u m l a h			725.134.575,22	1.199.878.792,00	(474.744.217,07)

Tabel 5.5.41
Perhitungan Mengguakan Metode Biaya
Data Penyertaan Modal Tahun 2022 dan 2021

No	BUMD	Prosesntasi Kepemilikan Saham	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Naik/ (turun)
1	PT. Bank NTB	1,42%	13.067.621.350,00	11.067.621.350,00	2.000.000.000,00
2	PT. Jamkrida NTB Bersaing	3,05%	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
3	PD. BPR NTB	0,77%	1.044.749.044,00	1.044.749.044,00	0,00
4	KPN Sabua Ade	2,37%	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
J u m l a h			15.412.370.394,00	13.412.370.394,00	2.000.000.000,00

Peraturan Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima bahwa Investasi pada PERUMDA Bima Aneka menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan sahamnya 100% milik Pemerintah Kota Bima sedangkan PT. Bank NTB, PT. Jamkrida NTB Bersaing, PD. BPR NTB menggunakan metode biaya karena kepemilikan saham kurang dari 20%. Sesuai PSAP 6 paragraf 40 menyatakan *bahwa hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatanya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.*

5.5.1.2.2.2	Properti Investasi	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		6.885.620.290,50	0,00

Properti Investasi pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.885.620.290,50 dan Tahun 2021 senilai Rp0,00. Properti Investasterdiri dari tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bima yang di sewakan pada pihak ke tiga dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.42
Properti Investasi Tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo 31/12/2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31/12/2022
1	Properti Investasi Tanah	0,00	3.886.030.071,50	0,00	3.886.030.071,50
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0,00	3.786.023.770,00	0,00	3.786.023.770,00
Jumlah Aset Non Lancar		0,00	7.672.053.841,50	0,00	7.672.053.841,50
Akumulasi Penyusutan		0,00	(786.433.551,00)	0,00	(786.433.551,00)
Nilai Buku Aset Non Lancar		0,00	6.885.620.290,50	0,00	6.885.620.290,50

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2022	0,00
2	Penambahan Tahun 2022	7.672.053.841,50
3	Pengurangan Tahun 2022	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022		7.672.053.841,50
Akumulasi Penyusutan		(786.433.551,00)
Nilai Buku Aset Non Lancar		6.885.620.290,50

Sesuai Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, Kota Bima memiliki Properti Investasi Kota Bima Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.43
Rincian Properti Investasi Kota Bima Tahun 2022

No	Uraian	SKPD	Nama Pihak Ke Tiga	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Nilai Perolehan KIB	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2022	Nilai Properti Investasi per 31 Des 2022
I	PROPERTI INVESTASI TANAH						3,886,030,071.50	-	3,886,030,071.50
1	Tanah Sawah So Lacici	Sekretariat Daerah	ST. Halimah	180/2/PK/II/2022	5,520,000.00	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2024	230,000,000.00	-	230,000,000.00
2	Tanah Sawah So Kalate Penatoi A. Halik	Sekretariat Daerah	A. Halik	180/3/PK/II/2022	3,200,000.00	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022	2,002,029,071.50	-	2,002,029,071.50
3	Tanah Sawah So Kalate Penatoi Sudirman Yusuf	Sekretariat Daerah	Sudirman Yusuf	180/4/PK/II/2022	1,680,000.00	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022	559,000,000.00	-	559,000,000.00
4	Tanah Sawah So Kalate Penatoi Sudirman Yusuf	Sekretariat Daerah	Sudirman Yusuf	180/4/PK/II/2022		1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022	409,500,000.00	-	409,500,000.00
5	Tanah Sawah So Kawinda Penaraga Abdullah Abidin	Sekretariat Daerah	Abdullah Abidin	180/1/PK/II/2022	5,760,000.00	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2024	685,501,000.00	-	685,501,000.00
II	PROPERTI INVESTASI GEDUNG DAN BANGUNAN						3,786,023,770.00	786,433,551.00	2,999,590,219.00
1	Kios Pasar	Dinas	Bank BRI	180/5/PK/I/20		1 Januari		320,161,000.00	

No	Uraian	SKPD	Nama Pihak Ke Tiga	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Nilai Perolehan KIB	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2022	Nilai Properti Investasi per 31 Des 2022
	Penaraga	Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan		21 B.144/KC-XI/LYI/2021	60,000,000	2021 s.d. 31 Desember 2023	1,506,640,000.00		1,186,479,000.00
2	Rumah Potong Hewan Asakota Kotabima	Dinas Pertanian	PT. BIMA BANGUN SINERGI	524.7/332/Distan/III/2022 002/KTR-RPH/BBS/III/2022	Kontribusi: 1. Kontribusi Tetap: Rp. 60.000.000 per tahun 2. Kontribusi Variabel: Rp. 35.000 per ekor	5 Tahun	133,189,550.00	24,140,601.00	109,048,949.00
3	Rumah Potong Hewan Asakota Kotabima	Dinas Pertanian	PT. Bima Bangun Sinergi	524.7/332/Distan/III/2022 002/KTR-RPH/BBS/III/2022	Kontribusi: 1. Kontribusi Tetap: Rp. 60.000.000 per tahun 2. Kontribusi Variabel: Rp. 35.000 per ekor	5 Tahun	137,660,220.00	11,758,479.00	125,901,741.00
4	Rumah Potong Hewan Asakota Kotabima	Dinas Pertanian	PT. Bima Bangun Sinergi	524.7/332/Distan/III/2022 002/KTR-RPH/BBS/III/2022	Kontribusi: 1. Kontribusi Tetap: Rp. 60.000.000 per tahun 2. Kontribusi Variabel: Rp. 35.000 per ekor	5 Tahun	147,035,000.00	7,658,073.00	139,376,927.00
5	Pabrik Es	Dinas Kelautan Dan Perikanan	CV. Danu Etty Fajar	523.4/03/DISL UTKAN/PDS PKP/I/2022		1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2024	1,861,499,000.00	422,715,398.00	1,438,783,602.00
Total I + II							7,672,053,841.50	786,433,551.00	6,885,620,290.50

5.5.1.3 Aset Tetap

2022 (Rp)
1.947.211.575.128,24

2021 (Rp)
1.864.964.691.001,61

Saldo Nilai Buku Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp1.947.211.575.128,24, mengalami kenaikan senilai Rp82.246.884.126,63 atau 4,41% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp1.864.964.691.001,61 sebagaimana pada **Lampiran 20** dan rincian per Perangkat Daerah (PD) pada **Lampiran 21**.

Tabel 5.5.38
Rincian Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Tanah	566.178.193.169,87	547.910.105.241,37
2	Peralatan dan Mesin	331.728.951.182,14	292.753.815.364,26
3	Gedung dan Bangunan	719.111.405.819,66	614.844.747.188,93
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.235.419.949.690,20	1.173.746.744.126,20

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5	Aset tetap lainnya	85.432.671.685,71	80.079.328.699,71
6	Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)	8.402.727.432,20	29.496.862.800,00
J u m l a h		2.946.273.898.979,78	2.738.831.603.420,47
Akumulasi Penyusutan		(999.062.323.851,54)	(873.866.912.418,86)
Nilai Buku Aset Tetap		1.947.211.575.128,24	1.864.964.691.001,61

Rincian mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.5.39

Mutasi Aset Tetap tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	2021 (Rp)	Mutasi		2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tanah	547.910.105.241,37	24.672.096.060,00	6.404.008.131,50	566.178.193.169,87
2	Peralatan dan Mesin	292.753.815.364,26	48.268.544.310,44	9.293.408.492,56	331.728.951.182,14
3	Gedung dan Bangunan	614.844.747.188,93	125.351.141.758,73	21.084.483.128,00	719.111.405.819,66
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.173.746.744.126,20	70.098.568.795,00	8.425.363.231,00	1.235.419.949.690,20
5	Aset Tetap Lainnya	80.079.328.699,71	5.355.027.486,00	1.684.500,00	85.432.671.685,71
6	Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)	29.496.862.800,00	8.402.727.432,20	29.496.862.800,00	8.402.727.432,20
Jumlah		2.738.831.603.420,47	282.148.105.842,37	74.705.810.283,06	2.946.273.898.979,78
Akumulasi Penyusutan		(873.866.912.418,86)	(134.056.969.589,20)	(8.861.558.156,52)	(999.062.323.851,54)
Nilai Buku Aset Tetap		1.864.964.691.001,61	148.091.136.253,17	65.844.252.126,54	1.947.211.575.128,24

Penambahan Aset Tetap senilai Rp282.148.105.842,37 terdiri dari:

- Hibah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp845.425.000,00; berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 032/383/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 (**Lampiran 22**);
- Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bima senilai Rp29.381.609.212,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 180/3/BA/IV/2022 Tanggal 20 Juni 2022 (**Lampiran 22**);
- Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp32.787.178.522,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 90.1/BA/DC/2021 dan Nomor : 180/2/BA/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 (**Lampiran 22**);
- Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp5.634.310.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 627/BA/Dr/2021 dan Nomor : 180/II/BA/XII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 (**Lampiran 22**);
- Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp8.986.044.280,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 105/BA/Dr/2020 dan Nomor : 650/297/VIII/2020 tanggal 13 Juli 2020 (**Lampiran 22**);
- Hibah dari Bank Negara Indonesia senilai Rp44.000.000,00 tanggal 20 Mei 2022 (**Lampiran 22**);
- Belanja Modal Aset Tetap Tahun Anggaran 2022 terealisasi senilai Rp153.774.797.087,73;
- Kapitalisasi atas Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp123.760.000,00;

- i. Kapitalisasi atas Belanja Barang dan Jasa senilai Rp3.300.646.500,00;
- j. Koreksi tambah atas kurang catat nilai perolehan barang pada Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp5.247.435.250,00;
- k. Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp1.677.238.097,44;
- l. Reklas antar Kartu Inventaris Barang (KIB) senilai Rp40.340.146.892,20; dan
- m. Reklas tambah dari Aset Lain-lain senilai Rp5.515.001,00.

Pengurangan Aset Tetap senilai Rp74.705.810.283,06 terdiri dari:

- a. Pengurangan Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/159/900.32/IV/2022 Tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Hibahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima senilai Rp937.912.000,00;
- b. Pengurangan Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/277/900.32/VI/2022 Tanggal 2 Juni 2022 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Hibahkan kepada Korem 162/Wira Bhakti untuk Satuan Kodim 1608/Bima senilai Rp3.146.053.000,00;
- c. Pengurangan Aset Tetap Tanah atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/325/900.32/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Hibahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima senilai Rp143.750.000,00;
- d. Pengurangan Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/418/900.32/IX/2022 Tanggal 22 September 2022 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Hibahkan kepada Korem 162/Wira Bhakti untuk Satuan Kodim 1608/Bima senilai Rp8.753.497.262,20;
- e. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/488/900.32/XI/2022 Tanggal 14 November 2022 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Hibahkan kepada Korem 162/Wira Bhakti untuk Satuan Kodim 1608/Bima senilai Rp510.140.806,35;
- f. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/547/420/XII/2022 Tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Dana Hibah Kepada Satuan Pendidikan TK/PAUD Swasta dan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Kota Bima senilai Rp3.127.074.000,00;
- g. Pengurangan Aset Tetap atas Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/544/900.32/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Proses Pembongkaran Tahun 2022 dari Daftar Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp3.549.350.250,60;
- h. Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya atas perubahan kondisi Rusak Berat dan Hilang senilai Rp2.902.726.329,77;
- i. Pengurangan atas Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp1.677.238.097,44; dan
- j. Reklasifikasi antar KIB senilai 40.340.146.892,20;
- k. Pengurangan Aset Tetap yang disebabkan adanya Koreksi kurang atas Belanja Modal yang tidak tercatat sebagai aset tetap dan Koreksi Kode Rekening senilai Rp1.945.867.803,00;

1. Pengurangan Aset yang disebabkan Reklasifikasi ke Properti Investasi senilai 7.672.053.841,50.

5.5.1.3.1 Tanah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	566.178.193.169,87	547.910.105.241,37

Tanah per 31 Desember 2022 senilai Rp566.178.193.169,87 mengalami kenaikan senilai Rp18.268.087.928,50 atau 3,33% dibandingkan tahun 2021 Rp547.910.105.241,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.40
Rincian Aset Tanah Tahun 2022 dan 2021

No.	Tanah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Tanah Persil	115.483.039.046,21	98.249.580.046,21
2	Tanah Non Persil	283.271.191.233,00	283.060.720.304,50
3	Lapangan	167.423.962.890,66	166.599.804.890,66
	Jumlah	566.178.193.169,87	547.910.105.241,37

Mutasi Tanah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2022	547.910.105.241,37
Penambahan Tahun 2022	24.672.096.060,00
Pengurangan Tahun 2022	6.404.008.131,50
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	566.178.193.169,87

Penambahan Aset Tanah Tahun 2022 senilai Rp.24.672.096.060,00 berasal dari:

- a. Belanja modal tanah Tahun 2022 senilai Rp3.035.329.060,00;
- b. Hibah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp845.425.000,00; berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 032/383/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022; **Lampiran 22.**
- c. Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bima senilai Rp18.931.366.000,00; berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 080/3/BA/IV/2022 Tanggal 27 Juni 2022, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Inventarisasi/Pemeriksaan Fisik BMD dan Dokumen Nomor: 800/1528/BPKAD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 terhadap 115 objek Tanah Persil/Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal/Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III berdiri di atasnya 106 unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal /Rumah Negara Golongan III yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima.; **Lampiran 22.**
- d. Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp590.976.000,00;
- e. Koreksi tambah atas kurang catat nilai perolehan barang pada Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp1.269.000.000,00;

Pengurangan Aset Tetap Tanah selama Tahun 2022 senilai Rp6.404.008.131,50 terdiri dari :

- a. Pengurangan Aset Tetap Tanah atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/277/900.32/VI/2022 Tanggal 2 Juni 2022 dan SK. Walikota Nomor: 188.45/418/900.32/IX/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Hibahkan kepada Korem 1608/Wira Bhakti untuk Satuan Kodim 1608/Bima senilai Rp1.315.068.000,00 pada Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah Kota Bima;
- b. Pengurangan Aset Tetap Tanah atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/159/900.32/IV/2022 Tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Hibahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima senilai Rp455.700.000,00 pada Sekretariat Daerah Kota Bima;
- c. Pengurangan Aset Tetap Tanah atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/325/900.32/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Hibahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima senilai Rp143.750.000,00 pada Sekretariat Daerah Kota Bima;
- d. Pengurangan Aset Tetap yang disebabkan adanya Koreksi kurang atas Belanja Modal yang tidak tercatat sebagai aset tetap senilai Rp3.898.514.131,50 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengurangan atas Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp590.976.000,00;
- f. Pengurangan Aset Tetap Tanah yang disebabkan Reklas ke Properti Investasi senilai Rp3.886.030.071,50.

Selama tahun 2022 tidak ada penambahan penerbitan sertifikat tanah yang telah diajukan oleh BPKAD Bidang BMD tahun 2012 dan Bagian Administrasi Pemerintahan Kota Bima tahun 2016 kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bima. Upaya sertifikasi akan terus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan prioritas pembangunan di lingkungan Kota Bima.

Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 21.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 terkait penerbitan sertifikat tanah masih dalam proses adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.41
Penerbitan Sertifikat Tanah masih dalam Proses

No.	Uraian	2018		Terbit 2021		Sisa dalam proses s/d Tahun 2021		Keterangan
		Jumlah Bidang	Luas (m ²)	Jumlah Bidang	Luas (m ²)	Jumlah Bidang	Luas (m ²)	
1	Pengajuan Penerbitan Sertifikat 2012	8	36.272	0,00	0,00	8	36.272	BPKAD Bidang Aset
2	Pengajuan Penerbitan Sertifikat 2016	6	12.981	0,00	0,00	6	12.981	Bag. Administrasi Pemerintahan
	JUMLAH	14	49.253	0,00	0,00	14	49.253	

5.5.1.3.2 Peralatan dan Mesin

2022 (Rp)
331.728.951.182,14

2021 (Rp)
292.753.815.364,26

Saldo Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp331.728.951.182,14 mengalami kenaikan senilai Rp38.975.135.817,88 atau 13,31% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp292.753.815.364,26 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.42
Rincian Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021

No.	Peralatan dan Mesin	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Alat Besar Darat	11.500.431.811,00	11.500.431.811,00
2	Alat Besar Apung	49.527.500,00	49.527.500,00
3	Alat Bantu	1.759.673.315,83	1.365.139.640,83
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	62.626.305.638,31	63.550.200.409,99
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.098.226.612,68	3.111.735.695,68
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	8.766.955.159,50	8.831.355.159,50
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	648.192.000,00	539.792.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	1.039.766.025,11	998.511.325,11
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	395.593.340,66	296.032.674,02
10	Alat Ukur	2.275.182.647,33	2.043.682.647,33
11	Alat Pengolahan	5.277.636.540,57	5.240.682.873,90
12	Alat Kantor	13.397.517.918,34	12.443.411.004,34
13	Alat Rumah Tangga	36.657.050.211,55	34.524.718.749,55
14	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.319.140.124,24	7.933.320.874,24
15	Alat Studio	10.449.988.475,05	10.066.360.275,05
16	Alat Komunikasi	2.849.439.979,74	2.740.921.447,74
17	Peralatan Pemancar	1.912.524.975,28	1.912.524.975,28
18	Alat Kedokteran	42.866.097.104,02	39.565.151.020,02
19	Alat Kesehatan Umum	28.587.404.647,17	4.335.350.842,17
20	Unit Alat Laboratorium	10.384.463.351,91	9.990.733.456,91
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	291.813.083,65	260.523.708,65
22	Alat Peraga Praktek Sekolah	19.273.127.251,84	18.992.060.323,12
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	159.486.875,00	159.486.875,00
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	184.444.000,00	184.444.000,00
25	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	668.534.375,00	447.245.000,00
26	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	204.114.085,75	193.498.085,75
27	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	2.300.000,00	0,00
28	Senjata Api	24.906.800,00	24.906.800,00
29	Persenjataan Non Senjata Api	29.375.000,00	29.375.000,00
30	Alat Khusus Kepolisian	9.797.150,00	8.210.350,00
31	Komputer Unit	42.392.107.650,01	36.647.215.401,80
32	Peralatan Komputer	11.536.162.768,60	10.920.395.633,28
33	Alat Deteksi	101.950.000,00	101.950.000,00

No.	Peralatan dan Mesin	2022 (Rp)	2021 (Rp)
34	Alat Pelindung	30.000.000,00	30.000.000,00
35	Alat Sar	344.221.700,00	333.305.000,00
36	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.078.263.600,00	2.979.463.600,00
37	Peralatan Olah Raga	537.229.464,00	402.151.204,00
Jumlah		331.728.951.182,14	292.753.815.364,26
Akumulasi Penyusutan		(226.313.432.097,54)	(195.330.014.404,86)
Nilai Buku Peralatan dan Mesin		105.415.519.084,60	97.423.800.959,40

Tabel 5.5.43
Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	2021 (Rp)	MUTASI		2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Alat Besar Darat	11.500.431.811,00	0,00	0,00	11.500.431.811,00
2	Alat Besar Apung	49.527.500,00	0,00	0,00	49.527.500,00
3	Alat Bantu	1.365.139.640,83	394.533.675,00	0,00	1.759.673.315,83
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	63.550.200.409,99	3.822.734.943,44	4.746.629.715,12	62.626.305.638,31
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.111.735.695,68	0,00	13.509.083,00	3.098.226.612,68
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	8.831.355.159,50	0,00	64.400.000,00	8.766.955.159,50
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	539.792.000,00	306.600.000,00	198.200.000,00	648.192.000
8	Alat Bengkel Bermesin	998.511.325,11	41.254.700,00	0,00	1.039.766.025,11
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	296.032.674,02	99.560.666,64	0,00	395.593.340,66
10	Alat Ukur	2.043.682.647,33	231.500.000,00	0,00	2.275.182.647,33
11	Alat Pengolahan	5.240.682.873,90	36.953.666,67	0,00	5.277.636.540,57
12	Alat Kantor	12.443.411.004,34	967.908.914,00	13.802.000,00	13.397.517.918,34
13	Alat Rumah Tangga	34.524.718.749,55	2.142.925.462,00	10.594.000,00	36.657.050.211,55
14	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.933.320.874,24	385.819.250,00	0,00	8.319.140.124,24
15	Alat Studio	10.066.360.275,05	383.628.200,00	0,00	10.449.988.475,05
16	Alat Komunikasi	2.740.921.447,74	108.518.532,00	0,00	2.849.439.979,74
17	Peralatan Pemancar	1.912.524.975,28	0,00	0,00	1.912.524.975,28
18	Alat Kedokteran	39.565.151.020,02	3.300.946.084,00	0,00	42.866.097.104,02
19	Alat Kesehatan Umum	4.335.350.842,17	24.264.130.014,00	12.076.209,00	28.587.404.647,17
20	Unit Alat Laboratorium	9.990.733.456,91	393.729.895,00	0,00	10.384.463.351,91
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	260.523.708,65	31.289.375,00	0,00	291.813.083,65
22	Alat Peraga Praktek Sekolah	18.992.060.323,12	4.375.940.928,72	4.094.874.000,00	19.273.127.251,84
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	159.486.875,00	0,00	0,00	159.486.875,00
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	184.444.000,00	0,00	0,00	184.444.000,00

No.	Uraian	2021 (Rp)	MUTASI		2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
25	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	447.245.000,00	221.289.375,00	0,00	668.534.375,00
26	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	193.498.085,75	10.616.000,00	0,00	204.114.085,75
27	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
28	Senjata Api	24.906.800,00	0,00	0,00	24.906.800,00
29	Persenjataan Non Senjata Api	29.375.000,00	0,00	0,00	29.375.000,00
30	Alat Khusus Kepolisian	8.210.350,00	1.586.800,00	0,00	9.797.150,00
31	Komputer Unit	36.647.215.401,80	5.841.543.189,79	96.650.941,58	42.392.107.650,01
32	Peralatan Komputer	10.920.395.633,28	658.439.679,18	42.672.543,86	11.536.162.768,60
33	Alat Deteksi	101.950.000,00	0,00	0,00	101.950.000,00
34	Alat Pelindung	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
35	Alat Sar	333.305.000,00	10.916.700,00	0,00	344.221.700,00
36	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.979.463.600,00	98.800.000,00	0,00	3.078.263.600,00
37	Peralatan Olah Raga	402.151.204,00	135.078.260,00	0,00	537.229.464,00
J u m l a h		292.753.815.364,26	48.268.544.310,44	9.293.408.492,56	331.728.951.182,14
Akumulasi Penyusutan		(195.330.014.404,86)	(34.456.691.091,20)	(3.473.273.398,52)	(226.313.432.097,54)
Nilai Buku Peralatan dan Mesin		97.423.800.959,40	13.811.853.219,24	5.820.135.094,04	105.415.519.084,60

U r a i a n	Jumlah (Rp)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	292.753.815.364,26
Penambahan Tahun 2022	48.268.544.310,44
Pengurangan Tahun 2022	9.293.408.492,56
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	331.728.951.182,14
Akumulasi Penyusutan	(226.313.432.097,54)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	105.415.519.084,60

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 senilai Rp48.268.544.310,44 berasal dari:

- Belanja Modal tahun 2022 senilai Rp45.650.535.702,00;
- Kapitalisasi atas belanja honorarium pengadaan barang/jasa senilai Rp65.442.500,00;
- Kapitalisasi atas belanja barang dan jasa konsultan perencana serta konsultan pengawasan senilai Rp469.340.700,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) selama tahun 2022 senilai Rp1.086.262.097,44;
- Reklas dari aset tetap Gedung dan Bangunan yang dicatat sebagai Peralatan dan Mesin senilai Rp28.500.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima;
- Reklas dari aset tetap Gedung dan Bangunan yang dicatat sebagai Peralatan dan Mesin senilai Rp248.645.760,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
- Reklas dari Aset Tetap Lainnya yang dicatat sebagai Peralatan dan Mesin senilai Rp1.684.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
- Hibah dari Bank Negara Indonesi senilai Rp44.000.000,00;
- Koreksi tambah tahun 2022 senilai Rp668.618.050,00.

- j. Reklas dari Aset Lainnya senilai Rp5.515.001,00.

Pengurangan Peralatan dan Mesin tahun 2022 senilai Rp9.293.408.492,56 terdiri atas :

- a. Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) selama tahun 2022 senilai Rp1.086.262.097,44;
- b. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan adanya Koreksi kurang atas Belanja Modal yang tidak tercatat sebagai aset tetap dan koreksi penyesuaian kode rekening senilai Rp1.663.903.259,00 (**Lampiran 22**);
- c. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/488/900,32/XI/2022 Tanggal 14 November 2022 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Hibahkan kepada Korem 162/Wira Bhakti untuk Satuan Kodim 1608/Bima senilai Rp510.140.806,35 pada Sekretariat Daerah Kota Bima;
- d. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/547/420/XII/2022 Tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Hibah Kepada Satuan Pendidikan TK/PAUD Swasta dan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Kota Bima senilai Rp3.127.074.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
- e. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.302.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
- f. Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas perubahan kondisi Rusak Berat, dan Hilang 2022 senilai Rp2.902.726.329,77..

Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor: 21.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 terkait kendaraan dinas tidak didukung BPKB adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.44

Kendaraan Dinas Yang Tidak Didukung BPKB

No.	Uraian	Audited 2019		Sudah Ada Tahun 2022		Belum Ada	
		Jumlah (unit)	Nilai (Rp)	Jumlah (unit)	Nilai (Rp)	Jumlah (unit)	Nilai (Rp)
1	Mobil Tangki/Tinja	1	125.000.000,00	0	0,00	1	125.000.000,00
2	Pick Up	1	170.092.500,00	0	0,00	1	170.092.500,00
3	Semi Trailer	2	80.000.000,00	0	0,00	2	80.000.000,00
4	Sepeda Motor	38	621.261.450,00	0	0,00	38	577.659.450,00
5	Station Wagon	10	2.217.272.000,00	0	0,00	10	2.217.272.000,00
6	Truck + Attachment	7	655.750.000,00	0	0,00	7	655.750.000,00
	JUMLAH	59	3.869.375.950,00	0	0,00	59	3.825.773.950,00

5.5.1.3.3 Gedung dan Bangunan

2022 (Rp)	2021 (Rp)
719.111.405.819,66	614.844.747.188,93

Saldo Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp719.111.405.819,66,66 mengalami kenaikan senilai Rp104.266.658.630,73

atau 16,96% dibanding dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp614.844.747.188,93 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.45
Nilai Bangunan dan Gedung Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No.	Gedung dan Bangunan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	606.026.215.987,33	550.860.756.558,60
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	51.510.668.968,68	3.649.736.166,68
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	5.101.363.078,25	5.101.363.078,25
4	Bangunan Menara Perambuan	604.570.000,00	604.570.000,00
5	Tugu/Tanda Batas	55.868.587.785,40	54.628.321.385,40
Jumlah		719.111.405.819,66	614.844.747.188,93
Akumulasi Penyusutan		(142.289.606.965,00)	(123.761.129.643,00)
Nilai Buku Bangunan dan Gedung		576.821.798.854,66	491.083.617.545,93

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.46
Mutasi Aset Tetap Bangunan dan Gedung Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	2021 (Rp)	MUTASI		2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	550.860.756.558,60	75.940.242.556,73	20.774.783.128,00	606.026.215.987,33
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.649.736.166,68	48.070.932.802,00	210.000.000,00	51.510.668.968,68
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	5.101.363.078,25	0,00	0,00	5.101.363.078,25
4	Bangunan Menara Perambuan	604.570.000,00	0,00	0,00	604.570.000,00
5	Tugu/Tanda Batas	54.628.321.385,40	1.339.966.400,00	99.700.000,00	55.868.587.785,40
J u m l a h		614.844.747.188,93	125.351.141.758,73	21.084.483.128,00	719.111.405.819,66
Akumulasi Penyusutan		(123.761.129.643,00)	(22.775.622.641,00)	(4.247.145.319,00)	(142.289.606.965,00)
Nilai Buku Bangunan dan Gedung		491.083.617.545,93	102.575.519.117,73	16.837.337.809,00	576.821.798.854,66

U r a i a n	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2022	614.844.747.188,93
Penambahan Tahun 2022	125.351.141.758,73
Pengurangan Tahun 2022	21.084.483.128,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	719.111.405.819,66
Akumulasi Penyusutan	(142.289.606.965,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	576.821.798.854,66

Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022 senilai Rp125.351.141.758,73 berasal dari :

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 senilai Rp34.349.972.004,73;
- b. Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bima senilai Rp10.450.243.212,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 032/035/07,3/2022 dan 180/3/BA/IV/2022 Tanggal 20 Juni 2021 ,yang kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Inventarisasi/Pemeriksaan Fisik BMD dan Dokumen Nomor: 800/1528/BPKAD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 terdapat 106 unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal/Rumah Negara Golongan III belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. **(Lampiran 22)**;
- c. Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp8.986.044.280,00, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 105/BA/Dr/2020 dan 650/297/VIII/2020 tanggal 13 Juli 2020 **(Lampiran 22)**;
- d. Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp32.787.178.522,00, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 90.1/BA/DC/2021 dan 180/2/BA/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 **(Lampiran 22)**;
- e. Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp5.634.310.000,00, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 627/BA/Dr/2021 dan 180/II/BA/XII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 **(Lampiran 22)**;
- f. Kapitalisasi atas belanja honorarium pengadaan barang/jasa senilai Rp31.207.500,00;
- g. Kapitalisasi atas belanja barang dan Jasa senilai Rp305.506.240,00;
- h. Reklas tambah dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp29.496.862.800,00;
- i. Koreksi tambah atas kurang catat nilai perolehan barang pada Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp3.309.817.200,00.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2022 senilai Rp.21.084.483.128,00 terdiri atas :

- a. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/544/900.32/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Proses Pembongkaran Tahun 2022 dari Daftar Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp3.369.212.250,60;
- b. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/277/900.32/VI/2022 Tanggal 2 Juni 2022 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Hibahkan kepada Korem 162/Wira Bhakti untuk satuan Kodim 1608/Bima senilai Rp3.000.953.000,00 pada Dinas Kesehatan Kota Bima;
- c. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/418/900.32/IX/2022 Tanggal 22 September 2022 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Hibahkan kepada Korem 162/Wira Bhakti untuk satuan Kodim 1608/Bima senilai Rp6.108.581.181,20 pada Dinas Kesehatan Kota Bima;
- d. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/159/900.32/IV/2022 Tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Hibahkan kepada Korem 162/Wira Bhakti untuk satuan Kodim 1608/Bima senilai Rp482.212.000,00 pada Sekretariat Daerah Kota Bima;
- e. Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin senilai Rp248.645.760,00 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;

- f. Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin senilai Rp28.500.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima;
- g. Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp837.423.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
- h. Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp196.600.000,00 pada Dinas Pariwisata Kota Bima;
- i. Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp34.849.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima;
- j. Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp2.774.441.782,20 pada Dinas Kesehatan Kota Bima.
- k. Koreksi (-) Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas sisa fisik yang masuk Bank Garansi senilai Rp217.040.484,00;
- l. Koreksi (-) Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Non Lancar (Properti Investasi) senilai Rp3.786.023.770,00.

5.5.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		1.235.419.949.690,20	1.173.746.744.126,20

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp1.235.419.949.690,20 mengalami kenaikan senilai Rp61.673.205.564,00 atau 5,25% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp1.173.746.744.126,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.47
Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dan 2021

No.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Jalan	779.650.613.819,99	746.653.793.000,99
2	Jembatan	78.260.494.266,85	74.539.927.266,85
3	Bangunan Air Irigasi	65.496.948.583,21	65.275.921.916,53
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	2.926.462.554,99	2.926.462.554,99
5	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	2.409.472.769,23	2.409.472.769,23
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	147.162.749.227,48	134.118.742.655,16
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	13.054.322.484,42	12.673.015.484,42
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	16.323.497.192,52	15.739.985.192,52
9	Bangunan Air Kotor	21.165.089.392,68	20.252.238.246,68
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	41.460.577.516,26	34.439.213.516,26
11	Instalasi Air Kotor	2.584.445.101,23	2.683.911.101,23
12	Instalasi Pengolahan Sampah	343.260.000,00	379.640.000,00
13	Instalasi Pembangkit Listrik	2.958.400.000	185.900.000,00
14	Instalasi Gardu Listrik	3.084.761.882,85	2.995.061.882,85
15	Instalasi Pengaman	22.250.000,00	22.250.000,00

No.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
16	Jaringan Air Minum	26.672.127.807,55	26.663.447.807,55
17	Jaringan Listrik	24.409.962.348,94	24.353.245.988,94
18	Jaringan Telepon	49.200.000,00	49.200.000,00
19	Jaringan Gas	7.385.314.742,00	7.385.314.742,00
	Jumlah	1.235.419.949.690,20	1.173.746.744.126,20
	Akumulasi Penyusutan	(630.459.284.789,00)	(554.775.768.371,00)
	Nilai Buku Jalan, Irigasi dan Jaringan	604.960.664.901,20	618.970.975.755,20

Tabel 5.5.48
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2021 (Rp)	MUTASI		2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Jalan	746.653.793.000,99	38.303.207.850,00	5.306.387.031,00	779.650.613.819,99
2	Jembatan	74.539.927.266,85	3.720.567.000,00	0,00	78.260.494.266,85
3	Bangunan Air Irigasi	65.275.921.916,53	221.026.666,68	0,00	65.496.948.583,21
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	2.926.462.554,99	0,00	0,00	2.926.462.554,99
5	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	2.409.472.769,23	0,00	0,00	2.409.472.769,23
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	134.118.742.655,16	13.554.902.072,32	510.895.500,00	147.162.749.227,48
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	12.673.015.484,42	381.307.000,00	0,00	13.054.322.484,42
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	15.739.985.192,52	837.423.400,00	253.911.400,00	16.323.497.192,52
9	Bangunan Air Kotor	20.252.238.246,68	912.851.146,00	0,00	21.165.089.392,68
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	34.439.213.516,26	7.082.358.000,00	60.994.000,00	41.460.577.516,26
11	Instalasi Air Kotor	2.683.911.101,23	8.460.000,00	107.926.000,00	2.584.445.101,23
12	Instalasi Pengolahan Sampah	379.640.000,00	0,00	36.380.000,00	343.260.000,00
13	Instalasi Pembangkit Listrik	185.900.000,00	2.772.500.000,00	0,00	2.958.400.000,00
14	Instalasi Gardu Listrik	2.995.061.882,85	89.700.000,00	0,00	3.084.761.882,85
15	Instalasi Pengaman	22.250.000,00	0,00	0,00	22.250.000,00
16	Jaringan Air Minum	26.663.447.807,55	99.495.000,00	90.815.000,00	26.672.127.807,55
17	Jaringan Listrik	24.353.245.988,94	2.114.770.660,00	2.058.054.300,00	24.409.962.348,94
18	Jaringan Telepon	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00
19	Jaringan Gas	7.385.314.742,00	0,00	0,00	7.385.314.742,00
	Jumlah	1.173.746.744.126,20	70.098.568.795,00	8.425.363.231,00	1.235.419.949.690,20
	Akumulasi Penyusutan	(554.775.768.371,00)	(76.824.655.857,00)	(1.141.139.439,00)	(630.459.284.789,00)
	Nilai Buku Jalan, Irigasi dan Jaringan	618.970.975.755,20	(6.726.087.062,00)	7.284.223.792,00	604.960.664.901,20

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2022	1.173.746.744.126,20
Penambahan Tahun 2022	70.098.568.795,00
Pengurangan Tahun 2022	8.425.363.231,00

Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	1.235.419.949.690,20
Akumulasi Penyusutan	(630.459.284.789,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	604.960.664.901,20

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2022 senilai Rp70.098.568.795,00 berasal dari :

- Belanja Modal tahun 2022 senilai Rp69.040.535.395,00;
- Kapitalisasi atas belanja honorarium pengadaan barang/jasa tahun 2022 senilai Rp24.010.000,00;
- Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dicatat sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp837.423.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
- Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dicatat sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp196.600.000,00 pada Dinas Pariwisata Kota Bima.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2022 senilai Rp8.425.363.231,00 terdiri atas:

- Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/544/900.32/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Proses Pembongkaran Tahun 2022 dari Daftar Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp180.138.000,00 pada Kecamatan Mpunda;
- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/418/900.32/IX/2022 Tanggal 22 September 2022 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Hibahkan kepada Korem 162/Wira Bhakti untuk satuan Kodim 1608/Bima senilai Rp1.474.948.081,00 pada Dinas Kesehatan Kota Bima;
- Reklas ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.089.551.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.
- Reklas ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp3.655.625.650,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima;
- Reklas ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.972.660.000,00 pada Dinas Perhubungan Kota Bima;
- Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan adanya Koreksi kurang atas Belanja Modal yang tidak tercatat sebagai aset tetap senilai Rp8.460.000,00 (**Lampiran 23**);
- Koreksi (-) Aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi atas sisa fisik yang masuk Bank Garansi senilai Rp43.980.000,00;

5.5.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

2022 (Rp)
85.432.671.685,71

2021 (Rp)
80.079.328.699,71

Aset Tetap Lainnya senilai Rp85.432.671.685,71 dan Rp80.079.328.699,71 merupakan nilai Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.49
 Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No.	Aset Tetap Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	81.361.420.634,71	76.292.712.699,71
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	341.944.251,00	100.810.000,00
3	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	1.681.859.200,00	1.679.050.000,00
4	Musik	48.370.000,00	48.370.000,00
5	Three Dimensional Artefacts And Realita	99.500.000,00	99.500.000,00
6	Barang Bercorak Kesenian	403.003.600,00	362.312.000,00
7	Alat Bercorak Kebudayaan	749.060.000,00	749.060.000,00
8	Tanda Penghargaan	5.000.000,00	5.000.000,00
9	Aset Tetap Dalam Renovasi	742.514.000,00	742.514.000,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya		85,432,671,685,71	80.079.328.699,71

Tabel 5.5.50
 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan 2021

Mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	2021 (Rp)	MUTASI		2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	76.292.712.699,71	5.070.392.435,00	1.684.500,00	81.361.420.634,71
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	100.810.000,00	241.134.251,00	0,00	341.944.251,00
3	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	1.679.050.000,00	2.809.200,00	0,00	1.681.859.200,00
4	Musik	48.370.000,00	0,00	0,00	48.370.000,00
5	Three Dimensional Artefacts And Realita	99.500.000,00	0,00	0,00	99.500.000,00
6	Barang Bercorak Kesenian	362.312.000,00	40.691.600,00	0,00	403.003.600,00
7	Alat Bercorak Kebudayaan	749.060.000,00	0,00	0,00	749.060.000,00
8	Tanda Penghargaan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
9	Aset Tetap Dalam Renovasi	742.514.000,00	0,00	0,00	742.514.000,00
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	80.079.328.699,71	5.355.027.486,00	1.684.500	85,432,671,685,71

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2022	80.079.328.699,71
Penambahan Tahun 2022	5.355.027.486,00
Pengurangan Tahun 2022	1.684.500
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	85,432,671,685,71

Penambahan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2022 senilai Rp5.355.027.486,00 terdiri dari:

- a. Belanja Modal tahun 2022 senilai Rp1.698.424.926,00;
- b. Kapitalisasi atas Honorarium Barang/Jasa senilai Rp3.100.000,00;
- c. Kapitalisasi atas Belanja Barang dan Jasa senilai Rp2.525.799.560,00;
- d. Reklas tambah dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.302.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
- e. Reklas tambah dari Aset Tetap gedung dan Bangunan yang dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya senilai Rp34.849.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima;
- f. Reklas tambah dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.089.551.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2022 senilai Rp1.684.500,00 terdiri dari Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.684.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima.

5.5.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		8.402.727.432,20	29.496.862.800,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2022 senilai Rp8.402.727.432,20 dan Rp29.496.862.800,00 merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.51

Rincian Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	2.774.441.782,00	29.496.862.800,00
2	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	5.628.285.650,00	0,00
3	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	8.402.727.432,20	29.496.862.800,00

Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.52

Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022

No	Uraian	2021 (Rp)	MUTASI		2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Gedung dan Bangunan	29.496.862.800,00	2.774.441.782,00	29.496.862.800,00	2.774.441.782,00
2	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	0,00	5.628.285.650,00	0,00	5.628.285.650,00
3	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	29.496.862.800,00	8.402.727.432,20	29.496.862.800,00	8.402.727.432,20

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2022	29.496.862.800,00
2	Penambahan Tahun 2022	8.402.727.432,20
3	Pengurangan Tahun 2022	29.496.862.800,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2022	8.402.727.432,20

5.5.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		999.062.323.851,54	873.866.912.418,86

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp999.062.323.851,54 dan Rp873.866.912.418,86.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk Tanah, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 disajikan sebagaimana tertuang pada rincian **Lampiran 24**.

Tabel 5.5.53

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	226.313.432.097,54	195.330.014.404,86
3	Gedung dan Bangunan	142.289.606.965,00	123.761.129.643,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	630.459.284.789,00	554.775.768.371,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	0,00	0,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		999.062.323.851,54	873.866.912.418,86

Tabel 5.5.54

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Nilai Perolehan 31-12-2021	2021(Rp)	MUTASI		2022 (Rp)
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tanah	547.910.105.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	292.753.815.364,26	195.330.014.404,86	34.456.691.091,20	3.473.273.398,52	226.313.432.097,54
3	Gedung dan Bangunan	614.844.747.188,93	123.761.129.643,00	22.775.622.641,00	4.247.145.319,00	142.289.606.965,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.173.746.744.126,20	554.775.768.371,00	76.824.655.857,00	1.141.139.439,00	630.459.284.789,00
5	Aset Tetap Lainnya	80.079.328.699,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	29.496.862.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.738.831.603.420,47	873.866.912.418,86	134.056.969.589,20	8.861.558.156,52	999.062.323.851,54

Mutasi Akumulasi Penyusutan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2022	873.866.912.418,86
Penambahan Tahun 2022	134.056.969.589,20
Pengurangan Tahun 2022	8.861.558.156,52
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	999.062.323.851,54

5.5.1.4	Dana Cadangan	31-12-2022(Rp)	31-12-2021 (Rp)
		0,00	0,00

Saldo Nilai Dana Cadangan Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.1.5	Aset Lainnya	31-12-2022(Rp)	31-12-2021 (Rp)
		25.475.127.372,73	19.609.893.482,84

Saldo Nilai Buku Aset Lainnya Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp25.475.127.372,73 dan mengalami kenaikan senilai Rp 19.609.893.482,84 atau 29,91% dibandingkan per 31 Desember 2021 senilai Rp19.609.893.482,84.

Berikut adalah Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Tabel 5.5.55
Rincian Aset Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No	Aset Lainnya	Saldo 31/12/2022	Saldo 31/12/2021
1	Tagihan Jangka Panjang	34.766.666,67	34.766.666,67
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
3	Aset Tak Berwujud	2.596.965.735,00	2.561.978.535,00
4	Aset Lain-lain	52.605.390.698,56	43.921.240.450,78
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(692.600.664)	(567.018.941,56)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(29.069.395.063,50)	26.341.073.228,06
	Jumlah Aset Lainnya	25.475.127.372,73	19.609.893.482,84

5.5.1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		34.766.666,67	34.766.666,67

Saldo Nilai Buku Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 senilai Rp34.766.666,67 dan Rp34.766.666,67. Yang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Rugi.

5.5.1.5.1.1	Tagihan Penjualan Angsuran	31-12-2022 (Rp) 0,00	31-12-2021 (Rp) 0,00
--------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Saldo Nilai Buku Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.1.5.1.2	Tuntutan Ganti Rugi	31-12-2022 (Rp) 34.766.666,67	31-12-2021 (Rp) 34.766.666,67
--------------------	----------------------------	--	--

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp34.766.666,67 dan tidak mengalami penurunan/kenaikan jika dibandingkan per 31 Desember 2021 senilai Rp34.766.666,67.

Tuntutan Ganti Rugi terdiri tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendaharan atau pejabat lain.

Berikut adalah Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Tabel 5.5.55
Rincian Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2022 dan 2021

No	Aset Lainnya	Saldo 31/12/2022	Saldo 31/12/2021
1	Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara	34.766.666,67	34.766.666,67
2	tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendaharan atau pejabat lain.	0,00	0,00
	Jumlah	34.766.666,67	34.766.666,67

5.5.1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31-12-2022 (Rp) 0,00	31-12-2021 (Rp) 0,00
------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------

Saldo Nilai Buku Kemitraan dengan Pihak Ketiga Angsuran Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dan nilai Per 31 Desember 2021 Rp0,00.

5.5.1.5.3	Aset Tak Berwujud	31-12-2022 (Rp) 2.596.965.735,00	31-12-2021 (Rp) 2.561.978.535,00
------------------	--------------------------	---	---

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 senilai Rp2.596.965.735,00 dan 2021 Rp2.561.978.535,00 merupakan Aset Tak Berwujud berupa Perangkat Lunak/*Software*. Rincian Aset Tak Berwujud tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.56
Rincian Aset Tak Berwujud Tahun 2022 dan 2021

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Nilai Perolehan 31/12/2021	Amortisasi 31/12/2021	Tambah Amortisasi 31/12/2022	Penambahan Nilai Perolehan (Rp.)	Saldo 31/12/2022	Nilai Buku 31/12/2022
1	Dinas Kesehatan	190.480.000,00	66.077.500,00	9.524.000,00	0,00	190.480.000,00	114.878.500,00
2	BPKAD	443.650.000,00	165.932.500,00	22.182.500,00	0,00	443.650.000,00	255.535.000,00
3	Dinas Pariwisata	14.850.000,00	8.167.500,00	742.500,00	0,00	14.850.000,00	5.940.000,00
4	Sekretariat Daerah	34.100.000,00	11.935.000,00	1.705.000,00	0,00	34.100.000,00	20.460.000,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	436.096.000,00	130.401.688,00	21.804.800,00	0,00	436.096.000,00	283.889.512,00
6	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	1.349.432.275,00	176.238.227,56	63.205.049,44	0,00	1.349.432.275,00	1.109.988.998,00
7	Dinas Sosial	10.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	10.000.000,00	7.500.000,00
8	BPBD	31.960.260,00	3.196.026,00	1.598.013,00	0,00	31.960.260,00	27.166.221,00
9	Dinas Tenaga Kerja	46.410.000,00	2.320.500,00	2.320.500,00	0,00	46.410.000,00	41.769.000,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	1.249.860,00	24.997.200,00	24.997.200,00	23.747.340,00
11	Inspektorat	0,00	0,00	499.500,00	9.990.000,00	9.990.000,00	9.490.500,00
12	RSUD Kota Bima	5.000.000,00	750.000,00	250.000,00	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00
Jumlah		2.561.978.535,00	567.018.941,56	125.581.722,44	34.987.200,00	2.596.965.735,00	1.904.365.071,00

Tabel 5.5.57
Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2022	2.561.978.535,00
Penambahan Tahun 2022	34.987.200,00
Pengurangan Tahun 2022	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	2.596.965.735,00
Amortisasi	(692.600.664,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1.904.365.071,00

5.5.1.5.4	Aset Lain-Lain	31-12-2022(Rp)	31-12-2021(Rp)
		52.605.390.698,56	43.921.240.450,78

Saldo Nilai Buku Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp52.605.390.698,56 dan Rp43.921.240.450,78 (**Lampiran 25**) yang merupakan Barang Kondisi Rusak Berat dan Hilang.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bima Kepada Pemerintah Kota Bima Nomor: 032/035/07.3/2022 dan Nomor: 180/3/BA/IV/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Inventarisasi/Pemeriksaan Fisik BMD dan Dokumen Nomor: 800/1528/BPKAD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 terdapat 126 objek tanah dengan nilai Rp 267.120.000,00 berupa Tanah Non Persil/Tanah Pertanian/Tanah Usaha yang perlu diklarifikasi kembali hasil Inventarisasi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bima, oleh karenanya aset tersebut dicatat dalam Aset Lain-Lain.

Aset Lain-Lain Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 disajikan secara *netto*/bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap sebelum direklas ke Aset Lain-lain, sehingga mutasi Aset Lain-lain tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5.59
Mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo 31/12/2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31/12/2022
1	Tanah	0,00	267.120.000,00	0,00	267.120.000,00
1	Peralatan dan Mesin	33.804.236.515,28	2.854.243.087,77	35.769.894,00	36.622.709.709,05
2	Gedung dan Bangunan	1.391.369.250,00	488.700.000,00	0,00	1.880.069.250,00
3	Jalan, Jembatan Irigasi dan Jaringan	6.286.913.515,33	0,00	0,00	6.286.913.515,33
4	Aset Tetap Lainnya	2.438.721.170,18	0,00	0,00	2.438.721.170,18
5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	5.109.857.054,00	0,00	5.109.857.054,00
Jumlah Aset Lain-lain		43.921.240.450,79	8.719.920.141,77	35.769.894,00	52.605.390.698,56
Akumulasi Penyusutan		(26.341.073.228,06)	(2.760.774.228,44)	(32.452.393,00)	(29.069.395.063,50)
Nilai Buku Aset Lain-lain		17.580.167.222,73	5.959.145.913,33	3.317.501,00	23.535.995.635,06

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara Non tunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF). Treasury Deposit Facility (TDF Kota Bima Tahun 2022 sebesar Rp5.109.857.054,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Rincian Treasury Deposit Facility (TDF) Kota Bima Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.5.60
Lembar Rekapitulasi TDF-TKD (Non Tunai)

Jenis Anggaran Transfer Ke Daerah	Alokasi 2022 (PMK 218/2022) Non Tunai (Rp)
A. Transfer DBH Pajak	1.488.676.932,00
DBH PPh	933.149.507,00
DBH PPh pasal 21 Trw ke-4 Tahun 2022 Non Tunai	885.067.968,00
DBH PPh pasal 25/29 WPOPND Trw ke-4 Tahun 2022 Non Tunai	48.081.539,00
DBH PBB	555.527.425,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata Non Tunai, Tahap ke-3 TA 2022	472.605.805,00
DBH PBB Migas Bagian Prov/Kab/Kota Non Tunai Trw ke-4 TA.2022	67.778.277,00

DBH PBB Sektor Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 Tahun 2022	12.360.838,00
Biaya Pemungutan PBB Migas Bagian Prov/Kab/Kota Non Tunai Trw ke-4 TA. 2022	2.353.390,00
Biaya Pemungutan PBB Sektor Lainnya Non Tunai Minggu ke-18 Tahun 2022	429.115,00
B. Transfer DBH Cukai	450.334.872,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Triwulan ke-4 TA 2022 Non Tunai	450.334.872,00
C. Transfer DBH SDA	3.170.845.250,00
Pertambangan Umum	2.952.877.453,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Minerba-Royalti, Triwulan ke-4 TA 2022 Non Tunai	2.952.877.453,00
Kehutanan	6.214.586,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Triwulan ke-4 TA 2022 Non Tunai	6.214.586,00
Perikanan	211.753.211,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Triwulan ke-4 TA 2022 Non Tunai	211.753.211,00
Jumlah Total Penerimaan Transfer (A + B + C)	5.109.857.054,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 januari 2022	43.921.240.450,79
2	Penambahan Tahun 2022	3.610.063.087,77
3	Pengurangan Tahun 2022	35.769.894,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022		47.495.533.644,56
Akumulasi Penyusutan		(29.069.395.063,50)
Nilai Buku Aset Lain-lain		18.426.138.581,06

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 senilai Rp47.495.533.644,56 merupakan Aset Lain-lain yang disajikan dengan menggunakan harga perolehan secara neto/bersih.

5.5.1.5.5	Akumulasi	31-12-2022(Rp)	31-12-2021(Rp)
	Amortisasi Aset		
	Tidak Berwujud	692.600.664,00	567.018.941,56

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud senilai Rp692.600.664,00 dan Rp567.018.941,54 merupakan nilai Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021. Rincian amortisasi aset tidak berwujud sebagai berikut

Tabel 5.5.61
Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022

No	Aset Tak Berwujud	Saldo 31/12/2021	Beban Amortisasi 2022	Saldo 31/12/ 2022
1	Dinas Kesehatan	66.077.500,00	9.524.000,00	75.601.500,00
2	BPPKAD	165.932.500,00	22.182.500,00	188.115.000,00
3	Dinas Pariwisata	8.167.500,00	742.500,00	8.910.000,00

No	Aset Tak Berwujud	Saldo 31/12/2021	Beban Amortisasi 2022	Saldo 31/12/ 2022
4	Sekretariat Daerah	11.935.000,00	1.705.000,00	13.640.000,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	130.401.688,00	21.804.800,00	152.206.488,00
6	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	176.238.227,56	63.205.049,44	239.443.277,00
7	Dinas Sosial	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
8	BPBD	3.196.026,00	1.598.013,00	4.794.039,00
9.	Dinas Tenaga Kerja	2.320.500,00	2.320.500,00	4.641.000,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	1.249.860,00	1.249.860,00
11	Inspektorat	0,00	499.500,00	499.500,00
12	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima	750.000,00	250.000,00	1000.000,00
Jumlah		567.018.941,56	125.581.722,44	692.600.664,00

5.5.1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	31-12-2022(Rp)	31-12-2021(Rp)
		29.069.395.063,00	26.341.073.228,06

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2022 Rp29.069.395.063,00 sedangkan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2021 senilai Rp26.341.073.228,06.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebagai berikut

Tabel 5.5.62

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2022

No.	Beban Penyusutan Aset Lain-lain - LO	2022 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	27.923.446.785,00
2	Gedung dan Bangunan	370.053.541,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	775.894.737,00
Jumlah		29.069.395.063,00

5.5.2	Kewajiban	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		739.857.783,51	728.647.582,76

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah Kewajiban Pemerintah

Kota Bima terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

5.5.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		30.489.379,00	642.444,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp739.857.783,51 mengalami kenaikan senilai Rp11.210.200,75 atau 1,53% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp728.647.582,76.

Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Bima periode tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5.63
Rincian Kewajiban Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan 2021

No	Kewajiban	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	30.489.379,00	642.444,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	201.506.362,51	219.049.136,00
3	Utang Belanja	507.862.042,00	508.956.003,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		739.857.783,51	728.647.583,00

Adapun akun-akun Kewajiban Jangka Pendek yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kota Bima tahun 2022 adalah sebagai berikut.

5.5.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		30.489.379,00	642.444,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp30.489.379,00 mengalami peningkatan senilai Rp29.846.935,00. atau 4645,84% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp642.444,00.

Saldo Utang PFK Tahun 2022 senilai Rp30.489.379,00 telah disetorkan ke Kas Negara terdiri dari:

Tabel 5.5.64
Utang PFK SKPD Tahun 2022

NO	SKPD	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPN	Pihak Ketiga Lainnya BOP-PAUD	TOTAL	Tanggal Penyetoran
1	Bappeda Litbang	721.000,00	335.981,00	27.703,00	1.280.453,00	0,00	2.365.137,00	Februari 2023

NO	SKPD	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPN	Pihak Ketiga Lainnya BOP-PAUD	TOTAL	Tanggal Penyetoran
2	PKM Mpunda	7.613.483,00	1.913.455,00	0,00	13.687.538,00	0,00	23.214.476,00	Januari 2023
3	PKM Kolo	651.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.766,00	Januari 2023
4	BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258.000,00	4.258.000,00	Januari 2023
	JUMLAH	8.986.249,00	2.249.436,00	27.703,00	14.967.991,00	4.258.000,00	30.489.379,00	

Sementara Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 senilai Rp30.489.379,00 merupakan utang PFK berupa PPh21, PPh22, PPh23, PPN dan pihak ketiga lainnya berupa penyetoran atas pengembalian penerimaan BOP PAUD dari semua utang pajak tersebut telah terbayarkan ke Kas Negara dan Kas Daerah pada bulan Januari dan Februari tahun 2023.

5.5.2.1.2	Utang Bunga	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		0,00	0,00

Jumlah Utang Bunga Tahun 2022 senilai Rp 0,00 dan 2021 senilai Rp0,00. Tidak terdapat Utang Bunga Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022

5.5.2.1.3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		0,00	0,00

Jumlah Utang Pinjaman Jangka Pendek Tahun 2022 senilai Rp 0,00 dan 2021 senilai Rp0,00. Tidak terdapat Utang Pinjaman Jangka Pendek Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022

5.5.2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		0,00	0,00

Jumlah Utang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2022 senilai Rp 0,00 dan 2021 senilai Rp0,00. Tidak terdapat Utang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022

5.5.2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		201.506.362,51	219.049.136,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp201.506.362,51 mengalami penurunan senilai Rp17.542.773,49 atau 8,00% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp219.049.136,00.

5.5.2.1.6 Utang Belanja

31-12-2022 (Rp)

507.862.042,00

31-12-2021 (Rp)

508.956.003,00

Saldo Utang Belanja pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp507.862.042,00 mengalami penurunan senilai Rp1.093.961,00 atau 0,21% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp508.956.003,00.

Saldo Utang Belanja senilai Rp507.862.042,00 merupakan utang belanja atas kekurangan berkala gaji pegawai Rp277.463.584,00, pada 13 (tiga belas) SKPD, utang belanja obat-obatan Rp194.400.000,00 dan utang tagihan listrik Rp35.998.458,00. Pada Dinas Kesehatan.

Tabel 5.5.65
Utang Belanja Tahun 2022 dan 2021

No.	SKPD	Saldo 31/12/2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31/12/2022
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	374.262.754,00	44.656.866,00	374.262.754,00	44.656.866,00
2	Dinas Kesehatan	72.601.853,00	155.866.932,00	72.601.853,00	155.866.932,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.627.263,00	0,00	1.627.263,00	0,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	8.134.155,00	0,00	8.134.155,00	0,00
5	Dinas Tenaga Kerja	1.810.128,00	1.222.031,00	1.810.128,00	1.222.031,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	698.858,00	0,00	698.858,00	0,00
7	Dinas Perhubungan	0,00	4.789.461,00	0,00	4.789.461,00
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.294.178,00	0,00	1.294.178,00	0,00
9	Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan	561.378,00	12.813.377,00	561.378,00	12.813.377,00
10	Dinas Kelautan Dan Perikanan	13.548.816,00	12.808.191,00	13.548.816,00	12.808.191,00
11	Sekretariat Daerah	3.264.956,00	16.106.032,00	3.264.956,00	16.106.032,00
12	Kec. Rasanae Barat	4.203.330,00	870.522,00	4.203.330,00	870.522,00
13	Kec. Rasanae Timur	2.112.401,00	4.696.473,00	2.112.401,00	4.696.473,00
14	Kec. Asakota	6.585.340,00	2.594.603,00	6.585.340,00	2.594.603,00
15	Kec. Mpunda	3.680.566,00	4.158.980,00	3.680.566,00	4.158.980,00
16	Kec. Raba	2.114.274,00	0,00	2.114.274,00	0,00
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.729.130,00	0,00	2.729.130,00	0,00
18	Inspektorat	6.009.986,00	8.063.769,00	6.009.986,00	8.063.769,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	2.019.491,00	6.932.282,00	2.019.491,00	6.932.282,00
20	Bpkad	872.180,00	0,00	872.180,00	0,00
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	824.966,00	1.884.065,00	824.966,00	1.884.065,00
Total		508.956.003,00	277.463.584,00	508.956.003,00	277.463.584,00

5.5.2.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		0,00	0,00

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 senilai Rp 0,00 dan 2021 senilai Rp0,00. Tidak terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota Bima kepada pihak ketiga per 31 Desember 2022.

5.5.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 sama dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

Perbandingan Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Bima periode tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5.66
Rincian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dan 2021

No	Kewajiban	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
3	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
4	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
5	Premium (Diskonto) obligasi	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

5.5.3	Ekuitas	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		2.100.460.506.926,58	1.948.090.010.502,74

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 senilai Rp2.100.460.506.926,58 mengalami penurunan senilai Rp152.370.496.423,84 atau 13,79% dibandingkan dengan tahun 2021 Rp1.948.090.010.502,74 yang bersumber dari ekuitas akhir Laporan Perubahan Ekuitas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.67
Rincian Ekuitas Tahun 2022 dan 2021

NO	Uraian	2022	2021
1	Ekuitas Awal	1.948.090.010.502,74	1.920.247.252.438,80
2	Surplus/Defisit - LO	134.710.317.212,39	12.416.076.447,07
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	16.430.996.589,05	15.426.681.616,87
4	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	354.287.000,00	0,00
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	16.076.709.589,05	15.426.681.616,87
7	Ekuitas Akhir	2.100.460.506.926,58	1.948.090.010.502,74

5.6 PENJELASAN KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS

5.6.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		210.379.919.143,22	151.589.600.028,99

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing senilai Rp210.379.919.143,22 dan Rp151.589.600.028,99. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan senilai Rp58.790.319.114,23 atau 38,78% dibandingkan tahun 2021.

Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut.

Tabel 5.6.1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Arus Masuk Kas					
1	Pendapatan Pajak Daerah	21.355.298.265,81	19.507.819.782,88	1.847.478.482,93	9,47
2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.710.293.760,28	15.196.689.454,00	4.513.604.306,28	29,70
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.545.139.285,00	1.284.388.411,79	260.750.873,21	20,30
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.703.672.797,13	10.983.185.098,00	3.720.487.699,13	33,87
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	69.899.355.791,00	37.344.039.204,00	32.555.316.587,00	87,18
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	430.503.529.123,00	432.159.814.000,00	(1.656.284.877,00)	(0,38)
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	89.773.006.178,00	68.320.563.668,00	21.452.442.510,00	31,40
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	67.495.307.379,00	56.185.780.202,00	11.309.527.177,00	20,13
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	39.108.685.000,00	30.025.143.000,00	9.083.542.000,00	30,25
10	Penerimaan Bagi Hasil Provinsi	51.171.903.581,00	40.727.314.230,00	10.444.589.351,00	25,65
11	Penerimaan Bantuan Keuangan	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
12	Pendapatan Hibah	0,00	17.931.340.700,00	(17.931.340.700,00)	(100,00)
13	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Pendapatan Lainnya	0,00	798.038.457,00	(798.038.457,00)	(100,00)
Jumlah		805.766.191.160,22	730.464.116.207,67	75.302.074.952,55	10,31
Arus Keluar Kas					
1	Belanja Pegawai	361.680.806.870,00	357.632.648.357,55	4.048.158.512,45	1,13
2	Belanja Barang dan Jasa	209.804.746.008,00	200.514.835.071,13	9.289.910.936,87	4,63
3	Belanja Hibah	16.448.051.139,00	16.770.982.000,00	(322.930.861,00)	(1,93)
4	Belanja Bantuan Sosial	6.507.250.000,00	1.422.000.000,00	5.085.250.000,00	357,61
5	Belanja Tak Terduga	945.418.000,00	2.534.050.750,00	(1.588.632.750,00)	(268,03)
6	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		595.386.272.017,00	578.874.516.178,68	16.511.755.838,32	2,85
Total		210.379.919.143,22	151.589.600.028,99	58.790.319.114,23	38,78

5.6.1.1 Arus Masuk Kas	2022 (Rp) 805.766.191.160,22	2021 (Rp) 730.464.116.207,67
-------------------------------	---	---

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 senilai Rp805.766.191.160,22 terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah, Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, Penerimaan Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Penerimaan Dana Penyesuaian, Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Hibah, Pendapatan Lainnya dari Aktivitas Operasi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan senilai Rp75.302.074.952,55 atau 9,35% dibandingkan tahun 2021 senilai Rp730.464.116.207,67.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sudah termasuk pendapatan dari Dana Kapitasi pada 7 FKTP, Pendapatan BLUD RSUD, pendapatan dana Bantuan Operasional Sekolah dan Pendidikan (BOSP) pada 103 (Seratus tiga) sekolah penerima Dana BOS terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) Sekolah Dasar dan 15 (lima belas) Sekolah Menengah Pertama dan 17 Sekolah Swasta, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk 165 (Seratus enam puluh lima) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri dari 34 (Tiga puluh empat) PAUD Negeri dan 131 (Seratus tiga puluh satu) PAUD Swasta dan 14 (Empat belas) Penerima Bantuan Operasional (BOP) Kesetaraan sebagaimana yang diamanatkan dengan rincian pendapatan sebagai berikut.

Tabel 5.6.2
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Dana Kapitasi, BLUD RSUD, dan Dana BOSP Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)
1	Penerimaan Dana Kapitasi JKN	7.795.069.400,00
2	Penerimaan Dana Klaim JKN RSUD	4.701.047.600,00
3	Penerimaan Jasa Pelayanan BLUD RSUD	11.086.416.350,00
4	Penerimaan Dana BOS Reguler Negeri	17.157.684.131,00
5	Penerimaan Dana BOS Reguler Swasta	2.154.095.139,00
6	Penerimaan Dana BOS Kinerja Negeri	640.000.000,00
7	Penerimaan Dana BOS Kinerja Swasta	45.000.000,00
8	Penerimaan Dana BOP PAUD	4.334.874.000,00
9	Penerimaan Dana BOP Kesetaraan	771.100.000,00
Jumlah		48.685.286.620,00

5.6.1.1.1 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah	2022 (Rp) 21.355.298.265,81	2021 (Rp) 19.507.819.782,88
--	--	--

Jumlah Arus Masuk Kas Tahun 2022 dan Tahun 2021 dari Penerimaan Pajak Daerah adalah senilai Rp21.355.298.265,81 dan Rp19.507.819.782,88 terdiri dari:

Tabel 5.6.3
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Pajak Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	911.452.444,30	415.017.422,00	496.435.022,30	119,62
2	Pajak Restoran	2.103.232.173,38	1.255.900.981,20	847.331.192,18	67,47
3	Pajak Hiburan	36.169.080,00	19.426.900,00	16.742.180,00	86,18
4	Pajak Reklame	489.500.086,50	567.980.156,75	(78.480.070,25)	(13,82)
5	Pajak Penerangan Jalan	9.443.782.515,00	8.463.177.492,00	980.605.023,00	11,59
6	Pajak Parkir	132.915.500,00	114.736.000,00	18.179.500,00	15,84
7	Pajak Air Tanah	56.046.006,45	46.170.792,18	9.875.214,27	21,39
8	Pajak Sarang Burung walet	13.500.000,00	11.500.000,00	2.000.000,00	17,39
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.043.239,18	207.879.473,75	142.163.765,43	68,39
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.543.193.929,00	3.633.609.655,00	(90.415.726,00)	(2,49)
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.275.463.292,00	4.772.420.910,00	(496.957.618,00)	(10,41)
Jumlah		21.355.298.265,81	19.507.819.782,88	1.847.478.482,93	9,47

Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6.4
Rincian Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Pajak Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Pajak Hotel					
1	Pajak Hotel	873.240.494,30	377.505.977,00	495.734.517,30	131,32
2	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesangrahan/ Rumah Kos	35.993.450,00	29.427.975,00	6.565.475,00	22,31
3	Rumah Kos Dengan Jumlah kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	2.218.500,00	8.083.470,00	(5.864.970,00)	(72,56)
Jumlah		911.452.444,30	415.017.422,00	496.435.022,30	119,62
Pajak Restoran					
1	Restoran	1.192.303.990,00	569.871.164,00	622.432.826,00	109,22
2	Rumah Makan	178.489.112,00	165.634.014,00	12.855.098,00	7,76
3	Kafetaria	155.637.536,00	90.469.676,20	65.167.859,80	72,03
4	Kantin	42.244.835,00	8.741.706,00	33.503.129,00	383,26
5	Katering	290.457.621,40	244.165.173,00	46.292.448,40	18,96
6	Warung	244.099.078,98	177.019.248,00	67.079.830,98	37,89
Jumlah		2.103.232.173,38	1.255.900.981,20	847.331.192,18	67,47
Pajak Hiburan					
1	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya	5.641.080,00	5.486.800,00	154.280,00	2,81

No.	Pajak Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Pertandingan Olahraga, Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	30.528.000,00	13.940.100,00	16.587.900,00	118,99
3	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Hiburan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		36.169.080,00	19.426.900,00	16.742.180,00	86,18
Pajak Reklame					
1	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	399.375.631,50	403.257.031,75	(3.881.400,25)	(0,96)
2	Reklame Kain	76.733.000,00	153.364.750,00	(76.631.750,00)	(49,97)
3	Reklame Berjalan	13.391.455,00	11.358.375,00	2.033.080,00	17,90
Jumlah		489.500.086,50	567.980.156,75	(78.480.070,25)	(13,82)
Pajak Penerangan Jalan					
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	9.443.782.515,00	8.463.177.492,00	980.605.023,00	11,59
Jumlah		9.443.782.515,00	8.463.177.492,00	980.605.023,00	11,59
Pajak Parkir					
1	Pajak Parkir	132.915.500,00	114.736.000,00	18.179.500,00	15,84
Jumlah		132.915.500,00	114.736.000,00	18.179.500,00	15,84
Pajak Air Tanah					
1	Pajak Air Tanah	56.046.006,45	46.170.792,18	9.875.214,27	21,39
Jumlah		56.046.006,45	46.170.792,18	9.875.214,27	21,39
Pajak Sarang Burung Walet					
1	Pajak Sarang Burung Walet	13.500.000,00	11.500.000,00	2.000.000,00	17,39
Jumlah		13.500.000,00	11.500.000,00	2.000.000,00	17,39
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
1	Pasir dan Kerikil	134.597.875,11	86.731.362,50	47.866.512,61	55,19
2	Tanah Liat	5.941.457,79	7.503.875,00	(1.562.417,21)	(20,82)
3	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	209.503.906,28	113.644.236,25	95.859.670,03	84,35
Jumlah		350.043.239,18	207.879.473,75	142.163.765,43	68,39
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					
1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.543.193.929,00	3.633.609.655,00	(90.415.726,00)	(2,49)
Jumlah		3.543.193.929,00	3.633.609.655,00	(90.415.726,00)	(2,49)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
1	BPHTB - Pemindahan Hak	4.275.463.292,00	4.772.420.910,00	(496.957.618,00)	(10,41)
Jumlah		4.275.463.292,00	4.772.420.910,00	(496.957.618,00)	(10,41)
Total		21.355.298.265,81	19.507.819.782,88	1.847.478.482,93	9,47

5.6.1.1.2	Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah	2022 (Rp) 19.710.293.760,28	2021 (Rp) 15.196.689.454,00
------------------	--	--	--

Arus masuk kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp19.710.293.760,28 dan Rp15.196.689.454,00 terdiri dari:

Tabel 5.6.5
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	13.970.104.800,00	10.106.612.479,00	3.863.492.321,00	38,23
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	509.321.000,00	869.616.000,00	(360.295.000,00)	(41,43)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	315.780.000,00	227.542.000,00	88.238.000,00	38,78
4	Retribusi Pelayanan Pasar	500.953.000,00	89.801.000,00	411.152.000,00	457,85
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	429.810.000,00	24.475.000,00	405.335.000,00	1.656,12
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	47.225.000,00	(47.225.000,00)	(100,00)
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	181.374.000,00	187.738.000,00	(6.364.000,00)	(3,39)
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.468.535.000,00	1.339.855.000,00	128.680.000,00	9,60
9	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	452.400.314,00	720.099.537,00	(267.699.223,00)	(37,18)
10	Retribusi Terminal	8.730.000,00	11.350.000,00	(2.620.000,00)	(23,08)
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	216.983.500,00	206.356.000,00	10.627.500,00	5,15
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	47.710.000,00	23.400.000,00	24.310.000,00	103,89
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	542.245.387,00	393.395.000,00	148.850.387,00	37,84
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.051.296.759,28	932.224.438,00	119.072.321,28	12,77
15	Retribusi Izin Trayek	15.050.000,00	17.000.000,00	(1.950.000,00)	(11,47)
Jumlah		19.710.293.760,28	15.196.689.454,00	4.513.604.306,28	29,70

5.6.1.1.3	Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2022 (Rp) 1.545.139.285,00	2021 (Rp) 1.284.388.411,79
------------------	---	---	---

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp1.545.139.285,00 dan Rp1.284.388.411,79 terdiri dari:

Tabel 5.6.6

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2022 & 2021

No.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	155.056.258,00	180.014.359,00	(24.958.101,00)	(13,86)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	25.426.352,00	23.932.217,79	1.494.134,21	6,24
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)	0,00	11.383.869,00	(11.383.869,00)	(100,00)
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	1.364.656.675,00	1.069.057.966,00	295.598.709,00	27,65
Jumlah		1.545.139.285,00	1.284.388.411,79	260.750.873,21	20,30

Arus Masuk Kas dari			
5.6.1.1.4	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		14.703.672.797,13	10.983.185.098,00

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp14.703.672.797,13 dan Rp10.983.185.098,00 terdiri dari:

Tabel 5.6.7

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun 2022 dan 2021

No.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Penerimaan Jasa Giro	634.481.215,05	688.317.761,77	(53.836.546,72)	(7,82)
2	Pendapatan Bunga	1.699.870.625,01	1.737.013.060,61	(37.142.435,60)	(2,14)
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	406.652.754,32	789.079.651,20	(382.426.896,88)	(48,46)
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	25.536.962,75	68.896.386,00	(43.359.423,25)	(62,93)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	296.382.068,00	27.868.961,50	268.513.106,50	963,48
6	Pendapatan dari Pengembalian	5.063.080,00	98.878.818,00	(93.815.738,00)	(94,88)
7	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak	170.251,00	279.305,92	(109.054,92)	(39,04)

No.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
9	Pendapatan Retribusi	1.336.440,00	0,00	1.336.440,00	0,00
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	7.795.069.400,00	7.572.851.153,00	222.218.247,00	2,93
11	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	110.001,00	0,00	110.001,00	0,00
12	Pendapatan Dana BOS	3.839.000.000,00	0,00	3.839.000.000,00	0,00
Jumlah		14.703.672.797,13	10.983.185.098,00	3.720.487.699,13	33,87

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 03 Laporan Arus Kas Paragraf 8 ***bahwa arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah*** dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ***Pasal 6 ayat 4 berbunyi Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan bagian dari Rekening BUD.***

Dengan berpedoman pada aturan tersebut bahwa Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 senilai Rp14.703.672.797,13 sudah termasuk Pendapatan BLUD pada RSUD Kota Bima Sebesar Rp3.847.046.363,26 dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional senilai Rp7.795.069.400,00 pada 7 (tujuh) Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Bima dengan rincian sebagai berikut.

- Puskesmas Mpunda senilai Rp1.875.264.000,00;
- Puskesmas Rasanae Timur senilai Rp661.329.000,00;
- Puskesmas Paruga senilai Rp1.443.774.900,00;
- Puskesmas Penanae senilai Rp1.755.236.700,00;
- Puskesmas Kolo senilai Rp312.010.700,00;
- Puskesmas Kumbé senilai Rp344.672.100,00;
- Puskesmas Jatibaru senilai Rp1.402.782.000,00.

Dapat kami jelaskan bahwa nilai yang ditampilkan dalam Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LRA) senilai Rp14.748.737.697,13 sementara yang ditampilkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Laporan Arus Kas) senilai Rp14.703.672.797,13 sehingga terdapat selisih senilai Rp45.064.900,00 yang merupakan Pendapatan atas Aset Lainnya. Dimana nilai tersebut direklasifikasi ke Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi.

5.6.1.1.5	Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		69.899.355.791,00	37.344.039.204,00

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2022 senilai Rp69.899.355.791,00, mengalami peningkatan sebesar Rp32.555.316.587,00 atau 87,18% dan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp37.344.039.204,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2022 dan 2021 terdiri dari:

Tabel 5.6.9
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil
Tahun 2022 dan 2021

No.	Dana Bagi Hasil	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	17.064.519.260,00	16.212.609.847,00	851.909.413,00	5,25
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	52.834.836.531,00	21.131.429.357,00	31.703.407.174,00	150,03
Jumlah		69.899.355.791,00	37.344.039.204,00	32.555.316.587,00	87,18

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 senilai Rp17.064.519.260,00, mengalami peningkatan sebesar Rp851.909.413,00 atau 5,25 % dan dibandingka tahun 2021 sebesar Rp16.212.609.847,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021 terdiri dari:

Tabel 5 .6.10
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
Tahun 2022 dan 2021

No.	Dana Bagi Hasil Pajak	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	5.701.935.675,00	5.727.066.197,00	(25.130.522,00)	(0,44)
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	7.630.278.551,00	7.996.600.600,00	(366.322.049,00)	(4,58)
3	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	3.732.305.034,00	2.488.943.050,00	1.243.361.984,00	49,96
Jumlah		17.064.519.260,00	16.212.609.847,00	851.909.413,00	5,25

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 senilai Rp52.834.836.531,00, mengalami peningkatan sebesar Rp31.703.407.174,00 atau 150,03 % dan dibandingka tahun 2021 sebesar Rp21.131.429.357,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2022 dan 2021 terdiri dari:

Tabel 5.6.11
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun 2022 dan 2021

No.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Provisi Sumber Daya Hutan	89.910.439,00	113.773.504,00	(23.863.065,00)	(20,97)
2	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	50.786.615.092,00	19.660.036.703,00	31.126.578.389,00	158,32
3	Pungutan Hasil Perikanan	1.958.311.000,00	1.357.619.150,00	600.691.850,00	44,25
Jumlah		52.834.836.531,00	21.131.429.357,00	31.703.407.174,00	150,03

5.6.1.1.6	Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum	2022 (Rp) 430.503.529.123,00	2021 (Rp) 432.159.814.000,00
------------------	---	---	---

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp430.503.529.123,00 dan Rp432.159.814.000,00.

5.6.1.1.7	Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	2022 (Rp) 89.773.006.178,00	2021 (Rp) 68.320.563.668,00
------------------	---	--	--

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp89.773.006.178,00 dan Rp68.320.563.668,00 terdiri dari:

Tabel 5.6.12
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus
Tahun 2022 dan 2021

No.	Dana Alokasi Khusus - Fisik	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendidikan	16.325.063.000,00	26.882.745.323,00	(10.557.682.323,00)	(39,27)
2	Kesehatan	37.802.206.678,00	24.049.799.703,00	13.752.406.975,00	57,18
3	Infrastruktur Jalan	26.076.988.000,00	5.885.011.914,00	20.191.976.086,00	343,11
4	Infrastruktur Air Minum	2.466.236.500,00	4.030.742.000,00	(1.564.505.500,00)	(38,81)
5	Infrastruktur Air Sanitasi	5.523.565.000,00	1.844.456.000,00	3.679.109.000,00	199,47
6	Kelautan dan Perikanan	0,00	1.361.623.728,00	(1.361.623.728,00)	(100,00)
7	Bidang Irigasi	0,00	1.115.590.000,00	(1.115.590.000,00)	(100,00)
8	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.578.947.000,00	3.150.595.000,00	(1.571.648.000,00)	(49,88)
Jumlah		89.773.006.178,00	68.320.563.668,00	21.452.442.510,00	31,40

5.6.1.1.8	Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	2022 (Rp) 67.495.307.379,00	2021 (Rp) 56.185.780.202,00
------------------	---	--	--

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp67.495.307.379,00 dan Rp56.185.780.202,00 terdiri dari:

Tabel 5.6.13
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Tahun 2022 dan 2021

No.	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP)	19.996.779.270,00	3.703.500.000,00	16.293.279.270,00	439,94

No.	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	PAUD				
2	Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	34.424.858.975,00	42.213.111.000,00	(7.788.252.025,00)	(18,45)
3	Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD	1.029.000.000,00	432.000.000,00	597.000.000,00	138,19
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.334.874.000,00	0,00	4.334.874.000,00	0,00
5	Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	3.248.199.820,00	5.073.270.071,00	(1.825.070.251,00)	(35,97)
6	Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.089.486.982,00	1.264.393.269,00	825.093.713,00	65,26
7	Dana pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	892.665.262,00	(892.665.262,00)	(100,00)
8	Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM	387.372.856,00	361.347.600,00	26.025.256,00	7,20
9	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	771.100.000,00	923.200.000,00	(152.100.000,00)	(16,48)
10	Fasilitasi Penanaman Modal	397.878.676,00	343.813.000,00	54.065.676,00	15,73
11	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	397.356.800,00	417.230.000,00	(19.873.200,00)	(4,76)
12	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	418.400.000,00	561.250.000,00	(142.850.000,00)	(25,45)
Jumlah		67.495.307.379,00	56.185.780.202,00	11.309.527.177,00	20,13

Arus Masuk Kas dari		2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.6.1.1.9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	39.108.685.000,00	30.025.143.000,00

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Insentif Daerah Tahun 2022 senilai Rp39.108.685.000,00 dan tahun 2021 senilai Rp30.025.143.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp9.083.542.000,00 atau 76,77%.

Arus Masuk Kas dari		2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.6.1.1.10	Penerimaan Bagi Hasil Provinsi	51.171.903.581,00	40.727.314.230,00

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp51.171.903.581,00 dan Rp40.727.314.230,00, mengalami peningkatan sebesar Rp10.444.589.351,00 atau 25,65%. Arus masuk kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.6.14
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Tahun 2022 dan 2021

No.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	7.625.909.931,00	6.672.660.345,00	953.249.586,00	14,29
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.609.123.194,00	5.374.685.550,50	234.437.643,50	4,36
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.745.529.174,00	12.130.057.966,50	6.615.471.207,50	54,54
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	41.524.731,00	34.749.404,00	6.775.327,00	19,50
5	Pajak Rokok	19.149.816.551,00	16.515.160.964,00	2.634.655.587,00	15,95
Jumlah		51.171.903.581,00	40.727.314.230,00	10.444.589.351,00	25,65

5.6.1.1.11	Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bantuan Keuangan	2022 (Rp) 500.000.000,00	2021 (Rp) 0,00
-------------------	--	---	---------------------------------

Jumlah Arus masuk kas dari Bantuan Keuangan Tahun 2022 senilai Rp500.000.000,00 dan dan 2021 Rp0,00. Realisasi Arus masuk kas dari Bantuan Keuangan Tahun 2022 bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi NTB untuk Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5.6.1.1.12	Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hibah	2022 (Rp) 0,00	2021 (Rp) 17.931.340.700,00
-------------------	---	---------------------------------	--

Jumlah Arus masuk kas dari Pendapatan Hibah Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp0,00 dan Rp17.931.340.700,00. Pendapatan Hibah tahun 2022 sebesar Rp0,00 karena penganggaran pendapatan dana Bantuan Operasional Sekolah dan Pendidikan (BOSP) pada 103 (Seratus tiga) sekolah penerima Dana BOS terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) Sekolah Dasar dan 15 (lima belas) Sekolah Menengah Pertama dan 17 Sekolah Swasta, 165 (Seratus enam puluh lima) penerima Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang terdiri dari 34 (Tiga puluh empat) PAUD Negeri dan 131 (Seratus tiga puluh satu) PAUD Swasta dan 14 (Empat belas) Penerima Bantuan Operasional (BOP) Kesetaraan karena merupakan bagian dari Rekening Bendahara Umum Daerah sudah tidak dicatat sebagai Pendapatan Hibah karena dicatat sebagai Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

5.6.1.1.13	Arus Masuk Kas dari Dana Darurat	2022 (Rp) 0,00	2021 (Rp) 0,00
-------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Jumlah Arus masuk kas yang bersumber dari Dana Darurat Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.6.1.1.14 Arus Masuk Kas dari Pendapatan Lainnya	2022 (Rp) 0,00	2021 (Rp) 798.038.457,00
--	---------------------------------	---

Jumlah Arus masuk kas dari Pendapatan Lainnya Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp0,00 dan Rp798.038.457,00. Merupakan Penerimaan atas Pengembalian Belanja (*Contra Post*).

5.6.1.2 Arus Keluar Kas	2022 (Rp) 595.386.272.017,00	2021 (Rp) 578.874.516.178,68
--------------------------------	---	---

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp595.386.272.017,00 dan Rp578.874.516.178,68 terdiri dari :

Tabel 5.6.15

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pembayaran Pegawai	361.680.806.870,00	357.632.648.357,55	4.048.158.512,45	1,13
2	Pembayaran Barang	209.804.746.008,00	200.514.835.071,13	9.289.910.936,87	4,63
3	Pembayaran Hibah	16.448.051.139,00	16.770.982.000,00	(322.930.861,00)	(1,93)
4	Pembayaran Bantuan Sosial	6.507.250.000,00	1.422.000.000,00	5.085.250.000,00	357,61
5	Pembayaran Tak Terduga	945.418.000,00	2.534.050.750,00	(1.588.632.750,00)	(62,69)
Jumlah		595.386.272.017,00	578.874.516.178,68	16.511.755.838,32	2,85

5.6.1.2.1 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai	2022 (Rp) 361.680.806.870,00	2021 (Rp) 357.632.648.357,55
--	---	---

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp361.680.806.870,00 dan Rp357.632.648.357,55 terdiri dari :

Tabel 5.6.16

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai
Tahun 2022 dan 2021

No.	Pembayaran Pegawai	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Gaji dan Tunjangan	240.011.994.328,00	235.861.106.648,00	4.150.887.680,00	1,76
2	Tambahan Penghasilan PNS	54.164.103.648,00	49.161.076.804,00	5.003.026.844,00	10,18
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	56.766.361.210,00	61.921.077.845,00	(5.154.716.635,00)	(8,32)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.978.172.296,00	9.934.861.816,00	43.310.480,00	0,44
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	274.375.788,00	253.725.644,55	20.650.143,45	8,14

No.	Pembayaran Pegawai	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	485.799.600,00	500.799.600,00	(15.000.000,00)	(3,00)
Jumlah		361.680.806.870,00	357.632.648.357,55	4.048.158.512,45	1,13

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai Tahun 2022 tersebut di atas termasuk pembayaran pegawai yang pencairannya langsung lewat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP di tujuh Puskesmas pada Dinas Kesehatan senilai Rp5.643.684.203,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6.17
Rincian Pembayaran Pegawai Dana Kapitasi dan Dana BOS
Tahun 2022 dan 2021

No.	Pembayaran Pegawai	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan PNS	0,00	25.005.655,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.608.419.956,00	5.618.678.548,00
3	Honorarium PNS	21.979.692,00	0,00
4	Uang Saku/Transport	0,00	0,00
5	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00
6	Uang Lembur	0,00	0,00
7	Honorarium Tenaga Honorer/Tidak Tetap	0,00	0,00
8	Honorarium Peserta Pengganti Uang Transport/ Akomodasi/Konsumsi	0,00	0,00
9	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	0,00	0,00
Jumlah		5.643.684.203,00	5.630.399.648,00

5.6.1.2.2	Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang dan Jasa	2022 (Rp)	2021(Rp)
		209.804.746.008,00	200.514.835.071,13

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp209.804.746.008,00 dan Rp200.514.835.071,13 terdiri dari :

Tabel 5.6.18
Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang
Tahun 2022 dan 2021

No.	Pembayaran Barang	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bahan Pakai Habis	57.459.374.310,00	61.023.035.572,64	(3.563.661.262,64)	(5,84)
2	Jasa Kantor	69.381.287.567,00	62.821.689.346,00	6.559.598.221,00	10,44

No.	Pembayaran Barang	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.986.968.850,00	10.291.840.000,00	(304.871.150,00)	(2,96)
4	Belanja Sewa Tanah	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	793.029.000,00	506.077.000,00	286.952.000,00	56,70
6	Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	1.195.330.400,00	1.039.541.400,00	155.789.000,00	14,99
7	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	6.387.802,00	0,00	6.387.802,00	0,00
8	Perjalanan Dinas	38.319.952.531,00	30.448.852.209,00	7.871.100.322,00	25,85
9	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	180.676.300,00	117.759.820,00	62.916.480,00	53,43
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
11	Beasiswa Pendidikan PNS	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	0,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan PNS	967.384.500,00	1.029.811.000,00	(62.426.500,00)	(6,06)
13	Pemeliharaan	6.503.946.252,00	5.201.355.163,00	1.302.591.089,00	25,04
14	Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Hadiah	4.428.859.125,00	7.572.331.882,00	(3.143.472.757,00)	(41,51)
16	Barang Dana BOS	1.184.433.600,00	0,00	1.184.433.600,00	0,00
17	Penhargaan atas suatu Prestasi	15.832.004.171,00	16.006.852.578,49	(174.848.407,49)	(1,09)
18	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	4.119.600,00	0,00	4.119.600,00	0,00
19	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3.240.000.000,00	0,00	3.240.000.000,00	0,00
20	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.992.000,00	4.138.689.100,00	(4.136.697.100,00)	(99,95)
Jumlah		209.804.746.008,00	200.514.835.071,13	9.289.910.936,87	4,63

5.6.1.2.3	Arus Keluar Kas dari Belanja Bunga	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		0,00	0,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Bunga Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.6.1.2.4	Arus Keluar Kas dari Belanja Subsidi	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		0,00	0,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Subsidi Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.6.1.2.5	Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		16.448.051.139,00	16.770.982.000,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp16.448.051.139,00 dan Rp16.770.982.000,00 terdiri dari :

Tabel 5.6.19
Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah Tahun 2022 dan 2021

No.	Pembayaran Hibah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hibah kepada Badan/ Lembaga/Organisasi	13.271.100.000,00	16.648.750.000,00	(3.377.650.000,00)	(20,29)
	Belanja Hibah Dana BOS	2.199.095.139,00	0,00	2.199.095.139,00	0,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	977.856.000,00	122.232.000,00	855.624.000,00	700,00
2	Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		16.448.051.139,00	16.770.982.000,00	(322.930.861,00)	(1,93)

5.6.1.2.6	Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		6.507.250.000,00	1.422.000.000,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp6.507.250.000,00 dan Rp1.422.000.000,00 terdiri dari :

Tabel 5.6.20
Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021

No.	Pembayaran Bantuan Sosial	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Kelompok Masyarakat	1.215.000.000,00	1.255.000.000,00	(40.000.000,00)	(3,19)
2	Anggota Masyarakat	0,00	87.000.000,00	(87.000.000,00)	(100,00)
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)	(100,00)
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	92.500.000,00	0,00	92.500.000,00	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.199.750.000,00	0,00	5.199.750.000,00	0,00
Jumlah		6.507.250.000,00	1.422.000.000,00	5.085.250.000,00	357,61

5.6.1.2.7	Arus Keluar Kas dari Pembayaran Tak Terduga	2022 (Rp) 945.418.000,00	2021 (Rp) 2.534.050.750,00
------------------	--	---	---

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Tak Terduga Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp945.418.000,00 dan Rp2.534.050.750,00 dengan rincian tahun 2022 sebagai berikut.

- Pembayaran tidak terduga untuk penanganan keperluan mendesak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota Bima Tahun 2022 senilai Rp133.624.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
- Pembayaran tidak terduga untuk penanganan keperluan mendesak mengantisipasi bencana banjir, tanah longsor dengan membuat padanan di Kota Bima Tahun 2022 senilai Rp129.294.000,00 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Pembayaran tidak terduga untuk santunan kematian dan pengobatan untuk masyarakat di Kota Bima Tahun 2021 senilai Rp682.500.000,00 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

5.6.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2022 (Rp) (155.764.719.387,73)	2021 (Rp) (140.602.241.564,74)
--------------	--	---	---

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing defisit senilai Rp155.764.719.387,73 dan Rp140.602.241.564,742. Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Investasi yaitu arus masuk kas investasi dikurangi dengan arus keluar kas investasi.

Rincian aliran kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6.21
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021

No.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Arus Masuk Kas					
1	Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2	Penjualan Aset Lainnya	40.064.900,00	21.434.000,00	18.630.900,00	86,92
3	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		45.064.900,00	21.434.000,00	23.630.900,00	110,25
Arus Keluar Kas					
1	Perolehan Tanah	3.035.329.060,00	737.365.000,00	2.297.964.060,00	311,65
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	45.650.535.702,00	28.082.138.647,00	17.568.397.055,00	62,56
3	Perolehan Bangunan dan Gedung	34.349.972.004,73	67.219.824.199,03	(32.869.852.194,30)	(48,90)

No.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	69.040.535.395,00	40.902.636.451,71	28.137.898.943,29	68,79
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.733.412.126,00	1.681.711.267,00	51.700.859,00	3,07
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		155.809.784.287,73	140.623.675.564,74	15.186.108.722,99	10,80
Total		(155.764.719.387,7)	(140.602.241.564,7)	(15.162.477.822,99)	10,78

5.6.2.1 Arus Masuk Kas	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	45.064.900,00	21.434.000,00

Arus Masuk Kas Tahun 2021 dan 2020 dari hasil penjualan atas peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai, kendaraan dinas roda empat dan Bahan-bahan Bekas Bangunan senilai Rp45.064.900,00 dan Rp21.434.000,00 terdiri dari :

Tabel 5.6.22
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021

No.	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penjualan Aset Tetap	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
7	Penjualan atas Aset Lainnya	40.064.900,00	21.434.000,00	18.630.900,00	86,92
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		45.064.900,00	21.434.000,00	23.630.900,00	110,25

5.6.2.1.1 Pencairan dana Cadangan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Pencairan dana Cadangan pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

5.6.2.1.2	Penjualan Atas Tanah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		0,00	0,00

Saldo Penjualan Atas Tanah pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

5.6.2.1.3	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		0,00	0,00

Saldo Penjualan Atas Peralatan dan mesin pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

5.6.2.1.4	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		0,00	0,00

Saldo Penjualan Atas Gedung dan Bangunan pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

5.6.2.1.5	Penjualan Atas Jalan Irigasi dan Jringen	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		0,00	0,00

Saldo Penjualan Atas jalan irigasi dan jaringan pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

5.6.2.1.6	Penjualan Aset Tetap	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		5.000000,00	0,00

Saldo Penjualan Aset Tetap pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp5.000.000,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

5.6.2.1.7	Penjualan Aset Tetap	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		40.064.900,00	21.434.000,00

Saldo Penjualan Aset Tetap dalam hal ini Aset Tetap Lainnya pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp40.064.900. mengalami kenaikan senilai 18.630.900,00 atau 86,92% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp21.434.000,00.

	Hasil Penjualan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.6.2.1.8	Kekayaan Yang dipisahkan	40.064.900,00	21.434.000,00

Saldo Hasil Pejualan Kekayaan yang dipisahkan pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

	Penerimaan Penjualan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.6.2.1.9	Investasi Non Permanen	0,00	0,00

Saldo Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

5.6.2.2	Arus Keluar Kas	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		155.809.784.287,73	140.623.675.564,74

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 senilai Rp155.809.784.287,73 dan Rp140.623.675.564,74 terdiri dari Perolehan Aset Tetap (Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya) dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah terdiri dari :

Tabel 5.6.23
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021

No.	Arus Keluar Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Tanah	3.035.329.060,00	737.365.000,00	2.297.964.060,00	311,65
3	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	45.650.535.702,00	28.082.138.647,00	17.568.397.055,00	62,56
4	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	34.349.972.004,73	67.219.824.199,03	(32.869.852.194,30)	(48,90)
5	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	69.040.535.395,00	40.902.636.451,71	28.137.898.943,29	68,79
6	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	1.733.412.126,00	1.681.711.267,00	51.700.859,00	3,07
7	Belanja Modal - Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Arus Keluar Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		155.809.784.287,73	140.623.675.564,74	15.186.108.722,99	10,82

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 tersebut di atas termasuk perolehan aset tetap pada Dana Kapitasi JKN pada FKTP di 7 (tujuh) Puskesmas pada Dinas Kesehatan senilai Rp206.709.425,00 dan Bendahara Dana BOS pada 86 (delapan puluh Enam) sekolah senilai Rp2.146.768.852,00 dan dicatat dalam laporan arus kas karena merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah.

Rincian dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 5.6.24
Perolehan Aset Tetap yang pencairannya langsung lewat Bendahara Dana Kapitasi JKN dan Bendahara Dana BOS Tahun 2022 dan 2021

No.	Perolehan Aset Tetap	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pengadaan <i>Electric Generating Set</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengadaan Peralatan Kantor	317.302.950,00	0,00	317.302.950,00	0,00
3	Perolehan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Perolehan Alat Pendingin	0,00	5.665.000,00	(5.665.000,00)	(100,00)
5	Perolehan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	3.400.000,00	(3.400.000,00)	(100,00)
6	Perolehan Pengadaan Komputer Jaringan	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
7	Perolehan Pengadaan Komputer/Personal Komputer	40.802.450,00	40.000.000,00	802.450,00	2,01
8	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	373.149.026,00	822.703.392,00	(449.554.366,00)	(54,64)
9	Perolehan Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	6.219.000,00	8.625.000,00	(2.406.000,00)	(27,90)
10	Perolehan Meja Kerja Pejabat	14.375.000,00	2.550.000,00	11.825.000,00	463,73
11	Perolehan Kursi Pejabat	10.166.000,00	0,00	10.166.000,00	0,00
12	Perolehan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Perolehan Lemari dan Arsip Pejabat	61.680.000,00	0,00	61.680.000,00	0,00
14	Perolehan Alat Studio Visual	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Perolehan Alat Kedokteran Umum	0,00	92.259.206,00	(92.259.206,00)	(100,00)
16	Perolehan Alat Kesehatan Umum Lainnya	42.463.475,00	7.469.250,00	34.994.225,00	468,51
17	Peralatan Kantor Lainnya	217.856.450,00	29.740.500,00	188.115.950,00	632,52
18	Perolehan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00

No.	Perolehan Aset Tetap	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
19	Perolehan Bangunan Gedung Kantor	0,00	1.054.950.867,00	(1.054.950.867,00)	(100,00)
20	Pengadaan Buku	1.226.859.426,00	0,00	1.226.859.426,00	0,00
21	Pengadaan Alat Musik	37.070.000,00	0,00	37.070.000,00	0,00
22	Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	1.684.500,00		1.684.500,00	0,00
Jumlah		2.353.478.277,00	2.087.363.215,00	266.115.062,00	12,75

5.6.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2022 (Rp) 5.647.042,00	2021 (Rp) 1.036.753,00
--------------	--	---	---

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing defisit senilai Rp5.647.042,00 dan senilai Rp1.036.753,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu arus masuk kas pendanaan dikurangi dengan arus keluar kas pendanaan. Nilai tersebut merupakan pengembalian Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Tabel 5.6.25
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
Tahun 2022 dan 2021

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Arus Masuk Kas				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman (Investasi Dana Bergulir)	5.647.042,00	1.036.753,00	4.610.289,00	444,69
Jumlah	5.647.042,00	1.036.753,00	4.610.289,00	444,69
Arus Keluar Kas			0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.647.042,00	1.036.753,00	4.610.289,00	444,69

5.6.3.1	Arus Masuk Kas	2022 (Rp) 5.647.042,00	2021 (Rp) 1.036.753,00
----------------	-----------------------	---	---

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing senilai Rp5.647.042,00 dan Rp1.036.753,00 yang merupakan penerimaan kembali Investasi Dana Bergulir yang disalurkan kepada masyarakat dan terdapat pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Arus Kas Masuk	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00

Daerah Lainnya				
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.647.042,00	1.036.753,00	4.610.289,00	444,69
Jumlah	5.647.042,00	1.036.753,00	4.610.289,00	444,69

5.6.3.2 Arus Keluar Kas

2022 (Rp)

0,00

2021 (Rp)

0,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 dan Tahun 2021 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Arus Kas Keluar	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

2022 (Rp)

0,00

2021 (Rp)

0,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari arus masuk kas aktivitas transitoris dikurangi dengan arus keluar kas aktivitas

transitoris (PFK dan Sisa UP/TU) yang merupakan PFK tahun lalu yang terbayarkan tahun 2022.

Rincian arus kas dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6.26
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021

No.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Arus Masuk Kas					
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	57.012.697.577,64	55.602.010.042,53	1.410.687.535,11	2,54
2	Penerimaan Sisa UP TA. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Sisa UP TA. 2021	5.720.000,00	172.013.382,00	(166.293.382,00)	(96,67)
4	Penerimaan Sisa UP TA. 2022	147.606.380,00	0,00	147.606.380,00	0,00
5	Penerimaan Sisa TU TA. 2021 dan TA. 2022	264.897.315,00	310.388.745,00	(45.491.430,00)	0,00
6	Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		57.430.921.272,64	56.084.412.169,53	1.346.509.103,11	2,40
Arus Keluar Kas					
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	57.012.697.577,6	55.602.010.042,53	1.410.687.535,11	2,54
2	Pengeluaran Sisa UP TA. 2020	0,0	0,00	0,00	0,00
3	Pengeluaran Sisa UP TA. 2021	5.720.000,0	172.013.382,00	(166.293.382,00)	0,00
4	Pengeluaran Sisa UP TA. 2022	147.606.380,0	0,00	147.606.380,00	0,00
5	Pengeluaran Sisa TU TA. 2021 dan TA. 2022	264.897.315,0	310.388.745,00	(45.491.430,00)	(14,66)
6	Kiriman Uang Keluar	0,0	0,00	0,00	0,00
Jumlah		57.430.921.272,64	56.084.412.169,53	1.346.509.103,11	2,40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00	0,00	0,00

5.6.4.1 Arus Masuk Kas

2022 (Rp)	2021 (Rp)
57.430.921.272,64	56.084.412.169,53

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing adalah senilai Rp57.430.921.272,64 dan Rp56.084.412.169,53 terdiri dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan penerimaan sisa Uang Persediaan (UP) dan sisa Tambahan Uang Persediaan (TU) serta kiriman uang masuk.

Uraian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.6.27
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2022 dan 2021

No.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Arus Masuk Kas					
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	57.012.697.577,64	55.602.010.042,53	1.410.687.535,11	2,54
2	Penerimaan Sisa UP TA. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Sisa UP TA. 2021	5.720.000,00	172.013.382,00	(166.293.382,00)	(96,67)
4	Penerimaan Sisa UP TA. 2022	147.606.380,00	0,00	147.606.380,00	0,00
5	Penerimaan Sisa TU TA. 2021 dan TA. 2022	264.897.315,00	310.388.745,00	(45.491.430,00)	0,00
6	Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		57.430.921.272,64	56.084.412.169,53	1.346.509.103,11	2,40

Rincian arus masuk kas dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing senilai Rp57.012.697.577,64 dan Rp55.602.010.042,53 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6.28
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Tahun 2022 dan 2021

No	Penerimaan PFK	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Iuran Wajib Pegawai	2.313.987.708,00	1.850.099.374,00	463.888.334,00	25,07
2	Potongan Taperum	0,00	138.446.362,00	(138.446.362,00)	(100,00)
3	BPJS Kesehatan	9.404.054.754,00	7.571.493.128,00	1.832.561.626,00	24,20
4	PPh Ps 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	12.163.097,00	11.268.427.938,53	(11.256.264.841,53)	(99,89)
5	PPh Ps 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	11.391.693.324,00	0,00	11.391.693.324,00	0,00
6	PPh Ps 22	800.504.461,00	726.471.777,00	74.032.684,00	10,19
7	PPh Ps 23	78.214.027,00	90.938.980,00	(12.724.953,00)	(13,99)
8	PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	9.300.000,00	2.741.311.404,00	(2.732.011.404,00)	(99,66)
9	PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	51.462.400,00	0,00	51.462.400,00	0,00
10	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	621.867.703,00	0,00	621.867.703,00	0,00
11	PPh Ps 15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16.108.010.795,77	15.717.798.823,00	390.211.972,77	2,48
13	Iuran Wajib Pegawai (8%)	13.095.714.536,00	13.384.723.099,00	(289.008.563,00)	(2,16)
14	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	374.559.288,00	387.852.137,00	(13.292.849,00)	(3,43)

No	Penerimaan PFK	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
15	Jaminan Kematian (JKM)	1.121.498.822,00	1.122.750.207,00	(1.251.385,00)	(0,11)
16	TAPERA PEGAWAI	0,00	583.505.103,00	(583.505.103,00)	(100,00)
17	Potongan Askes	1.442.214,00	3.496.231,00	(2.054.017,00)	(58,75)
18	Pajak Restoran	111.429,00	331.905,00	(220.476,00)	(66,43)
19	Iuran Wajib Pegawai (3,25%)	189.342.724,00	14.363.574,00	174.979.150,00	1.218,21
20	BPJS Kesehatan Dewan	4.488.953,00	0,00	4.488.953,00	0,00
21	BPJS Kesehatan PPPK	257.731.341,00	0,00	257.731.341,00	0,00
22	IWP (1%) Iuran Wajib Pegawai - KDH/WKDH	114.300,00	0,00	114.300,00	0,00
23	IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai - KDH/WKDH	352.800,00	0,00	352.800,00	0,00
24	IWP (1%) Iuran Wajib Pegawai - PPPK	63.638.929,00	0,00	63.638.929,00	0,00
25	PPh Pasal 4 ayat 2 (final)	1.112.443.971,87	0,00	1.112.443.971,87	0,00
Jumlah		57.012.697.577,64	55.602.010.042,53	1.410.687.535,11	2,54

5.6.4.2 Arus Keluar Kas

2022 (Rp)	2021 (Rp)
<u>57.430.921.272,64</u>	<u>56.084.412.169,53</u>

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing adalah senilai Rp57.430.921.272,64 dan Rp56.084.412.169,53 terdiri dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan penerimaan sisa Uang Persediaan (UP) dan sisa Tambahan Uang Persediaan (TU).

Tabel 5.6.29
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitor Tahun 2022 dan 2021

No.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Arus Keluar Kas					
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	57.012.697.577,64	55.602.010.042,53	1.410.687.535,11	2,54
2	Pengeluaran Sisa UP TA. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengeluaran Sisa UP TA. 2021	5.720.000,00	172.013.382,00	(166.293.382,00)	(96,67)
4	Pengeluaran Sisa UP TA. 2022	147.606.380,00	0,00	147.606.380,00	0,00
5	Pengeluaran Sisa TU TA. 2021 dan TA. 2022	264.897.315,00	310.388.745,00	(45.491.430,00)	(14,66)
6	Kiriman Uang Keluar	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		57.430.921.272,64	56.084.412.169,53	1.346.509.103,11	2,40

Rincian arus keluar kas dari pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing senilai Rp57.012.697.577,64 dan Rp55.602.010.042,53 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6.30
Arus Keluar Kas dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2022 dan 2021

No	Penerimaan PFK	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Iuran Wajib Pegawai	2.313.987.708,00	1.850.099.374,00	463.888.334,00	25,07
2	Potongan Taperum	0,00	138.446.362,00	(138.446.362,00)	(100,00)
3	BPJS Kesehatan	9.404.054.754,00	7.571.493.128,00	1.832.561.626,00	24,20
4	PPh Ps 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	12.163.097,00	11.268.427.938,53	(11.256.264.841,53)	(99,89)
5	PPh Ps 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	11.391.693.324,00	0,00	11.391.693.324,00	0,00
6	PPh Ps 22	800.504.461,00	726.471.777,00	74.032.684,00	10,19
7	PPh Ps 23	78.214.027,00	90.938.980,00	(12.724.953,00)	(13,99)
8	PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	9.300.000,00	2.741.311.404,00	(2.732.011.404,00)	(99,66)
9	PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	51.462.400,00	0,00	51.462.400,00	0,00
10	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	621.867.703,00	0,00	621.867.703,00	0,00
11	PPh Ps 15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16.108.010.795,77	15.717.798.823,00	390.211.972,77	2,48
13	Iuran Wajib Pegawai (8%)	13.095.714.536,00	13.384.723.099,00	(289.008.563,00)	(2,16)
14	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	374.559.288,00	387.852.137,00	(13.292.849,00)	(3,43)
15	Jaminan Kematian (JKM)	1.121.498.822,00	1.122.750.207,00	(1.251.385,00)	(0,11)
16	TAPERA PEGAWAI	0,00	583.505.103,00	(583.505.103,00)	(100,00)
17	Potongan Askes	1.442.214,00	3.496.231,00	(2.054.017,00)	(58,75)
18	Pajak Restoran	111.429,00	331.905,00	(220.476,00)	(66,43)
19	Iuran Wajib Pegawai (3,25%)	189.342.724,00	14.363.574,00	174.979.150,00	1.218,21
20	BPJS Kesehatan Dewan	4.488.953,00	0,00	4.488.953,00	0,00
21	BPJS Kesehatan PPPK	257.731.341,00	0,00	257.731.341,00	0,00
22	IWP (1%) Iuran Wajib Pegawai - KDH/WKDH	114.300,00	0,00	114.300,00	0,00
23	IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai - KDH/WKDH	352.800,00	0,00	352.800,00	0,00
24	IWP (1%) Iuran Wajib Pegawai - PPPK	63.638.929,00	0,00	63.638.929,00	0,00
25	PPh Pasal 4 ayat 2 (final)	1.112.443.971,87	0,00	1.112.443.971,87	0,00
Jumlah		57.012.697.577,64	55.602.010.042,53	1.410.687.535,11	2,54

5.6.5	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran	2022 (Rp) 21.962.179.832,18	2021 (Rp) 10.973.784.614,93
--------------	--	--	--

Saldo Kas per 1 Januari 2022 senilai Rp21.962.179.832,18 dan Tahun 2021 Rp10.973.784.614,93.

5.6.6 Saldo Akhir Kas	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	76.613.516.008,67	21.962.966.165,30

Saldo akhir Kas Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp76.613.516.008,67 dan Rp21.962.966.165,30 dengan rincian berikut.

Tabel 5.6.31
Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	76.583.026.629,67	21.962.179.832,18	54.612.800.434,23	248,67
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	143.889,12	7.902.474,14	5.492,06
4	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	30.489.379,00	642.444,00	29.846.935,00	4.745,84
Jumlah		76.613.516.008,67	21.962.966.165,30	54.650.549.843,37	248,84

- a. Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2022 senilai Rp76.583.026.629,67 terdiri dari :
 - Kas di BUD Per 31 Desember 2022 senilai Rp71.620.257.944,90;
 - Kas Dana Kapitasi merupakan Kas pada Bendahara FKTP Puskesmas Mpunda pada Dinas Kesehatan senilai Rp7.894.544,00;
 - Kas Dana BOS yang berada pada Sekolah senilai Rp664.161,51; dan
 - Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rp 4.954.209.979,26.
- b. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran senilai Rp30.489.379,00 merupakan hutang PFK yang terdapat pada:
 - Dinas Kesehatan senilai Rp23.866.242,00 yang terdiri dari hutang PFK PKM Mpunda Senilai Rp23.214.476 dan hutang PFK pada PKM Kolo senilai Rp651.766,00;
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp2.365.137,00; dan
 - Kas yang tidak dapat dipergunakan Senilai Rp4.258.000,00 merupakan pengembalian BOP PAUD.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kota Bima secara astronomis terletak di ujung timur Pulau Sumbawa di antara 8°20'-8°30' Lintang Selatan dan 118°41'-118°48' Bujur Timur, dengan sebagian besar batas wilayah Kota Bima di kelilingi oleh wilayah Kabupaten Bima yaitu: di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ambalawi, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Palibelo, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wawo, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bima.

Luas wilayah Kota Bima meliputi wilayah daratan seluas 222,25km², dengan jumlah kecamatan sebanyak lima kecamatan yang dihuni oleh penduduk asli suku Mbojo (Bima) dan suku pendatang lainnya. Adapun lima kecamatan yang terdapat di wilayah Kota Bima adalah: Rasanae Barat, Mpunda, Rasanae Timur, Raba, dan Asakota.

Asakota merupakan kecamatan yang memiliki luas area terbesar, yaitu 69,03km² sedangkan Kecamatan Rasanae Barat merupakan kecamatan tersempit dengan luas wilayah hanya 10,14km². Artinya, hampir sepertiga atau 31,06% wilayah Kota Bima merupakan bagian wilayah Kecamatan Asakota, kemudian 28,83% dan 28,67% merupakan wilayah kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Raba. Sisanya 10% adalah wilayah Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda, sebagaimana yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Luas Wilayah Kota Bima Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rasanae Barat	10,14	4,56
2	Mpunda	15,28	6,88
3	Rasanae Timur	64,07	28,83
4	Raba	63,73	28,67
5	Asakota	69,03	31,06
Total		222,25	100,00

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2022

Lebih rinci, kelima kecamatan tersebut terdiri dari total 41 kelurahan, yang dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 6.2
Ibu Kota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan per Kecamatan

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)
1. Rasanae Barat	Paruga	6
2. Mpunda	Sadia	10
3. Rasanae Timur	Kumbe	8
4. Raba	Penaraga	11
5. Asakota	Melayu	6
J u m l a h		41

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2022

Jumlah PNSD di Kota Bima adalah 3.596 orang, yang terdiri dari Eselon dan Non Eselon. Tidak ada Eselon I, Eselon II sebanyak 31 orang, Eselon III sebanyak 130 orang, Eselon IV sebanyak 340 orang, dan Eselon V sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk Non Eselon terdiri dari Tenaga Fungsional sebanyak 1.779 orang dan Staf 1.315 orang. Jumlah PNS per golongan dan per jabatan Pemerintah Kota Bima sebagaimana yang tertuang dalam daftar berikut :

Tabel 6.3

Daftar Jumlah PNS Pergolongan Pemerintah Kota Bima Per 31 Desember 2022

Golongan/Ruang	Eselon					Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	V	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/c	0	20	0	0	0	4	0	24
Golongan IV/b	0	6	24	1	0	185	0	216
Golongan IV/a	0	6	66	9	0	371	11	463
Jumlah Golongan IV	0	33	90	10	0	560	11	704
Golongan III/d	0	0	37	160	0	416	118	731
Golongan III/c	0	0	5	114	0	341	158	618
Golongan III/b	0	0	0	57	0	234	212	503
Golongan III/a	0	0	0	7	0	158	384	549
Jumlah Golongan III	0	0	42	338	0	1149	872	2401
Golongan II/d	0	0	0	1	0	26	131	158
Golongan II/c	0	0	0	1	0	18	77	96
Golongan II/b	0	0	0	0	0	6	98	104
Golongan II/a	0	0	0	0	0	3	7	10
Jumlah Golongan II	0	0	0	2	0	53	313	368
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	25	25
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	4	4
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	1	1
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0	30	30
Total	0	33	132	350	0	1762	1226	3503

Untuk lebih rinci, berikut dilampirkan daftar jumlah PNS per golongan per jabatan Lingkungan Pemerintah Kota Bima :

Tabel 6.4

Rincian PNS Pergolongan Perjabatan Pemerintah Kota Bima Per 31 Desember 2022

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											
		ESELON								NON ESELON			JML
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V	JML	Jabatan	Jabatan	JML	

										Fungsional Tertentu	Pelaksana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sekretariat Daerah	1	6	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7
2	Bagian Pemerintahan Setda	0	0	1	0	0	0	0	1	3	10	13	14
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	0	0	1	0	0	0	0	1	3	10	13	14
4	Bagian Hukum Setda	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	11	11
5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda	0	0	1	0	0	0	0	1	2	5	7	8
6	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	0	0	1	0	0	0	0	1	3	8	11	12
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	0	0	1	0	0	0	0	1	12	4	16	17
8	Bagian Organisasi Setda	0	0	1	0	0	0	0	1	3	7	10	11
9	Bagian Umum Setda	0	0	1	0	1	0	0	2	2	14	16	18
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	0	0	1	0	1	0	0	2	2	7	9	11
11	Sekretariat DPRD	0	1	3	0	1	0	0	5	3	21	24	29
12	Inspektorat	0	1	4	0	1	0	0	6	34	20	54	60
13	Satuan Polisi Pamong Praja	0	1	1	3	8	0	0	13	3	28	31	44
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	1	1	3	5	0	0	10	37	37	74	84
15	Dinas Kesehatan	0	1	1	3	2	1	0	8	55	13	68	76
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	1	1	4	4	2	0	12	14	45	59	71
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	1	1	2	6	0	0	10	2	22	24	34
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	1	2	2	0	0	5	6	15	21	26
19	Dinas Sosial	0	1	1	3	1	0	0	6	12	13	25	31
20	Dinas Tenaga Kerja	0	1	1	2	3	1	0	8	4	8	12	20
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	0	1	1	3	2	1	0	8	7	10	17	25
22	Dinas Ketahanan Pangan	0	1	1	3	1	0	0	6	8	9	17	23
23	Dinas Lingkungan Hidup	0	1	1	4	4	1	0	11	13	99	112	123
24	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0	1	1	3	2	0	0	7	8	17	25	32
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0	1	1	3	2	0	0	7	9	13	22	29
26	Dinas Perhubungan	0	1	1	2	8	0	0	12	3	19	22	34
27	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0	1	1	4	1	0	0	7	14	16	30	37
28	Dinas KOPERINDAG	0	1	1	2	4	2	0	10	10	20	30	40
29	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0	1	1	0	1	0	0	3	7	15	22	25
30	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0	1	1	4	1	0	0	7	19	11	30	37
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	1	1	3	1	0	0	6	9	14	23	29
32	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0	1	1	4	1	0	0	7	13	12	25	32
33	Dinas Pertanian	0	1	1	5	7	6	0	20	49	33	82	102
34	BAPPEDA LITBANG	0	1	1	3	1	0	0	6	12	18	30	36
35	BPKAD	0	1	1	6	12	0	0	20	5	48	53	73

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											
		ESELON								NON ESELON			JML
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0	1	1	2	2	0	0	6	12	11	23	29
37	BPBD	0	0	1	3	1	0	0	5	7	13	20	25
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	1	4	1	0	0	7	10	7	17	24
39	Kecamatan Asakota	0	0	1	1	5	2	0	9	8	6	14	23
40	Kecamatan RasanaE Barat	0	0	1	1	5	2	0	9	0	12	12	21
41	Kecamatan RasanaE Timur	0	0	1	1	5	1	0	8	7	4	11	19
42	Kecamatan Mpunda	0	0	1	1	6	1	0	9	0	14	14	23
43	Kecamatan Raba	0	0	1	1	5	2	0	9	0	12	12	21
44	Kelurahan Dara	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
45	Kelurahan Dodu	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
46	Kelurahan Jatibaru	0	0	0	0	1	4	0	5	0	3	3	8
47	Kelurahan Jatibaru Timur	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
48	Kelurahan Jatiwangi	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
49	Kelurahan Kendo	0	0	0	0	1	4	0	5	0	4	4	9
50	Kelurahan Kodo	0	0	0	0	1	4	0	5	0	3	3	8
51	Kelurahan Kolo	0	0	0	0	1	4	0	5	0	3	3	8
52	Kelurahan Kumbe	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
53	Kelurahan Lampe	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
54	Kelurahan Lelamase	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
55	Kelurahan Lewirato	0	0	0	0	1	4	0	5	0	3	3	8
56	Kelurahan Mande	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
57	Kelurahan Manggemaci	0	0	0	0	1	4	0	5	0	4	4	9
58	Kelurahan Matakando	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
59	Kelurahan Melayu	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
60	Kelurahan Monggonao	0	0	0	0	1	4	0	5	0	3	3	8
61	Kelurahan NaE	0	0	0	0	1	3	0	4	0	2	2	6
62	Kelurahan Nitu	0	0	0	0	1	4	0	5	0	3	3	8
63	Kelurahan Ntobo	0	0	0	0	1	4	0	5	0	5	5	10
64	Kelurahan Nungga	0	0	0	0	1	3	0	4	0	4	4	8
65	Kelurahan Oi Fo'o	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
66	Kelurahan Oimbo	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
67	Kelurahan Pane	0	0	0	0	1	4	0	5	0	3	3	8
68	Kelurahan Panggi	0	0	0	0	1	4	0	5	0	6	6	11
69	Kelurahan Paruga	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
70	Kelurahan PenanaE	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
71	Kelurahan Penaraga	0	0	0	0	1	4	0	5	0	4	4	9
72	Kelurahan Penatoi	0	0	0	0	1	4	0	5	0	4	4	9
73	Kelurahan Rabadompu Barat	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
74	Kelurahan Rabadompu	0	0	0	0	1	4	0	5	0	3	3	8

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											
		ESELON								NON ESELON			JML
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Timur												
75	Kelurahan Rabangodu Selatan	0	0	0	0	1	4	0	5	0	5	5	10
76	Kelurahan Rabangodu Utara	0	0	0	0	1	4	0	5	0	7	7	12
77	Kelurahan Rite	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
78	Kelurahan Rontu	0	0	0	0	1	4	0	5	0	6	6	11
79	Kelurahan Sadia	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
80	Kelurahan SambinaE	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
81	Kelurahan Santi	0	0	0	0	1	4	0	5	0	5	5	10
82	Kelurahan SaraE	0	0	0	0	1	4	0	5	0	4	4	9
83	Kelurahan Tanjung	0	0	0	0	1	4	0	5	0	3	3	8
84	Kelurahan Ule	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
85	SKB	0	0	0	0	0	1	0	1	14	1	15	16
86	RSUD Kota Bima	0	0	0	1	2	1	0	4	74	23	97	101
87	Puskesmas Kolo	0	0	0	0	0	1	0	1	13	5	18	19
88	Puskesmas Mpunda	0	0	0	0	0	1	0	1	72	18	90	91
89	Puskesmas Paruga	0	0	0	0	0	1	0	1	64	13	77	78
90	Puskesmas PenanaE	0	0	0	0	0	1	0	1	62	14	76	77
91	Puskesmas Rasanae Timur	0	0	0	0	0	1	0	1	35	8	43	44
92	Puskesmas Kumbe	0	0	0	0	0	1	0	1	20	14	34	35
93	Puskesmas Jatibaru	0	0	0	0	0	1	0	1	45	8	53	54
94	UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	0	0	0	0	1	0	0	1	4	5	9	10
95	SDN 01 Melayu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	11
96	SDN 02 Suntu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	14	5	19	19
97	SDN 03 Jatiwangi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	5
98	SDN 05 Rabangodu Utara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	15	15
99	SDN 06 Kodo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9	9
100	SDN 07 Kumbe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	10	10
101	SDN 08 Penanae Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8
102	SDN 10 Penatoi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	14	14
103	SDN 11 Manggemaci Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7	19	19
104	SDN 12 Sarae Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8	8
105	SDN 13 Kolo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9	9
106	SDN 14 Sadia Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	14	14
107	SDN 15 Ntobo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
108	SDN 16 Salama Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8	8
109	SDN 17 Pane Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	8

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											
		ESELON								NON ESELON			JML
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	SDN 18 Dodu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	7
111	SDN 19 Rabangodu Utara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	13	5	18	18
112	SDN 20 Rabadompur Timur Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	12
113	SDN 21 Tolomundu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	15	15
114	SDN 22 Jatibaru Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9	9
115	SDN 24 Rabangodu Utara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	10
116	SDN 25 Santi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	10	10
117	SDN 26 Rabadompur Barat Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	8
118	SDN 27 Rabadompur Timur Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9	9
119	SDN 28 Melayu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	17	17
120	SDN 29 Tanjung Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	14	7	21	21
121	SDN 30 Nitu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	9	9
122	SDN 31 Lelamase Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	9	9
123	SDN 32 Panggi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10	10
124	SDN 33 Lampe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	12	12
125	SDN 34 Bonto Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
126	SDN 35 Nungga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	6
127	SDN 36 Nggarolo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	7
128	SDN 37 Kendo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8	8
129	SDN 39 Rabadompur Barat Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	10
130	SDN 40 Lewirato Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	12	12
131	SDN 42 Manggemaci Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	13	13
132	SDN 43 Melayu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	SDN 44 Mande Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	8
134	SDN 45 Pane Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	6
135	SDN 46 Lela Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	10
136	SDN 47 Kodo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	6
137	SDN 48 Kumbe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	8
138	SDN 49 Rabangodu Selatan Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	18	18
139	SDN 50 Penaraga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8	8
140	SDN 51 Rite Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	7
141	SDN 52 Busu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9
142	SDN 53 Oi Fo'o Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	11	11
143	SDN 54 Santi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											
		ESELON								NON ESELON			JML
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	SDN 55 Dara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	10	10
145	SDN 56 Tolobali Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9
146	SDN 57 Wadumbolo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10	10
147	SDN 58 Tambana Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	6
148	SDN 59 Rasalewi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	12	12
149	SDN 60 Sambinae Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	7
150	SDN 61 Karara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9	9
151	SDN 62 Rontu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	15	15
152	SDN 63 Dodu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
153	SDN 64 Sori Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3
154	SDN 65 Jatibaru Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	15	15
155	SDN 66 Kuta Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	6
156	SDN 67 Rabantala Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10	10
157	SDN 68 Kolo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	11
158	SDN 69 Kabanta Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	8
159	SDN 70 Tolotongga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	8
160	SDN 71 Wenggo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	6
161	SDN 72 Ntobo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	7
162	SDN 73 Sabali Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	8
163	SDN 74 Songgela Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	6
164	SDN 76 Toloweri Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	7
165	SDN 77 Niu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	7
166	SMPN 01 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	42	10	52	52
167	SMPN 02 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	39	16	55	55
168	SMPN 03 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	20	7	27	27
169	SMPN 04 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3	30	30
170	SMPN 05 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	27	27
171	SMPN 06 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	30	4	34	34
172	SMPN 07 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	21	8	29	29
173	SMPN 08 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	26	8	34	34
174	SMPN 09 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3	23	23
175	SMPN 10 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	14	7	21	21
176	SMPN 11 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	19	8	27	27
177	SMPN 12 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10	10
178	SMPN 13 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	15	9	24	24

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											
		ESELON								NON ESELON			JML
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	SMPN 14 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	16	16
180	SMPN 15 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	11
181	SMP Muhammadiyah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
182	MIS Darul Hikmah Matakando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	MI Dodu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
184	MI Nurul Ilmi Paruga	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
185	MI SambinaE Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	MIS Mande Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
187	MTs Al- Husaini	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
188	MTs Darul Hikmah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	MTsN Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
190	MTsN Raba	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
191	SD Islam Al-Ikwan Santi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
192	SD IT Imam Safi'i	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
193	SD Muhammadiyah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
194	TK. Negeri Pembina 01 Raba Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6
195	TK. Negeri Pembina 02 Kolo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	4
196	TK. Negeri Pembina 03 Paruga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
197	TK. Negeri 04 Tanjung Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
198	TK. Negeri 05 Rabadompu Timur Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
199	TK. Negeri 06 Penaraga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
200	TK. Negeri 07 Pane Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
201	TK. RA AL-Muhtadin	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
202	TK. Negeri 08 Penatoi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
203	TK. Negeri 09 Rabadompu Barat Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3
204	TK. Negeri 10 Rabangodu Utara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
205	TK. Negeri 11 Jatibaru Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
206	TK. Negeri 12 Penanae Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
207	TK. Negeri 13 Monggonao Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
208	TK. Negeri 14 Rite Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
209	TK. Negeri 15 Kodo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
210	TK. Negeri 16 Jatiwangi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
211	TK. Negeri 17 Nae Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											
		ESELON								NON ESELON			JML
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	TK. Negeri 18 Manggemaci Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
213	TK. Negeri 19 Santi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
214	TK. Negeri 20 Lampe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
215	TK. Negeri 21 Kumbe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
216	TK. Negeri 22 Rontu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
217	TK. Negeri 23 Dodu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
218	TK. Negeri 24 Nungga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	TK. Negeri 25 Rabangodu Utara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
220	TK. Negeri 26 Lelamase Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
221	TK. Negeri 27 Dodu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	TK. Negeri 28 Kodo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	TK. Negeri 29 Kumbe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
224	TK. Negeri 30 Rabadompu Timur Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
225	TK. Negeri 31 Bonto Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
226	TK. Negeri 33 Ni'u Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
227	TK. Aisiyiah I Ranggo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	TK. Aisiyiah II Tolobali	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
229	TK. Al- Amin Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
230	TK. Al-Iqra Kendo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	TK. Al-Maani	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
232	TK. Amal PGRI Paruga	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
233	TK. An-Nur Sadia	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
234	TK. Darul Hikmah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
235	TK. Kartika Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
236	TK. Kemala Bayangkari	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
237	TK. Masyita Saleko	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
238	TK. Mutmainah Asakota	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
239	TK. Nurul Ilmi Ntobo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
240	TK. RA Darul Maarif	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
241	TK. RA Perwanida I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	TK. RA Perwanida II	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
243	TK. RA Perwanida III	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
244	TK. Yaa Bunaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	TK. Paud IT Delima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											
		ESELON								NON ESELON			JML
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
JUMLAH		1	32	46	86	157	193	0	515	1762	1226	2988	3503

Mulai Tahun 2017 Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah telah berubah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Berikut Daftar Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Tabel 6.5
Daftar Nama Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Nama Perangkat Daerah
DINAS DAERAH	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Dinas Sosial
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Dinas Tenaga Kerja
11	Dinas Ketahanan Pangan
12	Dinas Lingkungan Hidup
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
16	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
19	Dinas Kelautan dan Perikanan
20	Dinas Pariwisata
21	Dinas Pertanian
BADAN DAERAH	
22	Inspektorat
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penerlitian dan Pengembangan
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Nama Perangkat Daerah
SEKRETARIAT	
28	Sekretariat DPRD
29	Sekretariat Daerah
30	Bagian Organisasi
31	Bagian Umum
32	Bagian Humas
33	Bagian Perekonomian
34	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan
35	Bagian Kesra
36	Bagian LPBJ
37	Bagian Administrasi Pemerintahan
38	Bagian Hukum
KECAMATAN	
39	Kecamatan Asakota
40	Kecamatan Rasanae Barat
41	Kecamatan Rasanae Timur
42	Kecamatan Mpunda
43	Kecamatan Raba

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua keuangan saat ini ataupun nanti.

Sebagaimana diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan telah dapat dipenuhi dengan segala kekurangannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bima dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan tahun-tahun mendatang.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bima dalam penyampaian Laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Bima telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bima di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Besar harapan kami, pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 ini dapat berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kota Bima di masa yang akan datang.


Kota Bima, 03 Mei 2023
WALIKOTA BIMA,
H. MUHAMMAD LUTFI, SE